

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKGETA

Editor :
Ahmad Sudiro, Ade Adhari,
Lewiandy, Moody R. Syalendra,
Andryawan, Indah Siti Aprilia



Jagat Mitra Kertiyasa
PUBLISHER

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



BOOK CHAPTER: POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



UNTAR
Universitas Tarumanagara

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Editor:

**Ahmad Sudiro, Ade Adhari, Lewiandy,
Moody R. Syalendra, Andryawan, Indah Siti Aprilia**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Penulis:

Ade Adhari, Amad Sudiro, Andryawan, Anita Dewi, Anggraeni Kolopaking, Ariawan Gunadi, Arnott Ferels, Benny Djaja, Christine S.t. Kansil, Daniel Hasudungan Nainggolan, Diana Fitriana, Dr Hery Firmansyah, Enjelina Sibatuara, Evan Tjoa Putra, Evelyn Septiana, Fernando, Florencia Irena, Gatot Soemartono, Gunardi Lie, Ida Kurnia, Imelda Martinelli, Indah Siti Aprilia, Jeane Neltje Saly, Joshua Steven Ongaran, Juan Matheus, Lewiandy, Louis Sebastian Anot Putra, Maria Ibella Vianka, Martono, Mella Ismelina F. Rahayu, Mia Hadiati, Monika S Detri, Moody Rizqy Syailendra Putra, Muharam W Adipradono, Nessya Monica Larasati Putri, Neysa Tania Santoso, Panji Ali Candra, R. Rahaditya, Radius Prayogo, Rasji, Richard Jatimulya Alam Wibowo, Rugun Romaida Hutabarat, Samantha Elizabeth Fitzgerald, Shafa Athaya, Sharon Marilyn, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Stephanie Priscilla Darmawan,

Suwinto Johan, Sylvia Shasmita, Tedrick Soetedjo, Wilma Silalahi, Yohanes Jeriko Giovanni, Yuwono Prianto

Editor

Amad Sudiro, Ade Adhari

Tata Letak:

Tim Jagat Mitra Kertiyasa
Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

PT Jagat Mitra Kertiyasa
Bekerjasama Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jl.Meruya Selatan 99 Joglo Kembangan
Jakarta Barat 11640
Hp.087777661478
Email : designjobnet@gmail.com

Bekerjasama Dengan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Cetakan 1 : Oktober 2023

ISBN 978-623-09-6362-9



Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotocopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penerbit. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya, sehingga penulisan book chapter yang berjudul “Politik Hukum, Pembaruan Hukum, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini merupakan karya kolaborasi Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai persembahan perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ke – 64 pada tahun 2023.

Buku ini juga secara umum kami persembahkan untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan buah yang dapat memberikan sumbangsih rujukan bagi pembaca, baik di kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi agar dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, bagian pertama bertemakan “Politik Hukum” bagian kedua tentang “Pembaruan Hukum” dan bagian ketiga berkaitan dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi menuangkan gagasannya dalam buku ini. Sebagai sebuah karya, tentu book chapter ini masih banyak kekurangan, para Penulis dengan kerendahan hati menerima masukan dan saran dari Pembaca demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

DAFTAR ISI

POLITIK HUKUM

Politik Hukum Perundang-Undangan: Undang-Undang Khusus Subrogasi Perlu Atau Tidak? BENNY DJAJA, RADIUS PRAYOGO	1
Legalitas Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia MIA HADIATI, MOODY R. SYAILENDRA, INDAH SITI APRILIA	15
Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis GUNARDI LIE, NEYSA TANIA SANTOSO	39
Kajian Usia Penumpang Pesawat dalam Perjanjian Transportasi Udara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata AMAD SUDIRO, MARIA IBELLA VIANKA	53
Implikasi Perundang-undangan No. 4 Tahun 2023 Terkait dengan Industri Keuangan ARIAWAN GUNADI, INDAH SITI APRILIA, SUWINTO JOHAN	63
Politik Hukum Batas Usia Calon Presiden Republik Indonesia RASJI, RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO	73
Independensi Dan Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK CHRISTINE S.T. KANSIL, YOHANES JERIKO GIOVANNI, LOUIS SEBASTIAN ANOT PUTRA	91
Penerapan Konvensi ILO sebagai Pemenuhan Hak Berserikat Buruh sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Hukum di Indonesia MELLA ISMELINA F. RAHAYU, VICKY ARDIANSYAH	107
Politik Hukum Terhadap Pencegahan Mahar Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 WILMA SILALAH, STEPHANIE PRISCILLA DARMAWAN	125
Perspektif Konsep Organ Dalam Kewenangan Organ Pembuat Peraturan: Di Indonesia Dan Di Luar Negara Indonesia IMELDA MARTINELLI, ENJELINA SIBATUARA, ARNOTT FERELS	147

Implementasi Politik Hukum Penguasaan Sumber Daya Alam YUWONO PRIANTO, FERNANDO	163
Politik Hukum Pemanfaatan Gambut Bagi Pangan Perspektif Hukum JEANE NELTJE SALLY, DIAN DIANA FITRIANA, MONIKA S DETRI, PANJI ALI CANDRA, MUHARAM W ADIPRADONO.....	189
Berhukum di Era Society 5.0 TUNDJUNG HERNING SITABUANA, DIXON SANJAYA, IBRA FULENZI AMRI.....	225

PEMBARUAN HUKUM

Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kuhp Kolonial ke KUHP Baru ADE ADHARI, DANIEL HASUDUNGAN NAINGGOLAN.....	253
Akibat Hukum Dari Tidak Dibuatnya Informed Consent Secara Tertulis Oleh Dokter Estetika ANDRYAWAN.....	271
Peradilan Koneksitas Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Militer Aktif Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi HERY FIRMANSYAH, NESSYA MONICA LARASATI PUTRI	289
Kebijakan Pembuktian Pidana Terhadap Dokumen Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, EVAN TJOA PUTRA.....	311
Kajian Dampak Penerapan Perjanjian Simulasi Dalam Perjanjian Kredit VERA WS SOEMARWI, NATASYA CLAUDY AGUSTINA.....	331
Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi WILMA SILALAH, JESSICA AURELIA.....	349
Tantangan Dalam Regulasi AI di Indonesia: Studi Komparatif Dari Tiongkok, Amerika Serikat, Dan Eropa LEWIANDY, EVAN TJOA PUTRA.....	369

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Masa Depan Mediasi Online: Peluang Dan Tantangan GATOT SOEMARTONO, SHARON MARLYN	389
---	-----

Analisis Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172/2018 Antara Qatar dan Uni Emirat Arab IDA KURNIA, FLORENCIA IRENA.....	405
Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perjanjian Transportasi Udara Timbal Balik MARTONO, SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA, JOSHUA STEVEN ONGARAN	431
Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi: Konsep Dan Tantangan Di Era Digital MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, JUAN MATHEUS.....	453
Analisis Tentang Sistem Common Law Dan Civil Law Pada Lingkup Arbitrase Internasional R. RAHADITYA, TEDRICK SOETEDJO, SYLVIA SHASMITA.....	465
Keberhasilan Mediator Dalam Bermediasi Perkara Pembagian Harta Bersama Atau Gono Gini Akibat Perceraian TJEMPAKA, ILLONA.....	481
Tips Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING	501

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIBUATNYA INFORMED CONSENT SECARA TERTULIS OLEH DOKTER ESTETIKA

ANDRYAWAN

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Penyelenggaraan praktik kedokteran dewasa ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran masih kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Perjanjian/kontrak *terapeutik* yang terjalin antara dokter dan pasien, nyatanya tidak selalu terselenggara seperti yang diharapkan, hingga berujung pada terjadinya sengketa antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Hubungan hukum antara dokter dan pasien pada umumnya berupa perikatan yang mengupayakan hasil (*inspanningsverbintenis*). Namun, dalam beberapa bidang keahlian tertentu, hubungan hukum antara keduanya dapat berubah menjadi perikatan yang menjanjikan hasil (*resultaatsverbintenis*), salah satu contohnya adalah dokter estetika, di mana bidang ini menjanjikan hasil akhir sebagai prestasi dari perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, pembuatan *informed consent* menjadi suatu hal yang penting, karena *informed consent* merupakan bukti persetujuan pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Pembuatan *informed consent* ini masih menjadi polemik, terutama dalam praktik dokter estetika yang kerap membuat *informed consent* secara lisan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dari

hasil kajian, diperoleh fakta bahwa praktik dokter estetika dewasa ini masih didominasi dokter umum, padahal seharusnya bidang ini menjadi kewenangan dari dokter spesialis kulit dan kelamin. *Informed consent* dapat dibuat secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan risiko dari tindakan medis yang akan dilakukan.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Kesehatan sendiri didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Maka dari itu, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pembahasan di bidang kesehatan melalui sarana hukum yang disebut Hukum Kesehatan.¹

Hukum Kesehatan yang dikembangkan dewasa ini di berbagai belahan dunia, sebenarnya sudah dikenal sejak 1800 SM sebagai Kode Etik Hammurabi (*Code of Hammurabi*) dan Kode Etik Hittites (*Code of Hittites*). Kemudian kode etik tersebut di dalam perkembangannya menjadi sumpah dokter yang pelafalannya bermacam-macam, namun bentuk yang lazim dikenal adalah sumpah Hippocrates yang hidup sekitar 460-370 SM. Sumpah tersebut berisi kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau semacam code of conduct bagi dokter.²

Hukum Kesehatan pada masa itu belum berkembang seperti saat ini, karena dulu pola hubungan antara dokter/tenaga kesehatan dan pasiennya adalah terjalin sebagai hubungan yang paternalistik, di mana peran dokter sangat dominan. Dokter berperan sebagai pihak yang mengambil keputusan terhadap semua tindakan kepada pasiennya. Apa pun yang

1 H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.5.

2 Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan (Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.3.

menjadi hasil atau akibat dari tindakan dokter tersebut, harus diterima oleh pasien, seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab pasien. Pasien diminta untuk menerima setiap akibat dari tindakan dokter karena adanya anggapan bahwa dokter pasti telah menentukan dan melakukan yang terbaik untuk diri pasien.

Pola hubungan paternalistik yang menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dokter-pasien dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Lebih dari setengah abad terakhir, para ahli hukum dan dokter mulai mengembangkan gagasan hak-hak dasar manusia di bidang kesehatan, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan diri sendiri (*the right on self determination*)/TROS). Kemudian dalam perkembangannya, hak-hak dasar tersebut diakomodasi pada Pasal 25 ayat (1) *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948*.³

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dewasa ini pola hubungan dokter dan pasien sudah berkembang menjadi pola *partnership*. Dalam pola *partnership*, hubungan dokter dan pasien adalah seimbang. Pasien tidak lagi bersifat pasif dan menyerahkan segalanya kepada dokter, melainkan terdapat hubungan aktif dan saling memengaruhi antara dokter dan pasien, sehingga hubungan tersebut dinamakan *partnership*.⁴

Dokter sebagai salah satu unsur utama pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat mempunyai peranan yang sangat sentral karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan serta mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap pasien adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimilikinya. Semua itu diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus diperta-

3 Pasal 25 ayat (1) *United Nations Declaration of Human Rights 1948* menyatakan bahwa “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.” Di Indonesia, ketentuan tersebut diadopsi di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

4 Sri Siswati, *Op.Cit.*, hlm.5.

hankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan dalam upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PRADOK) diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Keberadaan UU PRADOK juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Namun, hampir dua dasawarsa usia UU PRADOK, nyatanya tidak jarang masih ditemukan sengketa medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien.⁵ Konflik tersebut dipicu oleh ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan pengobatan atau melaksanakan profesi kedokteran. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan adanya dugaan kesalahan/kelalaian medik dalam melaksanakan profesi yang menyebabkan kerugian di pihak pasien. Hal tersebut terjadi apabila ada anggapan bahwa isi perjanjian *terapeutik* tidak dipenuhi/dilanggar oleh dokter.⁶

Dalam praktik kedokteran sendiri, hal-hal yang kerap menjadi penyebab terjadinya sengketa antara lain:⁷

Isi informasi (tentang penyakit yang diderita pasien) dan alternatif terapi yang dipilih tidak disampaikan secara lengkap;

Kapan informasi itu disampaikan (oleh dokter kepada pasien), apakah

5 Sengketa medik adalah ketidaksepahaman antara pihak dokter dan pihak pasien/klien atau keluarganya (keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud diadukannya dokter tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK, atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya. Ikatan Dokter Indonesia, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana MKEK*, (Jakarta: PB IDI, 2018), Pasal 1 butir 13.

6 A&A Law Office, "Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Medik dalam Hukum Kesehatan", diakses pada tanggal 13 Juli 2022, <https://aa-lawoffice.com/konsultan-hukum-kesehatan-3/>.

7 *Loc.Cit.*

pada waktu sebelum terapi yang berupa tindakan medis itu dilaksanakan? Informasi harus diberikan (oleh dokter kepada pasien), baik diminta atau tidak (oleh pasien) sebelum terapi dilakukan. Lebih-lebih jika informasi itu berkaitan dengan kemungkinan perluasan terapi;

Cara penyampaian informasi harus lisan dan lengkap serta diberikan secara jujur dan benar, kecuali bila menurut penilaian dokter penyampaian informasi itu akan merugikan pasien, demikian pula informasi yang harus diberikan kepada dokter oleh pasien;

Yang berhak atas informasi adalah pasien yang bersangkutan, dan keluarga terdekat apabila menurut penilaian dokter informasi yang diberikan akan merugikan pasien, atau bila ada perluasan terapi yang tidak dapat diduga sebelumnya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien;

Yang berhak memberikan informasi adalah dokter yang menangani atau dokter lain dengan petunjuk dokter yang menangani.

Berbagai hal tersebut kerap terjadi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dewasa ini, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa medik di antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Akibatnya, pasien/keluarga pasien mengadukan/menggugat/melaporkan dokter yang bersangkutan guna meminta pertanggungjawaban, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Penyelenggaraan praktik kedokteran nyatanya mengandung multi aspek, maksudnya penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU PRADOK tidak hanya mengandung aspek hukum saja, melainkan juga terkandung aspek etika dan disiplin profesi. Ketiga aspek itu kerap muncul secara bersamaan dalam suatu sengketa medik.

Dari aspek etika, profesi dokter sebagai unsur utama dalam penyedia layanan kesehatan, berada di bawah naungan organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI).⁸ Sebagai organisasi profesi dokter, IDI

8 Ikatan Dokter Indonesia/IDI (*The Indonesian Medical Association*) adalah organisasi profesi dokter yang berfungsi sebagai pemersatu, pembina, dan pemberdaya dokter di Indonesia. IDI didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950. Tujuan dari dibentuknya IDI adalah: (i) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (ii) memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan

bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan dokter Indonesia sebagai anggotanya. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah pemenuhan standar profesi di mana standar etik atau kode etik menjadi salah satu unsurnya. Dalam pelayanan, setiap dokter harus memegang teguh etika kedokteran yang menjadi penentu keluhuran profesi ini. Jika etika kedokteran tidak lagi dipegang teguh oleh dokter sebagai anggota IDI, maka profesi dokter tidak lagi layak disebut sebagai profesi yang luhur.⁹

Salah satu organ kelengkapan IDI yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran secara otonom kepada IDI adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Adapun etika kedokteran yang dimaksud adalah merujuk pada ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 yang disusun oleh IDI.

Selain etika, juga terdapat aspek disiplin profesi yang menjadi instrumen pengawas profesi dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Disiplin profesi dokter adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.¹⁰ Mengenai disiplin profesi dokter ini diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Sebagai organisasi profesi dokter, IDI melakukan usaha membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu (*agent of change*) serta agen pembangunan (*agent of development*) terutama dalam advokasi kesehatan melalui: (i) memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia; (ii) meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian, dan pengembangan ilmu kedokteran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran; (iii) memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran; (iv) bermitra dengan semua pihak terkait dalam pengembangan kebijakan kesehatan; (v) memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya; (vi) mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, pemerintah, swasta, di dalam negeri atau di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras; (vii) melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota; dan (viii) melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.

Ikatan Dokter Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia*, (Jakarta: PB IDI, 2018), hlm.2-4.

9 Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Jakarta: PB IDI, 2012), hlm.iv.

10 *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi*, Pasal 1 butir 1.

tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi.¹¹

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran adalah persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Hal ini dikarenakan setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, harus didahului dengan mendapatkan persetujuan, baik itu dari pasien/keluarga pasien. *Informed consent* tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai:¹² (1) diagnosis dan tata cara tindakan medis; (2) tujuan tindakan medis yang dilakukan; (3) alternatif tindakan lain dan risikonya; (4) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan (5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan (*informed consent*) dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Namun, terkait dengan kategori “tindakan medis yang mengandung risiko tinggi” masih terdapat keberagaman persepsi di kalangan dokter. Salah satu yang Penulis temukan yakni dalam praktik dokter estetika. Dokter estetika merupakan dokter yang menangani berbagai hal seputar perawatan kecantikan, baik pada kulit tubuh, kulit wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah.¹³

Praktik dokter estetika dewasa ini makin marak dan semakin digandrungi oleh masyarakat, karena beragam perawatan kecantikan yang ditawarkan oleh praktik dokter ini membuat masyarakat tertarik guna mempercantik diri.¹⁴

11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 butir 14.

12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 ayat (3).

13 Kevin Andrian, “Mengetahui Peran Dokter Estetika untuk Perawatan Kecantikan Kulit”, diakses pada tanggal 14 Juli 2022, di <https://www.alodokter.com/mengetahui-peran-dokter-estetika-untuk-perawatan-kecantikan-kulit#:~:text=Dokter%20estetika%20adalah%20dokter%20yang,estetika%20atau%20pusat%20perawatan%20kulit>.

14 Adysha Citra R., “Sebenarnya Istilah Dokter Estetika Itu Tidak Ada”, diakses pada tanggal 14 Juli 2022, di <https://www.republika.co.id/berita/oup73328/sebenarnya-istilah-dokter-estetika-itu-tidak-ada>.

Namun, praktik dokter estetika ini juga membuat hubungan hukum antara dokter dan pasien juga bergeser. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang tertuang dalam kontrak/perikatan/transaksi *terapeutik*, yaitu perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Transaksi *terapeutik* berbeda sama sekali dengan transaksi/perjanjian pada umumnya. Perbedaannya terletak pada objek perjanjiannya, di mana bukan “hasil/output” yang menjadi tujuan utama perjanjian tersebut (*resultaat verbinten*is), melainkan terletak pada “upaya maksimal/proses” yang dilakukan untuk kesembuhan pasien (*inspanning verbinten*is).¹⁵

Hal yang berbeda terdapat pada praktik dokter estetika, di mana objek yang diperjanjikan (prestasinya) adalah hasil akhir. Jadi keberhasilan dokter estetika adalah saat ia bisa memenuhi hasil akhir yang dijanjikan sebelumnya kepada pasien.

Salah satu contoh kasus sengketa medik yang sempat menarik perhatian publik adalah kasus dugaan malpraktik yang terjadi pada seorang dokter estetika (dr. Elisabeth Susana, M.Biomed) di Makassar. Kasus ini bermula ketika pada 15 September 2017 di mana dua orang pasien (Yeni Ariani dan Agita Diora Fitri) mendatangi klinik kecantikan di mana dokter yang bersangkutan berpraktik guna menjalani perawatan kecantikan berupa penyuntikan *filler* pada bagian hidung guna membuatnya menjadi terlihat lebih mancung. Kedatangan pasien (Agita Diora Fitri) ke klinik tersebut adalah didasari rekomendasi dari Yeni Ariani yang merupakan kerabatnya. Yeni Ariani sebelumnya merupakan pasien dari klinik tersebut dan sudah terlebih dahulu melakukan *treatment* serupa.¹⁶

Dokter kemudian menyuntikkan 0,1 cc *hyaluronic acid* ke bagian hidung pasien (Agita Diora Fitri), namun karena terjadi kepuatan di area kedua alis pasien, maka dokter kemudian mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan *hyaluronidase* sebagai antidot di area hidung. Namun, pasien kemudian mengeluhkan sakit dan menutup matanya. Setelahnya, ketika pasien membuka mata, ia mendapati mata sebelah kirinya tidak bisa melihat. Kemudian pasien dibawa oleh kerabatnya (Yeni

15 Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, (Jakarta: Rineka Jaya, 2005), hlm.11.

16 *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks*, hlm.6-7.

Ariani) ke Rumah Sakit Siloam Makassar. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Revertum* dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Ver/010/IV/2019/Forensik tanggal 15 April 2019 ditemukan adanya kebutaan dengan lensa keruh pada mata kiri serta didapatkan visus 0 (nol), refleks cahaya langsung tidak ditemukan, sedangkan mata kanan didapatkan visus 20/160 dengan koreksi S-2 visus 20/20 serta didapatkan refleks cahaya langsung.¹⁷

Atas insiden tersebut, pasien kemudian melaporkan dokter yang bersangkutan ke MKEK Cabang Makassar dan diperoleh kesimpulan bahwa dokter yang bersangkutan patut diduga melakukan kelalaian berupa tidak membuat *informed consent* tertulis (penyampaian prosedur dan persetujuan tindakan medis) terhadap pasien sehubungan dengan berbagai risiko tindakan *filler* (salah satu faktor risiko dari penyuntikkan *filler* adalah timbulnya kerusakan pada mata yang menyebabkan kebutaan) pada diri pasien.

Tidak berhenti sampai di situ saja, pasien kemudian melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian guna meminta pertanggungjawaban hukum si dokter atas kelalaian yang dilakukannya dan menyebabkan cideranya pasien. Namun, Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis bebas si dokter. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut adalah karena putusan MKEK Cabang Makassar yang sebelumnya menyatakan si dokter terbukti melakukan kelalaian dalam hal tidak membuat *informed consent* tertulis, belum berkekuatan etik tetap (*inkracht*), karena sedang diajukan upaya banding ke MKEK Pusat, sehingga putusan MKEK Cabang Makassar tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kelalaian si dokter.¹⁸

Dari uraian kasus tersebut di atas, nampak bahwa hal yang dipermasalahkan adalah perihal pembuatan *informed consent* sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter estetika tersebut. *Informed consent* sendiri merupakan kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.¹⁹

17 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, hlm.8.

18 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, hlm.40-41.

19 Desrizza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*,

Persetujuan (*Informed Consent*) merupakan hal yang sangat penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi dokter untuk memberikan informasi dan keterangan kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien, tindakan yang akan dilakukan dan risiko apa yang mungkin terjadi dari suatu tindakan, sebelum tindakan itu dilakukan.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana akibat hukum dari tidak dibuatnya *informed consent* secara tertulis oleh dokter estetika sebelum tindakan medis dilakukan?”

PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terjalin atas dasar perjanjian/kontrak yang lazimnya tertuang dalam kontrak *terapeutik*. Dari kontrak *terapeutik* ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien. Salah satu hak pasien yang berkaitan dengan topik kajian dalam penelitian ini adalah hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Penjelasan tersebut minimal harus mencakup:²¹ (a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; (b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; (c) alternatif tindakan lain dan risikonya; (d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan (e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan ini berkaitan dengan persetujuan tindakan medis yang harus diperoleh dari pasien yang bersangkutan. Artinya, setelah dokter memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, maka pasien akan memutuskan untuk menerima atau menolak tindakan medis yang akan diberikan. Jika pasien memutuskan untuk menerima tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, maka pasien akan memberikan persetujuan (*consent*) baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.²²

(Bandung: Keni Media, 2018), hlm.45.

20 Sri Siswati, *Op.Cit.*, hlm.98-99.

21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 ayat (3).

22 Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 yang menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang

Pembuatan *informed consent* secara lisan maupun tertulis tentunya memiliki konsekuensi masing-masing. UU PRADOK hanya memberikan batasan bahwa untuk tindakan medis yang mengandung risiko tinggi, harus dibuat secara tertulis²³, sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko ringan cukup secara lisan.²⁴ Namun, ringan/tingginya risiko suatu tindakan medis sangat bergantung pada jam terbang/pengalaman dari masing-masing dokter.

Dibuatnya *informed consent* secara tertulis lebih memberikan kepastian, khususnya dari perspektif hukum. Hal ini dikarenakan hukum selalu bicara ‘hitam di atas putih’, terlebih ketika terjadi suatu sengketa hukum perdata antara dokter dan pasien yang mengedepankan kebenaran formil.

Demi alasan kepraktisan, memang tidak semua tindakan medis harus diikuti dengan pembuatan *informed consent* secara tertulis. Namun, dengan tidak dibuatnya *informed consent* secara tertulis/hanya dengan lisan tentunya memiliki kelemahan, khususnya dalam hal pembuktian di kemudian hari manakala terjadi suatu konflik.

Tidak jarang pembuatan *informed consent* secara lisan menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama manakala terjadi suatu kerugian pada diri pasien. Misalnya, seperti pada kasus yang dikaji dalam penelitian ini, dimana dokter estetika melakukan penyuntikan filler pada hidung pasien. Namun, setelah penyuntikan dilakukan, pasien justru mendapati salah satu matanya tidak dapat melihat secara jelas. Kejadian ini kemudian dibawa ke ranah hukum untuk diselesaikan. Dalam persidangan terjadi perdebatan mengenai tindakan penyuntikan filler yang dilakukan oleh dokter. Perdebatan yang terjadi lebih mempersoalkan apakah dokter sudah memberikan penjelasan yang memadai kepada pasien terkait tindakan medis yang akan diberikan, serta apakah pasien sudah memberikan *consent*-nya secara tertulis.

akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan setelah didahului dengan adanya pemberian penjelasan kepada pasien mengenai urgensi suatu tindakan medis untuk dilakukan.

23 Pembuatan persetujuan tindakan medis secara tertulis dituangkan dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.

24 Persetujuan tindakan medis secara lisan dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Namun, apabila persetujuan lisan yang diberikan dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.

Perdebatan semacam itulah yang tidak bisa dihindari manakala terjadi suatu konflik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Terlebih ketika konflik tersebut membutuhkan pembuktian, maka keberadaan alat bukti menjadi sangat vital guna mengungkapkan kebenaran di muka persidangan.

Dimungkinkannya pembuatan *informed consent* secara lisan untuk tindakan medis tertentu memang berorientasi pada sisi kepraktisan dalam praktik kedokteran. Namun, tidak bisa disangkal bahwa keleluasaan semacam ini juga mengandung potensi risiko, karena setiap tindakan medis apa pun, tentu mengandung risiko (walaupun ringan).

Di sisi lain, pembuatan *informed consent* secara tertulis lebih diperuntukkan bagi tindakan medis yang mengandung risiko tinggi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari yang mana membutuhkan pembuktian hukum. Dengan dibuatnya *informed consent* secara tertulis tentu memiliki berbagai kelebihan, khususnya dalam hal pembuktian perihal ada/tidaknya persetujuan medis yang diberikan oleh pasien kepada dokter sebelum tindakan medis dilakukan.

Dibuatnya *informed consent* secara tertulis nyatanya tidak otomatis meniadakan potensi konflik. Tidak jarang ditemukan adanya pasien/keluarga pasien yang tetap memperlmasalahkan keabsahan *informed consent* yang sudah dibuat.

Namun, dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, maka tidak diperlukan persetujuan tindakan medis.²⁵ Artinya, dokter dapat mengesampingkan kewajiban untuk meminta/mendapatkan persetujuan pasien sebelum menjalankan tindakan medis. Keputusan untuk melakukan tindakan medis ini diputuskan oleh dokter dan dicatat di dalam rekam medik, dan dokter wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.²⁶

Persetujuan tindakan medis dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh pasien/keluarga pasien yang memberikan persetujuan sebelum dimulainya

25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 4 ayat (1).

26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

tindakan medis. Pembatalan persetujuan tindakan medis ini harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang memberikan persetujuan. Segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan persetujuan tindakan medis ini menjadi tanggung jawab dari pihak yang membatalkan persetujuan.

Pemberian persetujuan tindakan medis ini tidak menghapuskan tanggung gugat hukum manakala terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Maka dari itu, pembuatan *informed consent* secara tertulis tentu lebih memberikan keamanan daripada hanya dibuat secara lisan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah proses pembuktian di kemudian hari ketika terjadi konflik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Selain itu juga pembuatan *informed consent* secara tertulis juga dapat bermanfaat dalam proses pendokumentasian di fasilitas layanan kesehatan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dokter wajib memberikan/menyampaikan penjelasan mengenai tindakan medis secara langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Penjelasan yang diberikan oleh dokter minimal harus mencakup:²⁷ (a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; (b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; (c) alternatif tindakan lain dan risikonya; (d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; (e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; serta (f) perkiraan pembiayaan.

Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi:²⁸ (i) temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut; (ii) diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding; (iii) indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan medis; dan (iv) prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.

Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi:²⁹ (i)

Kedokteran, Pasal 4 ayat (2) dan (3).

27 *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Pasal 7 ayat (3)

28 *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Pasal 8 ayat (1).

29 *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Pasal 8 ayat (2).

tujuan tindakan medis yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, *terapeutik*, ataupun rehabilitatif; (ii) tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi; (iii) alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan; (iv) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan; dan (v) perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.

Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan medis adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:³⁰ (i) risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum; (ii) risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan; (iii) risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (*unforeseeable*).

Penjelasan tentang prognosis meliputi:³¹ (i) prognosis tentang hidupnya (*ad vitam*); (ii) prognosis tentang fungsinya (*ad functionam*); (iii) prognosis tentang kesembuhan (*ad sanationam*).

Penjelasan tentang tindakan medis harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman pasien. Kegiatan pemberian penjelasan ini wajib dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pihak-pihak yang memberi maupun yang menerima penjelasan. Namun, apabila dokter menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.

Dokter yang merawat pasien atau salah satu dokter dari tim dokter yang merawat pasien adalah pihak yang diwajibkan untuk memberikan

30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 8 ayat (3).

31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 8 ayat (4).

penjelasan mengenai tindakan medis. Apabila dokter yang bersangkutan berhalangan, maka pemberian penjelasan wajib didelegasikan kepada dokter lain yang kompeten. Pemberian penjelasan juga dapat dibantu oleh tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan kewenangannya.³²

Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan medis, maka dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga terdekat. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penjelasan kemungkinan perluasan tindakan medis merupakan dasar daripada persetujuan tindakan medis.

Perluasan tindakan medis yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien. Setelah tindakan perluasan tindakan medis tersebut dilakukan, maka dokter wajib memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga terdekat.

Dalam persetujuan tindakan medis, perlu diperhatikan juga mengenai pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan. Pihak tersebut adalah pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Sebelum melakukan tindakan medis, dokter perlu melakukan penilaian terhadap kompetensi pasien. Jika terdapat keraguan persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien, maka dokter dapat melakukan permintaan persetujuan ulang.

Terdapat situasi khusus dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis, yaitu dalam hal tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (*withdrawing/withholding life support*) pada seorang pasien, dimana harus mendapat persetujuan dari keluarga terdekat pasien.³³ Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien diberikan harus diberikan secara tertulis setelah keluarga mendapatkan penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan.³⁴

Selain itu, juga terdapat situasi khusus lainnya yang mana memberikan pengecualian untuk tidak diperlukannya persetujuan tindakan medis, yakni manakala tindakan medis tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

32 Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.

33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 14 ayat (1).

34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 14 ayat (2) dan (3).

program pemerintah dimana tindakan medis tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.³⁵

Pada dasarnya, pasien/keluarga pasien tidak selalu harus menerima setiap tindakan medis yang akan diberikan oleh dokter. Setelah dokter memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, pasien/keluarga pasien mempunyai hak untuk menerima/menolak tindakan medis tersebut. Jika pasien/keluarga pasien memutuskan untuk menolak suatu tindakan medis yang akan dilakukan, maka penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis. Penolakan tersebut tentu memiliki konsekuensi, dimana pasien bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi atas penolakan tersebut. Namun, penolakan tindakan medis ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara dokter dan pasien.

Setiap tindakan medis yang telah mendapat persetujuan dari pasien/keluarga pasien menjadi tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan medis. Di samping itu, sarana pelayanan kesehatan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan medis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dibuatnya *informed consent* baik secara lisan maupun tertulis tentu memiliki akibat hukum masing-masing. Akibat hukum yang jelas adalah perihal pembuktian ketika terjadi suatu konflik antara dokter dan pasien. Ketika *informed consent* dibuat secara tertulis, maka akan memudahkan untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari. Memang tidak semua tindakan medis harus dibuatkan *informed consent* secara tertulis. Justru ketika suatu tindakan medis yang mengandung risiko tinggi tapi tidak dibuatkan *informed consent* secara tertulis, maka terhadap dokter yang bersangkutan dapat dianggap melakukan pelanggaran (baik profesi, disiplin, maupun hukum).

SARAN

Adapun saran yang dapat diajukan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 15.

Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas, serta rinci mengenai batasan pembuatan *informed consent* secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan praktisi kedokteran;

Perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan bagi para praktisi kedokteran, khususnya di bidang estetika, mengenai pentingnya pembuatan *informed consent* secara tertulis demi kepentingan pembuktian manakala terjadi konflik antara dokter dan pasien di kemudian hari.

REFERENSI

Buku

Asyhadie, H. Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Ikatan Dokter Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. (Jakarta: PB IDI, 2012).

_____. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia*. (Jakarta: PB IDI, 2018).

_____. *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana MKEK*. (Jakarta: PB IDI, 2018).

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*. (Jakarta: Rineka Jaya, 2005).

Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*. (Bandung: Keni Media, 2018).

Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan (Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Declaration of Human Rights 1948*.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

_____. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Sumber Online

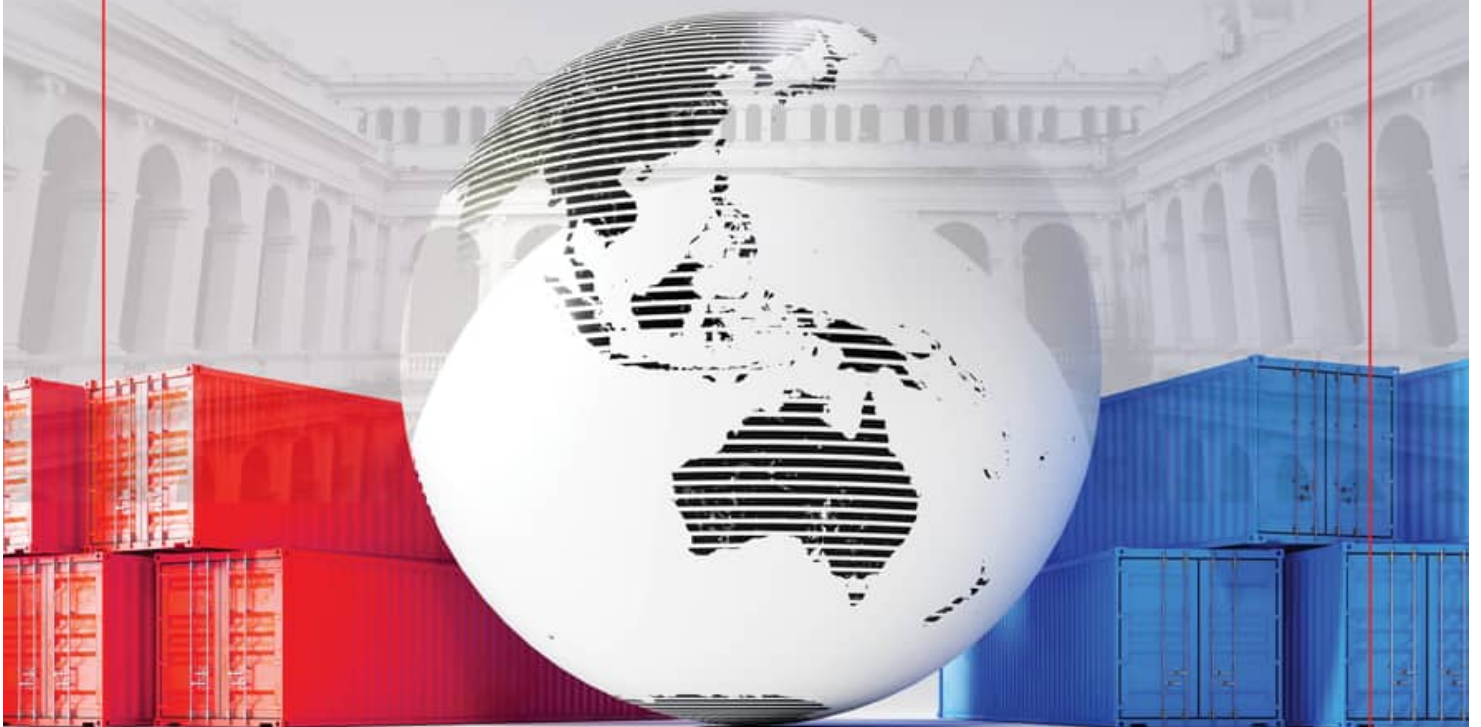
A&A Law Office, “Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Medik dalam Hukum Kesehatan”, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, <https://aa-lawoffice.com/konsultan-hukum-kesehatan-3/>.

Adyssha Citra R., “Sebenarnya Istilah Dokter Estetika Itu Tidak Ada”, diakses pada tanggal 14 Juli 2022, di <https://www.republika.co.id/berita/oupg73328/sebenarnya-istilah-dokter-estetika-itu-tidak-ada>.

Kevin Andrian, “Mengenal Peran Dokter Estetika untuk Perawatan Kecantikan Kulit”, diakses pada tanggal 14 Juli 2022, di <https://www.alodokter.com/mengenal-peran-dokter-estetika-untuk-perawatan-kecantikan-kulit#:~:text=Dokter%20estetika%20adalah%20dokter%20yang,estetika%20atau%20pusat%20perawatan%20kulit>.



ANATOMI **HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Mahira Farrell T.A., S.H.

Kata Pengantar Dinarasikan Oleh
Sihard Hadjopan Pohan, S.H., M.M.
Selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Membongkar Teknik Pemberian **KETERANGAN AHLI** di Pengadilan

Kompleksitas proses hukum suatu perkara dalam persidangan di pengadilan kerap kali membutuhkan keterangan ahli yang memiliki keilmuan dan kompetensi khusus untuk menjelaskan perkara secara menyeluruh kepada Majelis Hakim. Peranan seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan merupakan bagian integral yang penting dalam membantu Majelis Hakim guna memahami suatu perkara yang awalnya rumit dimengerti dan menjadi perdebatan di persidangan menjadi lebih terang.

Dalam buku ini, Penulis akan memberikan 'penyegaran' bagi para akademisi dan praktisi mengenai teknik dan strategi seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan serta bagaimana teknis secara praktik untuk memberikan keterangan ahli di muka pengadilan yang keterangannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keilmuannya. Seorang ahli harus memahami teknis komprehensif yang mana dapat membuat terang suatu fakta yang dibutuhkan pada suatu perkara.

Dalam buku ini juga dilulas secara jelas dan komprehensif bagaimana cara menjadi seorang ahli di muka pengadilan, bagaimana persiapan menjadi seorang ahli, bagaimana teknik memberikan keterangan sebagai ahli, bagaimana perlunya melatih argumentasi dan kepercayaan diri saat memberikan keterangan, bagaimana peran penting dan objektivitas keterangan ahli di pengadilan serta bagaimana cara seorang ahli menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan kompetensi keahliannya dalam perkara pada saat proses persidangan berlangsung.


PT RAJAWALI PERS
Jl. Raya Lestari No. 112
Kel. Lestari, Kec. Lestari, Kota Depok 16456
Telp: 021-8411192
Email: rajawali@rajawali.co.id
www.rajawali.co.id



Membongkar Teknik Pemberian **KETERANGAN AHLI** di Pengadilan

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dkk.

Membongkar Teknik Pemberian **KETERANGAN AHLI** di Pengadilan

Kata Sambutan
Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6 Republik Indonesia
Ketua Komisi Yudisial Periode Januari 2021 – Juni 2023

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Victoria Regine Liando, S.H., CTA.
Andre Kiemas, S.H., C.Med.
Steven Nigel Bunalven, S.H.
Juan Matheus, CCD., CPCD.

Editor:
Ekky Widha Atmaka, Amd, SH, CPLA
Prof. Dr. K. Martono SH,LLM.,Mc.Sc.,CLA



Bunga Rampai **GEPOLITIK GLOBAL:**

Hubungan Diplomatik, Aktivitas Hukum Udara
dan Luar Angkasa Terkini

Potpourri
Global Geopolitics:
Diplomatic Relations, Recent Air and Space Law Activities



Prof. Anis H. Bajrektarevic | Prof. Dr Ariawan Gunadi SH MH
Columbanus Priaardanto SH | Ekky Widha Atmaka AMD, SH, CPLA
Elfi Amir SSiI, SE, MM | Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH
Prof. Dr. Gunardi Lie SH, MH | Mahoro Jean Claude Geofrey, LLB, LLM
Prof. Dr. K. Martono SH,LLM.,Mc.Sc.,CLA | Prof. Dr. Rasji SH, MH
Saptandri Widiyanto, SH, MH, DESS, DESM

SAMBUTAN:

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
(Rektor Universitas Tarumanegara)

Bunga Rampai

GEOPOLITIK GLOBAL:

Hubungan Diplomati, Aktivitas Hukum Udara
dan Luar Angkasa Terkini

Buku ini mengulas diplomasi global selama dan setelah Perang Dingin, khususnya antara Uni Soviet (URSS) dan Amerika Serikat (USA), serta dampaknya terhadap Indonesia dan dunia. Dalam bab awal, dibahas persaingan militer dan teknologi antara URSS dan USA, mencakup perkembangan pesawat tempur seperti MiG-21, F-16, hingga perlombaan senjata nuklir dan eksplorasi angkasa. Peristiwa penting seperti Perang Korea dan Perang Vietnam juga diulas sebagai bagian dari perang ideologi.

Selanjutnya, buku ini menyajikan peran Indonesia dalam dinamika politik internasional, termasuk kontribusinya dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Peran Amerika dalam pemberontakan PKI Madiun, peristiwa PRRI, dan Gerakan Permesta menunjukkan keterlibatan asing dalam politik Indonesia.

Bab lainnya membahas hubungan Indonesia dengan Uni Soviet yang berkembang sejak 1945, dengan kontribusi URSS dalam pembebasan Irian Barat dan dukungannya terhadap berbagai kebutuhan militer Indonesia. Terakhir, buku ini mengeksplorasi hukum udara dan angkasa sebagai aspek penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta dinamika ekonomi dan politik internasional, terutama dalam era kemajuan teknologi penerbangan dan eksplorasi ruang angkasa.

Potpourri

Global Geopolitics:

Diplomatic Relations, Recent Air and Space Law Activities

This book explores global diplomacy during and after the Cold War, especially between the Soviet Union (URSS) and the United States (USA), and its impact on Indonesia and the world. In the early chapters, it discusses military and technological rivalry between the URSS and the USA, covering developments in fighter jets like the MiG-21 and F-16, as well as the nuclear arms race and space exploration. Significant events such as the Korean War and the Vietnam War are examined as part of the ideological conflict.

The book then highlights Indonesia's role in international politics, including its contribution to the 1955 Asian-African Conference (KAA) and its independent foreign policy during the Old and New Order periods. The influence of the United States on Indonesian affairs is reflected in its involvement in the PKI Madiun uprising, the PRRI event, and the Permesta Movement, showing the impact of foreign intervention in Indonesian politics.

Further chapters discuss Indonesia's relationship with the Soviet Union, which developed after 1945, including Soviet contributions to the liberation of West Irian and its support for various Indonesian military needs. The final sections delve into air and space law as essential tools for maintaining security, stability, and the economic and political dynamics of international relations, particularly in an era of rapid advancements in aviation and space exploration technology.



eureka
media akura

Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaakura@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-516-917-0



9 786235 169170

BUNGA RAMPAI
GLOBAL GEOPOLITICS: DIPLOMATIC
RELATIONS, RECENT AIR AND SPACE LAWS
ACTIVITIES

Prof. Anis H. Bajrektarevic
Prof. Dr Ariawan Gunadi SH MH
Columbanus Priaardanto SH
Ekky Widha Atmaka AMd, SH, CPLA
Elfi Amir SSiT, SE, MM
Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH
Prof. Dr. Gunardi Lie SH, MH
Mahoro Jean Claude Geofrey, LLB, LLM
Prof. Dr. K. Martono SH.,LLM.,Mc.Sc.,CLA
Prof. Dr. Rasji SH, MH
Saptandri Widiyanto, SH, MH, DESS, DESM



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUNGA RAMPAI
GLOBAL GEOPOLITICS: DIPLOMATIC RELATIONS,
RECENT AIR AND SPACE LAWS ACTIVITIES

Penulis : Prof. Anis H. Bajrektarevic
Prof. Dr Ariawan Gunadi SH MH
Columbanus Priaardanto SH
Ekky Widha Atmaka AMd, SH, CPLA
Elfi Amir SSiT, SE, MM
Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH
Prof. Dr. Gunardi Lie SH, MH
Mahoro Jean Claude Geofrey, LLB, LLM
Prof. Dr. K. Martono SH.,LLM.,Mc.Sc.,CLA
Prof. Dr. Rasji SH, MH
Saptandri Widiyanto, SH, MH, DESS, DESM

Editor : Ekky Widha Atmaka, Amd, SH, CPLA
Prof. Dr. K. Martono SH.,LLM.,Mc.Sc.,CLA

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-516-917-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan buku berjudul *Global Geopolitic: Diplomatic Relations, Recent Air and Space Laws Activities*. Buku ini adalah hasil kolaborasi berharga antara para dosen Universitas Tarumanagara dan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, yang berkompeten di bidang diplomasi, geopolitik, serta hukum udara dan angkasa. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara teori dan praktik dalam konteks global yang terus berkembang.

Buku ini mengangkat isu-isu geopolitik kontemporer dengan fokus pada hubungan diplomatik antara negara-negara besar dan aktivitas hukum di bidang udara dan angkasa. Melalui lima bab yang terstruktur dengan baik, buku ini menawarkan analisis yang mendalam mengenai diplomasi internasional, serta peran penting hukum udara dan angkasa dalam membentuk tatanan dunia yang lebih harmonis. Pembaca akan diajak untuk memahami sejarah dan dinamika hubungan antarnegara serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan efektif di tingkat global.

Sebagai bagian dari dunia akademik Universitas Tarumanagara, kami berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan penelitian-penelitian yang membawa dampak besar bagi pemahaman kita tentang isu-isu internasional. Buku ini merupakan manifestasi dari komitmen tersebut dan saya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam ranah akademik maupun praktik profesional.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Tanpa dukungan dari para mentor, kolega, mitra internasional, dan editor yang telah menyempurnakan karya ini, buku ini tidak akan bisa terwujud dengan baik. Saya juga menghargai kerja keras dan dedikasi seluruh penulis, yang telah berkolaborasi untuk memperkaya pemahaman kita tentang

hubungan diplomatik dan hukum internasional yang semakin kompleks.

Harapan saya, buku ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi, serta dapat memicu diskusi yang lebih luas tentang pentingnya diplomasi dan hukum udara serta angkasa dalam membangun dunia yang lebih adil dan damai. Saya juga mengundang pembaca untuk menggali lebih dalam isi buku ini, agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam berbagai bidang yang relevan.

Jakarta, Desember 2024

Rektor Universitas Tarumanagara

Prof. Dr. Amad Sudiro

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Global Geopolitic: Diplomatic Relations, Recent Air And Space Laws Activities”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku Global Geopolitic: Diplomatic Relations, Recent Air And Space Laws Activities yang berada di tangan pembaca ini disusun dalam 5 BAB yaitu:

- BAB 1 Diplomasi Uni Soviet (URRS) dan Amerika Serikat (USA) | Deploation of Air and Space Law Between The URRS and the US
- BAB 2 Deplomansi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) Selama Perang dan Pasca Dingin (PD) | Deplomatic Relations Between Indonesia and the United States of America (USA) During The Cold War (PD)
- BAB 3 Diplomasi Indonesia dan Amerika Serikat Selama dan Pasca Perang Dingin (PD) | Indonesian and United States Diplomacy During and Post the Cold War (PD)
- BAB 4 Deplomasi Indonesia dan URRSS, Kegiatan Hukum Udara dan Angkasa Dewasa Ini | Indonesian Deplomation and URRSS, Air and Space Legal Activities Today
- BAB 5 Kesimpulan | Conclusion

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 DIPLOMASI UNI SOVIET (URRS) DAN AMERIKA SERIKAT (USA) DEPLOMATION OF AIR AND SPACE LAW BETWEEN THE URRS AND THE US	1
A. Pendahuluan (1945).....	1
A. <i>Introduction (1945)</i>	2
B. Pengertian dan Kronologi Perang Dingin (PD)	2
B. <i>Definition and Chronology of the Cold War (CW)</i>	3
C. Pesawat Udara Tempur Amerika Serikat.....	8
C. <i>U.S. Fighter Aircraft</i>	8
D. Pesawat Udara Tempur Uni Soviet (URRS).....	17
D. <i>Soviet Union (USSR) Combat Aircraft</i>	18
E. Perlombaan Senjata Nuklir.....	26
E. <i>The Nuclear Arms Race</i>	29
F. Perlombaan Teknologi Angkasa Luar	31
F. <i>The Space Technology Race</i>	33
G. Perdamaian Dunia.....	35
G. <i>World Peace</i>	36
H. Pembatasan Senjata Strategis (SALT)	36
H. <i>Strategic Arms Limitation Talks (SALT)</i>	37
I. Perang Ideologi Korea 1950-1953.....	38
I. <i>The Korean Ideological War 1950-1953</i>	39
J. Perang Ideologi Viet Nam 1955-1975.....	43
J. <i>The Ideological War in Vietnam 1955-1975</i>	46
K. Pembentukan NATO (North Atlantic Treaty Organization).....	49
K. <i>Formation of NATO (North Atlantic Treaty Organization)</i>	53
L. Pembentukan Pakta Warsawa 1955.....	56
L. <i>Formation of the Warsaw Pact in 1955</i>	57
M. Pembubaran URRS Digantikan Federasi Rusia (FR)....	58
M. <i>Dissolution of the USSR and the Establishment of the Russian Federation</i>	58

N. Kronologi Bentrok Pesawat Tempur USA dengan Rusia.....	59
N. <i>Chronology of Air Conflicts between the USA and Russia</i>	60
O. Rusia Kerahkan Jet Tempur untuk Cegah Pesawat USA di Perbatasan Kutub Utara.....	60
O. <i>Russia Deploys Fighter Jets to Intercept U.S. Aircraft at the Arctic Border</i>	62
P. Pesawat Pengebom AS Dekati Perbatasan, Rusia Kerahkan Jet Tempur.....	62
P. <i>U.S. Bombers Approach Border, Russia Deploys Fighter Jets</i>	63
Q. Biden Izinkan Ukraina Serang Rusia dengan Senjata AS	63
Q. <i>Biden Authorizes Ukraine to Strike Russia with U.S. Weapons</i>	65
R. Rusia akan Keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, Apa Dampaknya?	65
R. <i>Russia to Withdraw from the International Space Station: What are the Implications?</i>	66
S. Analisis Jonathan Amos, Koresponden Isu Sains	67
S. <i>Analysis by Jonathan Amos, Science Issues Correspondent</i>	68
T. Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat	68
T. <i>World's Largest Plane Bombed by Russia, Indonesia's Satellite Project Delayed</i>	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB 2 DEPLOMANSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (AS) SELAMA PERANG DAN PASCA DINGIN (PD) DEPLOMATIC RELATIONS BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA (USA) DURING THE COLD WAR (PD) ..	75
A. Peran AS di Balik Pemberontakan PKI Madiun.....	75
A. <i>The Role of the US Behind the PKI Madiun Rebellion</i>	76
B. Bantuan Amerika Serikat (AS).....	84

B. <i>United States (USA) Assistance</i>	85
C. Peran Indonesia dalam KAA 1955	86
C. <i>Indonesia's Role in the 1955 Asian-African Conference</i>	87
D. Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno ...	96
D. <i>Cikini Tragedy 1957, Attempted Assassination of Soekarno</i>	97
E. Keterlibatan AS dalam PRRI	103
E. <i>US involvement in PRRI</i>	104
F. Keterlibatan AS dalam Gerakan Permesta	106
F. <i>US Involvement in the Permesta Movement</i>	106
G. Konfrontasi Ideologi	110
G. <i>Ideological Confrontation</i>	112
H. Gerakan Non-Blok.....	115
H. <i>Non-Aligned Movement</i>	117
I. Pembelian Senjata dari Blok Timur	120
I. <i>Arms Purchases from the Eastern Bloc</i>	122
J. Konfrontasi dengan Malaysia	126
J. <i>Confrontation with Malaysia</i>	127
K. Politik Luar Negeri Orde Lama.....	132
K. <i>Foreign Policy of the Old Order</i>	133
L. Transportasi Udara di Indonesia	138
L. <i>Air Transportation in Indonesia</i>	139
M. Kebijakan Luar Negeri Soeharto	139
M. <i>Soeharto's Foreign Policy</i>	141
N. Sejarah dan Pentingnya Satelit Palapa	144
N. <i>History and Importance of Palapa Satellite</i>	145
O. Satelit-Satelit Indonesia, dari Palapa hingga Satria	152
O. <i>Indonesian Satellites, from Palapa to Satria</i>	154
P. Ars-Vita Alamsyah Perempuan Indonesia Bekerja di Elon Musk AS.....	155
P. <i>Ars-Vita Alamsyah, an Indonesian Woman Working for Elon Musk in the US</i>	156
DAFTAR PUSTAKA.....	159

BAB 3	DIPLOMASI INDONESIA DAN AMERIKA	
	SERIKAT SELAMA DAN PASCA PERANG DINGIN	
	(PD) <i>INDONESIAN AND UNITED STATES</i>	
	<i>DIPLOMACY DURING AND POST THE COLD WAR</i>	
	(PD).....	163
A.	Diplomasi Indonesia dan Amerika Serikat.....	163
A.	<i>Indonesia and United States Diplomacy</i>	164
B.	Peran Indonesia dalam KAA 1955.....	174
B.	<i>Indonesia's Role in the 1955 Asian-African Conference</i> <i>(KAA).....</i>	176
C.	Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno .	184
C.	<i>The Cikini Tragedy of 1957: An Assassination Attempt</i> <i>on Sukarno</i>	188
D.	Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI	190
D.	<i>U.S. Involvement in the Revolutionary Government</i> <i>of the Indonesian Republic (PRRI).....</i>	191
E.	Keterlibatan AS dalam Gerakan Permesta	192
E.	<i>U.S. Involvement in the Permesta Movement</i>	194
F.	Indonesia, Amerika Serikat dan Politik Luar Negeri.	196
F.	<i>Indonesia, the United States, and Foreign Policy</i>	196
G.	Politik Luar Negeri Orde Lama	197
G.	<i>Foreign Policy of the Old Order</i>	197
H.	Politik Luar Negeri Orde Baru.....	201
H.	<i>Foreign Policy of the New Order</i>	204
I.	Keterlibatan USA dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980	207
I.	<i>U.S. Involvement in Indonesia's Economic Development</i> <i>during the Suharto Era (1966-1980).....</i>	208
J.	Indonesia-AS setelah Donald J. Trump terpilih sebagai Presiden.....	208
J.	<i>Indonesia-U.S. Relations after Donald J. Trump was</i> <i>Elected President</i>	209
K.	Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Indonesia d engan USA.....	209
K.	<i>Economic and Financial Cooperation between Indonesia</i> <i>and the USA</i>	210

L. Perjanjian Transportasi Udara Indonesia dengan USA.....	210
L. <i>Air Transport Agreement between Indonesia and the USA</i>	211
M. Sejarah dan Pentingnya Satelit Palapa	212
M. <i>History and Importance of the Palapa Satellite</i>	214
N. Satelit-Satelit Indonesia, dari Palapa hingga Satria	220
N. <i>Indonesian Satellites, from Palapa to Satria</i>	221
O. Ars-Vita Alamsyah Perempuan Indonesia Bekerja di Elon Musk AS.....	222
O. <i>Ars-Vita Alamsyah: An Indonesian Woman Working at Elon Musk's Company</i>	223
P. Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat.....	225
P. <i>World's Largest Aircraft Bombed by Russia, Indonesia's Satellite Project Delayed</i>	226
Q. Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS).....	226
Q. <i>International Space Station (ISS)</i>	229
DAFTAR PUSTAKA.....	232

BAB 4 DEPLOMASI INDONESIA DAN URRSS, KEGIATAN HUKUM UDARA DAN ANGKASA DEWASA INI 	
INDONESIAN DEPLOMATION AND URRSS, AIR AND SPACE LEGAL ACTIVITIES TODAY	236
A. URRSS Dibalik Peristiwa Madiun 1948.....	236
A. <i>The USSR Behind the Madiun Events of 1948</i>	238
B. Negara Soviet Madiun	239
B. <i>The Soviet State of Madiun</i>	242
C. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia 1945 - 2011	244
C. <i>Bilateral Relations Between Indonesia and Russia (1945 - 2011)</i>	246
D. Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-URRSS.....	248
D. <i>Opening Diplomatic Relations Between Indonesia and the USSR</i>	250

E. Bantuan URRSS terhadap Indonesia.....	251
E. <i>USSR Assistance to Indonesia</i>	252
F. Peran URRSS dalam Pembebasan Irian Barat	253
F. <i>The Role of the USSR in the Liberation of West Irian</i>	254
G. Hubungan di Era Orde Baru.....	255
G. <i>Relations During the New Order Era</i>	255
H. Hubungan setelah URRSS Bubar.....	256
H. <i>Relations After the Dissolution of the USSR</i>	257
I. Hubungan pada Abad Milenium	258
I. <i>Relations in the New Millennium</i>	259
J. Poros Jakarta-Tingkok-Moskow	259
J. <i>The Jakarta-Beijing-Moscow Axis</i>	261
K. Tonggak Baru Hubungan Indonesia-Federasi Rusia (FR)	262
K. <i>A New Milestone in Indonesia-Russian Federation Relations</i>	262
L. Kerjasama Berbagai Bidang	263
L. <i>Cooperation in Various Fields</i>	264
M. Kerjasama Perdagangan.....	265
M. <i>Trade Cooperation</i>	265
N. Kerjasama Parlemen	265
N. <i>Parliamentary Cooperation</i>	266
O. Kerjasama Bidang Lainnya	266
O. <i>Cooperation in Other Areas</i>	267
P. Kerjasama Transportasi Udara, Nuklir, dan Angkasa	267
P. <i>Cooperation in Air Transportation, Nuclear, and Space</i> ...	271
Q. Kerjasama Dibidang Pesawat Udara Tempur	273
Q. <i>Cooperation in Combat Aircraft</i>	273
R. Kerjasama Alat Perang/ Alutsista.....	274
R. <i>Cooperation in Weapons/Defense Equipment</i>	274
S. Kapal Laut untuk Armada AL.....	275
S. <i>Naval Ships for the Navy Fleet</i>	275
T. Pesawat Udara Tempur.....	275
T. <i>Combat Aircraft</i>	277

U. Pada Masa Kini Indonsia Memiliki Berbagai Pesawat Udara.....	278
U. <i>Currently, Indonesia Has Various Aircraft</i>	279
V. Kerjasama Indonesia dan Rusia Bidang Nuklir	282
V. <i>Cooperation Between Indonesia and Russia in the Nuclear Sector</i>	283
W. Kerjasama Senjata Indonesia-Rusia	284
W. <i>Indonesia-Russia Weapon Cooperation</i>	285
X. Kerjasama di Bidang Angkasa	286
X. <i>Cooperation in Outer Space</i>	286
Y. Pembelian Senjata dari Blok Timur	286
Y. <i>Arms Purchases from the Eastern Bloc</i>	290
Z. Transportasi Udara di Indonesia	292
Z. <i>Air Transportation in Indonesia</i>	295
DAFTAR PUSTAKA.....	297
BAB 5 KESIMPULAN CONCLUSION	300
TENTANG PENULIS	357
TENTANG EDITOR	385

BAB

1

DIPLOMASI UNI SOVIET (URRS) DAN AMERIKA SERIKAT (USA)

DEPLOMATION OF AIR AND SPACE LAW BETWEEN THE URRS AND THE US

A. Pendahuluan (1945)

Berakhirnya perang dua kedua (PDII) tahun 1945 tidak membuat dunia menjadi aman dan damai, karena munculnya persaingan ideologi negara adidaya (URRS) dan USA sebagai negara pemenang PDII ternyata membawa dunia memasuki babak baru yang disebut (PD) 1947-1991. PD berlangsung hampir setengah abad tersebut membuat konstelasi politik dunia terbagi menjadi 2(dua), yakni blok timur yang dipimpin oleh URRS dan blok barat yang dipimpin USA. Persaingan yang pada awalnya didasari oleh perbedaan ideologi antara ideologi sosialis dan kapitalis yang liberal tersebut kemudian berlanjut dalam persaingan senjata nuklir; pesawat udara tempur AS yakni jenis F-4 Phantom II, P-47, Thunderbolt, F-111 Aardvark, F-15 Eagle Strike, pesawat udara Mata-Mata U-2, B-52 Stratofortress, F-16 Fighting Falcon, P-51 Mustang, A-10 Thunderbolt II; pesawat udara tempur URRS yakni pesawat tempur MiG-21, pesawat udara pengebom TU-95, Sukhoi SU-35, pengebom TU-22M, pesawat udara MiG-31, Sukhoi SU-25; dan perlombaan berbagai bidang teknologi angkasa luar termasuk persenjataan.¹

¹ Pengaruh Perang Dingin terhadap Perkembangan Teknologi Ruang Angkasa.,
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/03/180000479/pengaruh-perang-dingin-terhadap-perkembangan-teknologi-ruang-angkasa?page=all> diunduh
Tanggal 22 Desember 2023

A. Introduction (1945)

The end of World War II (WWII) in 1945 did not bring peace and security to the world; instead, it ushered in a new era of ideological competition between the world superpowers, the Soviet Union (USSR) and the United States (USA), both of which emerged victorious from WWII. This marked the beginning of what is known as the Cold War (1947-1991). Spanning nearly half a century, the Cold War divided global political alliances into two main camps: the Eastern Bloc, led by the USSR, and the Western Bloc, led by the USA. Initially, this rivalry stemmed from ideological differences between socialist and liberal capitalist ideals. However, it quickly escalated into a nuclear arms race and an intense competition in airpower. The USA developed various combat aircraft, such as the F-4 Phantom II, P-47 Thunderbolt, F-111 Aardvark, F-15 Eagle Strike, U-2 reconnaissance planes, B-52 Stratofortress, F-16 Fighting Falcon, P-51 Mustang, and A-10 Thunderbolt II. Meanwhile, the USSR responded with its own arsenal, including the MiG-21 fighter jet, TU-95 bomber, Sukhoi SU-35, TU-22M bomber, MiG-31, and Sukhoi SU-25. This competition extended into technological advancements in space exploration and weaponry, marking an era of profound geopolitical tension and scientific progress.

B. Pengertian dan Kronologi Perang Dingin (PD)

1. Pengertian Perang Dingin

Perang dingin (PD) adalah persaingan ideologi antara blok Timur beserta sekutunya yang dipimpin oleh URSS yang mengembangkan ideologi komunis dan sosial dengan blok Barat beserta sekutunya yang dipimpin oleh USA yang mengembangkan kebebasan perdagangan pasar (*supply and demand*), sedangkan URSS mengembangkan ideologi sosial semua kepemilikan dikuasai oleh negara untuk kepentingan sosial, tidak ada penguasaan oleh swasta maupun pribadi yang disebarkan ke negara-negara yang baru merdeka setelah PD II berakhir.²

² Martono K.,Ed.,Bunga Rampai Hukum Udara.Kabupaten Purbalingga: Penerbit CV EUREKA MEDIA AKSARA,2024 hal.6

B. Definition and Chronology of the Cold War (CW)

1. Definition of the Cold War

The Cold War (CW) refers to the ideological rivalry between the Eastern Bloc, led by the USSR, which promoted communist and socialist ideologies, and the Western Bloc, led by the USA, which championed free-market trade based on supply and demand. The USSR advocated a socialist ideology where all ownership was controlled by the state for social benefit, with no private or individual ownership allowed. This ideology was spread to newly independent nations that emerged after the end of WWII.

2. Kronologi Perang Dingin (PD)

Dalam Perang Dunia kedua (PDII) URSS dan USA mengubah kedua negara tersebut menjadi kekuatan dunia yang tangguh dan meningkatkan persaingan. Akibat kekalahan kekuatan poros terjadi persaingan ideologis dan politik antara URSS dan USA meratakan jalan diawalinya PD. Perbedaan ideologi menjadi inti dari konflik antara URSS yang menganut ideologi komunisme, dan USA yang menganut ideologi liberalisme dan kapitalisme. Kedua sistem ideologi tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang ekonomi, politik, dan hak asasi manusia. Keterlibatan URSS dalam perubahan rezim meliputi pendanaan partai-partai sayap kiri, perang pembebasan nasional. PD dipicu karena langkah yang diambil URSS dan USA menjelang berakhirnya PD II tahun 1945. Sebelumnya, USA bersama sekutunya juga berhasil mengalahkan Jerman. USA dalam perubahan rezim selama PD meliputi dukungan terhadap kediktatoran anti-komunis dan sayap kanan, pemerintahan, dan pemberontakan di seluruh dunia, sementara keterlibatan Eropa.³

³ <https://www.britannica.com/event/Cold-War> diunduh Tanggal 26 Agustus 2024

Sumber lain ⁴ mengatakan bahwa PD adalah perseteruan Blok Timur yang dipimpin URSS dan Blok Barat yang dipimpin USA dalam hal ideologi. Blok Timur menganut paham komunis dan sosialis, sedangkan Blok Barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis. Keduanya saling berebut pengaruh terhadap negara lain selama PD. Banyak pihak yakin PD dimulai tidak lama setelah PD II yakni pada 1947 dan berakhir pada 1991 saat keruntuhan URSS. Secara historis sebenarnya URSS dan USA tergabung ke dalam Blok Sekutu dan bersama-sama berperang melawan Blok Poros selama PD II, namun demikian hubungan kedua pihak tersebut sebetulnya bersitegang karena perbedaan ideologi. USA telah lama waspada dan khawatir terhadap perkembangan komunisme URSS dan prihatin dengan pemerintahan tirani pemimpinnya, Joseph Stalin, sebaliknya URSS membenci perilaku USA yang menganaktirikan URSS dalam komunitas internasional. URSS geram terhadap USA tidak bergerak cepat untuk terjun ke dalam PD II. Menjelang berakhirnya PD II, benih-benih kebencian antara kedua belah pihak tumbuh semakin besar. Aliansi USA, Inggris, dan US mulai terpecah. Benih-benih kebencian tersebut menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa.⁵

Setelah Nazi Jerman dan Blok Poros kalah perang, ditandatangani perjanjian Postdam. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara URSS dan USA. USA dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahannya dalam PDII. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yakni

⁴ Sejarah Perang Dingin: Latar Belakang dan Persaingannya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/27/120100570/sejarah-perang-dingin-latar-belakang-dan-persaingannya?page=all> diunduh Tanggal 26 Agustus 24

⁵ Sejarah Perang Dingin: Latar Belakang dan Persaingannya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/27/120100570/sejarah-perang-dingin-latar-belakang-dan-persaingannya?page=all> diunduh Tanggal 26 Agustus 24

Jerman Timur berada di bawah kekuasaan URSS, sedangkan Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Perancis dan USA. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah URSS juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman dan menancapkan pengaruhnya di sana. Langkah URSS tersebut mengkhawatirkan sekutu dekat USA, Inggris. Kedua negara USA dan Inggris itu khawatir pengaruh komunisme URSS bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat.⁶

Banyak ahli berpendapat PD dimulai ketika USA meluncurkan Marshall Plan (MP), yakni program bantuan USA untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. MP dipicu oleh ketakutan akan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi Eropa yang cepat pada musim dingin 1946–1947. Sebagai tandingannya, URSS membentuk Molotov Plan (MP), yakni bantuan yang diberikan URSS untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak PD II. Pada 1948, US memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Istilah PD pertama kali digunakan oleh penulis Inggris, George Orwell, dalam artikel yang diterbitkan pada 1945. Orwell merujuk pada apa yang dia prediksi akan menjadi persaingan nuklir antara dua sampai tiga negara adidaya. Masing-masing memiliki senjata yang dapat digunakan membunuh jutaan orang sekaligus dalam beberapa detik.⁷

Pada 4 April 1949 Blok Barat mendirikan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Negara-negara pendirinya adalah Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan USA. Pembentukan NATO bertujuan untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan serangan URSS. Sebagai tandingan NATO, Blok Timur membentuk Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955 dalam pertemuan di Warsawa, Polandia.

⁶.*Ibid.*

⁷.*Ibid.*

Pakta Warsawa dibentuk atas kekhawatiran Blok Timur mengenai keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa adalah URSS, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. PD mencapai puncaknya pada 1948-1953. Pada periode tersebut URSS tidak berhasil memblokir sektor-sektor Jerman Barat yang dikuasai Barat. PD secara perlahan mereda pada 1980-an ketika URSS yang dipimpin Mikhail Gorbachev mulai menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. PD diyakini resmi berakhir seiring bubarnya URSS pada 1991. Berakhirnya PD ditandai runtuhnya URSS pada 1991.⁸

2. *Chronology of the Cold War (CW)*

During World War II (WWII), the USSR and the USA emerged as powerful nations, sparking competition. The defeat of the Axis powers paved the way for ideological and political rivalry between the USSR and the USA, leading to the onset of the Cold War. The core of the conflict lay in the ideological divide: the USSR adhered to communism, while the USA embraced liberalism and capitalism. Each system offered contrasting perspectives on economics, politics, and human rights. The USSR sought to promote regime changes worldwide by supporting left-wing parties and national liberation movements, while the USA, aiming to counter communist influence, supported anti-communist, right-wing dictatorships and insurgencies globally.

Historically, the Cold War is understood as a confrontation between the Eastern Bloc, led by the USSR, and the Western Bloc, led by the USA, each vying for global influence. The Cold War is believed to have begun shortly after WWII, in 1947, and concluded in 1991 with the collapse of the USSR. Although the USA and the USSR had fought together in WWII as part of the Allies, their relationship was strained due to ideological differences. The USA

⁸.Ibid.

had long been wary of the USSR's expansion of communism and concerned about the tyrannical rule of Joseph Stalin. Conversely, the USSR resented the USA's reluctance to support it internationally and its slow engagement in WWII. As the war concluded, tensions escalated, and the alliance among the USA, the UK, and the USSR began to fracture, leading to deep-seated mistrust and animosity.

With Germany and the Axis powers defeated, the Potsdam Agreement was signed. This agreement, involving the USSR, USA, and the UK, determined post-war Germany's division, with East Germany under USSR control and West Germany under the administration of the UK, France, and the USA. In Eastern and Central Europe, the USSR extended its influence over former German-occupied territories, raising concerns for the USA's close ally, the UK, about the USSR's growing communist presence threatening Western Europe.

Many experts argue that the Cold War escalated with the USA's Marshall Plan (MP), a program providing aid to countries under its influence, aimed at countering the rapid economic decline and communist expansion in Europe during the harsh winter of 1946–1947. In response, the USSR established the Molotov Plan, offering aid to Eastern European countries affected by WWII. In 1948, the USSR installed left-wing governments in Eastern European countries liberated by the Red Army. The term "Cold War" was first used by British writer George Orwell in a 1945 article, predicting a nuclear arms race among superpowers with weapons capable of mass destruction.

On April 4, 1949, the Western Bloc formed the North Atlantic Treaty Organization (NATO), consisting of Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the UK, and the USA. NATO's objective was to protect Western Europe from a potential USSR attack. In response, the Eastern Bloc formed the Warsaw Pact on May 14, 1955, in Warsaw, Poland, due to concerns over NATO's potential threat. The Warsaw Pact included the USSR, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, and Romania.

The Cold War reached its peak between 1948 and 1953, during which the USSR attempted but failed to blockade Western-controlled sectors in West Germany. Gradually, the conflict began to ease in the 1980s when the USSR, under Mikhail Gorbachev, initiated reforms toward democracy and dismantled its authoritarian systems. The Cold War officially ended in 1991 with the dissolution of the USSR, marking the fall of the Eastern Bloc.

C. Pesawat Udara Tempur Amerika Serikat

Sejarah dunia sering kali didefinisikan sebagai perang. Selama abad ke-20 dan ke-21 pesawat udara memainkan peran penting untuk menentukan hasil pertempuran serta pencegah agresi. Pesawat militer mulai berkembang selama PDII, sejak PD berguna untuk keperluan militer (*state aircraft*) dan non-militer (*civil aircraft*),⁹ khususnya perang URSS vs USA. Selama PD (1947- 1991), USA telah menggunakan pesawat udara jet tempur yakni jenis F-4 Phantom II, P-47, Thunderbolt, F-111 Aardvark, F-15 Eagle Strike, pesawat udara Mata-Mata U-2, B-52 Stratofortress, F-16 Fighting Falcon, P-51 Mustang, A-10 Thunderbolt II sebagai berikut.¹⁰

C. U.S. Fighter Aircraft

World history is often defined by warfare, and throughout the 20th and 21st centuries, aircraft have played a critical role in shaping battle outcomes and deterring aggression. Military aircraft gained prominence during WWII, with both military (state aircraft) and non-military (civil aircraft) roles evolving, especially during the Cold War conflict between the USSR and the USA. From 1947 to 1991, the USA deployed a range of jet fighters and reconnaissance aircraft, each pivotal

⁹ Perbedaan antara state aircraft dengan civil aircraft diatur dalam Konvensi Chicago 1944, lihat ICAO Doc.7300/8 Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944, untuk teks lihat Dempsey P.S.Ed, Annal of Air and Space Law, 2005 Vol.XXX-Part I.Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, page 19-51.

¹⁰ Sejarah Perang Dingin: Latar Belakang dan Persaingannya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/27/120100570/sejarah-perang-dingin--latar-belakang-dan-persaingannya?page=all> diunduh Tanggal 26 Agustus 24

to its military strategy in the Cold War. These aircraft included the F-4 Phantom II, P-47 Thunderbolt, F-111 Aardvark, F-15 Eagle Strike, the reconnaissance U-2, B-52 Stratofortress, F-16 Fighting Falcon, P-51 Mustang, and A-10 Thunderbolt II.

1. Pesawat Udara Jenis F-4 Phantom II.

Pada tahun 1958, *McDonald Aircraft Corporation* mengirimkan prototipe pesawat udara tempur bermesin ganda, supersonik, mampu menghadapi segala cuaca, dan jarak jauh yang tidak dapat diabaikan oleh Angkatan Laut USA. Pesawat udara tempur tersebut dirancang untuk berperang, lincah, dengan radar, rudal untuk menyerang pesawat udara musuh dari jarak jauh, selanjutnya menjadi ikon pesawat udara jet tempur USA. Pada masa PD diberi nama F-4 Phantom II, sedangkan dalam PDII pesawat udara tempur yang paling terkenal adalah pesawat udara tempur jenis P-47 dan Thunderbolt yang pernah dikirim oleh USA ke Inggris untuk membantu perang Inggris.¹¹

Menurut Emily Charles, Kurator IWM Duxford, pesawat udara jet tempur jenis P-47 adalah salah satu pesawat udara tempur USA yang paling dikenal dari PD II, setelah USA ikut serta dalam perang, pilot dari Angkatan Udara USA dikirim ke Inggris untuk membantu perang, bersama dengan Thunderbolt andalan mereka. Dalam video pakar *Graham Rodgers* mengajak menelusuri sejarah dan aspek teknis pesawat ikonik tersebut mengulas perkembangan, desain, dan riwayat layanan F-111 Aardvark. Beliau mengeksplorasi apa yang diwakili oleh pesawat udara selama masa layanannya, sebuah contoh Kompleks Industri-Militer yang diperingatkan oleh Dwight D. Eisenhower dan sebagai simbol peran intervensionis USA pasca-PD. Beliau juga mengulas riwayat layanan F-111 Aardvark. khususnya

¹¹ F-4 Phantom II: Jet tempur paling produktif dalam sejarah Amerika? <https://www.iwm.org.uk/history/the-f-4-phantom-ii-the-most-prolific-jet-fighter-in-american-history> diunduh Tanggal 7 September 24

dalam Perang Teluk sebagai bagian dari Wing Tempur Taktis ke-20 sebelum tiba di IWM Duxford pada tahun 1993.¹²

1. F-4 Phantom II

In 1958, McDonnell Aircraft Corporation delivered a prototype of a versatile, twin-engine, supersonic, long-range, all-weather fighter jet, which quickly gained the attention of the U.S. Navy. Designed for combat agility and equipped with radar and long-range missiles, this aircraft could effectively engage enemy aircraft at a distance. This jet became a significant icon of the U.S. military and was named the F-4 Phantom II during the Cold War. Previously, in WWII, some of the most notable U.S. fighter aircraft included the P-47 Thunderbolt, which the USA had deployed to assist Britain.

According to Emily Charles, curator at IWM Duxford, the P-47 Thunderbolt was one of the most famous U.S. fighter aircraft from WWII. After the USA entered the war, American Air Force pilots were sent to Britain, where they fought alongside their British counterparts with the support of the Thunderbolt.

In a historical analysis video, expert Graham Rodgers delves into the technical evolution, design, and operational history of another iconic jet, the F-111 Aardvark. This aircraft, which served prominently in the Gulf War as part of the 20th Tactical Fighter Wing, symbolizes the U.S. military-industrial complex, as President Dwight D. Eisenhower once warned, and highlights the USA's interventionist role post-WWII. Rodgers discusses the Aardvark's extensive service record, especially its role in tactical operations, before it was eventually retired and brought to the Imperial War Museum (IWM) Duxford in 1993.

2. F-15 Eagle Strike

F-15 Eagle Strike pertama kali terbang pada tahun 1972 dan telah mendominasi langit sejak saat itu yang dibangun sebagai respons terhadap pengembangan MiG-25 Foxbat US, hampir setengah abad kemudian, Angkatan Udara USA

¹².Ibid.

masih menerbangkan F-15 Eagle Strike di Eropa. Mereka bergabung dengan kurator *Hattie Hearn* di *American Air Museum* di *IWM Duxford* untuk mengetahui lebih lanjut tentang pesawat udara tangguh telah yang telah beroperasi dalam setiap konflik besar selama empat puluh tahun terakhir.¹³

2. *F-15 Eagle Strike*

The F-15 Eagle Strike first took to the skies in 1972, developed in response to the Soviet MiG-25 Foxbat. This aircraft has since dominated airspace and remains in use by the U.S. Air Force in Europe nearly half a century later. Designed as a powerful air superiority fighter, the F-15 has operated in major conflicts over the past four decades, demonstrating unmatched combat capabilities. At the American Air Museum in IWM Duxford, curator Hattie Hearn explores the F-15's history and durability, highlighting its significance as one of the most formidable and enduring fighter jets in the U.S. arsenal.

3. Pesawat Udara Mata-Mata U-2

Pesawat udara mata-mata jenis U-2 adalah pesawat udara jet tempur yang dapat terbang tinggi, berkursi tunggal, diterbangkan oleh USA untuk pengumpulan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Pesawat udara mata-mata paling terkenal yang pernah dibuat, dikenal juga sebagai *Dragon Lady*, telah beroperasi sejak 1956. Sebuah prototipe terbang pada tahun 1955, dan pesawat udara terakhir dalam seri tersebut dibangun pada tahun 1989. Pada tanggal 1 Mei 1960, salah satu pesawat udara jenis U-2 ditembak jatuh di atas wilayah udara URSS yang memicu Peristiwa U-2, dan pada tahun 1962, selama krisis rudal Kuba, pesawat udara jenis U-2 tersebut mengambil foto yang mengonfirmasi keberadaan rudal bersenjata nuklir URSS di Kuba. Misi pengumpulan intelijen strategis terus berlanjut, tetapi U-2 juga telah digunakan untuk pengintaian dan pengawasan

¹³.Ibid.

medan perang dalam berbagai konflik dan titik ketegangan tempat USA terlibat sejak Perang Vietnam pada 1960-an. Meskipun banyak fungsinya diadopsi oleh wahana udara nirawak yang dapat terbang tinggi dan tahan lama, beberapa U-2 masih beroperasi. Sejak tahun 1980-an, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) telah mengoperasikan U-2 yang dimodifikasi, yang diberi nama "Earth Resources" (ER-2), untuk pengumpulan data tentang atmosfer, Bumi, dan fenomena langit.

3. U-2 Spy Plane

The U-2 is a high-altitude, single-seat jet aircraft used by the USA for intelligence gathering, surveillance, and reconnaissance. Known as the "Dragon Lady," this iconic spy plane has been in operation since 1956, following the first prototype flight in 1955. On May 1, 1960, one U-2 was shot down over Soviet airspace, leading to the U-2 Incident, a significant event in Cold War history. In 1962, during the Cuban Missile Crisis, U-2 aircraft provided crucial reconnaissance photos confirming the presence of Soviet nuclear missiles in Cuba. The U-2's strategic intelligence-gathering missions have continued, and it has also been deployed for battlefield reconnaissance and surveillance in various conflicts and flashpoints involving the USA since the Vietnam War in the 1960s. While many of its functions have been adopted by high-flying, durable unmanned aerial vehicles (UAVs), several U-2s remain operational today. Since the 1980s, NASA has operated modified U-2s, known as "Earth Resources" (ER-2), for data collection on the atmosphere, Earth, and celestial phenomena.

4. B-52 Stratofortress

Pesawat udara jenis B-52 yang juga disebut Stratofortress tersebut adalah pesawat udara pembom berat jarak jauh USA yang dirancang oleh pabrikan Boeing pada tahun 1948, pertama kali diterbangkan pada tahun 1952, dan pertama juga kali dikirim untuk dinas militer pada tahun 1955. Pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi pembawa bom atom yang mampu mencapai URSS, namun demikian

ternyata dapat beradaptasi dengan sejumlah misi, dan beberapa B-52 diharapkan tetap beroperasi hingga abad ke-21. B-52 memiliki lebar sayap 185 kaki (56 meter) dan panjang 160 kaki 10,9 inci (49 meter) yang didukung oleh delapan mesin jet yang dipasang di bawah sayap dalam empat pod kembar. Kecepatan maksimum pesawat pada 55.000 kaki (17.000 meter) adalah Mach 0,9 (595 mil per jam, atau 960 km/jam); hanya beberapa ratus kaki di atas tanah, pesawat udara tersebut dapat terbang dengan kecepatan Mach 0,5 (375 mil per jam, atau 600 km/jam). Semula pesawat udara tersebut membawa enam awak, kemudian dikurangi menjadi lima awak pesawat udara, satu-satunya persenjataan pertahanannya adalah menara senjata yang dikendalikan dari jarak jauh di bagian ekor, namun demikian pada tahun 1991, senjata tersebut dihilangkan. Rangka pesawat B-52 yang besar sehingga mendapat julukan "*Big Ugly Fat Fellow*" (BUFF), tetapi juga memungkinkan pesawat udara tersebut untuk dipasangi sistem navigasi, kontrol senjata, dan penanggulangan elektronik yang sangat canggih. Lebih dari 70 B-52 masih beroperasi di Angkatan Udara AS.

4. B-52 Stratofortress

The B-52 Stratofortress is a long-range heavy bomber designed by Boeing, first flown in 1952 and entering military service in 1955. Originally intended as a nuclear bomber capable of reaching the USSR, the B-52 has proven versatile, adapting to a wide range of missions, with some expected to remain operational into the 21st century. The aircraft features a wingspan of 185 feet (56 meters) and a length of 160 feet 10.9 inches (49 meters), powered by eight jet engines mounted beneath the wings in four twin pods. Its maximum speed at 55,000 feet (17,000 meters) is Mach 0.9 (595 miles per hour, or 960 kilometers per hour); at low altitudes, it can fly at Mach 0.5 (375 miles per hour, or 600 kilometers per hour). Initially crewed by six, the B-52's crew was later reduced to five. Its only defensive armament was a remote-controlled tail turret, which was removed in 1991. The aircraft's large airframe earned it the nickname "Big Ugly Fat Fellow" (BUFF), and this design allows

for the installation of advanced navigation, weapon control, and electronic countermeasure systems. Today, more than 70 B-52s remain in service with the U.S. Air Force, continuing to play a significant role in military operations and strategic deterrence.

5. F-16 Fighting Falcon

F-16 yang juga disebut *Fighting Falcon*, adalah pesawat udara jet tempur berkursi tunggal dan bermesin tunggal yang dibangun oleh *General Dynamics Corporation* (sekarang bagian dari untuk USA dan selebihnya untuk negara lain. F-16 berasal dari pesanan yang ditempatkan pada tahun 1972 untuk pesawat udara tempur udara-ke-udara yang ringan dan hemat biaya; model saat sekarang juga mampu menghadapi segala cuaca, dan efektif untuk serangan darat juga. Angkatan Udara USA menerima pengiriman pertama pada tahun 1978. F-16 memiliki panjang 49 kaki (15 meter) dan memiliki lebar sayap 31 kaki (9,45 meter) yang didukung oleh satu mesin turbofan *Pratt & Whitney* atau *General Electric*, dengan afterburning, dapat menghasilkan 23.000 hingga 29.000 pon (102 hingga 130 kilonewton) daya dorong, mempercepat pesawat udara hingga lebih dari dua kali kecepatan suara. Persenjataannya meliputi meriam putar 0,8 inci (20 milimeter) serta alat tambahan di bawah sayap dan badan pesawat untuk berbagai macam bom dan rudal. Dengan beban tempur yang umum, F-16 berbobot sekitar 23.000 pon (10.000 kg). Pesawat udara tersebut telah dijual kepada sekutu USA di Timur Tengah, di mana pesawat udara tersebut terbukti sangat efektif dalam pertempuran udara-ke-udara dan serangan darat dalam konflik Israel-Suriah tahun 1982 dan dalam Perang Teluk Persia tahun 1990–91. Dalam hal penjualan internasional, F-16 adalah pesawat tempur yang paling diminati, dan saat ini digunakan oleh angkatan udara di lebih dari 20 negara.

5. **F-16 Fighting Falcon**

The F-16, also known as the Fighting Falcon, is a single-seat, single-engine jet fighter aircraft developed by General Dynamics Corporation (now part of Lockheed Martin) for the United States and subsequently for other countries. The F-16 originated from an order placed in 1972 for a lightweight and cost-effective air-to-air combat aircraft. The current models are also capable of all-weather operations and are effective for ground attack missions. The U.S. Air Force received its first deliveries in 1978. The F-16 has a length of 49 feet (15 meters) and a wingspan of 31 feet (9.45 meters). It is powered by either a Pratt & Whitney or General Electric turbofan engine, equipped with afterburners, producing between 23,000 to 29,000 pounds (102 to 130 kilonewtons) of thrust, enabling the aircraft to exceed twice the speed of sound. Armament includes a 20mm (0.79 inches) rotary cannon, as well as hardpoints under the wings and fuselage for a variety of bombs and missiles. With a typical combat load, the F-16 weighs approximately 23,000 pounds (10,000 kg). The aircraft has been sold to U.S. allies in the Middle East, where it has proven highly effective in air-to-air combat and ground attack during the 1982 Israel-Syria conflict and the Gulf War of 1990–91. In terms of international sales, the F-16 is one of the most sought-after fighter jets and is currently in use by air forces in over 20 countries.

6. **P-51 Mustang**

P-51 yang juga disebut Mustang, adalah pesawat udara tempur bermesin tunggal berkursi tunggal yang awalnya dirancang dan diproduksi oleh *North American Aviation* untuk Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) dan kemudian diadopsi oleh Angkatan Udara Angkatan Darat USA (USAAF). P-51 secara luas dianggap sebagai pesawat udara tempur bermesin piston serba guna terbaik dari PD II yang diproduksi dalam jumlah yang signifikan. Sekitar 1.500 Mustang bertenaga Merlin digunakan oleh RAF untuk tugas siang hari di atas Eropa, dan pesawat udara tersebut diproduksi di bawah lisensi di Australia menjelang akhir perang. Beberapa dikirim ke Tiongkok Nasionalis. Versi yang

paling banyak diproduksi adalah P-51D yang dilengkapi dengan kanopi "gelembung" Plexiglas untuk visibilitas menyeluruh, dapat terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 440 mil (700 km) per jam, mencapai ketinggian operasional hampir 42.000 kaki (12.800 meter), dan dipersenjatai dengan enam senapan mesin 0,5 inci (12,7 mm) yang terpasang di sayap.

6. P-51 Mustang

The P-51 Mustang is a single-seat, single-engine fighter aircraft originally designed and produced by North American Aviation for the Royal Air Force (RAF) and later adopted by the United States Army Air Forces (USAAF). Widely regarded as the best all-purpose piston-engine fighter of World War II, the P-51 was produced in significant numbers. Approximately 1,500 Merlin-powered Mustangs were used by the RAF for daytime missions over Europe, and the aircraft was also produced under license in Australia toward the war's end. Some were sent to the Nationalist Chinese forces. The most produced variant, the P-51D, featured a "bubble" canopy made of Plexiglas for improved visibility. The P-51D could reach a maximum speed of around 440 miles per hour (700 kilometers per hour) and achieve an operational ceiling of nearly 42,000 feet (12,800 meters). It was armed with six .50 caliber (12.7 mm) machine guns mounted in its wings, making it a formidable opponent in aerial combat. The P-51 Mustang played a crucial role in achieving air superiority during the war and is celebrated for its performance and versatility.

7. A-10 Thunderbolt II

Fairchild Republic A-10A Thunderbolt II, adalah pesawat udara bermesin ganda dengan dua tempat duduk yang pertama kali diterbangkan pada tahun 1972, pada pertengahan tahun 1970-an menjadi pesawat udara serang pendukung jarak dekat utama Angkatan Udara USA. Persenjataan utamanya adalah meriam tujuh laras 1,2 inci (30 milimeter) yang dipasang di hidung yang merupakan "pembunuh tank" yang sangat efektif. Pesawat tersebut telah

digunakan dalam Perang Teluk Persia , Perang Irak , dan Perang Afghanistan , serta perang melawan ISIS .

7. A-10 Thunderbolt II

The Fairchild Republic A-10A Thunderbolt II is a twin-engine aircraft first flown in 1972, which became the primary close air support aircraft for the U.S. Air Force in the mid-1970s. Its main weapon is a seven-barrel 30 mm (1.2 inches) cannon mounted in the nose, known for its effectiveness against tanks, earning it the nickname "Warthog." The A-10 has seen extensive combat in various conflicts, including the Persian Gulf War, the Iraq War, and the War in Afghanistan. Its design emphasizes survivability and operational efficiency in close air support roles, making it a vital asset for ground forces. The A-10's ability to deliver precision strikes and provide support in hostile environments has solidified its reputation as one of the most effective ground attack aircraft in military history.

D. Pesawat Udara Tempur Uni Soviet (URRS)

Persaingan pesawat udara tempur juga dilakukan oleh URRS sebagai perasing USA selama PD. Pada 1990, Angkatan Udara US memiliki lebih dari 10.000 pesawat udara tempur (*state aircraft*). Jumlah tersebut belum termasuk pesawat udara yang dioperasikan Angkatan Darat US. Semua pesawat tersebut digunakan untuk keperluan pertahanan negara, terutama operasi pendukung. Pada era PD, semua pesawat Angkatan Udara US untuk mendukung kekuatan Tentara Merah, sehingga siap bilamana diluncurkan untuk pertempuran strategis melawan AS, menghalangi jalur pelayaran Atlantik dan Pasifik, dan melindungi tanah air US, namun demikian seiring jalannya waktu telah berubah. Setelah US runtuh, kekuatan Angkatan Udara US terbagi ke negara-negara pecahannya. Angkatan Udara FR hanya memperoleh seperlima kekuatan Angkatan Udara US. Sebagian besar armada tersebut telah dipensiunkan, namun demikian sebagian masih digunakan. Menurut *The National Interest*, masih ada lima pesawat era PD yang dimiliki US masih siap bertempur yakni pesawat tempur MiG-21,

pesawat udara Pengebom TU-95, Sukhoi SU-35, pengebom TU-22M, pesawat udara jet tempur MiG-31 dan Sukhoi SU-25.¹⁴

D. Soviet Union (USSR) Combat Aircraft

*The competition in combat aircraft development was also pursued by the USSR as a counter to the USA during the Cold War. By 1990, the U.S. Air Force had more than 10,000 combat aircraft (state aircraft), not including those operated by the U.S. Army. All these aircraft were used for national defense purposes, primarily in support operations. During the Cold War, the U.S. Air Force aircraft were intended to support the Red Army, prepared for potential strategic battles against the U.S., to block Atlantic and Pacific shipping routes, and to protect the U.S. homeland. However, as time progressed, this dynamic changed. Following the collapse of the Soviet Union, the strength of the U.S. Air Force was divided among the newly independent states. The Russian Air Force acquired only one-fifth of the U.S. Air Force's capabilities. While most of the fleet has been retired, some aircraft are still in operation. According to *The National Interest*, five Soviet-era aircraft that remain in active service include the MiG-21 fighter, the Tu-95 bomber, the Sukhoi Su-35, the Tu-22M bomber, the MiG-31 jet fighter, and the Sukhoi Su-25. These aircraft represent a legacy of Cold War military capabilities, reflecting the intense competition between the two superpowers.*

1. Pesawat tempur MiG-21 (Uni Soviet)

Biro desain kedirgantaraan URSS merancang MiG-21, pesawat udara pencegat bermesin tunggal yang ringan dan mampu terbang dengan kecepatan dua kali kecepatan suara, diperkenalkan pada tahun 1955. Versi dasar, yang mulai beroperasi pada tahun 1958, adalah pesawat tempur sederhana berbiaya rendah yang sangat lincah, mudah dirawat, dan mampu beroperasi dari bandar udara yang belum dikembangkan. Biro desain URSS tersebut

¹⁴ 5 Pesawat Era Perang Dingin yang Masih Andal untuk Bertempur <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/07/143901970/5-pesawat-era-perang-dingin-yang-masih-andal-untuk-bertempur?page=all> diunduh Tanggal 7 September 24

memproduksi lebih dari 9.000 MiG-21 dalam 32 versi untuk angkatan udara US dan lebih dari 40 negara lain dan URSS melisensikan satu versi untuk diproduksi di Tiongkok. Sebagaimana disebutkan di atas, pesawat udara tersebut menjadi pesawat udara pencegat yang dapat terbang tinggi, pernah digunakan dalam Vietnam Utara, dan versi yang ditingkatkan menjadi tulang punggung angkatan udara Arab sepanjang tahun 1970-an.

1. MiG-21 Fighter Aircraft (Soviet Union)

The MiG-21, designed by the Soviet design bureau, is a lightweight, single-engine interceptor aircraft capable of flying at speeds exceeding twice the speed of sound. It was introduced in 1955, with the basic version entering service in 1958. The MiG-21 is recognized for its simplicity, low operational costs, agility, and ability to operate from undeveloped airfields. The Soviet Union produced over 9,000 MiG-21 aircraft across 32 different versions, which were deployed by the U.S. Air Force and more than 40 other countries. Additionally, the USSR licensed one version of the MiG-21 for production in China. Notably, the MiG-21 was utilized extensively by North Vietnam during the Vietnam War, where it became known for its effectiveness against American aircraft. Upgraded versions of the MiG-21 also served as the backbone of several Arab air forces throughout the 1970s, demonstrating its versatility and adaptability in various combat scenarios.

2. Pesawat Udara Pengebom TU-95.

Setelah mengadopsi propulsi jet ke beberapa rangka pesawat udara bermesin piston, pada tahun 1952 Tupolev memperkenalkan TU-16 ("Badger"), sebuah pesawat udara pengebom jarak menengah yang memiliki sayap menyapu dan konstruksi paduan ringan. Sebuah tim di bawah Aleksandr A. Arkhangelsky, rekan lama dari salah seorang pendiri perusahaan *Andrey Tupolev*, merancang TU-95 ("Bear"), sebuah pesawat udara pengebom turboprop besar yang pertama kali terbang pada tahun 1954 dan menjadi salah satu pesawat udara militer paling tahan lama yang

pernah dibuat dan salah satu pesawat udara dengan masa pakai terlama di gudang senjata strategis US. FR masih mengoperasikan lebih dari 50 pesawat TU-95 ("Bear") sebagai pembawa rudal jelajah.

Pesawat udara jenis TU-95 tersebut awalnya dikembangkan sebagai pesawat udara pengebom strategis pada dekade 1950-an. Pesawat udara jenis TU-95 ("Bear"), yang dahulu adalah pesawat udara yang lamban, namun demikian TU-95 Bear telah berevolusi dan beradaptasi dengan berbagai misi selama enam dekade terakhir. Seperti B-52, TU-95 modern telah mengalami modifikasi ekstensif. TU-95 Bear juga masih memainkan beberapa peran yang sama termasuk pengintaian jarak jauh, patroli maritim, dan "kehadiran" senjata nuklir. Semua konfigurasi TU-95 Bear sangat rentan terhadap hampir semua jenis pesawat udara pencegat milik Barat yang modern. TU-95 Bear kemungkinan mampu mengirimkan serangan rudal jelajah terhadap target NATO dari wilayah udara FR. Demikian juga TU-95 Bear mampu melakukan pengintaian terhadap pesawat udara Barat yang sedang berkembang terhadap tindakan apa pun. Sebanyak 58 dari 500 versi asli dari TU-95 Bear masih beroperasi di bawah kendali Angkatan Udara FR.¹⁵

2. TU-95 Bomber Aircraft

The TU-95, known as "Bear," was developed by the Tupolev Design Bureau after the adaptation of jet propulsion to several piston-engine aircraft designs. Introduced in 1954, the TU-95 is a large turboprop strategic bomber that has become one of the most durable military aircraft ever built, boasting one of the longest service lives in the strategic weapons inventory of the Russian Federation (FR). Originally developed as a strategic bomber in the 1950s, the TU-95 has evolved and adapted to various missions over

¹⁵ 5 Pesawat Era Perang Dingin yang Masih Andal untuk Bertempur <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/07/143901970/5-pesawat-era-perang-dingin-yang-masih-andal-untuk-bertempur?page=all> diunduh Tanggal 7 September 24

the past six decades. While it was initially considered a slow aircraft, modern modifications have significantly enhanced its capabilities. Similar to the U.S. B-52, the TU-95 has undergone extensive upgrades, allowing it to perform roles such as long-range reconnaissance, maritime patrol, and nuclear deterrence.

Despite its age, the TU-95 remains an integral part of Russia's strategic bomber fleet, with over 50 units still in operation as cruise missile carriers. However, all configurations of the TU-95 Bear are vulnerable to modern Western interceptor aircraft. The TU-95 is believed to be capable of launching cruise missile strikes against NATO targets from Russian airspace, and it continues to conduct reconnaissance missions against Western aircraft developments. As of now, approximately 58 of the original 500 TU-95 variants are still operational under the control of the Russian Air Force, reflecting its lasting significance in military aviation.

3. Sukhoi SU-35

Ketika PD memasuki babak akhir, keluarga Flanker (sebutan NATO untuk beberapa jenis jet tempur Sukhoi) menghadirkan masalah yang semakin berat bagi angkatan udara Barat, banyak kebutuhan angkatan udara pada 1970-an dan 1980-an. Flanker pertama kali berdinamika di masa-masa terakhir URSR. Sejak saat tersebut, Flanker membuktikan platform yang sangat fleksibel, mampu menerima berbagai macam modifikasi dan peningkatan, sehingga keluarga Flanker berfungsi sebagai pesawat udara tempur berbasis kapal induk di dua angkatan laut, pesawat superioritas udara, dan pesawat udara serang jarak jauh. SU-35 mewakili konfigurasi keluarga Flanker yang paling mematikan. Saat tersebut, FR mengoperasikan 34 unit SU-35, dengan lusinan lainnya sedang disiapkan untuk "berdinamika" mampu manuver dengan terbang tinggi yang dipersenjatai dengan senjata berat. SU-35 berpotensi bersaing dengan pesawat Barat yang terbaik. Walaupun ada SU-57 terbaru, SU-35 tetap menjadi

pilihan pesawat udara tempur utama FR untuk beberapa waktu mendatang.¹⁶

3. Sukhoi SU-35

As the Cold War entered its final phase, the Flanker family – NATO's designation for various Sukhoi fighter jets – emerged as a significant challenge for Western air forces. Developed in response to the evolving needs of air forces during the 1970s and 1980s, the Flanker was introduced in the late years of the Soviet Union (URRS). Since then, it has proven to be an exceptionally flexible platform, capable of accommodating a wide range of modifications and upgrades. The Sukhoi SU-35 represents the most lethal configuration of the Flanker family. Currently, the Russian Federation (FR) operates 34 units of the SU-35, with additional units being prepared for service. The SU-35 is notable for its advanced maneuverability at high altitudes and its heavy armament capabilities, making it a formidable competitor against the best Western fighter aircraft. While the more advanced SU-57 is in development, the SU-35 remains the primary choice for the Russian Air Force (VKS) in the near future. Its versatility allows it to perform multiple roles, including carrier-based operations for two navies, air superiority missions, and long-range strike capabilities. This adaptability and combat potential solidify the SU-35's status as a cornerstone of Russia's modern aerial combat strategy.

4. Pesawat Udara Pengebom TU-22M.

Pesawat udara pembom TU-22M (NATO menyebutnya Backfire) adalah salah satu pesawat udara pengebom mematikan yang dimiliki URRS pada era PD. Pesawat udara supersonik tersebut dirancang sebagai pengebom strategis jarak menengah hingga jarak jauh. Backfire dianggap mampu digunakan untuk berburu kapal induk yang sempat membuat Barat khawatir. TU-22M

¹⁶ 5 Pesawat Era Perang Dingin yang Masih Andal untuk Bertempur
<https://internasional.kompas.com/read/2021/03/07/143901970/5-pesawat-era-perang-dingin-yang-masih-andal-untuk-bertempur?page=all> diunduh
Tanggal 7 September 24

menimbulkan masalah baik dalam hal pertahanan udara nasional dan memberikan tantangan yang besar bagi pertahanan udara armada. Sekitar 90 unit TU-22M masih beroperasi di dalam tubuh Angkatan Udara FR. Sekitar 50 unit lainnya beroperasi di bawah kendali Angkatan Laut FR. Terlepas dari keunggulannya dalam patroli maritim, TU-22M telah melakukan peran pengeboman dan pengintaian sejak Perang Afghanistan.¹⁷

4. TU-22M Bomber Aircraft

The TU-22M bomber aircraft, known by its NATO designation "Backfire," is one of the deadliest bombers possessed by the Soviet Union (USSR) during the Cold War era. This supersonic aircraft was designed as a strategic bomber with a range extending from medium to long distances. The Backfire is considered capable of hunting aircraft carriers, which raised significant concerns among Western powers. The TU-22M posed challenges for national air defense and represented a significant threat to naval defense systems. Approximately 90 units of the TU-22M are still operational within the Russian Air Force (FR), while about 50 additional units are under the control of the Russian Navy. In addition to its superiority in maritime patrol, the TU-22M has also performed bombing and reconnaissance missions since the Afghan War. Its versatility and operational capabilities ensure that the TU-22M remains an important asset in Russia's military strategy.

5. Pesawat Udara Jet Tempur Mikoyan MiG-31

Pesawat udara jet tempur Mikoyan MiG-31 (NATO menyebutnya *Foxhound*) diklaim merupakan senjata hipersonik URSS yang membawa rudal penjelajah Kizhal. Pesawat udara pembom tersebut yang merupakan pengembangan dari MiG-25 yang merupakan puncak design pesawat pencegat dari era PD yang dilengkapi dengan radar yang kuat, kecepatan tinggi, kemampuan terbang jarak jauh, dapat menyelesaikan masalah yang menyolok dari

¹⁷.Ibid.

pendahulunya. MiG-25 dan *Foxhound* dilaporkan dapat secara efektif memburu pesawat udara Barat di sepanjang pinggiran wilayah udara FR serta ke Kutub Utara. Secara khusus, dengan kecepatannya yang tinggi, *Foxhound* dianggap sangat efektif untuk menyerang *hit-and-run*, memberikan serangan yang mengganggu, lalu kembali ke wilayah udara FR. Angkatan Udara FR masih mengoperasikan sekitar 200 *Foxhound*, yang terus berpatroli di wilayah udara FR dan memproyeksikan kekuatan FR ke Kutub Utara. FR merencanakan menghentikan *Foxhound* yang tersisa dalam lima belas tahun ke depan dan menggantinya dengan pesawat baru, namun demikian, mengingat industri pesawat udara FR yang sedang kesulitan, kemungkinan *Foxhound* baru dapat terbang dengan prima di masa depan.¹⁸

5. Mikoyan MiG-31 Fighter Jet

The Mikoyan MiG-31 fighter jet, known by its NATO designation "Foxhound," is claimed to be a hypersonic weapon of the Soviet Union (USSR) capable of carrying Kinzhal cruise missiles. This bomber aircraft is an evolution of the MiG-25, which was the pinnacle of interceptor design during the Cold War, featuring powerful radar, high speed, and long-range capabilities that addressed the shortcomings of its predecessor. Both the MiG-25 and the Foxhound have been reported to effectively hunt Western aircraft along the fringes of Russian airspace and into the Arctic region. Notably, with its high speed, the Foxhound is considered particularly effective for hit-and-run attacks, executing disruptive strikes before returning to Russian airspace. The Russian Air Force currently operates around 200 MiG-31s, which continue to patrol Russian airspace and project Russia's power into the Arctic. While there are plans to retire the remaining Foxhounds over the next fifteen years and replace them with new aircraft, the challenges facing the Russian aerospace industry suggest that the Foxhound may still be flying at peak performance for the foreseeable future.

¹⁸.Ibid.

6. Sukhoi SU-25

Pesawat udara tempur jet jenis *Sukhoi SU-25* milik Angkatan Udara Irak. (Wikipedia) SU-25 (NATO menyebutnya *Frogfoot*) masih dianggap sebagai platform serangan darat yang sangat efektif. Pesawat udara jenis *Sukhoi SU-25*, dirancang untuk menyerang pasukan darat NATO di Eropa Tengah pada Pakta Warsawa masih ada. SU-25 telah bertempur dalam banyak konflik di seluruh dunia. Lebih dari 1.000 unit *Frogfoot* dibangun pada 1970-an dan 1980-an. Sekitar 200 unit masih tersisa dan berdinas di bawah bendera FR. SU-25 telah membuktikan kinerja yang baik dalam Perang Afghanistan, Perang Chechnya Pertama dan Kedua, Perang Iran-Irak, dan dalam berbagai konflik lain yang berhubungan dengan operasi era URRS. Setahun terakhir, *Frogfoot* telah memainkan peran penting dalam perang internasional melawan ISIS serta dalam konflik Ukraina-Rusia. Sekarang, kinerja Su-25 dinilai rentan terhadap senjata permukaan-ke-udara modern. Hal terungkap dalam konflik Rusia-Ukraina.¹⁹

6. Sukhoi SU-25

The Sukhoi SU-25, known by its NATO designation "Frogfoot," is a jet fighter aircraft used by the Iraqi Air Force. It is still considered a highly effective ground attack platform. Designed to target NATO ground forces in Central Europe during the Warsaw Pact era, the SU-25 has participated in numerous conflicts worldwide. Over 1,000 units of the Frogfoot were built in the 1970s and 1980s, with approximately 200 units still in service under the Russian banner. The SU-25 has demonstrated strong performance in various conflicts, including the Soviet-Afghan War, the First and Second Chechen Wars, the Iran-Iraq War, and other operations related to the Soviet era. In recent years, the Frogfoot has played a significant role in the international fight against ISIS and the ongoing Ukraine-Russia conflict. However, the SU-25's performance has been deemed vulnerable to modern surface-to-air

¹⁹.Ibid.

weapons, as highlighted by the experiences observed in the Russia-Ukraine conflict.

E. Perlombaan Senjata Nuklir

Secara khusus, para pejabat USA mendorong pengembangan senjata nuklir. Maka, perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Pada 1949 URSS menguji senjata nuklir mereka sendiri. Sebagai tanggapan, presiden USA kala itu, Harry Truman, mengumumkan negaranya akan membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat. Pada 1962 URSS secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan ke kota-kota di USA. Ancaman tersebut membuat orang-orang USA membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Pemasangan rudal tersebut memicu krisis yang membawa kedua negara ke ambang pertempuran fisik sebelum akhirnya tercapai kesepakatan untuk menarik rudal.²⁰

Sumber lain mengutarakan²¹ bahwa perlombaan Senjata URSS-USA menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh bom atom USA pada bulan Agustus 1945 memulai perlombaan senjata antara URSS vs USA. yang berlangsung hingga penandatanganan perjanjian pasukan Konvensional di Eropa pada bulan November 1990. Seluruh generasi tumbuh di bawah bayang-bayang bencana yang akan segera terjadi. Ada ketakutan yang meluas bahwa umat manusia tidak dapat bertahan hidup. Seorang pemimpin yang sembrono, atau bahkan kesalahan atau kesalahpahaman, dapat memusnahkan kehidupan umat manusia. Persediaan senjata yang menakutkan dibangun hingga tingkat yang jauh melampaui tujuan yang dapat dibayangkan, dan tampaknya hanya menambah ketidakpastian dan ketidakstabilan zaman.²²

²⁰ Sejarah Perang Dingin: Latar Belakang dan Persaingannya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/27/120100570/sejarah-perang-dingin--latar-belakang-dan-persaingannya?page=all> diunduh Tanggal 26 Agustus 24

²¹ Perlombaan Senjata Soviet-Amerika <https://www.historytoday.com/archive/soviet-american-arms-race> diunduh Tanggal 6 September 24

²² *Ibid.*

Penyerahan diri Jepang yang cepat pada tahun 1945 menunjukkan bahwa USA memiliki senjata yang paling menentukan. Sebenarnya semua menduga bahwa tujuan penggunaan senjata tersebut bukan untuk memaksa Jepang kalah, melainkan untuk memperingatkan URSS agar menuruti keinginan USA untuk membangun dunia pascaperang. Akan tetapi, sebagai bantuan bagi diplomasi USA, kepemilikan senjata atom terbukti tidak begitu berharga. Para pemimpin URSS segera menyadari keterbatasan senjata tersebut. Jelaslah bahwa USA akan membela Eropa Barat yang menghadapi invasi URSS, sebuah langkah yang tampaknya tidak pernah dipikirkan secara serius oleh Joseph Stalin, tetapi tidak ada pemerintah USA yang dapat membenarkan penggunaan senjata tersebut untuk memaksakan reformasi politik di Eropa Timur. PD dan menilai motif Negara Adidaya. Para pemimpin URSS menjadi semakin keras kepala dalam negosiasi, bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan terintimidasi. Selain itu, sudah pasti bahwa URSS akan mengembangkan senjata bom atom mereka sendiri, dan secepat mungkin. Pihak USA, akan memakan waktu antara delapan hingga 15 tahun, mengingat kehancuran akibat perang yang dialami URSS yang membuat AS merenungkan masalah keamanan di dunia yang dipersenjatai bom atom.²³

Satu senjata saja dapat menghancurkan satu kota. Pengalaman masa perang juga menunjukkan bahwa tidak ada pertahanan terhadap roket V2 Jerman, oleh karena itu, bilamana hulu ledak dapat dipasang pada roket semacam tersebut, pasti akan memberikan kemenangan instan. Selain itu, serangan Jepang di Pearl Harbor telah mengajarkan bahwa serangan mendadak adalah alat para agresor. Demokrasi yang cinta damai akan sangat rentan. Akibatnya, beberapa pemikiran diberikan pada kontrol internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mencegah negara mana pun memiliki senjata ini. Ini adalah dasar dari Rencana Baruch.²⁴

²³.*Ibid*

²⁴.*Ibid.*

Pada tahun 1946, disamping bom atom URSS dan USA mereka juga membuat bom atom, bom nuklir, bom hidrogen, rudal jarak jauh, rudal balistik antarbenua. Pemodal USA dan penasihat presiden, Bernard Baruch mengusulkan pembongkaran senjata USA, larangan internasional atas produksi senjata lainnya, dan kerja sama internasional untuk mengembangkan energi atom untuk penggunaan damai di bawah pengawasan ketat badan internasional, namun demikian URSS harus tunduk pada rezim inspeksi tersebut, dan USA tidak akan membagikan teknologi persenjataannya. Tidak jelas seberapa serius presiden Harry S. Truman dan pemerintahannya menanggapi usulan tersebut. Tanpa kontrol internasional, satu-satunya pertahanan tampaknya adalah mengancam pembalasan dengan cara yang sama bilamana serangan bom atom pernah dilakukan terhadap USA atau sekutunya, karena terbukti memang sangat sulit untuk mengembangkan rudal jarak jauh yang cukup andal dan akurat, awalnya pencegahan tersebut diberikan oleh pembom B-36 yang ditempatkan di Inggris dan Timur Jauh. Tetapi URSS menguji senjata atom pertamanya pada tahun 1949, jauh lebih awal dari yang diharapkan. Kejutan tersebut membuat persediaan bom nuklir USA tampak tidak meyakinkan, karena itu, Truman mengesahkan pengembangan senjata term nuklir, atau bom hidrogen yang dapat menghasilkan ledakan sepuluh megaton (setara dengan 10.000.000 ton TNT. Sebagai perbandingan Bom atom yang digunakan di Hiroshima menghasilkan setara dengan 12.500 ton. URSS pada tahun 1953 telah mengejar ketinggalan lagi. Sementara itu USA mulai membangun pasukan rudal jarak jauh pertamanya yang efektif yang termasuk Atlas dan Titan ICBM Rudal Balistik Antarbenua (Atlas dan Titan ICBM), Rudal Balistik Jarak Menengah (Jupiter dan Thor IRBM) dan Rudal Balistik yang Diluncurkan dari Kapal Selam (Polaris SLBM). AS mempertahankan keunggulan teknologi atas US, namun demikian tidak selalu terjadi. Pada bulan Oktober 1957, US meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia. Yang mengejutkan publik AS, yang tidak terbiasa dengan pemikiran

berada dalam jangkauan senjata Soviet, yang sekarang tampaknya terjadi.²⁵

E. The Nuclear Arms Race

U.S. officials actively promoted the development of nuclear weapons, leading to a nuclear arms race that raised global concerns. In 1949, the USSR tested its own nuclear weapon. In response, President Harry Truman announced that the U.S. would create even more powerful nuclear weapons. By 1962, the USSR had secretly deployed missiles in Cuba that could strike cities in the U.S., prompting Americans to build fallout shelters in their backyards. This missile installation triggered a crisis that brought both countries to the brink of physical conflict, ultimately resolved by an agreement to withdraw the missiles.

Other sources indicate that the U.S.-USSR arms race began with the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in Japan by the U.S. in August 1945. This race continued until the signing of the Conventional Armed Forces in Europe treaty in November 1990. Generations grew up under the shadow of impending disaster, with widespread fears that humanity might not survive. A reckless leader or even a mistake or misunderstanding could obliterate human life. A frightening stockpile of weapons was built to levels far beyond any imaginable goals, only adding to the uncertainty and instability of the era.

Japan's swift surrender in 1945 demonstrated that the U.S. possessed the most decisive weapon. It was widely suspected that the purpose of using these weapons was not merely to defeat Japan but also to warn the USSR to comply with U.S. wishes for a post-war world. However, the possession of atomic weapons proved less valuable for U.S. diplomacy than anticipated. Soviet leaders quickly realized the limitations of such weapons. It was evident that the U.S. would defend Western Europe against a Soviet invasion – something Joseph Stalin seemingly never considered seriously – but no U.S. government could justify using these weapons to impose political reforms in Eastern Europe. Consequently, the USSR's leaders became increasingly

²⁵ Perlombaan Senjata Soviet-Amerika <https://www.historytoday.com/archive/soviet-american-arms-race> diundduh Tanggal 6 September 24

stubborn in negotiations, determined to show they would not be intimidated. Furthermore, it was clear that the USSR would develop its own atomic bombs as soon as possible.

The U.S. anticipated that this would take between eight and fifteen years, given the devastation caused by the war that left the USSR contemplating global security in a nuclear-armed world. A single weapon could annihilate an entire city. Wartime experience also showed that there was no defense against the German V-2 rockets; therefore, if a warhead could be mounted on such a rocket, it would guarantee instant victory. The attack on Pearl Harbor also taught that surprise attacks were the tools of aggressors, leaving peaceful democracies particularly vulnerable. Consequently, considerable thought was given to international controls under the auspices of the United Nations (UN) to prevent any nation from possessing such weapons, forming the basis of the Baruch Plan.

By 1946, both the U.S. and the USSR had developed atomic bombs, atomic bombs, hydrogen bombs, long-range missiles, and intercontinental ballistic missiles. U.S. financier and presidential advisor Bernard Baruch proposed the dismantling of U.S. nuclear weapons, an international ban on the production of further weapons, and international cooperation for developing atomic energy for peaceful use under strict international oversight. However, the USSR would have to submit to the inspection regime, and the U.S. would not share its military technology. It remains unclear how seriously President Harry S. Truman and his administration took this proposal. Without international control, the only defense seemed to threaten retaliation in kind if an atomic bomb were ever used against the U.S. or its allies. It proved very difficult to develop sufficiently reliable and accurate long-range missiles, with initial deterrence provided by the B-36 bombers stationed in England and the Far East.

However, the USSR tested its first atomic weapon in 1949, much sooner than anticipated. This shock rendered the U.S. nuclear arsenal seem unconvincing, leading Truman to endorse the development of thermonuclear weapons or hydrogen bombs capable of producing a ten-megaton explosion (equivalent to 10 million tons of TNT), compared to the atomic bomb used in Hiroshima, which was equivalent to 12,500 tons. By 1953, the USSR had once again closed

the gap. Meanwhile, the U.S. began building its first effective long-range missile forces, including Atlas and Titan Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), Jupiter and Thor Intermediate-Range Ballistic Missiles (IRBMs), and Polaris Submarine-Launched Ballistic Missiles (SLBMs). While the U.S. maintained a technological edge over the USSR, this was not always the case. In October 1957, the USSR launched Sputnik 1, the first artificial satellite in the world, shocking the American public, who were unaccustomed to the idea of being within the reach of Soviet weaponry, which now seemed all too real.

F. Perlombaan Teknologi Angkasa Luar

Selama terjadi PD di permukaan bumi, juga terjadi PD di angkasa luar yang biasa disebut perang bintang (*star wars*), berwujud persaingan di angkasa luar antara URSS dan USA yang mengirimkan misi ke angkasa luar untuk menjajagi kemungkinan menempatkan perangkat militer, komunikasi, dan mata-mata (*spionase*). Pengiriman misi tersebut merupakan usaha perang urat syaraf untuk menunjukkan keunggulan teknologi kepada pihak lawan. Sejak tahun 1950-an, mereka secara bergantian unjuk kecanggihan di bidang teknologi angkasa luar. URSS mendahului USA dengan peluncuran Sputnik V tanggal 4 Oktober 1957, menjadikan satelit pertama yang diluncurkan ke angkasa luar oleh URSS. Keberhasilan peluncuran Sputnik V sangat mengejutkan dan membuat USA merasa kecolongan, apalagi pada tanggal 3 November 1957, URSS meluncurkan Sputnik 2 dengan membawa anjing bernama Laika, menjadikan hewan pertama pergi ke angkasa.²⁶

Kegiatan mata-mata pada masa PD tanggal 1 Februari 1958, AS mengejar ketertinggalan US dengan meluncurkan *Explorer 1*, sebagai satelit pertama yang diluncurkan AS, pada tahun yang sama tepatnya pada 29 Juli 1958, AS mendirikan *National Aeronautics and Space Administration (NASA)*, sebuah badan antariksa AS untuk mengeksplorasi angkasa luar. Di samping itu, AS juga menciptakan dua program angkasa luar yang berorientasi pada keamanan nasional, beroperasi secara

²⁶.*Ibid.*

bersamaan dengan program NASA. Pada 1959, persaingan antara US dan AS untuk mengembangkan teknologi angkasa luar semakin memanas. US kembali unggul dengan meluncurkan Luna 2, wahana antariksa pertama yang mencapai bulan yang disusul pada April 1961, di mana kosmonot Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang berhasil melakukan perjalanan ke angkasa dan mengorbit bumi dengan pesawat angkasa bernama Vostok 1.²⁷

KGB, Badan Intelijen URRS Era PD tidak mau kalah dengan pengiriman misi angkasa luar, kemudian merancang pesawat angkasa luar yang lebih ringan dari Vostok 1 dan sempat melakukan pengujian dengan mengangkut simpanse pada Maret 1961. Sebaliknya pada 5 Mei, USA, meluncurkan Bartlett Shepard Jr ke angkasa luar, masih di bulan yang sama, Presiden USA John F Kennedy sesumbar akan mendaratkan manusia di bulan sebelum akhir 1960-an, kemudian menaikkan anggaran NASA hingga 500 persen untuk mendukung program pendaratan manusia di Bulan yang disebut "*Program Apollo*," namun demikian sempat mengalami hambatan saat tiga astronotnya tewas akibat pesawat angkasa luar mereka terbakar selama simulasi peluncuran pada bulan Januari 1967. Sementara itu, program pendaratan US sempat kurang jelas nasibnya karena adanya konflik internal.²⁸

Desember 1968, USA meluncurkan Apollo 8, misi antariksa berawak kedua dari "*Program Apollo*" yang menjadi misi pertama untuk membawa manusia ke bulan. USA resmi mengungguli capaian URRS pada Juli 1969 dengan peluncuran Apollo 11 yang merupakan misi angkasa luar berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke Bulan dan kembali dengan selamat. Dampak PD bagi USA persaingan pengiriman misi ke angkasa luar dan pengembangan teknologi antariksa terus terjadi selama PD. Dapat dikatakan PD antara URRS dan USA berpengaruh positif pada teknologi angkasa luar yang mengalami peta perkembangan pesat, karena keberhasilan

²⁷.Ibid.

²⁸.Ibid.

peluncuran satelit banyak manfaatnya bagi kehidupan di permukaan bumi, ditemukannya pesawat ulang-alik, roket, dan sebagainya.²⁹

Pemimpin URSS, Nikita Khrushchev, lebih mementingkan kemampuan teknologi negaranya. Faktanya, keunggulan teknologi dan keseimbangan strategis tetap sangat menguntungkan USA, tidak mencegah publik USA percaya pada keberadaan "kesenjangan rudal" yang menguntungkan URSS, yang pada gilirannya menyebabkan John F. Kennedy, menjadi presiden pada tahun 1961, memperluas kekuatan rudal USA lebih jauh lagi. Masa kepresidenan F.Kennedy juga menyaksikan dunia berada di ambang perang nuklir selama krisis rudal Kuba pada bulan Oktober 1962. Setelah itu, Menteri Pertahanannya, Robert McNamara, beralih ke strategi *Mutual Assured Destruction (MAD)* untuk memberikan tingkat stabilitas dengan menerima kehancuran total kedua belah pihak dalam pertukaran bom atom. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan nuklir yang menghancurkan, tetapi pembalasan akan tetap dilancarkan, mereka sama-sama akan menderita. Gagasan pencegahan bersama tersebut memang memiliki beberapa keuntungan. Bilamana ICBM disebarkan ke silo-silo yang diperkeras, dan armada SLBM tidak dapat dideteksi, maka cukup banyak yang akan selamat untuk membalas. Serangan mendadak tidak akan menguntungkan siapa pun. Selain itu, tidak perlu lagi terus membangun lebih banyak rudal, hanya untuk mempertahankan tingkat paritas. Dengan demikian, pasti akan memungkinkan beberapa bentuk batasan jumlah rudal yang dinegosiasikan.³⁰

F. The Space Technology Race

During the Cold War on Earth, there was also a war in outer space, commonly referred to as the "Star Wars," manifesting as a competition between the USSR and the USA to send missions into space to explore the potential for deploying military, communication,

²⁹.Ibid.

³⁰.Ibid.

and espionage devices. These missions were a form of psychological warfare aimed at demonstrating technological superiority to the opposing side. Since the 1950s, both nations alternately showcased their advancements in space technology. The USSR gained an early lead by launching Sputnik V on October 4, 1957, making it the first satellite sent into space. The success of Sputnik V surprised the USA, especially when the USSR launched Sputnik 2 on November 3, 1957, carrying a dog named Laika, the first animal to travel into space.

As the U.S. sought to catch up, it launched Explorer 1 on February 1, 1958, its first satellite. Later that same year, on July 29, 1958, the U.S. established the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to explore outer space. Additionally, the U.S. created two space programs focused on national security that operated alongside NASA. By 1959, the competition to develop space technology between the U.S. and the USSR intensified. The USSR took the lead again by launching Luna 2, the first spacecraft to reach the Moon. In April 1961, cosmonaut Yuri Gagarin became the first human to travel into space and orbit the Earth aboard the Vostok 1 spacecraft.

The KGB, the USSR's intelligence agency during the Cold War, sought to keep pace with the space missions and designed a spacecraft lighter than Vostok 1, conducting tests with a chimpanzee in March 1961. On May 5 of the same year, the USA launched Alan Shepard Jr. into space. Later in that month, President John F. Kennedy boldly claimed that the U.S. would land a man on the Moon before the end of the 1960s, subsequently increasing NASA's budget by 500% to support the Moon landing program, called the "Apollo Program." However, the program faced setbacks when three astronauts perished in a fire during a launch simulation in January 1967. Additionally, the U.S. Moon landing program's fate was uncertain due to internal conflicts.

In December 1968, the U.S. launched Apollo 8, the second crewed mission of the Apollo Program and the first mission to bring humans to the Moon. The U.S. officially surpassed the USSR's achievements in July 1969 with the launch of Apollo 11, the first crewed mission to successfully land humans on the Moon and return them safely. The Cold War spurred competition in space missions and technological advancements, significantly impacting the development

of space technology. The successes in satellite launches had numerous benefits for life on Earth, leading to the discovery of space shuttles, rockets, and more.

Soviet leader Nikita Khrushchev prioritized his country's technological capabilities. Despite this, the technological advantage and strategic balance continued to favor the U.S., yet the American public remained concerned about a "missile gap" favoring the USSR. This perception led John F. Kennedy, elected president in 1961, to further expand U.S. missile capabilities. Kennedy's presidency was marked by the world teetering on the brink of nuclear war during the Cuban Missile Crisis in October 1962. Following this, Secretary of Defense Robert McNamara adopted the strategy of Mutual Assured Destruction (MAD) to establish stability through the acceptance of total destruction on both sides in the event of a nuclear exchange. While there was no way to prevent devastating nuclear attacks, retaliation would still occur, leading to mutual suffering. The idea of mutual deterrence offered some advantages: if intercontinental ballistic missiles (ICBMs) were deployed in hardened silos, and submarine-launched ballistic missiles (SLBMs) remained undetectable, there would be enough survivable weapons to respond. A surprise attack would benefit no one. Moreover, there was no longer a need to continue building more missiles merely to maintain parity, allowing for the possibility of negotiating limits on the number of missiles.

G. Perdamaian Dunia

Para pegiat perdamaian termasuk mereka yang membahas biaya pencegahan yang dibutuhkan. Selama krisis rudal Kuba, Kennedy memiliki pilihan untuk meluncurkan serangan udara untuk menghancurkan rudal di Kuba, namun demikian beliau mengetahui bahwa beberapa di antaranya kemungkinan akan selamat, dan menolak pilihan tersebut karena khawatir rudal tersebut akan diluncurkan. Sedikit pencegahan jelas dapat bermanfaat, namun demikian, pertengahan tahun 1970-an kelompok penelitian perdamaian, seperti Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, melaporkan bahwa cukup banyak persenjataan atom yang telah ditimbun untuk memusnahkan manusia sebanyak 690 kali. Pada

saat yang sama, penelitian tentang perang kimia dan biologi (CBW) mengalami kemajuan pesat. Penyakit seperti antraks dan *glanders*, yang dapat membunuh hampir semua orang yang tertular, dapat dengan mudah menyebar. Agen biologis lainnya dapat menargetkan ternak atau tanaman untuk menyebabkan kelaparan. Risiko epidemi yang menghancurkan pencetusnya hanya menambah kengerian yang melekat pada senjata semacam itu.

G. World Peace

Peace advocates, including those discussing the costs of prevention, play a crucial role in global stability. During the Cuban Missile Crisis, President Kennedy faced the option of launching an airstrike to destroy the missiles in Cuba. However, he recognized that some of these missiles might survive the attack, and he rejected this option due to concerns that it could provoke a missile launch against the U.S. While some deterrence was clearly beneficial, by the mid-1970s, peace research groups such as the Stockholm International Peace Research Institute reported that there were enough nuclear weapons stockpiled to potentially destroy humanity 690 times over. Simultaneously, research in chemical and biological warfare (CBW) was advancing rapidly. Diseases like anthrax and glanders, which could kill nearly everyone who contracted them, posed a significant threat due to their ease of spread. Other biological agents could target livestock or crops, leading to widespread famine. The risk of devastating epidemics, which could trigger catastrophic consequences, only added to the horror associated with such weapons. The stark reality of these threats emphasized the importance of international cooperation and dialogue to foster peace and prevent conflict. Addressing the challenges posed by nuclear and biological weapons remains critical in the quest for a more peaceful world.

H. Pembatasan Senjata Strategis (SALT)

Semakin besar persediaan senjata strategis, semakin mengerikan meningkatnya konfrontasi. Pada tahun 1950-an, Angkatan Darat USA melakukan latihan militer, seperti operasi *Sage Brush* dan *Carte Blanche*, untuk melihat apakah senjata

strategis tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan Jerman Barat dari invasi URSS, kesimpulannya mereka mungkin melakukannya. Sejak pertengahan tahun 1950-an secara umum diterima bahwa dalam konsep perang nuklir kemenangan tersebut menggelikan. Pasca perang nuklir akan mengalami kehancuran, kekacauan, kejatuhan nuklir, kelaparan dan penyakit, banyak korban meninggal dunia.

Kedua Presiden Khrushchev URSS dan F.Kennedy USA telah mengambil langkah memasang saluran telepon darurat (sebenarnya saluran teletype yang menghubungkan Gedung Putih dan Kremlin, sehingga kedua pemimpin dapat bertindak cepat untuk meredakan krisis), selama Krisis Rudal Kuba. Mereka juga menyetujui Perjanjian Larangan Uji Coba Sebagian, yang memindahkan uji coba peledakan senjata nuklir ke bawah tanah, yang berfungsi untuk mengurangi kontaminasi radioaktif atmosfer dari uji coba tersebut, tidak menempatkan rudal nuklir di luar angkasa atau di dasar laut. Lebih jauh, mereka setuju tidak menempatkan rudal nuklir di luar angkasa atau di dasar laut. Selain itu, pada tahun 1968 kedua negara URSS dan USA menanda tangani Perjanjian Non-Proliferasi untuk mencegah negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir memperolehnya dan setuju tidak membangun senjata nuklir dan mengizinkan inspeksi internasional atas fasilitas nuklir mereka, dengan syarat negara pemilik senjata nuklir berjanji untuk melucuti senjata pada kesempatan paling awal, namun demikian Korea Utara, Israel, Pakistan, dan India, menolak menandatangani atau kemudian menarik diri darinya. Semua negara tersebut segera memperoleh senjata nuklir yang mengancam akan memulai perlombaan senjata regional.

H. Strategic Arms Limitation Talks (SALT)

The growing stockpiles of strategic weapons exacerbated the terrifying nature of confrontations during the Cold War. In the 1950s, the U.S. Army conducted military exercises, such as Operation Sage Brush and Carte Blanche, to assess whether strategic weapons could defend West Germany against a potential Soviet invasion, and the conclusions suggested that they could. By the mid-1950s, it was widely

accepted that the concept of victory in nuclear warfare was absurd. The aftermath of a nuclear conflict would entail destruction, chaos, nuclear fallout, famine, and disease, resulting in countless casualties.

Both Soviet Premier Nikita Khrushchev and U.S. President John F. Kennedy took steps to mitigate this threat by establishing a direct emergency communication line (specifically, a teletype connection between the White House and the Kremlin) during the Cuban Missile Crisis, allowing for swift action to defuse tensions. They also agreed to the Partial Test Ban Treaty, which moved nuclear weapon testing underground to reduce atmospheric radioactive contamination and prohibited the deployment of nuclear missiles in outer space or on the seabed. Furthermore, in 1968, both the USSR and the USA signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) to prevent non-nuclear-armed states from acquiring nuclear weapons. They committed not to develop new nuclear arsenals and to allow international inspections of their nuclear facilities, with the stipulation that nuclear-armed states would work towards disarmament at the earliest opportunity. However, countries such as North Korea, Israel, Pakistan, and India either refused to sign the treaty or later withdrew from it, ultimately acquiring nuclear weapons and threatening to initiate a regional arms race. The SALT negotiations represented a significant effort to manage the nuclear arms race and prevent the proliferation of nuclear weapons, underscoring the need for international cooperation to maintain global security.

I. Perang Ideologi Korea 1950-1953

1. Sejarah Singkat Lahirnya Republik Korea

Bulan Desember 1945, sesuai Perjanjian Postdam, diadakan konferensi di Moskwa yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis, namun demikian kesepakatan tersebut menemui kegagalan sampai kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. USA membentuk Republik Korea (Korsel) dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin Syngman Rhee, sedangkan URSS mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korut) dengan ibu kota di Pyongyang, yang dipimpin Kim Il Sung.

Tidak adanya kesepakatan antara URSS dan USA mengenai pembentukan Korea merdeka yang memicu Perang Korea.³¹

Perang Korea berlangsung antara 1950 hingga 1953, melibatkan Republik Demokratik Korea (Korut) dan Republik Korea (Korsel). Perang tersebut bukan hanya perkara perang saudara, tetapi melibatkan campur tangan dari dua negara adidaya URSS dan USA. Dalam perang tersebut, Korea Selatan dibantu oleh USA, sedangkan Koruea Utara dibantu oleh URSS. Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata antara kedua pihak, tidak ada negara yang menang maupun negara yang kalah, karena itu tanpa perjanjian damai, secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara dengan terus dilakukan upaya perjanjian damai.³²

I. *The Korean Ideological War 1950-1953*

1. *Brief History of the Birth of the Republic of Korea*

In December 1945, following the Potsdam Agreement, a conference was held in Moscow that resulted in an agreement to establish a democratic government in Korea. However, this agreement failed, leading both parties to establish new governments in their respective halves of Korea by 1948. The USA formed the Republic of Korea (South Korea) with its capital in Seoul, led by Syngman Rhee, while the USSR established the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) with its capital in Pyongyang, led by Kim Il Sung. The lack of consensus between the USSR and the USA regarding the formation of an independent Korea triggered the Korean War.

The Korean War lasted from 1950 to 1953, involving the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) and the Republic of Korea (South Korea). This conflict was not merely a civil war; it also saw the intervention of the two superpowers, the USSR and the USA. In this war, South Korea was supported by the USA,

³¹ Perang Korea: Penyebab, Jalannya Pertempuran, Penyelesaian, dan Dampak <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/28/160000879/perang-korea-penyebab-jalannya-pertempuran-penyelesaian-dan-dampak?page=all> diunduh Tanggal 7 Januari 2024

³².Ibid.

while North Korea was aided by the USSR. The war ended with a ceasefire between the two sides, with no clear winner or loser, and without a peace treaty. As a result, technically, South Korea and North Korea remain in a state of conflict, with ongoing efforts toward a peace agreement.

2. Sebab-Sebab Perang

Secara umum perang Korea disebabkan adanya persaingan ideologi antara URSS dan USA. Setelah PD II berakhir dalam tahun 1945, terjadi PD antara Blok timur yang dipimpin oleh URSS dan blok barat yang dipimpin USA. Pada saat itu, Korea menjadi daerah yang diperebutkan antara URSS dan USA. Pada tanggal 10 Agustus 1945, beberapa hari sebelum Jepang menyerah, URSS dan USA menerima tawanan perang Jepang di Korea yakni di garis batas paralel ke-38, namun demikian, garis batas paralel tersebut berubah menjadi garis demarkasi antara URSS dan USA. Hal tersebut yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Utara dibawah URSS yang mengembangkan paham sosial-komunis dan Korea Selatan di bawah pengaruh USA dengan paham liberal-kapitalis.

Sebab khusus lainnya, terjadinya perang Korea, yakni Sidang Umum PBB mengesahkan laporan hasil pemilihan Korsel pada Desember 1948 yang menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Di samping itu, USA juga mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang tersebut menghasilkan dua resolusi, yakni mendesak Korea Utara untuk menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas paralel ke-38, yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Memberi sanksi kepada Korea Utara bilamana tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korsel hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan, disebabkan Korea Utara memperoleh dukungan dari rakyat dan simpati URSS yang dipimpin oleh Kim Il Sung, bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib

rakyatnya. Selain itu, logistik milik Korea Utara terpecah di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dihancurkan. Keputusan tersebut membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan AS yang membuat US mendukung Korut untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan.

2. *Causes of the War*

In general, the Korean War was caused by the ideological rivalry between the USSR and the USA. After World War II ended in 1945, a cold war emerged between the Eastern Bloc, led by the USSR, and the Western Bloc, led by the USA. At that time, Korea became a contested area between the USSR and the USA. On August 10, 1945, just days before Japan's surrender, the USSR and the USA accepted the surrender of Japanese prisoners in Korea along the 38th parallel. However, this parallel line soon became the demarcation line between the USSR and the USA, leading to the establishment of two opposing ideological camps in Korea. North Korea, under the influence of the USSR, developed a socialist-communist ideology, while South Korea, under the influence of the USA, adopted a liberal-capitalist ideology.

Another specific cause of the Korean War was the United Nations General Assembly's endorsement of the results of the elections in South Korea in December 1948, which declared the South Korean government as the only legitimate government. Additionally, the USA proposed a meeting of the UN Security Council to discuss the situation in Korea. This meeting resulted in two resolutions: urging North Korea to cease hostilities and withdraw its forces back to the 38th parallel that separated North and South Korea, and threatening sanctions against North Korea if it ignored these demands. By August 1950, North Korea still had the upper hand over South Korea due to popular support and sympathy from the USSR, led by Kim Il Sung, who vowed to unify Korea and improve the lives of its people. Moreover, North Korea's logistics were scattered across several locations, making them difficult to destroy. This decision led North Korea to feel that its

rights were unrecognized by the UN and expressed its anger towards South Korea and the USA, prompting the USA to support North Korea's efforts to gain control over all of Korea through warfare.

3. Korea Utara Menyerang Korea Selatan

Korut menyerang Korsel secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38, hingga membuat Korut unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah, seperti Chuchon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting Korsel. Sebenarnya, target serangan tersebut adalah Seoul, ibu kota Korsel, namun demikian, cuaca buruk membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan. Tiga hari sejak perang meletus, Korsel berhasil direbut oleh Korut pada saat itu, 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan Korut. Meletusnya Perang Korea pun mengejutkan dunia. Satu bulan kemudian, pasukan AS memasuki medan perang atas nama Korsel, dengan misi memerangi komunisme.

3. North Korea Attacks South Korea

North Korea launched a surprise attack on South Korea by sending 75,000 troops across the 38th parallel. This unexpected assault allowed North Korea to gain the upper hand and capture several key regions, including Chuchon, Ongjin, and Kaesong, which were significant cities in South Korea. The primary target of the attack was Seoul, the capital of South Korea; however, adverse weather conditions prevented the execution of the assault on the city. Within three days of the outbreak of war, North Korean forces successfully seized control of South Korea, occupying 12 cities and 5,000 villages in the southern region. The eruption of the Korean War took the world by surprise. A month later, American troops entered the battlefield on behalf of South Korea, with a mission to combat the spread of communism.

J. Perang Ideologi Viet Nam 1955-1975

Perang Ideologi Vietnam atau Perang Indochina II terjadi antara 1955-1975. Kubu utama yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara merupakan bagian dari PD, yang melibatkan dua kubu ideologi besar, yakni Komunis dan SEATO, sebab Vietnam Selatan ataupun Vietnam Utara masing-masing mempunyai negara pendukung. Vietnam Selatan didukung oleh USA, Korsel, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina, ideologi liberal, sedangkan Vietnam Utara didukung oleh URRS, Tiongkok, Mongolia, dan Kuba, berideologi sosial komunis. Pertempuran yang berlangsung selama dua dekade tersebut diperkirakan menimbulkan total lebih dari tiga juta korban.³³

Sejak pertengahan abad ke-19, Vietnam telah menjadi jajahan Perancis. Pada 1941, Ho Chi Minh, yang merupakan seorang negarawan Vietnam, tokoh revolusi yang terinspirasi dari semangat komunisme dari China dan URRS, membentuk Viet Minh, sebuah lembaga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Perlawanan Viet Minh berhasil mengusir Perancis Agustus 1945, karena kekosongan kekuasaan, tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam (RDV), beliau menjabat presiden pertama, namun demikian, karena Perancis kembali datang ke Vietnam pada tahun berikutnya, akhirnya meletus Perang Perancis-Vietnam pada 19 Desember 1946.³⁴

Perang Perancis-Vietnam diakhiri dengan Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954, yang membagi Vietnam menjadi dua, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh Diem dengan

³³ Perang Vietnam: Latar Belakang, Keterlibatan AS, Akhir, dan Dampak", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/11/080000279/perang-vietnam-latar-belakang-keterlibatan-as-akhir-dan-dampak?page=all> diunduh Tanggal 28 Januari 2024

³⁴ Ibid.

ibu kota di Saigon. Setelah terpecah, Ngo Dinh Diem mengalahkan Kaisar Bao Dai dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955, serta mengangkat dirinya sebagai presiden. Sementara di Vietnam Utara, Pemerintah RDV mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Ho Chi Minh dan Ngo Dinh Diem sama-sama ingin menyatukan Vietnam, tetapi keduanya terhalang ideologi yang mereka yakini. Ho Chi Minh ingin menjadikan Vietnam negara komunis, sedangkan Ngo Dinh Diem ingin membangun negara ala Barat yang kemudian memicu terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina II antara Vietnam Selatan dan Viet Nam Utara. AS mulai terlibat dalam Perang Vietnam tahun 1955, saat Presiden AS, Dwight D. Eisenhower menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan, untuk memerangi sekutu US karena AS sangat takut dengan efek domino, bilamana Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikutinya.

Dengan pelatihan serta peralatan militer USA dan CIA, pasukan keamanan Ngo Dinh Diem segera bergerak menuju simpatisan Viet Minh di selatan, melawan Viet Cong (komunis Vietnam). Dalam operasinya, pasukan Vietnam Selatan menangkap sekitar 100.000 orang, banyak yang disiksa dan dieksekusi secara brutal. Sejak 1957, Viet Cong dan penentang rezim Ngo Dinh Diem mulai melawan balik. Pada Desember 1960, mereka kemudian membentuk Front Pembebasan Nasional (FPN), meskipun demikian sebagian besar anggota FPN bukan komunis, tetapi AS tetap menganggapnya sebagai boneka Vietnam Utara. Pada 1961, tim yang diterjunkan Presiden John F. Kennedy menyarankan agar USA meningkatkan bantuan militer serta ekonomi untuk membantu Ngo Dinh Diem untuk menghadapi ancaman Viet Cong. Pada 1962, pasukan USA yang berada di Vietnam Selatan telah mencapai 9.000 tentara, Setelah situasi terus memanas dan presiden pengganti John F. Kennedy juga melakukan hal yang sama. Pada November 1967, pasukan USA yang diterjunkan ke

Vietnam Selatan telah lebih dari 500.000 orang, 15.000 tewas dan 100.000 mengalami luka-luka. Korsel, Thailand, Australia, dan Selandia Baru juga mengerahkan pasukan untuk berperang di Vietnam Selatan, walaupun dalam skala lebih kecil dari USA, sedangkan Vietnam Utara memperkuat pertahanan udaranya dengan dukungan dari China dan URRS.³⁵

Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan USA yang meragukan pemerintah negaranya sendiri, bahkan, keterlibatan USA dalam Perang Vietnam ditentang oleh rakyat USA karena telah menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap tentara USA. Antara 1966 hingga 1973, gerakan anti-perang dan protes besar baik di Vietnam ataupun di USA bermunculan. Para demonstran yang melakukan aksi di luar gedung Pentagon menyuarakan bahwa warga sipil telah menjadi korban utama dan USA hanya mendukung kediktatoran di Saigon. Mereka menuntut agar tentara USA segera ditarik dari Vietnam, hasilnya tahun 1968, usulan USA untuk berunding disambut baik oleh Vietnam Utara, dan kedua kubu melakukan perundingan di Paris, tetapi perundingan tersebut, menemui jalan buntu. Setelah Presiden USA Richard Nixon mulai menjabat pada 1969, USA kembali melakukan manuver yang semakin memperparah kekejaman Perang Vietnam, kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap USA karena suasana Perang Vietnam sudah tidak terkendali lagi.³⁶

Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengguguli Selatan, yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih AS, sangat kecil. Meski telah mendapat bantuan dari China dan US, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh AS dengan mudah. Walaupun demikian, situasi berubah pada Januari 1973, saat AS dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri permusuhan terbuka antara

³⁵.Ibid.

³⁶.Ibid.

kedua negara, dan AS segera menarik pasukannya karena demonstrasi anti-perang semakin intens dilakukan di AS, namun demikian, setelah kekalahan AS di Perang Vietnam, pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut hingga 30 April 1975. Pasukan RDV merebut Saigon kemudian menamainya Kota Ho Chi Minh, setelah Vietnam Selatan menyerah, Perang Vietnam dapat berakhir, sehingga Vietnam Utara menjadi pemenang Perang Vietnam.³⁷

Dampak Perang Vietnam yang berlangsung dari 1 November 1955 hingga 30 April 1975, tersebut diperkirakan menewaskan lebih dari tiga juta orang, termasuk lebih dari 58.000 orang USA dan lebih dari dua juta korbannya adalah warga sipil Vietnam, sedangkan tiga juta korban lainnya mengalami luka dan 12 juta penduduk Vietnam terpaksa mengungsi. Peperangan telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi Vietnam, setelah pasukan komunis memenangi perang pada 1975, Vietnam Selatan dan Utara resmi disatukan sebagai Republik Sosialis Vietnam pada tahun berikutnya. Kendati demikian, kekerasan sporadis masih berlangsung selama 15 tahun berikutnya. Perang Vietnam juga berimbas pada AS yang menghabiskan lebih dari 120 miliar dollar untuk berperang. Pengeluaran besar-besaran tersebut menimbulkan inflasi, yang diperburuk dengan krisis minyak di seluruh dunia.³⁸

J. *The Ideological War in Vietnam 1955-1975*

The Vietnam War, also known as the Second Indochina War, took place from 1955 to 1975, involving a significant ideological conflict between South Vietnam and North Vietnam. This war was a part of the broader Cold War context, featuring two major ideological camps: communism and SEATO (Southeast Asia Treaty Organization). South Vietnam was supported by the United States, South Korea, Thailand, Australia, New Zealand, and the Philippines, all upholding liberal ideologies. In contrast, North Vietnam received backing from the USSR, China, Mongolia, and Cuba, embracing a socialist communist

³⁷.Ibid.

³⁸.Ibid.

framework. The prolonged conflict resulted in over three million casualties.

Since the mid-19th century, Vietnam had been a French colony. In 1941, Ho Chi Minh, a Vietnamese statesman and revolutionary leader inspired by communist ideals from China and the USSR, founded Viet Minh, a coalition of nationalists and communist groups advocating for Vietnam's independence. Viet Minh successfully expelled the French in August 1945, and on September 2, 1945, Ho Chi Minh declared the independence of the Democratic Republic of Vietnam (DRV), becoming its first president. However, due to the return of French forces the following year, the First Indochina War erupted on December 19, 1946.

The First Indochina War ended with the Geneva Accords on July 21, 1954, which divided Vietnam into two parts: North Vietnam, led by Ho Chi Minh with its capital in Hanoi, and South Vietnam, ruled by Emperor Bao Dai and Prime Minister Ngo Dinh Diem, with its capital in Saigon. After the division, Ngo Dinh Diem defeated Emperor Bao Dai in a referendum, proclaiming the Republic of Vietnam in October 1955 and assuming the presidency. Meanwhile, the DRV government announced a constitution with a communist character. Both Ho Chi Minh and Ngo Dinh Diem aimed to unify Vietnam, but their conflicting ideologies created a barrier; Ho Chi Minh sought to establish a communist state, while Ngo Dinh Diem aimed for a Western-style nation, leading to the Vietnam War.

The U.S. became involved in the Vietnam War in 1955 when President Dwight D. Eisenhower promised support to South Vietnam in its fight against communism, motivated by the fear of the domino effect – if Vietnam fell to communism, other Southeast Asian nations might follow. With training and military equipment from the U.S. and the CIA, Ngo Dinh Diem's security forces began targeting Viet Minh sympathizers in the south, confronting the Viet Cong (Vietnamese communists). During these operations, South Vietnamese forces captured around 100,000 individuals, many of whom were brutally tortured and executed.

From 1957 onward, the Viet Cong and opponents of the Diem regime began to push back. In December 1960, they formed the National Front for the Liberation of South Vietnam (NLF), which, despite most

of its members not being communists, was viewed by the U.S. as a proxy for North Vietnam. In 1961, President John F. Kennedy's advisors recommended increasing military and economic assistance to help Ngo Dinh Diem face the Viet Cong threat. By 1962, U.S. troops in South Vietnam numbered 9,000, and this figure grew significantly under Kennedy's successor.

By November 1967, U.S. troop numbers in South Vietnam had exceeded 500,000, with around 15,000 fatalities and 100,000 injuries reported. South Korea, Thailand, Australia, and New Zealand also deployed troops to support South Vietnam, albeit on a smaller scale. Meanwhile, North Vietnam bolstered its air defenses with assistance from China and the USSR.

Over time, many U.S. soldiers began to question their government's actions. The U.S. involvement in the Vietnam War faced substantial opposition domestically due to the physical and psychological toll on U.S. troops. Between 1966 and 1973, significant anti-war movements and protests emerged both in Vietnam and the United States. Demonstrators outside the Pentagon emphasized that civilians were the primary victims of the conflict and condemned U.S. support for the dictatorship in Saigon, demanding a withdrawal of U.S. forces. In 1968, the U.S. proposal for negotiations was welcomed by North Vietnam, leading to peace talks in Paris, but these discussions ultimately stalled.

As President Richard Nixon took office in 1969, U.S. maneuvers intensified the brutality of the Vietnam War, drawing international condemnation as the situation spiraled out of control. After years of conflict, North Vietnam realized that defeating the South, backed by advanced U.S. military forces, was an uphill battle. Despite receiving aid from China and the USSR, their resistance was continually thwarted by U.S. forces.

In January 1973, the U.S. and North Vietnam signed a peace agreement that officially ended open hostilities between the two nations, leading to the withdrawal of U.S. troops amid escalating anti-war demonstrations in the U.S. However, fighting between North and South Vietnam continued until April 30, 1975, when DRV forces captured Saigon, renaming it Ho Chi Minh City after the surrender of

South Vietnam. This marked the conclusion of the Vietnam War, resulting in North Vietnam's victory.

The Vietnam War, which spanned from November 1, 1955, to April 30, 1975, is estimated to have caused over three million deaths, including more than 58,000 Americans, with over two million civilian casualties in Vietnam. An additional three million were injured, and 12 million Vietnamese were displaced. The war devastated Vietnam's infrastructure and economy. Following the communist victory in 1975, North and South Vietnam were officially reunified as the Socialist Republic of Vietnam the following year. Sporadic violence persisted for the next 15 years. The war also significantly impacted the U.S., which spent over \$120 billion on the conflict, leading to inflation exacerbated by a global oil crisis.

K. Pembentukan NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Pada tahun 1949, USA, Canada dan beberapa negara barat membentuk Organisasi Atlantik Udara (NATO) yang merupakan aliansi militer masa damai pertama yang diikuti USA di luar belahan barat. Setelah kehancuran PD II, negara-negara Eropa berjuang membangun kembali perekonomian dan keamanan mereka, membutuhkan bantuan kebangkitan Jerman atau serangan URRS. USA memandang Eropa yang ekonominya kuat, dipersenjatai, dan terintegrasi untuk mencegah ekspansi komunis di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri USA mengusulkan bantuan ekonomi skala besar ke Eropa, tidak hanya memfasilitasi integrasi ekonomi Eropa, tetapi juga mempromosikan gagasan kepentingan dan kerja sama antara USA dan Eropa.³⁹

Pada tahun 1947-1948, serangkaian peristiwa menyebabkan negara-negara Eropa Barat menjadi khawatir terhadap keamanan fisik dan politik mereka dan USA menjadi lebih terlibat dalam urusan Eropa. Perang saudara yang sedang berlangsung di Yunani, ketegangan di Turki, mendorong USA

³⁹ Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), 1949 <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato>, diunduh Tanggal 22 Desember 2023

memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada kedua negara, serta negara lain yang berjuang melawan upaya penaklukan. Kudeta yang disponsori URSS di Cekoslowakia mengakibatkan pemerintahan komunis berkuasa di Jerman. Perhatian juga terfokus pada pemilu di Italia karena partai komunis memperoleh perolehan signifikan di kalangan pemilih Italia. Selain itu, kejadian di Jerman juga menimbulkan kekhawatiran, pendudukan dan pemerintahan Jerman setelah perang telah lama diperdebatkan, dan pada pertengahan tahun 1948, Perdana Menteri US Joseph Stalin memilih untuk menguji tekad barat dengan menerapkan blokade terhadap Berlin Barat, yang saat itu berada di bawah kendali bersama USA, Inggris, dan Prancis. dikelilingi oleh Jerman Timur yang dikuasai URSS. Krisis Berlin tersebut menyebabkan URSS dan USA ke ambang konflik, meskipun pengangkutan udara besar-besaran untuk memasok pasokan ke kota tersebut selama blokade membantu mencegah konfrontasi langsung. Peristiwa tersebut menyebabkan USA semakin waspada terhadap kemungkinan negara-negara Eropa Barat mengatasi masalah keamanan mereka dengan melakukan negosiasi dengan URSS, karena itu USA mempertimbangkan kemungkinan pembentukan aliansi Eropa-Amerika yang mengikat USA untuk memperkuat keamanan Eropa Barat.⁴⁰

Negara-negara Eropa Barat menyetujui solusi keamanan kolektif, untuk menanggapi ketegangan dan masalah keamanan, perwakilan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris Raya, Perancis, Belgia, Belanda dan Luksemburg membentuk aliansi militer dan bulan Maret 1948 dan menandatangani Perjanjian Brussel. Perjanjian tersebut berisikan pertahanan kolektif, bilamana salah satu negara tersebut diserang, negara lain wajib membantu mempertahankannya. Pada saat yang sama, USA melembagakan rancangan masa damai, meningkatkan belanja militer, dan meminta Kongres Partai Republik yang secara historis terisolasi untuk mempertimbangkan aliansi militer

⁴⁰.Ibid.

dengan Eropa. Pada bulan Mei 1948, Senator Partai Republik Arthur H. Vandenburg mengusulkan sebuah resolusi yang menyarankan agar Presiden mengupayakan perjanjian keamanan dengan Eropa Barat yang akan mematuhi piagam PBB tetapi berada di luar Dewan Keamanan tempat US memegang hak veto. Resolusi Vandenburg disahkan, dan negosiasi Perjanjian Atlantik Utara dimulai.⁴¹

Meskipun terdapat kesepakatan umum mengenai konsep perjanjian tersebut, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk menentukan ketentuan pastinya. Kongres USA mendukung upaya pembentukan aliansi internasional, namun demikian tetap mengkhawatirkan dalam perjanjian tersebut. Negara-negara Eropa Barat menginginkan jaminan bahwa USA melakukan intervensi secara otomatis bilamana terjadi serangan, namun berdasarkan Konstitusi USA, kekuasaan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres. Negosiasi dilakukan untuk meyakinkan negara-negara Eropa namun tidak mewajibkan USA untuk bertindak dengan cara yang melanggar hukum USA sendiri. Selain itu, kontribusi Eropa terhadap keamanan kolektif memerlukan bantuan militer berskala besar dari USA untuk membangun kembali kemampuan pertahanan Eropa Barat. Sementara negara-negara Eropa menginginkan hibah dan bantuan individual, USA ingin bantuan tersebut tergantung pada koordinasi regional. Isu ketiga adalah pertanyaan tentang ruang lingkup. Para penandatangan Perjanjian Brussel lebih suka bahwa keanggotaan dalam aliansi tersebut dibatasi hanya pada anggota perjanjian tersebut ditambah USA. Para perunding USA merasa ada manfaat lebih dari perluasan perjanjian baru tersebut dengan mencakup negara-negara Atlantik Utara, termasuk Kanada, Islandia, Denmark, Norwegia, Irlandia, dan Portugal. Bersama-sama, negara-negara tersebut menguasai wilayah yang menjadi

⁴¹.Ibid.

jembatan antara pantai seberang Samudera Atlantik, yang akan memfasilitasi aksi militer jika diperlukan.⁴²

Hasil perundingan ekstensif tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tahun 1949. Dalam perjanjian tersebut, USA, Kanada, Belgia, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Inggris sepakat untuk menganggap serangan terhadap satu negara sebagai serangan terhadap semua negara, bersamaan dengan konsultasi mengenai ancaman dan masalah pertahanan. Pengaturan pertahanan kolektif tersebut hanya secara formal diterapkan pada serangan terhadap negara penandatangan yang terjadi di Eropa atau USA; tidak termasuk konflik di wilayah kolonial. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, sejumlah negara penandatangan mengajukan permintaan bantuan militer ke USA. Kemudian pada tahun 1949, Presiden Truman mengusulkan program bantuan militer, dan Program Bantuan Pertahanan Bersama disahkan oleh Kongres USA pada bulan Oktober, mengalokasikan sekitar \$1,4 miliar dolar untuk tujuan membangun pertahanan Eropa Barat.⁴³

Setelah pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, pecahnya Perang Korea menyebabkan para anggota bergerak cepat untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kekuatan pertahanan mereka melalui markas terpusat. Serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan pada saat tersebut secara luas dipandang sebagai contoh agresi komunis yang diarahkan oleh Moskow, sehingga USA memperkuat komitmen pasukannya ke Eropa untuk memberikan jaminan terhadap agresi URSS di benua Eropa. Pada tahun 1952, para anggota sepakat untuk memasukkan Yunani dan Turki ke dalam NATO dan menambahkan Republik Federal Jerman pada tahun 1955. Masuknya Jerman Barat menyebabkan URSS membalas dengan aliansi regionalnya sendiri, yang berbentuk Organisasi

⁴².Ibid.

⁴³.Ibid.

Perjanjian Warsawa dan mencakup NATO. Negara-negara satelit URSS di Eropa Timur sebagai anggota.

Pengaturan pertahanan kolektif di NATO berfungsi untuk menempatkan seluruh Eropa Barat di bawah “payung nuklir” USA. Pada tahun 1950-an, salah satu doktrin militer pertama NATO muncul dalam bentuk “pembalasan besar-besaran,” atau gagasan bahwa bilamana ada anggota yang diserang, USA akan membalas dengan serangan nuklir skala besar. Ancaman dari bentuk respons tersebut dimaksudkan sebagai pencegah agresi URSS di benua tersebut. Meskipun dibentuk sebagai respons terhadap urgensi perkembangan PD, NATO telah bertahan hingga konflik tersebut berakhir, dan keanggotaannya bahkan bertambah hingga mencakup beberapa negara bekas URSS. Aliansi tersebut tetap menjadi aliansi militer masa damai terbesar di dunia.⁴⁴

K. Formation of NATO (North Atlantic Treaty Organization)

In 1949, the United States, Canada, and several Western European nations established the North Atlantic Treaty Organization (NATO), marking the first peacetime military alliance the U.S. had engaged in outside the Western Hemisphere. In the aftermath of World War II, European countries struggled to rebuild their economies and ensure security against potential threats from the USSR, particularly with regard to Germany's resurgence. The U.S. envisioned a strong, armed, and integrated Europe as a bulwark against the global spread of communism. The U.S. Secretary of State proposed significant economic aid to Europe, not only to facilitate economic integration but also to promote cooperation and shared interests between the U.S. and Europe.

Between 1947 and 1948, a series of events heightened Western Europe's concerns about their physical and political security, prompting increased U.S. involvement in European affairs. The ongoing civil war in Greece and tensions in Turkey led the U.S. to provide economic and military aid to both countries and others resisting conquest. A Soviet-sponsored coup in Czechoslovakia resulted in a communist government, raising alarms about the growing influence of

⁴⁴.Ibid.

communism in Europe. Attention also turned to the elections in Italy, where the Communist Party was gaining traction among voters. Additionally, the occupation and governance of Germany after the war became contentious, and by mid-1948, Soviet leader Joseph Stalin tested Western resolve by imposing a blockade of West Berlin, which was jointly controlled by the U.S., the U.K., and France, surrounded by Soviet-controlled East Germany. The Berlin Crisis brought the U.S. and the USSR to the brink of conflict, although massive airlifts supplying the city during the blockade helped avoid direct confrontation. This situation made the U.S. wary of Western European nations potentially negotiating their security issues with the USSR, leading to considerations for forming a U.S.-European alliance to strengthen Western security.

In response to rising tensions, Western European countries sought a collective security solution. Representatives from the U.K., France, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg formed a military alliance, signing the Brussels Treaty in March 1948. This treaty included provisions for collective defense, stating that if one of the signatory nations were attacked, the others would be obliged to assist in its defense. Concurrently, the U.S. established a draft for peace, increased military spending, and urged the historically isolationist Republican Congress to consider a military alliance with Europe. In May 1948, Republican Senator Arthur H. Vandenberg proposed a resolution encouraging the President to pursue a security agreement with Western Europe that would comply with the UN Charter but operate outside the Security Council where the U.S. held veto power. This resolution passed, leading to negotiations for the North Atlantic Treaty.

Although there was general agreement on the concept of the treaty, determining its specific provisions took several months. While Congress supported the formation of an international alliance, concerns persisted. Western European countries sought guarantees that the U.S. would automatically intervene in the event of an attack; however, according to the U.S. Constitution, the power to declare war resided with Congress. Negotiations aimed to reassure European nations without obligating the U.S. to actions that would contravene its own laws. Additionally, European contributions to collective security

necessitated substantial military aid from the U.S. to rebuild Western Europe's defense capabilities. While European nations preferred individual grants and assistance, the U.S. sought to link this aid to regional coordination. A third issue was the scope of the alliance. Signatories of the Brussels Treaty favored limiting membership to existing signatories plus the U.S. U.S. negotiators argued for the benefits of expanding the new treaty to include North Atlantic countries like Canada, Iceland, Denmark, Norway, Ireland, and Portugal, creating a coalition that would facilitate military action if necessary.

The extensive negotiations culminated in the signing of the North Atlantic Treaty in 1949. The U.S., Canada, Belgium, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, and the U.K. agreed to treat an attack against one nation as an attack against all, along with committing to consult on defense threats and issues. This collective defense arrangement was formally applied only to attacks occurring on the territory of signatory nations in Europe or the U.S., excluding conflicts in colonial areas. After the treaty was signed, several signatory countries requested military assistance from the U.S. Subsequently, in 1949, President Truman proposed a military aid program, and the Joint Defense Assistance Program was approved by the U.S. Congress in October, allocating approximately \$1.4 billion to build up Western Europe's defenses.

Following the establishment of NATO, the outbreak of the Korean War prompted member states to swiftly integrate and coordinate their defense forces through a centralized command. The North Korean invasion of South Korea was widely viewed as an example of communist aggression directed by Moscow, leading the U.S. to reinforce its troop commitments in Europe as a deterrent against potential Soviet aggression on the continent. In 1952, NATO members agreed to include Greece and Turkey in the alliance, followed by the admission of the Federal Republic of Germany in 1955. The inclusion of West Germany provoked a Soviet response, resulting in the formation of the Warsaw Pact, which included Eastern European Soviet satellite states as members.

NATO's collective defense arrangement effectively placed all of Western Europe under the "nuclear umbrella" of the United States. In the 1950s, one of NATO's first military doctrines emerged in the form of "massive retaliation," which posited that in the event of an attack on a member state, the U.S. would respond with a large-scale nuclear strike. This threat was intended as a deterrent against Soviet aggression on the continent. Although NATO was formed in response to the urgent developments of the Cold War, it has endured beyond that conflict, even expanding its membership to include several former Soviet states. The alliance remains the largest peacetime military coalition in the world.

L. Pembentukan Pakta Warsawa 1955

Pasca berakhirnya PD II, terdapat 2 (dua) kekuatan besar yang saling bersebrangan ideologi yakni URSS dan USA. Kedua negara tersebut saling berebut pengaruh kekuasaan di negara-negara dunia dengan cara membentuk aliansi-aliansi pertahanan. Pakta Warsawa (PW) merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis-sosialis di kawasan Eropa Timur, yang terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara Blok Timur di Warsawa, Polandia. Latar belakang pembentukan PW tidak dapat lepas dari keputusan USA dan sekutunya untuk mendirikan aliansi pertahanan NATO, karena kekhawatiran URSS dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Di samping itu, URSS menganggap USA berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer (remiliterisasi) Jerman Barat dengan memasukannya ke aliansi NATO. Pembentukan PW pada awalnya diusulkan oleh Perdana Menteri URSS Nikita Khrushchev, sedangkan realisasi pembentukan dilaksanakan melalui pertemuan antara negara Blok Timur di Warsawa pada 14 Mei 1955. Perjanjian Damai PD II disebut dengan PW semula beranggotakan 8 (delapan) negara, bertujuan mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerja sama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur, saling membantu bilamana salah satu negara anggota PW mengalami

masalah pertahanan maupun keamanan. Pembubaran PW berhubungan dengan krisis yang dialami oleh URSS tahun 1990-an, yang disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh URSS menyebabkan perpecahan internal PW, akhirnya secara resmi PW dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antarnegara anggota PW di kota Praha, Ceko.⁴⁵

L. Formation of the Warsaw Pact in 1955

After the conclusion of World War II, two major powers emerged with opposing ideologies: the USSR and the USA. These nations vied for influence across the globe by forming various defense alliances. The Warsaw Pact (WP) was a military alliance of communist-socialist countries in Eastern Europe, established on May 14, 1955, during a meeting of Eastern Bloc nations in Warsaw, Poland. The background for the formation of the WP was closely tied to the U.S. and its allies' establishment of NATO, which raised concerns in the USSR and Eastern Bloc nations about the potential threat NATO posed to their security. Additionally, the USSR feared that the U.S. was seeking to remilitarize West Germany by incorporating it into NATO. The proposal to create the Warsaw Pact was initially put forward by Soviet Premier Nikita Khrushchev, and the formal establishment was realized through discussions among Eastern Bloc countries in Warsaw on May 14, 1955. Initially, the Warsaw Pact comprised eight member states, aiming to counterbalance NATO's military alliance, enhance defense cooperation among Eastern Bloc nations, and provide mutual assistance in times of defense or security issues. The member states included the USSR, Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, and Albania. The dissolution of the Warsaw Pact was connected to the crises faced by the USSR in the 1990s, driven by a wave of democratic revolutions across Eastern Europe and internal divisions among communist countries. The internal crises within the USSR led to fractures within the Warsaw Pact, which ultimately

⁴⁵ Pakta Warsawa: Latar Belakang, Tujuan, dan Pembubarannya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/090000969/pakta-warsawa--latar-belakang-tujuan-dan-pembubarannya>, diunduh Tanggal 22 Desember 2023

resulted in its official dissolution on March 31, 1991, during a meeting of member states in Prague, Czech Republic.

M. Pembubaran URSS Digantikan Federasi Rusia (FR)

Pada tahun 1990-an terjadi perubahan geopolitik di fora internasional yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Bubarnya URSS membuktikan berakhirnya “Perang Dingin” dan terbentuknya Federasi Rusia (FR). URSS dibentuk pada tanggal 30 Desember 1922, dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 1991 dan secara resmi Federasi Rusia (FR) sebagai “pengganti sah” (legal successor) URSS.⁴⁶

M. *Dissolution of the USSR and the Establishment of the Russian Federation*

In the 1990s, significant geopolitical changes occurred on the international stage, marked by the fall of the Berlin Wall. The dissolution of the USSR signified the end of the Cold War and led to the establishment of the Russian Federation (RF) as the legal successor to the USSR. The USSR was formed on December 30, 1922, and officially declared its dissolution on December 25, 1991. Following the collapse, the Russian Federation emerged as the successor state, inheriting the USSR's international obligations and responsibilities. This transition represented a monumental shift in global politics, as the ideological divide that characterized the Cold War era began to diminish, paving the way for new political and economic landscapes in the post-Soviet space. The end of the USSR not only transformed Russia but also had far-reaching impacts on former Soviet republics, Eastern Europe, and the broader international community, influencing global relations in the years that followed.

⁴⁶ Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
<https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu> diunduh Tanggal 22 September 24

N. Kronologi Bentrok Pesawat Tempur USA dengan Rusia

Walaupun URRS telah bubar sebagaimana disebutkan diatas dan digantikan oleh FR, masih terjadi bentrokan antara pesawat udara USA dengan pesawat udara FR. Pada tanggal 22 Juli 24, dikejutkan kabar bentrokan antara dua pesawat pengebom jarak jauh USA dengan pesawat tempur Rusia yang terjadi diwilayah laut Barents, Artik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihaknya mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan negaranya, karena terdeteksi serangan itu, militer Rusia mengerahkan jet tempur canggihnya MiG-29 dan MiG-31. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia pada saat jet-jet tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis USA menyesuaikan jalur penerbangan mereka, kemudian berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia, MiG-29 dan MiG-31 mengidentifikasi pesawat pengebom strategis milik USA bertipe B-52H.⁴⁷

Pada saat pesawat tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis USA menjauh dari perbatasan Negara Federasi Rusia, kemudian, Kemhan Rusia menuturkan, pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan penerbangan sesuai dengan aturan internasional yakni tentang penggunaan wilayah udara di perairan netral. Sementara, Departemen Pertahanan USA (Pentagon) belum menanggapi permintaan komentar Reuters terkait insiden itu. Sebelumnya, Rusia pernah melaporkan insiden serupa ketika pesawat-pesawatnya berhadapan dengan pesawat militer NATO yang terbang dekat perbatasan.⁴⁸

⁴⁷ Kronologi Bentrok Pesawat Tempur AS dengan Rusia
<https://www.rri.co.id/internasional/844937/kronologi-bentrok-pesawat-tempur-as-dengan-rusia> diunduh Tanggal 10 Oktober 24

⁴⁸ Kronologi Bentrok Pesawat Tempur AS dengan Rusia
<https://www.rri.co.id/internasional/844937/kronologi-bentrok-pesawat-tempur-as-dengan-rusia> diunduh Tanggal 10 Oktober 24

N. Chronology of Air Conflicts between the USA and Russia

Despite the dissolution of the USSR and its replacement by the Russian Federation, tensions between U.S. and Russian aircraft have continued. On July 22, an incident was reported involving a confrontation between two U.S. long-range bombers and Russian fighter jets over the Barents Sea in the Arctic region. The Russian Ministry of Defense stated that it detected airborne targets approaching its borders and subsequently deployed advanced MiG-29 and MiG-31 fighter jets in response. According to the Russian Ministry of Defense, as the Russian fighter jets approached, the U.S. strategic bombers adjusted their flight paths and turned away from the Russian Federation's borders. The MiG-29 and MiG-31 identified the U.S. strategic bombers as B-52Hs.

As the Russian fighter aircraft closed in, the U.S. bombers retreated from the vicinity of the Russian Federation's border. The Russian Defense Ministry emphasized that the actions of its fighter jets were in accordance with international regulations regarding the use of airspace over neutral waters. Meanwhile, the U.S. Department of Defense (Pentagon) had not responded to Reuters' request for comment regarding the incident. This incident was not isolated; Russia had previously reported similar encounters involving its military aircraft facing NATO aircraft flying close to its borders, highlighting ongoing geopolitical tensions and the complex dynamics of airspace sovereignty in the region.

O. Rusia Keraahkan Jet Tempur untuk Cegat Pesawat USA di Perbatasan Kutub Utara

Pada tanggal 21 Juli 24, Rusia mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan jet-jet tempurnya untuk mencegat dua pesawat udara pengebom jarak jauh militer USA. Pesawat milik militer USA tersebut mencoba mendekati perbatasan Rusia di atas laut Barents di Kutub Utara. Menurut kementerian Peertahanan Rusia di platform media sosial Telegram, awak pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target udara tersebut,

sebagai sepasang pesawat pengebom strategis B-52H Angkatan Udara USA.⁴⁹

Kementerian pertahanan Rusia juga menyebutkan, bahwa pesawat yang ditembak jatuh tersebut adalah pesawat tempur MiG-29 dan MiG-31. "Ketika pesawat tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis USA berbalik arah dari Perbatasan Negara Federasi Rusia. Menurut New York Post, USA secara rutin melakukan penerbangan di atas perairan internasional. Rusia baru-baru ini menanggapi latihan tersebut dengan lebih agresif, menuduh USA bulan Juni 2024 menggunakan penerbangan drone pengintai, di atas perairan netral di Laut Hitam untuk membantu Ukraina menyerang Krimea yang diduduki Rusia. Bulan lalu, Moskow memperingatkan adanya konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO.⁵⁰

Menteri pertahanan Rusia, memerintahkan para pejabatnya untuk menyiapkan tanggapan terhadap drone USA di atas Laut Hitam, dalam sebuah peringatan yang jelas bahwa mungkin akan diperlukan tindakan tegas, untuk menangkal pesawat pengintai USA. Washington dan Moskow pernah berselisih sebelumnya karena masalah penerbangan drone. Pada Maret 2023, sebuah jet tempur SU-27 Rusia merusak drone MQ-9 Reaper milik USA menyebabkannya jatuh ke Laut Hitam yang merupakan bentrokan langsung pertama, antara pasukan Federasi Rusia (FR) dan USA sejak PD.⁵¹

⁴⁹ Rusia Keraahkan Jet Tempur untuk Cegat Pesawat Amerika Serikat di Perbatasan Kutub Utara <https://www.jawapos.com/internasional/014892350/rusia-kerahkan-jet-tempur-untuk-cegat-pesawat-amerika-serikat-di-perbatasan-kutub-utara> diunduh Tanggal 10 Oktober 24

⁵⁰ Rusia Keraahkan Jet Tempur untuk Cegat Pesawat Amerika Serikat di Perbatasan Kutub Utara <https://www.jawapos.com/internasional/014892350/rusia-kerahkan-jet-tempur-untuk-cegat-pesawat-amerika-serikat-di-perbatasan-kutub-utara> diunduh Tanggal 10 Oktober 24

⁵¹.Ibid.

O. Russia Deploys Fighter Jets to Intercept U.S. Aircraft at the Arctic Border

On July 21, 2024, Russia announced that it had deployed fighter jets to intercept two U.S. military long-range bombers approaching Russian borders over the Barents Sea in the Arctic region. According to the Russian Ministry of Defense, the Russian fighter pilots identified the airborne targets as a pair of U.S. Air Force B-52H strategic bombers.

The Russian Ministry of Defense reported that the intercepting aircraft were MiG-29 and MiG-31 fighters. As the Russian jets approached, the U.S. strategic bombers turned away from the borders of the Russian Federation. The New York Post noted that the U.S. routinely conducts flights over international waters, prompting Russia to respond more aggressively to such exercises. Recently, Russia accused the U.S. of using reconnaissance drone flights over neutral waters in the Black Sea to assist Ukraine in attacking Russian-occupied Crimea in June 2024.

In response to the situation, the Russian Defense Minister ordered officials to prepare a response to U.S. drone activity over the Black Sea, issuing a clear warning that decisive action might be required to counter U.S. surveillance aircraft. The U.S. and Russia have had previous disputes over drone flights, with a notable incident in March 2023 when a Russian SU-27 fighter jet damaged a U.S. MQ-9 Reaper drone, causing it to crash into the Black Sea. This incident marked the first direct confrontation between the forces of the Russian Federation and the U.S. since the Cold War.

P. Pesawat Pengebom AS Dekati Perbatasan, Rusia Keraahkan Jet Tempur

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 22 Juli 24 terjadi insiden pesawat tempur Rusia mencegat dua pesawat pesawat udara pengebom strategis USA yang akan melanggar perbatasan negara tersebut di atas wilayah Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan setelah mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia, militer Rusia mengerahkan jet tempur MiG-29 dan MiG-31. Jet-jet tempur MiG mengidentifikasi pesawat yang menjadi target

udara tersebut sebagai dua pesawat pengebom strategis B-52H milik USA. Pada saat jet-jet tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis USA menyesuaikan jalur penerbangan mereka, kemudian berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia. Sebelumnya, Rusia telah melaporkan insiden serupa ketika pesawat-pesawatnya berhadapan dengan pesawat militer dari negara-negara NATO yang terbang dekat perbatasannya, seiring meningkatnya ketegangan akibat perang Rusia dan Ukraina.⁵²

P. U.S. Bombers Approach Border, Russia Deploys Fighter Jets

On July 22, 2024, an incident occurred involving Russian fighter jets intercepting two U.S. strategic bombers that were approaching the borders of Russia over the Barents Sea. The Russian Ministry of Defense reported that after detecting aerial targets nearing the Russian border, the military deployed MiG-29 and MiG-31 fighter jets. The MiG fighters identified the airborne targets as two U.S. B-52H strategic bombers. As the Russian jets approached, the U.S. bombers adjusted their flight paths and turned away from the borders of the Russian Federation. This incident follows similar reports from Russia of encounters between its aircraft and military planes from NATO countries operating near its borders, amid rising tensions stemming from the ongoing conflict between Russia and Ukraine.

Q. Biden Izinkan Ukraina Serang Rusia dengan Senjata AS

Menurut pejabat yang dilansir CNN tanggal 31 Mei 24, Biden mengizinkan serangan terbatas setelah Rusia membuat kemajuan signifikan di sekitar bagian timur laut negara dekat perbatasan Rusia. Beliau mengarahkan timnya untuk memastikan bahwa Ukraina dapat menggunakan senjata yang dipasok USA untuk serangan balasan di Kharkiv sehingga Ukraina dapat membalas serangan pasukan Rusia atau

⁵² Tegang! Pesawat Pengebom AS Dekati Perbatasan, Rusia Keraahkan Jet Tempur" <https://news.detik.com/internasional/d-7450630/tegang-pesawat-pengebom-as-dekati-perbatasan-rusia-kerahkan-jet-tempur> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

menyerang mereka. Pelonggaran pembatasan tersebut membuktikan perubahan kebijakan lama dan terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional dari sekutu dekat USA, namun demikian wilayah tersebut terbatas pada wilayah di sekitar Kharkiv. Pasukan Rusia, depot amunisi dan pusat logistik kini dapat menjadi sasaran artileri dan roket yang disediakan USA di seberang perbatasan dari Kharkiv di Rusia barat. Pemerintah USA juga tegas tidak membiarkan Ukraina menggunakan amunisi paling tangguh yang pernah diberikan kepada Rusia yakni rudal jarak jauh yang dikenal sebagai ATACMS yang dapat mencapai target sejauh 200 mil, atau 300 kilometer. Ukraina telah diizinkan untuk menggunakan senjata anti-pesawat USA untuk mencegah ancaman pesawat Rusia yang terbang di wilayah udara Ukraina dan Rusia dan telah berhasil melakukannya, namun demikian larangan tersebut telah menghalangi Ukraina untuk menargetkan pesawat Rusia yang berada di wilayah Rusia.⁵³

Menteri Luar Negeri Antony Blinken secara terbuka mengisyaratkan kesediaan untuk mengubah kebijakan pemerintah ketika beliau mencatat bahwa USA dapat "menyesuaikan dan menyesuaikan" posisinya. Ciri khas dukungan USA terhadap Ukraina "adalah beradaptasi seiring dengan perubahan kondisi, perubahan medan perang, sebagaimana apa yang dilakukan Rusia untuk meningkatkan eskalasi agresinya, USA juga telah beradaptasi dan menyesuaikan diri. Sehari sebelumnya, para pemimpin utama Eropa mengisyaratkan bahwa mereka telah mengubah posisi. Berbicara pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz Presiden Prancis Emmanuel Macron menguraikan bahwa senjata Prancis yang dikirim ke Ukraina, termasuk rudal jarak jauh, diizinkan untuk menargetkan pangkalan di Rusia."⁵⁴

⁵³ Biden Izinkan Ukraina Serang Rusia dengan Senjata AS
<https://news.detik.com/internasional/d-7366535/biden-izinkan-ukraina-serang-rusia-dengan-senjata-as> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

⁵⁴ Ibid.

Q. Biden Authorizes Ukraine to Strike Russia with U.S. Weapons

According to officials reported by CNN on May 31, 2024, President Biden has authorized limited strikes by Ukraine after Russia made significant advances in the northeastern part of the country near the Russian border. He directed his team to ensure that Ukraine could use U.S.-supplied weapons to conduct counterattacks in Kharkiv, enabling Ukraine to retaliate against Russian forces or strike them directly.

This easing of restrictions marks a shift from previous policy and occurs amid increasing international pressure from U.S. allies, though the permitted strikes are limited to the area surrounding Kharkiv. Russian troops, munitions depots, and logistics centers can now be targeted by artillery and rockets provided by the U.S. from across the border in western Russia. The U.S. government has made it clear that it will not allow Ukraine to use the most advanced munitions provided to Russia, specifically long-range missiles known as ATACMS, which can reach targets up to 200 miles (300 kilometers) away.

Ukraine has been authorized to use U.S. anti-aircraft weapons to counter threats from Russian aircraft operating in Ukrainian and Russian airspace, which has proven effective. However, the restrictions previously in place hindered Ukraine's ability to target Russian aircraft within Russian territory.

Secretary of State Antony Blinken has publicly indicated a willingness to adjust U.S. policy, noting that the U.S. can "adapt and adjust" its stance. The hallmark of U.S. support for Ukraine is its adaptability in response to changing conditions on the battlefield, as seen with Russia's escalation of aggression. The day before, leading European leaders hinted at a similar shift in their positions. During a joint press conference, French President Emmanuel Macron detailed that French weapons sent to Ukraine, including long-range missiles, are permitted to target bases within Russia.

R. Rusia akan Keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, Apa Dampaknya?

Rusia menyatakan akan mundur dari Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) pada tahun 2024 dan kemudian membangun stasiun sendiri sebagai gantinya. Roskosmos, Yuri

Borisov Kepala Badan Antariksa Rusia mengatakan lembaganya akan tetap menjalankan semua kewajiban di ISS hingga dua tahun mendatang. USA dan Rusia, bersama dengan mitra lainnya, telah bekerja sama di ISS sejak tahun 1998, namun demikian hubungan menjadi buruk sejak Rusia menginvasi Ukraina. Rusia sebelumnya telah mengancam akan keluar dari proyek tersebut karena sanksi negara-negara Barat terhadap mereka. ISS adalah sebuah proyek bersama yang melibatkan lima badan antariksa. Stasiun ruang angkasa tersebut telah mengorbit di sekitar Bumi sejak tahun 1998 dan telah digunakan untuk melakukan ribuan eksperimen ilmiah. Stasiun tersebut disetujui untuk beroperasi hingga 2024, tetapi USA ingin memperpanjangnya selama enam tahun lagi dengan persetujuan semua mitra. Pada saat pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Borisov menyebut keputusan diambil untuk keluar dari proyek tersebut setelah tahun 2024. Beliau berpikir, akan mulai menyusun stasiun orbit Rusia, seraya menambahkan bahwa stasiun baru tersebut adalah prioritas utama agensinya. Belum jelas apa arti keputusan Rusia tersebut bagi masa depan ISS. Seorang pejabat senior NASA mengatakan kepada Reuters, bahwa badan antariksa USA itu belum diberitahu secara resmi tentang rencana Rusia.⁵⁵

R. *Russia to Withdraw from the International Space Station: What are the Implications?*

Russia has announced its intention to withdraw from the International Space Station (ISS) in 2024 and plans to build its own station in its place. Yuri Borisov, the head of the Russian space agency Roscosmos, stated that the agency would fulfill all its obligations to the ISS for the next two years. The United States and Russia, along with other partners, have collaborated on the ISS since 1998; however, relations have deteriorated since Russia's invasion of Ukraine. Russia

⁵⁵ Rusia akan keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, apa dampaknya? <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62314743> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

had previously threatened to exit the project due to Western sanctions against them.

The ISS is a joint project involving five space agencies and has been orbiting Earth since 1998, facilitating thousands of scientific experiments. Although the station is scheduled to operate until 2024, the United States aims to extend its operation for another six years with the agreement of all partners. During a meeting with President Vladimir Putin, Borisov mentioned that the decision to leave the project after 2024 has been made, and he emphasized that developing a new Russian orbital station is the agency's top priority. It remains unclear what this decision means for the future of the ISS. A senior NASA official informed Reuters that the U.S. space agency has not been officially notified of Russia's plans.

S. Analisis Jonathan Amos, Koresponden Isu Sains

Rusia telah memicu polemik tentang rencana penarikan diri mereka dari ISSu, walaupun tidak jelas seberapa serius pernyataan tersebut. Rusia telah berbicara tentang rencana membangun pos terdepan mereka sendiri, yakni Stasiun Layanan Orbital Rusia, namun demikian rencana tersebut akan membutuhkan komitmen finansial yang sejauh ini belum ditunjukkan oleh pemerintah Rusia. Memang, elemen-elemen Rusia di ISS sudah tua, tetapi para insinyur memandang bahwa modul-modul tersebut masih dapat bekerja hingga 2030. Bilamana Rusia mundur, tidak diragukan lagi langkah akan menimbulkan masalah. Stasiun ISS dirancang sedemikian rupa sehingga membuat negara-negara mitra saling bergantung satu sama lain. Bagian tugas USA di ISS yakni menyediakan kekuatan, sementara pihak Rusia menyediakan propulsi atau pendorong untuk menjaga platform agar tidak jatuh ke Bumi. Artinya, bilamana kemampuan pendorong Rusia ditarik atau tidak berkerja lagi, maka USA dan mitra lainnya, yakni badan antariksa Eropa, Jepang, dan Kanada, perlu memikirkan atau merancang cara lain secara berkala guna mengangkat stasiun lebih tinggi di langit. Hal tersebut adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh robot pengangkut barang USA. Kerja sama di ISS antara Rusia dan USA tampaknya relatif tidak terdampak

perang di Ukraina. Kedua negara telah menandatangani perjanjian awal bulan ini untuk mengizinkan osmonot Rusia melakukan perjalanan ke stasiun dengan pesawat ruang angkasa AS dan sebaliknya. Menurut Roskosmos Perjanjian itu akan "mempromosikan pengembangan kerja sama dalam kerangka program ISS.⁵⁶

S. Analysis by Jonathan Amos, Science Issues Correspondent

Russia has sparked controversy with its plans to withdraw from the ISS, although it remains unclear how serious this statement is. Russia has discussed plans to establish its own outpost, the Russian Orbital Service Station; however, such plans would require financial commitments that the Russian government has yet to demonstrate. Indeed, the Russian components on the ISS are aging, but engineers believe that these modules could still function until 2030. Should Russia withdraw, it would undoubtedly create problems. The ISS is designed to foster interdependence among partner nations. The U.S. is responsible for providing power, while Russia supplies propulsion to keep the platform from falling back to Earth. This means that if Russia's propulsion capabilities are withdrawn or fail, the U.S. and other partners – namely, the European Space Agency, Japan, and Canada – would need to devise alternative methods to periodically boost the station higher into orbit. This is something that could be accomplished by U.S. cargo transport robots. Cooperation between Russia and the U.S. on the ISS seems relatively unaffected by the war in Ukraine. The two countries signed an agreement earlier this month to allow Russian cosmonauts to travel to the station aboard U.S. spacecraft and vice versa. According to Roskosmos, the agreement will "promote the development of cooperation within the framework of the ISS program."

T. Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat

Pesawat udara jenis Antonov AN-225 yang rencananya akan membawa satelit Satria-1 milik Indonesia ke USA, terkena bom saat terbang dari pabriknya di Prancis. Peristiwa tersebut

⁵⁶.Ibid.

dapat menghambat transportasi satelit Satria-1. Produsen satelit, Thales Alenia Space saat tersebut sedang mencari jalan keluar dan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PT Satelit Nusantara Tiga. Menurut Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, perang antara Ukraina dan Rusia tersebut memang berdampak terhadap proyek (satelit Satria-1), khususnya dengan transportasi yang rencananya membawa dari pabrikan Thales Alenia Space di Prancis ke tempat peluncuran di USA, karena menggunakan roket dari SpaceX.

Pesawat udara jenis Antonov-225 tersebut pesawat dengan kapasitas besar yang biasa membawa barang-barang besar, seperti satelit, tersebut dibom informasinya. Tentunya, sehingga supply Antonov tersebut menjadi berkurang, sehingga potensi mempengaruhi proyek tersebut. Satelit Satria-1 dirakit di tiga lokasi, yaitu Toulouse, Belfast dan Cannes. Satelit internet tersebut terdiri dari empat tingkat dengan lokasi produksi berbeda untuk setiap bagiannya. Satelit Satria-1 tersebut diandalkan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital Indonesia termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan Perbatasan. Satelit Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps akan mendukung penyebaran akses layanan internet di 150 ribu titik lokasi layanan publik. Thales Alenia Space selaku produsen satelit Satria-1 disebut sedang menjajaki ketersediaan transportasi lain untuk membawa satelit Satria-1 dari Prancis ke USA. Menkominfo Buka Suara soal Satelit Satria yang Disebut Gagal Anang juga mengatakan sejauh ini jadwal peluncuran satelit Satria-1 masih belum berubah. Rencananya peluncuran dilakukan pada pertengahan 2023 dan ditargetkan beroperasi pada November di tahun yang sama.⁵⁷

⁵⁷ Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220313182111-213-770638/pesawat-terbesar-dunia-dibom-rusia-proyek-satelit-ri-terhambat> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

URRS dan Federasi Rusia(FR) memiliki sejarah panjang dalam eksplorasi ruang angkasa. Pencapaian-pencapaian seperti mengirimkan manusia pertama di luar angkasa pada tahun 1961 tetap menjadi sumber kebanggaan nasional. Dalam pertemuannya dengan Putin, pimpinan Roskosmos, Borisov mengatakan stasiun ruang angkasa Rusia yang baru akan memberikan negaranya layanan berbasis ruang yang dibutuhkan untuk kehidupan modern, misalnya navigasi dan transmisi data.

T. *World's Largest Plane Bombed by Russia, Indonesia's Satellite Project Delayed*

The Antonov AN-225 aircraft, which was set to transport Indonesia's Satria-1 satellite to the USA, was bombed while flying from its factory in France. This incident could hinder the transportation of the Satria-1 satellite. The satellite manufacturer, Thales Alenia Space, is currently seeking solutions and coordinating with the Telecommunication and Information Accessibility Agency (Bakti) of the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) and PT Satelit Nusantara Tiga. According to Anang Latif, the CEO of Bakti Kominfo, the war between Ukraine and Russia is indeed impacting the project (Satria-1 satellite), especially concerning the transportation from the Thales Alenia Space factory in France to the launch site in the USA, as it involves a rocket from SpaceX.

The Antonov AN-225 is a large-capacity aircraft typically used to transport oversized cargo such as satellites. Its bombing has reduced the supply of Antonov aircraft, potentially affecting the project. The Satria-1 satellite is being assembled in three locations: Toulouse, Belfast, and Cannes. This internet satellite consists of four levels, with different production locations for each part. The Indonesian government relies on the Satria-1 satellite to accelerate the development of Indonesia's digital infrastructure, especially in the Disadvantaged, Outermost, and Border areas (3T). The Satria-1 satellite, which has a capacity of 150 Gbps, will support the deployment of internet service access at 150,000 public service locations. Thales Alenia Space, the producer of the Satria-1 satellite, is reportedly exploring alternative transportation options to transport the satellite from France to the

USA. The Minister of Communication and Informatics has addressed concerns about the Satria satellite being deemed a failure. Anang also stated that, so far, the launch schedule for the Satria-1 satellite has not changed. The launch is planned for mid-2023, with operations targeted to commence in November of the same year.

The USSR and the Russian Federation (RF) have a long history in space exploration. Achievements such as sending the first human into space in 1961 remain a source of national pride. In his meeting with Putin, Roskosmos head Borisov stated that the new Russian space station would provide the country with the space-based services needed for modern life, such as navigation and data transmission.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Martono K.,Ed.,Bunga Rampai Hukum Udara.Kabupaten Purbalingga: Penerbit CV EUREKA MEDIA AKSARA,2024 hal.6

ARTIKEL

Martono K.,Perang Dingin,KAA(1955), Hukum Angkasa dan Serpihan Roket di Kalimantan Barat, Webinar diselenggarakan oleh Universitas Tanjung Pura Pontianak tanggal 24 Pebruari 2024

DOKUMEN

ICAO Doc.7300/8 Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944, untuk teks lihat Dempsey P.S.Ed,Annal of Air and Space Law, 2005 Vol.XXX-Part I.Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd,page 19-51.

JURNAL

Dempsey P.S.Ed,Annal of Air and Space Law, 2005 Vol.XXX-Part I.Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd,page 19-51.

LAIN-LAIN

5 Pesawat Era Perang Dingin yang Masih Andal untuk Bertempur
<https://internasional.kompas.com/read/2021/03/07/143901970/5-pesawat-era-perang-dingin-yang-masih-andal-untuk-bertempur?page=all> diunduh Tanggal 7 September 24

Biden Izinkan Ukraina Serang Rusia dengan Senjata AS
<https://news.detik.com/internasional/d-7366535/biden-izinkan-ukraina-serang-rusia-dengan-senjata-as> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

F-4 Phantom II: Jet tempur paling produktif dalam sejarah Amerika?
<https://www.iwm.org.uk/history/the-f-4-phantom-ii-the-most-prolific-jet-fighter-in-american-history> diunduh

Tanggal 7 September 24 <https://www.britannica.com/event/Cold-War> diunduh Tanggal 26 Agustus 2024

Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
<https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu> diunduh Tanggal 22 September 24

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), 1949
<https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato>,
diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Pakta Warsawa: Latar Belakang, Tujuan, dan Pembubarannya.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/090000969/pakta-warsawa--latar-belakang-tujuan-dan-pembubarannya>, diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Pengaruh Perang Dingin terhadap Perkembangan Teknologi Ruang Angkasa., <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/03/180000479/pengaruh-perang-dingin-terhadap-perkembangan-teknologi-ruang-angkasa?page=all> diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Perang Korea: Penyebab, Jalannya Pertempuran, Penyelesaian, dan Dampak
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/28/160000879/perang-korea-penyebab-jalannya-pertempuran-penyelesaian-dan-dampak?page=all> diundudh Tanggal 7 Januari 2024

Perang Vietnam: Latar Belakang, Keterlibatan AS, Akhir, dan Dampak", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/11/080000279/perang-vietnam-latar-belakang-keterlibatan-as-akhir-dan-dampak?page=all> diunduh Tanggal 28 Januari 2024

Perlombaan Senjata Soviet-Amerika
<https://www.historytoday.com/archive/soviet-american-arms-race> diundduh Tanggal 6 September 24

Rusia akan keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, apa dampaknya? <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62314743> diunduh Tanggal 11 Oktober 24

Sejarah Perang Dingin: Latar Belakang dan Persaingannya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/27/120100570/sejarah-perang-dingin--latar-belakang-dan-persaingannya?page=all> diunduh Tanggal 26 Agustus 24

BAB 2

DEPLOMANSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (AS) SELAMA PERANG DAN PASCA DINGIN (PD)¹

DEPLOMATIC RELATIONS BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA (USA) DURING THE COLD WAR (PD)

A. Peran AS di Balik Pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948 merupakan peristiwa luar biasa bagi Indonesia yang baru merdeka selama tiga tahun. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan apa tujuan PKI melakukan pemberontakan hingga dugaan keterlibatan AS dalam pembunuhan ribuan partai komunis daerah tersebut. Pecahnya peristiwa Madiun (PM) dimulai dari tekanan politik terhadap Kabinet Hatta. Menurut informasi dalam telegram yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS George Catlett Marshall pada 21 Juli 1948 pemerintah kabinet Hatta keadaan terlalu lama karena dominasi kaum komunis dalam gerakan nasional. Sehubungan dengan komunisme di Indonesia dan pemerintah Belanda harus mengambil tindakan tegas, namun demikian Belanda tidak dapat mengambil tindakan karena khawatir langkah tersebut dapat mempercepat jatuhnya kabinet Hatta.⁵⁸

⁵⁸ Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

A. The Role of the US Behind the PKI Madiun Rebellion

*The rebellion of the Indonesian Communist Party (PKI) in Madiun, East Java on September 18, 1948 was an extraordinary event for Indonesia which had only been independent for three years. The incident raised questions about the purpose of the PKI in carrying out the rebellion and the alleged involvement of the US in the murder of thousands of communist parties in the region. The outbreak of the Madiun incident began with political pressure on the Hatta Cabinet. According to information in a telegram addressed to USA Secretary of State George Catlett Marshall on July 21, 1948, the Hatta cabinet government took too long because of the dominance of the communists in the national movement. In connection with communism in Indonesia and the Dutch government must take firm action, however, the Netherlands could not take action because it was worried that this step could accelerate the fall of the Hatta cabinet.*⁵⁹

Pada bulan September 1948, Marshall secara terang-terangan menyatakan dukungan Kabinet Hatta untuk menumpas kekuatan komunis. Beliau menegaskan bahwa AS akan memberikan bantuan dengan segala cara sehingga jelas AS terlibat dalam penumpasan kaum komunis di Madiun. AS khawatir dan benci pada gerakan kiri tersebut bahkan telah tampak sejak 1926-1927 saat pemberontakan rakyat yang dipimpin PKI digagalkan Belanda. Menurut Soemarsono tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang merupakan saksi hidup PM, pemerintahan Soekarno-Hatta mengambil langkah untuk membasmi komunis di Madiun agar kedaulatan Indonesia dapat diakui. Adanya kaum komunis dianggap sebagai penghalang bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Barat. Selama kekuatan komunis di Indonesia masih kuat, negara-negara Barat tidak akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang baru merdeka. Sebelum meletus peristiwa Madiun tersebut, telah

⁵⁹ Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis buruh dan komunis di Solo oleh tentara. Penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Solo membuat situasi di Madiun sangat tegang mencapai puncaknya dengan Diproklamirkannya Negara Madiun oleh Soemarsono, yang kemudian diambil alih oleh Musso, yang saat tersebut dikenal sebagai Peristiwa Madiun.⁶⁰

*In September 1948, Marshall openly declared the Hatta Cabinet's support for crushing the communist forces. He emphasized that the USA would provide assistance in any way so that it was clear that the USA was involved in crushing the communists in Madiun. The USA was worried and hated the left-wing movement and had been apparent since 1926-1927 when the people's rebellion led by the PKI was thwarted by the Dutch. According to Soemarsono, a figure from the Indonesian Socialist Youth (Pesindo) who was a living witness to the PM, the Soekarno-Hatta government took steps to eradicate the communists in Madiun so that Indonesia's sovereignty could be recognized. The presence of communists was considered an obstacle for Indonesia to gain recognition of sovereignty from Western countries. As long as the communist forces in Indonesia were still strong, Western countries would not recognize the sovereignty of the newly independent Republic of Indonesia. Before the Madiun incident erupted, there had been kidnappings and murders of labor and communist activists in Solo by the military. The kidnappings and murders that occurred in Solo made the situation in Madiun very tense, reaching its peak with the Proclamation of the State of Madiun by Soemarsono, which was then taken over by Musso, which at that time was known as the Madiun Incident.*⁶¹

⁶⁰ Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun <https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

⁶¹ Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun <https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Tokoh komunis Indonesia Musso, menggerakkan pemberontakan di Madiun karena bercita-cita menjadikan Indonesia Republik Soviet. Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka mengalami kesulitan membangun dan mensejahterakan rakyatnya, dalam PD Indonesia memperoleh bantuan dari US. Presiden Soekarno memperoleh bantuan US membangun proyek *Asian Games* di kawasan Senayan yang sekarang bernama Gelora Bung Karno (GB) dalam tahun 1961 untuk menunjukkan kehebatan Indonesia lewat Asian Games ke-IV dalam tahun 1962. US juga memberikan pinjaman lunak senilai US\$12,5 juta, mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Krushev turut hadir dalam pencaanangan tiang pancang pertama pada 8 Februari 1960.⁶²

*Indonesian communist figure Musso, led a rebellion in Madiun because he aspired to make Indonesia a Soviet Republic. Indonesia as a country that had not long been independent experienced difficulties in developing and prospering its people, in PD Indonesia received assistance from the USA. President Soekarno received USA assistance to build the Asian Games project in the Senayan area which is now called Gelora Bung Karno (GB) in 1961 to show Indonesia's greatness through the 4th Asian Games in 1962. The USA also provided a soft loan worth US\$12.5 million, sending engineers and technicians to design the Gelora Bung Karno Main Stadium. The Prime Minister of the USSR, Nikita Khrushchev, was also present at the laying of the first pile on February 8, 1960.*⁶³

Sumber lain menjelaskan⁶⁴ bahwa pemberontakan PKI Madiun atau Peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 tersebut,

⁶².*Ibid.*

⁶³.*Ibid.*

⁶⁴ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun baru dapat diakhiri setelah tiga bulan berlangsung, dengan kekalahan di pihak PKI. Faktor yang membuat gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI adalah PKI memproklamasikan Republik Soviet.⁶⁵

Other sources explain⁶⁶ that the PKI Madiun rebellion or the PKI Madiun Incident of 1948 was a conflict between the Indonesian government and the left-wing opposition group. In the incident that erupted on September 18, 1948, the Indonesian Communist Party (PKI), the Indonesian Socialist Party (PSI), the Indonesian Labor Party (PBI), and the Central Organization of All Indonesian Laborers (SOBSI), tried to seize power because they were dissatisfied with government policies. The PKI Madiun rebellion was only ended after three months, with the PKI losing. The factor that made the PKI Madiun movement considered a threat to the integrity of the Republic of Indonesia was that the PKI proclaimed the Soviet Republic.⁶⁷

Peristiwa tersebut diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin, yang tidak lagi mendapat dukungan setelah dituding merugikan Indonesia ketika mengadakan Perjanjian Renville dengan Belanda. Ketika jabatan perdana menteri Amir Sjarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948, Mohammad Hatta maju membentuk kabinet baru. Kabinet Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir

⁶⁵ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

⁶⁶ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

⁶⁷ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Sjarifuddin, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir Sjarifuddin menginginkan posisi kunci. Pada akhirnya, Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948, membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya. Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yakni TNI-Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota. Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. FDR lantas mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh. Pemerintah marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan Republik.⁶⁸

The incident began with the fall of the Amir Sjarifuddin Cabinet, which no longer received support after being accused of harming Indonesia when it entered into the Renville Agreement with the Netherlands. When Amir Sjarifuddin's prime ministerial term ended on January 28, 1948, Mohammad Hatta stepped forward to form a new cabinet. The Hatta Cabinet had offered positions in its cabinet to Amir Sjarifuddin's faction, but no agreement was reached because Amir Sjarifuddin's party wanted key positions. In the end, Hatta formed a new cabinet without the left wing group, whose main program was to implement the Renville Agreement and rationalize the Indonesian military. The left wing group began to join the opposition and held a meeting in Surakarta on February 26, 1948, forming the People's Democratic Front (FDR) consisting of PSI, PKI, PBI, Pesindo, and SOBSI, with Amir Sjarifuddin as its leader. In its development, the

⁶⁸.Ibid.

FDR turned radical and its program focused on opposing the Hatta Cabinet program. FDR had two main power bases, namely TNI-Masyarakat and SOBSI, which was the largest labor organization with almost 300,000 members. Resentment towards the government grew when Hatta began a rationalization program and viewed TNI-Masyarakat as an untrained communist-leaning military organization. FDR then began to seek support from farmers and encouraged labor strikes. The government was angry and accused the strikes of being an act that endangered the Republic.⁶⁹

Kembalinya Musso Situasi semakin memanas saat Musso, tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke US, kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Mereka lantas melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan komunisme. Peristiwa tersebut yang dijadikan alasan untuk melancarkan kampanye anti-PKI dan melakukan penculikan perwira kiri. Memasuki September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik. Daerah Madiun menjadi daerah yang tersisa sebagai benteng terakhir FDR yang membuat pimpinan FDR lokal di Madiun khawatir sehingga pecalah pemberontakan pada 18 September 1948.⁷⁰

Musso's Return The situation became increasingly heated when Musso, a senior Indonesian communist figure who had studied in the USSR, returned and formed a new body consisting of left-wing parties. They then made a propaganda trip to Central Java and East Java to spread communism. This incident was used as an excuse to launch an anti-PKI campaign and kidnap left-wing officers. Entering September 1948, the government and left-wing groups launched a kidnapping campaign. The Madiun area became the last remaining area as the

⁶⁹.Ibid.

⁷⁰ Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Mengapa Lirik Lagu Kian Lugas dan Teramat Gamblang? Artikel Kompas.id

*FDR's last stronghold, which worried the local FDR leadership in Madiun, resulting in a rebellion on September 18, 1948.*⁷¹

Pada 18 September 1948 pukul 03.00 pagi, FDR Madiun mulai merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam serangan tersebut terdapat dua perwira yang tewas terbunuh dan empat orang terluka. Hanya dalam hitungan jam, Madiun sepenuhnya sudah berhasil dikuasai FDR. Dua anggota FDR yakni Setiadjit dan Wikana mengambil alih pemerintahan sipil dan membentuk Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Musso sudah membentuk "Republik Soviet Indonesia".

Musso pun menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme AS. Beberapa pemimpin FDR menyatakan kesediaan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia dan menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Pada 23 September 1948, Amir Sjarifuddin juga menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia, bendera mereka tetap merah putih, dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, pemerintah Indonesia terlihat mengabaikan upaya FDR untuk mengakhiri konflik. Pemerintah justru menggunakan kesempatan tersebut untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Pemerintah mengirimkan Brigade Siliwangi Letkol Sadikin untuk mengerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Pemberontakan tersebut pun menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, serta beberapa tokoh lainnya.⁷²

⁷¹ Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Mengapa Lirik Lagu Kian Lugas dan Teramat Gamblang? Artikel Kompas.id

⁷² *Ibid*

On September 18, 1948 at 03.00 am, FDR Madiun began to seize local government officials, telephone exchanges, and army headquarters led by Sumarsono and Djoko Sujono. In the attack, two officers were killed and four people were injured. In just a matter of hours, Madiun had been completely controlled by FDR. Two FDR members, Setiadjit and Wikana, took over the civil government and formed the Madiun Regional National Government Front. On the evening of September 19, 1948, President Soekarno stated that the Madiun rebellion was an attempt to overthrow the Indonesian government and Musso had formed the "Indonesian Soviet Republic".

Musso then declared war on Indonesia by accusing Soekarno and Hatta of being slaves of USA imperialism. Several FDR leaders expressed their willingness to make peace with the Indonesian government and broadcast via radio that what happened in Madiun was not a coup, but an attempt to correct government policy. On September 23, 1948, Amir Sjarifuddin also stated that the FDR constitution was the Republic of Indonesia, their flag remained red and white, and their national anthem was still Indonesia Raya. Unfortunately, the Indonesian government seemed to ignore FDR's efforts to end the conflict. The government instead used the opportunity to eliminate the left wing in Indonesia. The government sent Lieutenant Colonel Sadikin's Siliwangi Brigade to mobilize its troops and take control of Madiun. The rebellion also killed the Governor of East Java, RM Suryo, and several other figures.⁷³

Guna menghindari konflik dengan TNI, FDR/PKI pun mundur ke pegunungan. Di bawah komando Amir Sjarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka setelah tahu bahwa desa tersebut sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin. Pada 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan Musso berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang

⁷³ *Ibid*

bersembunyi di kamar kecil. Sebulan kemudian, 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Sementara itu, Amir Sjarifuddin juga menghadapi nasib yang sama. Beliau ditangkap pada 4 Desember 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan FDR lain yang tertangkap dieksekusi pada 19 Desember 1948. Perkiraan korban dalam peristiwa tersebut berjumlah 24.000 orang, 8.000 di antaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo.⁷⁴

In order to avoid conflict with the TNI, the FDR/PKI retreated to the mountains. Under the command of Amir Sjarifuddin, they fled from Madiun and headed to a small village called Kandangan, where they found ammunition and weapons. However, they were shocked to learn that the village had been occupied by the Sungkono Division Battalion led by Major Sabarudin. On October 28, the government arrested 1,500 people and Musso was shot dead on October 31, 1948 while hiding in a toilet. A month later, on November 29, Djoko Sujono and Maruto Darusman were also arrested. Meanwhile, Amir Sjarifuddin also faced the same fate. He was arrested on December 4, 1948. The rebellion was successfully suppressed when Amir, Maruto, Djoko, Suripno, and other captured FDRs were executed on December 19, 1948. The estimated number of victims in the incident was 24,000 people, 8,000 of whom were from Madiun, 4,000 in Cepu, and 12,000 in Ponorogo.⁷⁵

B. Bantuan Amerika Serikat (AS)

Pada 21 September 1960, AS membantu Indonesia mengembangkan energi atom dengan menjanjikan dana hibah senilai US\$350.000. Dana tersebut digunakan untuk operasional reaktor nuklir yang dibangun di Bandung. AS juga berjanji memberi tambahan US\$ 141.000 untuk mendanai risetnya. Soekarno meresmikan Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI-2000 dari US di Serpong, Tangerang.

⁷⁴. *Ibid.*

⁷⁵. *Ibid.*

Pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan PD. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau PD. Soekarno menggelar KAA-1955 yang menjadi Gerakan Non-Blok (GNB), namun demikian, PD pula yang mengakhiri Soekarno. CIA diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Sejak dekade 1950-an, CIA mencoba berbagai operasi rahasia mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. AS mencoba mendekati militer. AS terlibat dalam peristiwa G30S dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya.⁷⁶

B. United States (USA) Assistance

On September 21, 1960, the USA helped Indonesia develop atomic energy by promising a grant of US\$350,000. The funds were used for the operation of a nuclear reactor built in Bandung. The USA also promised to provide an additional US\$141,000 to fund its research. Soekarno inaugurated the Nuclear Research Center using the IRI-2000 reactor from the USA in Serpong, Tangerang. The political upheaval in Indonesia that occurred during Soekarno's government was closely related to the PD. One of Soekarno's successes was in forming solidarity among former colonial countries to ward off the PD. Soekarno held the 1955 Asian-African Conference which became the Non-Aligned Movement (GNB), however, it was also PD that ended Soekarno. The CIA was tasked with eliminating Soekarno. Since the 1950s, the CIA has tried various covert operations, from making pornographic films with fake Soekarno to supplying weapons for the rebellion. The USA tried to approach the military. The US was involved in the G30S incident and the subsequent eradication of communists.⁷⁷

⁷⁶.Ibid.

⁷⁷.Ibid.

C. Peran Indonesia dalam KAA 1955

Indonesia mempunyai peran penting dalam PD sebab sebagai pencetus gerakan non-blok (GNB) yang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 (KAA-1955). Konferensi tersebut untuk mencapai perdamaian. Selain itu untuk menciptakan prinsip politik bersama yang bebas blok barat maupun blok timur, menghapus penjajahan dalam segala bentuk, berjalan berdasarkan prinsip koeksistensi damai dan tidak tergabung ke dalam aliansi pasukan-pasukan militer, memilih bersifat netral dengan tidak memihak blok barat maupun blok timur, karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif.

PD berlangsung sejak tahun 1947-1991, setelah PDII berakhir adalah persaingan ideologi US dan AS untuk memperebutkan pengaruh dari negara-negara lain, sementara itu, Indonesia berusaha bersikap netral pada PD dengan cara membentuk Gerakan Non-Blok (GNB). KAA-1955 merupakan pertemuan antara negara-negara benua Asia dan Afrika (AA) untuk membendung pengaruh blok timur dan barat. Mereka berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan, terutama komitmen untuk saling mempertahankan kemerdekaan. Dalam KAA-1955 yang dihadiri oleh 29 negara tersebut, mereka membicarakan tentang semua masalah yang sedang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang, misalnya masalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam PD, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi. Semua peserta yang hadir dalam KAA-1955 terutama dari Afrika, menyampaikan aspirasi negara-negara mereka yang masih dalam proses kemerdekaan, yang menghasilkan Dasasila Bandung dan dijadikan harapan oleh semua peserta KAA-1955, karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.⁷⁸

⁷⁸ Peran Indonesia dalam Perang Dingin.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/09/090000379/peran-indonesia-dalam-perang-dingin?page=all>, diunduh Tanggal 28 Januari 2024

C. Indonesia's Role in the 1955 Asian-African Conference

Indonesia has an important role in the PD because it is the initiator of the non-aligned movement (NAM) which held the 1955 Asian-African Conference (AAC-1955). The conference was to achieve peace. In addition, to create a common political principle that is free from the western bloc or the eastern bloc, eliminate colonialism in all forms, run based on the principle of peaceful coexistence and not join any military alliance, choose to be neutral by not siding with the western bloc or the eastern bloc, because Indonesia adheres to a free and active foreign policy.

The PD took place from 1947-1991, after the end of WWII was the ideological competition between the USSR and the USA to fight for influence from other countries, meanwhile, Indonesia tried to be neutral in the PD by forming the Non-Aligned Movement (NAM). The AAC-1955 was a meeting between the countries of the Asian and African continents (AA) to stem the influence of the eastern and western blocs. They gathered to produce several agreements, especially the commitment to mutually maintain independence. In the 1955 Asian-African Conference attended by 29 countries, they discussed all the problems being faced by the newly developed former western colonies, such as the problem of peace, the role of third world countries or developing countries in the PD, economic development, and decolonization. All participants who attended the 1955 Asian-African Conference, especially from Africa, conveyed the aspirations of their countries that were still in the process of independence, which resulted in the Ten Principles of Bandung and became the hope of all participants of the 1955 Asian-African Conference, because most of them had experienced colonization.⁷⁹

Sasaran PD dalam perang ideologi US dan AS adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti India dan Indonesia, kemudian membuat Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, dan para pemimpin dunia lainnya mencetus Gerakan Non-Blok (GNB) yang merupakan organisasi

⁷⁹ Peran Indonesia dalam Perang Dingin.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/09/090000379/peran-indonesia-dalam-perang-dingin?page=all>, diunduh Tanggal 28 Januari 2024

internasional terdiri dari 120 negara yang merasa diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Organisasi tersebut didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KAA-1955 yang disebut Dasasila Bandung. Indonesia menjadi salah satu pendiri GNB, yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa PD. Di samping itu, tujuan GNB untuk mengupayakan hak guna menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota dan menentang adanya sistem pemisahan ras (*apartheid*), menolak segala bentuk imperialisme dan kolonialisme, mendukung pelucutan senjata, dan tidak mencampuri urusan negara lain. Peran Indonesia dalam PD selanjutnya terus aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, dengan demikian Indonesia dapat meningkatkan hubungannya dengan sesama negara anggota.

Selain itu, Indonesia juga dapat ikut serta dalam kegiatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi perdamaian dunia, seperti mendirikan ASEAN yang diikuti oleh sepuluh negara, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Tidak hanya menjadi anggota, Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967. Negara-negara anggota dalam ASEAN sendiri merupakan negara yang baru saja merdeka, sehingga kondisi politik internalnya masih belum stabil, masih terjadi konflik etnis, masalah persatuan, dan sistem pertahanan serta keamanannya masih lemah, karena itu negara-negara di Asia Tenggara terdorong untuk membentuk organisasi regional supaya dapat menjadi alternatif landasan perdamaian daerah.

The target of the PD in the USSR and USA ideological war was developing countries that had just become independent, such as India and Indonesia, then made the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and other world leaders initiate the Non-Aligned Movement (NAM) which is an international organization consisting of 120 countries that feel they are not aligned with any great power. The organization was founded based on the basic principles agreed upon in

the 1955 Asian-African Conference called the Ten Principles of Bandung. Indonesia became one of the founders of the NAM, which aims to maintain the neutrality of third world countries during the PD. In addition, the purpose of the NAM is to strive for the right to self-determination, national independence, sovereignty, and integrity of member countries and oppose the system of racial separation (apartheid), reject all forms of imperialism and colonialism, support disarmament, and not interfere in the affairs of other countries. Indonesia's role in the PD continued to be active in international organizations, such as the UN, thus Indonesia can improve its relations with fellow member countries. In addition, Indonesia can also participate in activities that in turn can contribute to world peace, such as establishing ASEAN which is followed by ten countries, namely Indonesia, the Philippines, Thailand, Singapore, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, and Cambodia. Not only being a member, Indonesia is one of the founding countries of the organization which was formed on August 8, 1967. The member countries in ASEAN themselves are countries that have just become independent, so that their internal political conditions are still unstable, there are still ethnic conflicts, problems of unity, and their defense and security systems are still weak, therefore countries in Southeast Asia are encouraged to form regional organizations so that they can become an alternative basis for regional peace.

1. Maksud dan Tujuan KAA-1955 di Bandung.

Maksud dan tujuan KAA-1955 di Bandung yang dihadiri oleh 29 negara Asia-Afrika adalah untuk membahas perdamaian dan peran dunia ketiga dalam PD, pembangunan ekonomi, dan dekolonisasi. Pada prinsipnya KAA-1955 di Bandung adalah penentuan nasib sendiri secara politik, saling menghormati kedaulatan, non-agresi, tidak campur tangan urusan dalam negeri, dan kesetaraan, merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh peserta konferensi, yang sebagian besar baru saja keluar dari pemerintahan kolonial. Sponsor KAA-1955 adalah Burma, India, Pakistan dan Sri Lanka, mereka mempertemukan 24 negara tambahan dari AA dan Timur Tengah. Mereka

mewakili masyarakat terjajah lainnya, karena proses dekolonisasi masih berlangsung, terutama masyarakat Afrika yang belum membentuk pemerintahan independen. Para delegasi membangun berdasarkan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai; bekerja dalam negosiasi antara India dan Tiongkok pada tahun 1954, ketika mereka berupaya membangun solidaritas di antara negara-negara yang baru saja merdeka.⁸⁰

1. *The purpose and objectives of the 1955 Asian-African Conference in Bandung*

*The purpose and objectives of the 1955 Asian-African conference in Bandung, attended by 29 Asian-African countries, were to discuss peace and the role of the third world in PD, economic development, and decolonization. In principle, the 1955 Asian-African Conference in Bandung was political self-determination, mutual respect for sovereignty, non-aggression, non-interference in internal affairs, and equality, which were very important for all conference participants, most of whom had just emerged from colonial rule. The sponsors of the 1955 Asian-African Conference were Burma, India, Pakistan and Sri Lanka, they brought together 24 additional countries from the AA and the Middle East. They represented other colonized peoples, because the process of decolonization was still ongoing, especially African peoples who had not yet formed independent governments. The delegates built on the 5 principles of peaceful coexistence; worked in the negotiations between India and China in 1954, when they sought to build solidarity among the newly independent countries.*⁸¹

⁸⁰ Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955 [https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diunduh Tanggal 22 Desember 2023

⁸¹ Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955 [https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRig](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRig)

2. Dasawarsa Bandung (1955)

Pada penutupan KAA-1955 Bandung, memuat asas-asas piagam PBB dan 5 (lima) asas Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Pada dasarnya tujuan Dasasila Bandung sama dengan tujuan piagam PBB yakni (a) menghormati hak-hak dasar manusia serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB; (b) mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil; (c) tidak melakukan intervensi atau campur tangan soal dalam negeri negara lain; (d) menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendirian ataupun secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB; (e) tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar; (f) tidak melakukannya terhadap negara lain; (g) tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara; (h) menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB; (i) memajukan kepentingan bersama dan kerjasama; (j) menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Terbentuknya Dasasila Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, terutama karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.

2. *The Bandung Decade (1955)*

At the closing of KAA-1955 Bandung, containing the principles of the UN charter and 5 (five) principles of Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India. Basically, the purpose of Dasasila Bandung is the same as the purpose of the UN charter, namely (a) respect for basic human rights and the principles contained in the

UN charter; (b) recognize the equality of all tribes and the equality of all nations, large and small; (c) not to intervene or intervene in the internal affairs of other countries; (d) respect the rights of every nation to defend itself alone or collectively in accordance with the UN Charter; (e) not to use the rules of collective defense to act for the special interests of one of the big countries; (f) not to do so against other countries; (g) not to carry out actions or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of a country; (h) resolve all international disputes by peaceful means, such as negotiation, agreement, arbitration, or other peaceful means, according to the choice of the parties concerned in accordance with the UN Charter; (i) advancing mutual interests and cooperation; (j) respect the law and international obligations. The formation of Dasasila Bandung is the hope of all KAA Bandung participants, especially because most of them have experienced colonialism.

3. Inspirasi Dasawarsa Bandung (1955)

KAA-1955 menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk G yang mencakup serangkaian tujuan konkrit yakni peningkatan kerja sama ekonomi, budaya, sosial, perlindungan hak asasi manusia dan prinsip penentuan nasib sendiri, mengakhiri diskriminasi rasial di mana pun terjadi, penegasan kembali pentingnya hidup berdampingan secara damai. Para pemimpin berharap fokus pada potensi kolaborasi antar negara-negara dunia ketiga, mempromosikan upaya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada apa dan Amerika Utara. Para pemimpin negara-negara berkembang bersatu untuk menghindari keharusan memihak dalam persaingan PD. Pada awalnya motifasinya adalah promosi perdamaian, tetapi pada tahun 1970-an, kelompok tersebut semakin radikal mengutuk kebijakan negara-negara adidaya PD, namun demikian GNB terus berlanjut hingga PD berakhir.

3. *Inspiration of the Bandung Decade (1955)*

KAA-1955 inspired Yugoslavian President Josip Broz Tito, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, and Egyptian President Gamal Abdel Nasser to form the G which includes a series of concrete goals namely increased economic, cultural, social cooperation, protection of human rights and the principle of self-determination, ending racial discrimination wherever it occurs, reaffirming the importance of peaceful coexistence. The leaders hope to focus on potential collaboration between third world countries, promoting efforts to reduce their dependence on what and North America. The leaders of developing countries are united to avoid having to take sides in PD competition. At first the motivation was the promotion of peace, but in the 1970s, the group became increasingly radical in condemning the policies of PD superpowers, however, GNB continued until PD ended.

4. Sikap AS terhadap KAA-1955

Pemerintah AS pada awalnya memandang KAA dan GNB yang muncul dari KAA-1955 tersebut dengan sikap hati-hati. Para pengamat di AS menyatakan keprihatinannya bahwa pertemuan tersebut merupakan tanda pergeseran ke arah kiri yang cenderung ideologi sosialis. Di samping itu, KAA-1955 tersebut mengungkapkan 2 (dua) kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS terkait dekolonisasi di dunia ketiga sehingga pemerintah AS akan terjebak keinginannya untuk mendukung dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri di Asia Tenggara dan Afrika dan ketergantungannya pada kekuatan kolonial Eropa Barat sebagai sekutu melawan Blok Timur yang komunis yang dipimpin oleh US. Bagi AS kerjasama dengan Inggris, Perancis dan Belanda sangat penting bagi kebijakan AS di Eropa, namun mendukung dekolonisasi sama saja dengan menentang sekutu-sekutu AS. Para pemimpin AS khawatir bahwa anti-kolonialisme di Bandung dan diskusi mengenai politik rasial global yang terjadi di sana dapat berubah menjadi anti-Amerika atau anti-Barat.

4. US Attitude to the 1955 Asian-African Conference

The USA government initially viewed the Asian-African Conference and the Non-Aligned Movement (NAM) that emerged from the 1955 Asian-African Conference with caution. Observers in the USA expressed concern that the meeting was a sign of a shift to the left that tended towards socialist ideology. In addition, the 1955 Asian-African Conference revealed 2 (two) contradictions in USA foreign policy regarding decolonization in the third world so that the USA government would be trapped in its desire to support decolonization and self-determination in Southeast Asia and Africa and its dependence on Western European colonial powers as allies against the communist Eastern Bloc led by the USSR. For the USA, cooperation with England, France and the Netherlands was very important for USA policy in Europe, but supporting decolonization was tantamount to opposing USA allies. USA leaders were concerned that anti-colonialism in Bandung and the discussions on global racial politics that took place there could turn anti-American or anti-Western.

5. Semangat KAA (1955)

Namun demikian, pada akhirnya, KAA-1955 tidak menimbulkan kecemasan umum terhadap Barat seperti yang dikhawatirkan oleh para pengamat AS. Sebaliknya, para peserta menampilkan beragam ideologi dan loyalitas. Sekutu AS di Asia mampu mewakili kepentingan bersama mereka dengan AS dalam pertemuan konferensi tersebut, dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mengambil sikap moderat dalam pidatonya di hadapan para delegasi KAA. Meskipun demikian, Bandung memberikan suara kepada negara-negara berkembang dan menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi kekuatan dalam politik dunia di masa depan, baik di dalam maupun di luar kerangka PD.

5. The Spirit of the Asian-African Conference (1955)

In the end, however, the Asian-African Conference of 1955 did not result in a general outcry against the West as US observers had feared. Instead, participants displayed a wide range of ideologies

and loyalties. USA allies in Asia were able to represent their shared interests with the US at the conference, and Chinese Premier Zhou Enlai took a moderate stance in his speech to the Asian-African Conference delegates. Nevertheless, Bandung gave a voice to developing countries and showed that they could be a force in world politics in the future, both inside and outside the PD framework.

6. Dampak Positif Terhadap Indonesia

Presiden Soekarno meminta bantuan pada AS. Pelaksanaan Asian Games ke-IV di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet, karena itu dibangunlah Jembatan Semanggi yang sekarang dikenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Jembatan Semanggi dibangun lewat uang AS. Presiden Soekarno juga mengutus Perdana Menteri Djuanda untuk menemui Howard Jones yang berhasil mendapat bantuan membangun jalan baru dari Cawang sampai ke Tanjung Priok yang disebut sebagai *Jakarta By Pass* (kini Jalan Jenderal A Yani dan Mayjen DI Panjaitan).

Pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan PD. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau PD. Soekarno menggelar KAA-1955 yang menjadi Gerakan Non-Blok (GNB), namun demikian, PD pula yang mengakhiri pemerintahan Soekarno. CIA diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Sejak dekade 1950-an, CIA mencoba berbagai operasi rahasia mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu hingga memasok senjata untuk pemberontakan. AS mencoba mendekati militer. AS terlibat dalam peristiwa G30S dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya.

6. Positive Impact on Indonesia

President Soekarno asked for help from the USA. The implementation of the 4th Asian Games in Senayan was feared to cause traffic jams, therefore the Semanggi Bridge was built which is now known as the Semanggi Interchange. The Semanggi Bridge

was built using USA money. President Soekarno also sent Prime Minister Djuanda to meet Howard Jones who succeeded in getting help to build a new road from Cawang to Tanjung Priok which was called the Jakarta By Pass (now Jalan Jenderal A Yani and Maj. Gen. DI Panjaitan).

The political turmoil in Indonesia that occurred during Soekarno's government was closely related to the PD. One of them was Soekarno's success in forming solidarity among former colonial countries to ward off the PD. Soekarno held the 1955 Asian-African Conference which became the Non-Aligned Movement (GNB), however, it was also the PD that ended Soekarno's government. The CIA was given the task of removing Soekarno. Since the 1950s, the CIA has tried various secret operations ranging from making pornographic films with fake Soekarno to supplying weapons for the rebellion. The USA tried to approach the military. The USA was involved in the G30S incident and the eradication of communists afterward.

D. Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno

Tragedi Cikini adalah percobaan penggranatan untuk membunuh Presiden Soekarno di Jalan Cikini No. 76 Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 30 November 1957. Upaya pembunuhan tersebut didalangi oleh Jusuf Ismail, anggota pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Beliau bersama rekannya melemparkan enam buah granat ke arah Presiden Soekarno. Lima di antaranya meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah dan mencederai 48 orang. Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur dan Megawati selamat dari insiden tersebut. Latar belakang tragedi pelemparan granat di Perguruan Cikini diduga bukan hanya sebuah aksi teror biasa, melainkan bertujuan untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak orang yang merasa tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi saat tersebut. Akibatnya, tercetus sebuah upaya untuk melakukan pembunuhan Presiden Soekarno. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melemparkan granat. Ide tersebut tercetus ketika salah satu

pelaku tengah melihat mobil Presiden Soekarno di Perguruan Cikini pada 30 November 1957 itu. Saat tersebut, sedang ada perayaan hari jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Kebetulan, kedua anak Presiden Soekarno, yakni Guntur dan Megawati juga merupakan murid di sekolah tersebut. Kedatangan Soekarno ke Perguruan Cikini tidak hanya sebagai orang tua dari kedua anaknya, melainkan juga atas undangan khusus dari kepala sekolah Perguruan Cikini, Sumadji Muhammad Sulaimani dan Direktur Percetakan Gunung Sari, Johan Sirie. Akhirnya, para pelaku memutuskan untuk melemparkan granat kepada Presiden Soekarno untuk membuatnya jatuh dari jabatannya.⁸²

D. Cikini Tragedy 1957, Attempted Assassination of Soekarno

The Cikini Tragedy was an attempted grenade attack to assassinate President Soekarno at Jalan Cikini No. 76, Central Jakarta. The incident occurred on Saturday night, November 30, 1957. The assassination attempt was masterminded by Jusuf Ismail, a member of the Darul Islam/Indonesian Islamic Army (DI/TII) rebels. He and his colleagues threw six grenades at President Soekarno. Five of them exploded and killed 10 school children and injured 48 people. President Soekarno and his two children, Guntur and Megawati, survived the incident. The background to the grenade throwing tragedy at Sekolah Cikini is suspected to not only be an ordinary act of terror, but also aimed to remove Soekarno from the presidency. During Soekarno's leadership, many people were dissatisfied with the political conditions that occurred at that time. As a result, an attempt was made to assassinate President Soekarno. One of the methods used was by throwing grenades. The idea came to mind when one of the perpetrators was looking at President Soekarno's car at Perguruan Cikini on November 30, 1957. At that time, there was a celebration of the 15th anniversary of Perguruan Cikini. Coincidentally, President Soekarno's two children, Guntur and Megawati, were also students at the school.

⁸² Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Soekarno's arrival at Perguruan Cikini was not only as the parent of his two children, but also at the special invitation of the principal of Perguruan Cikini, Sumadji Muhammad Sulaimani and the Director of Gunung Sari Printing, Johan Sirie. Finally, the perpetrators decided to throw a grenade at President Soekarno to make him fall from office.⁸³

Pada 30 November 1957 sedang diselenggarakan perayaan hari jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Saat itu, acara berjalan dengan sangat meriah, bahkan, Presiden Soekarno juga turut hadir untuk merayakan. Kehadiran Soekarno tersebut disambut dengan antusias oleh para peserta, terutama para murid sekolah. Usai acara, Presiden Soekarno bergegas untuk segera meninggalkan lokasi. Di sepanjang jalan dari halaman sekolah, warga sudah bergerombol untuk menantikan presiden lewat, namun demikian, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat yang ternyata berasal dari lemparan granat yang diarahkan ke halaman sekolah. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak. Selain itu, mobil yang dikendarai Presiden Soekarno juga hancur di makan lautan api akibat ledakan besar dari granat yang dilemparkan. Soekarno bersama kedua anaknya, Guntur dan Megawati selamat, namun demikian ada 10 anak sekolah tewas dan 48 orang mengalami cedera. Sebagian besar dari mereka mengalami luka parah.⁸⁴

On November 30, 1957, the 15th anniversary of Perguruan Cikini was being celebrated. At that time, the event was very lively, in fact, President Soekarno also attended to celebrate. Soekarno's presence was greeted enthusiastically by the participants, especially the school students. After the event, President Soekarno rushed to leave the location. Along the road from the school yard, residents had gathered to wait for the president to pass, however, suddenly a loud explosion was

⁸³ Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

⁸⁴ Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

*heard which turned out to be from a grenade thrown at the school yard. The explosion caused many people to fall down. In addition, the car driven by President Soekarno was also destroyed by a sea of fire due to the large explosion from the grenade that was thrown. Soekarno and his two children, Guntur and Megawati survived, however, 10 school children died and 48 people were injured. Most of them were seriously injured.*⁸⁵

Penangkapan Pasca-penggranatan tersebut, Presiden Soekarno dengan amarahnya segera memerintahkan pengejaran terhadap para pelaku pelemparan granat. Beliau juga meminta untuk dilakukan penyelidikan sehubungan dengan dalang di balik peristiwa tersebut. Akhirnya, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, para aparat dan intelijen negara berhasil menangkap empat pemuda yang diduga sebagai pelaku aksi teror tersebut. Mereka adalah Jusuf Ismail, Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, dan Moh Tasin bin Abubakar. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa keempat orang tersebut adalah penghuni Asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/TII). Selain mereka, rupanya Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat juga dicurigai sebagai otak dari tragedi tersebut. Persidangan untuk mengusut peristiwa tersebut, digelar persidangan pada 15 Agustus 1958. Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebutkan bahwa Zulkifli Lubis adalah dalang utamanya. Bahkan, terdakwa juga mengatakan sempat beberapa kali menyusun upaya percobaan untuk membunuh Soekarno. Akan tetapi, beberapa kalangan meragukan pengakuan tersebut. Zulkifli pribadi juga menolak untuk bertanggung jawab atas tragedi Cikini yang menyasar Soekarno sebagai target pembunuhan. Pada akhirnya, Jusuf Ismail mengaku bahwa beliau yang memelopori pelemparan granat tersebut, Zulkifli

⁸⁵ Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

pun lolos dari tuduhan. Keempat terdakwa pelaku tragedi Cikini diputuskan diberi hukuman mati di hadapan regu tembak pada 28 Mei 1960.⁸⁶

Post-grenade arrest, President Soekarno in his anger immediately ordered the pursuit of the perpetrators of the grenade throwing. He also asked for an investigation to be carried out regarding the mastermind behind the incident. Finally, in less than 24 hours, the state apparatus and intelligence managed to arrest four young men suspected of being the perpetrators of the terror act. They were Jusuf Ismail, Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, and Moh Tasin bin Abubakar. Based on the investigation, it was revealed that the four people were residents of the Sumbawa Dormitory which was also located in the Cikini area and members of the Darul Islam/Islamic State of Indonesia (DI/TII) rebels. In addition to them, apparently Colonel Zulkifli Lubis, former Deputy Chief of Staff of the Army was also suspected of being the mastermind behind the tragedy. The trial to investigate the incident was held on August 15, 1958. During the trial, one of the defendants stated that Zulkifli Lubis was the main mastermind. In fact, the defendant also said that he had planned several attempts to assassinate Soekarno. However, some people doubted the confession. Zulkifli personally also refused to take responsibility for the Cikini tragedy that targeted Soekarno as the target of the assassination. In the end, Jusuf Ismail admitted that he was the one who initiated the throwing of the grenade, Zulkifli was also acquitted of the charges. The four defendants of the Cikini tragedy were sentenced to death by firing squad on May 28, 1960.⁸⁷

⁸⁶ .Ibid.

⁸⁷ .Ibid.

Informasi lain⁸⁸ pada tanggal 30 Nopember 1957 sebanyak enam granat menghujani sekolah Perguruan Cikini di Jalan Cikini Nomor 76 Jakarta Pusat. Keenam granat tersebut sengaja dilempar ke arah Presiden Soekarno yang malam tersebut tengah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Perguruan Cikini. Lima dari enam granat meledak, lalu menewaskan sepuluh orang anak sekolah dan 48 orang mengalami luka hingga cacat. Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri selamat dari insiden tersebut. Kebetulan, kedua anak Soekarno tersebut merupakan murid di sekolah tersebut. Secara kronologi tragedi tersebut bermula saat Soekarno yang sedang dikerumuni anak-anak berjalan keluar untuk meninggalkan lokasi malam dana amal di sana. Malam tersebut, ramai dengan hiasan balon, carikan kertas warna-warni, musik, nyanyian, lelang, hingga pertunjukan singkat tiba-tiba ada sebuah granat meledak. Granat lainnya kembali dilemparkan dari sisi kiri dan kanan gedung secara bersusulan. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak. Sementara Soekarno merunduk ke arah belakang mobil sambil melindungi anak-anak yang ada di dekatnya.⁸⁹

Other information⁹⁰ on November 30, 1957, six grenades rained down on the Perguruan Cikini school on Jalan Cikini Number 76, Central Jakarta. The six grenades were deliberately thrown towards President Soekarno who that night was attending the celebration of the 15th Anniversary of Perguruan Cikini. Five of the six grenades exploded, killing ten school children and injuring 48 people and

⁸⁸ [Kilas Balik] 66 Tahun Lalu, Presiden Soekarno Nyaris Terbunuh dalam Tragedi Cikini", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/30/10000081/kilas-balik-66-tahun-lalu-presiden-soekarno-nyaris-terbunuh-dalam-tragedi> diunduh Tanggal 29 Agustus 24

⁸⁹.*Ibid.*

⁹⁰ [Kilas Balik] 66 Tahun Lalu, Presiden Soekarno Nyaris Terbunuh dalam Tragedi Cikini", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/30/10000081/kilas-balik-66-tahun-lalu-presiden-soekarno-nyaris-terbunuh-dalam-tragedi> diunduh Tanggal 29 Agustus 24

crippling them. President Soekarno and his two children, Guntur Soekarnoputra and Megawati Soekarnoputri, survived the incident. Incidentally, Soekarno's two children were students at the school. Chronologically, the tragedy began when Soekarno, who was surrounded by children, walked out to leave the location of the charity night there. That night, lively with balloon decorations, colorful paper scraps, music, singing, auctions, and short performances, suddenly a grenade exploded. Other grenades were thrown from the left and right sides of the building one after another. The explosion caused many people to fall to the ground. Meanwhile, Soekarno ducked behind the car while protecting the children nearby.⁹¹

Granat yang dilempar dari jarak lima meter tersebut ternyata menembus mesin, menghancurkan kaca depan, dan meledakkan dua ban. Setelah mobil tersebut diledakkan, ajudan Bung Karno, Mayor Sudrato menarik tangannya. Bung Karno bersama ajudannya lari menyeberangi jalan. Dalam keadaan gelap dan panik, Bung Karno terjatuh ke tanah. ajudannya menolong Bung Karno, lalu mereka lari ke sebuah rumah milik seorang Belanda. Anak-anak berteriak dan lari ketakutan memasuki gedung sekolah. Para bergulingan ke bawah kendaraan untuk menyelamatkan diri. Suasana mengerikan tersebut terjadi hingga ledakan granat kelima. Tak berselang lama, polisi dan ambulans datang bergantian. Sekolah yang mendadak tersebut berubah menjadi rumah sakit darurat. Pada pukul Pukul 22.00 WIB, kendaraan cadangan membawa Soekarno ke istana dan menenangkan rakyat melalui siaran radio.⁹²

The grenade thrown from a distance of five meters turned out to penetrate the engine, destroy the windshield, and explode two tires. After the car was blown up, Bung Karno's adjutant, Major Sudrato pulled his hand. Bung Karno and his adjutant ran across the street. In the dark and panic, Bung Karno fell to the ground. His adjutant helped

⁹¹.Ibid.

⁹².Ibid.

*Bung Karno, then they ran to a house owned by a Dutchman. Children screamed and ran in fear into the school building. The children rolled under the vehicles to save themselves. The terrifying atmosphere lasted until the fifth grenade explosion. Not long after, the police and ambulances came in turns. The school suddenly turned into an emergency hospital. At 22.00 WIB, a backup vehicle took Soekarno to the palace and calmed the people through a radio broadcast.*⁹³

E. Keterlibatan AS dalam PRRI

Pada 1956 hingga 1958, terjadi pemberontakan di Sumatera yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan terjadi karena rasa kecewa para politisi dan perwira di daerah tersebut terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam pemberontakan tersebut, para politisi dan perwira juga turut dibantu oleh AS karena sikap anti-komunis. Keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI adalah memberi bantuan berupa pesawat tempur, dana, perlengkapan, amunisi, dan pilot melalui CIA (*Central Intelligence Agency*). Latar Belakang, tuntutan, anggota, penumpasan, dan dampaknya keterlibatan AS dalam PRRI kekecewaan yang dirasakan oleh para politisi dan perwira tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, tetapi kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga membuat para politisi dan perwira di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti-komunis dan pro-barat. Anti-komunis mereka pun mendapat dukungan dan bantuan dari AS yang pada saat tersebut sedang terlibat perang dingin melawan US dan negara-negara komunis. Bantuan dari AS diberikan melalui CIA pada 1958, dimulai dengan memberi bantuan terselubung untuk PRRI.⁹⁴

⁹³.*Ibid.*

⁹⁴ Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/100000679/keterlibatan-amerika-serikat-dalam-prri?page=all> diunduh Tanggal 25 Februari 2024

E. *US involvement in PRRI*

In 1956 to 1958, there was a rebellion in Sumatra called the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI). The rebellion occurred because of the disappointment of politicians and officers in the area towards the policies of the central government of the Republic of Indonesia. In the rebellion, politicians and officers were also assisted by the US because of their anti-communist stance. US involvement in the PRRI rebellion was to provide assistance in the form of fighter planes, funds, equipment, ammunition, and pilots through the CIA (Central Intelligence Agency). Background, demands, members, suppression, and impact of US involvement in PRRI The disappointment felt by politicians and officers was not only caused by the policies of the central government of the Republic of Indonesia, but President Soekarno's closeness to the Indonesian Communist Party (PKI) also made politicians and officers in the area unhappy, because many of them were very anti-communist and pro-West. Their anti-communism also received support and assistance from the USA which at that time was involved in the cold war against the US and communist countries. US aid was provided through the CIA in 1958, starting with providing covert assistance to the PRRI.⁹⁵

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan gerakan separatisme yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Gerakan PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1958. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI adalah rasa kecewa para politisi dan perwira di Sumatera terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, yang dinilai hanya melancarkan pembangunan di Jawa. Gerakan PRRI sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab ada keterlibatan asing, khususnya AS. Gerakan separatist PRRI tidak hanya disebabkan oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga karena kedekatan Presiden

⁹⁵ Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/100000679/keterlibatan-amerika-serikat-dalam-prri?page=all> diunduh Tanggal 25 Februari 2024

Soekarno dan PKI yang kian lama semakin dekat yang menimbulkan ketidaksukaan dari golongan anti-komunis dan pro-Barat yang berada di Sumatera. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat serta ketidaksukaan terhadap kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI memicu sejumlah tokoh di Sumatera untuk bersatu dalam gerakan PRRI. Keterlibatan pihak asing dalam pemberontakan PRRI khususnya AS sangat beralasan. Pasalnya, saat tersebut AS sedang terlibat PD dengan negara-negara komunis, utamanya US. AS terlibat dalam pemberontakan PRRI dengan memberi bantuan terselubung berupa pesawat tempur, tentara, dana, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya. Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis PRRI.⁹⁶

The Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) was a separatist movement that emerged after Indonesian independence. The PRRI movement was formed in Padang, West Sumatra, on February 15, 1958. One of the things that caused the PRRI rebellion was the disappointment of politicians and officers in Sumatra towards the policies of the central government of the Republic of Indonesia, which was considered to only facilitate development in Java. The PRRI movement was difficult to crush compared to other rebellions, because there was foreign involvement, especially the USA. The PRRI separatist movement was not only caused by disappointment towards the policies of the central government, but also because of the increasingly closeness of President Soekarno and the PKI which caused dislike from anti-communist and pro-Western groups in Sumatra. Disappointment towards the central government and dislike towards President Soekarno's closeness to the PKI triggered a number of figures in Sumatra to unite in the PRRI movement. The involvement of foreign parties in the PRRI rebellion, especially the USA, was very reasonable. The reason was, at that time the US was involved in PD with communist countries, especially the USA. The USA was involved in

⁹⁶ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

the PRRI rebellion by providing covert assistance in the form of fighter jets, soldiers, funds, ammunition, and other military equipment. One proof of foreign involvement in the PRRI separatist movement.⁹⁷

F. Keterlibatan AS dalam Gerakan Permesta

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) merupakan gerakan separatisme yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Gerakan Permesta dimulai dengan dicetuskan dan diproklamasikannya Piagam Permesta di Makassar pada 2 Maret 1957. Sedangkan PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1958. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perjuangan Permesta adalah rasa kecewa para politisi dan perwira Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, yang dinilai hanya melancarkan pembangunan di Jawa. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab ada keterlibatan asing, khususnya AS. Bukti AS terlibat Permesta Gerakan separatis Permesta tidak hanya disebabkan oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga karena kedekatan Presiden Soekarno dan PKI yang semakin lama semakin dekat yang juga menimbulkan ketidaksukaan dari golongan anti-komunis dan pro-Barat yang berada di Sulawesi.⁹⁸

F. US Involvement in the Permesta Movement

The Universal People's Struggle (Permesta) was a separatist movement that emerged after Indonesian independence. The Permesta movement began with the initiation and proclamation of the Permesta Charter in Makassar on March 2, 1957. Meanwhile, PRRI was formed in Padang, West Sumatra, on February 15, 1958. One of the things that

⁹⁷ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

⁹⁸ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI dan Permesta <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

*caused the Permesta struggle was the disappointment of Sulawesi politicians and officers towards the policies of the central government of the Republic of Indonesia, which was considered to only facilitate development in Java. The Permesta movement was difficult to crush compared to other rebellions, because there was foreign involvement, especially the USA. Evidence of USA involvement in Permesta The Permesta separatist movement was not only caused by disappointment with the central government's policies, but also because of the increasingly closeness between President Soekarno and the PKI, which also caused dislike from anti-communist and pro-Western groups in Sulawesi.*⁹⁹

Kekecewaan terhadap pemerintah pusat serta ketidaksukaan terhadap kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI memicu sejumlah tokoh di Sulawesi dalam perjuangan Permesta. Keterlibatan pihak asing dalam pemberontakan Permesta, khususnya AS sangat beralasan. Pasalnya, saat tersebut AS sedang terlibat PD dengan negara-negara komunis, terutama US. Alasan Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya AS memberi bantuan terselubung berupa pesawat tempur, tentara, dana, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya. Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis Permesta adalah tertangkapnya pesawat udara yang dikendalikan agen *Central Intelligence Agency (CIA)*, Allen Pope. Dukungan yang diberikan CIA dalam pemberontakan Permesta berupa 15 pesawat udara pengebom B-26 dan beberapa pesawat udara tempur P-51 Mustang. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan Permesta, sebuah pesawat udara berhasil ditembak jatuh. Ternyata, pesawat udara pembom B-26 yang berhasil ditembak jatuh di Ambon pada 18 Mei 1958, dikendalikan oleh seorang agen CIA bernama Allen

⁹⁹ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI dan Permesta <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Lawrence Pope. yang tertangkap dalam keadaan hidup, sampai ke markas besar CIA di AS pada hari yang sama. Dalam pemberontakan Permesta. Setelah ditangkap, Allen Pope ditahan dan menjalani serangkaian persidangan di Indonesia. Diketahui bahwa sebelum terjun dalam operasi rahasia bersama Permesta, Allen Pope dikirim ke Filipina untuk mengaburkan identitas pesawatnya. Allen Pope mulai bergabung dengan Permesta pada 27 April 1958, dan beroperasi di bawah perwira militer lokal. Setelah penangkapan Allen Pope, AS memutuskan untuk berhenti memberikan bantuan kepada Permesta. Duta Besar AS Howard P Jones sempat mengatakan Allen Pope adalah tentara bayaran dan menyatakan penyesalannya atas keterlibatan warga AS, namun demikian pernyataan tersebut terbukti omong kosong, karena saat ditangkap, Allen Pope membawa sekitar 30 dokumen, termasuk catatan penerbangannya. pengadilan militer menyatakan bahwa Allen Pope bersalah atas pembunuhan 17 anggota angkatan bersenjata Indonesia dan enam warga sipil. Atas perbuatannya tersebut, Allen Pope dijatuhi hukuman mati, namun demikian, eksekusi tidak pernah terjadi. Allen Pope hanya menjadi tahanan rumah selama pemerintah AS bernegosiasi dengan Presiden Soekarno. Setelah dua tahun tawar-menawar, Allen Pope akhirnya dibebaskan dan diterbangkan ke AS pada 2 Juli 1962. Sekembalinya ke AS, Pope masih menerbangkan misi rahasia CIA di berbagai negara.¹⁰⁰

Sejarah diplomasi Indonesia-AS mengalami pasang dan surut. Secara umum hubungan diplomatik orde lama Indonesia-AS menjauh. Presiden Sukarno memposisikan AS sebagai salah satu kekuatan kapitalis global yang perlu dilawan, sedangkan hubungan diplomatik orde baru Indonesia-AS mendekat, karena Presiden Soeharto membutuhkan AS dan sekutunya untuk mendukung pembangunan nasional. Hubungan diplomatik Indonesia-AS di masa reformasi lebih berimbang karena presiden pada masa tersebut berusaha menegakan prinsip bebas

¹⁰⁰.*Ibid.*

aktif dan memperoleh kontrol yang ketat dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.¹⁰¹

Disappointment with the central government and dislike of President Soekarno's closeness to the PKI triggered a number of figures in Sulawesi in the Permesta struggle. The involvement of foreign parties in the Permesta rebellion, especially the USA, was very reasonable. The reason is, at that time the USA was involved in PD with communist countries, especially the USA. The reason the Permesta Movement was difficult to crush compared to other rebellions was that the USA provided covert assistance in the form of fighter planes, soldiers, funds, ammunition, and other military equipment. One piece of evidence of foreign involvement in the Permesta separatist movement was the capture of an aircraft controlled by a Central Intelligence Agency (CIA) agent, Allen Pope. The support provided by the CIA in the Permesta rebellion was in the form of 15 B-26 bombers and several P-51 Mustang fighter planes. When the Indonesian National Army (TNI) launched a military operation to crush the Permesta rebellion, an aircraft was shot down. It turned out that the B-26 bomber that was shot down in Ambon on May 18, 1958, was controlled by a CIA agent named Allen Lawrence Pope. who was captured alive, arrived at CIA headquarters in the US on the same day. In the Permesta rebellion. After being captured, Allen Pope was detained and underwent a series of trials in Indonesia. It is known that before joining the secret operation with Permesta, Allen Pope was sent to the Philippines to obscure the identity of his plane. Allen Pope joined Permesta on April 27, 1958, and operated under a local military officer. After the capture of Allen Pope, the USA decided to stop providing assistance to Permesta. USA Ambassador Howard P Jones had said that Allen Pope was a mercenary and expressed regret for the involvement of USA citizens, however, this statement was proven to be nonsense, because when arrested, Allen Pope was carrying around 30 documents, including his flight records. The military court found Allen Pope guilty of the murder of 17 members of the Indonesian armed forces and six

¹⁰¹ Arsip Rahasia '65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing <https://kumparan.com/kumparannews/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing> diunduh Tanggal 31 Agustus 24.

civilians. For his actions, Allen Pope was sentenced to death, however, the execution never took place. Allen Pope was only under house arrest while the USA government negotiated with President Soekarno. After two years of bargaining, Allen Pope was finally released and flown to the USA on July 2, 1962. Upon his return to the USA Pope continued to fly secret CIA missions in various countries.¹⁰²

The history of Indonesia-USA diplomacy has experienced ups and downs. In general, diplomatic relations between the old order of Indonesia and the USA drifted apart. President Sukarno positioned the USA as one of the global capitalist powers that needed to be fought, while diplomatic relations between the new order of Indonesia and the USA moved closer, because President Soeharto needed the US and its allies to support national development. Diplomatic relations between Indonesia and the USA during the reform era were more balanced because the president at that time tried to uphold the principle of free and active and obtain strict control from stakeholders and the community.¹⁰³

G. Konfrontasi Ideologi

Pada era 1950-an dan awal 1960-an, Indonesia berada di tengah-tengah dinamika politik global yang ditandai dengan PD antara Blok Barat yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur yang dipimpin oleh US. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengambil sikap yang unik dalam lanskap geopolitik tersebut yang dikenal sebagai "poros Jakarta-Peking-Moskow."¹⁰⁴

Soekarno adalah pemimpin dengan pandangan politik yang sangat dipengaruhi oleh gagasan anti-kolonialisme, anti-imperialisme dan semangat nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, Soekarno ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berdaulat dan tidak menjadi boneka dari

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Arsip Rahasia '65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing <https://kumparan.com/kumparannews/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing> diunduh Tanggal 31 Agustus 24.

¹⁰⁴ Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press diunduh Tanggal 4 September 24

kekuatan besar mana pun juga dan beliau menolak secara tegas keterlibatan Indonesia dalam aliansi militer atau politik yang didominasi oleh negara-negara Barat. Pada saat yang sama, Soekarno melihat sosialisme sebagai salah satu alternatif yang menarik, meskipun beliau tidak sepenuhnya mengadopsi ideologi komunis. Bagi beliau sosialisme, terutama versi yang dianut oleh US dan Republik Rakyat Tiongkok, menawarkan jalan menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang bebas dari eksploitasi kapitalis yang diasosiasikan dengan Barat.¹⁰⁵

Istilah "poros Jakarta-Peking-Moskow" mencerminkan kedekatan politik dan ideologi Indonesia dengan dua negara besar komunis tersebut yakni US dan Tiongkok yang menunjukkan upaya Soekarno untuk menyeimbangkan pengaruh global dengan memperkuat hubungan dengan Blok Timur, sambil tetap mempertahankan independensi Indonesia dari dominasi kekuatan mana pun juga. US adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan Indonesia di forum internasional. Soekarno melihat US sebagai sekutu strategis untuk membangun kekuatan militer dan ekonomi Indonesia tanpa harus bergantung pada bantuan Barat. US memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Indonesia, termasuk persenjataan canggih seperti pesawat tempur MiG dan kapal selam. Bantuan tersebut membuat Indonesia memiliki salah satu angkatan bersenjata terkuat di Asia Tenggara pada waktu tersebut, yang digunakan Soekarno untuk menekan klaim teritorial, seperti dalam konfrontasi dengan Belanda sehubungan dengan pengembalian Irian Barat (Papua), sedangkan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, juga merupakan sekutu dekat Indonesia selama periode tersebut. Soekarno terinspirasi oleh revolusi Tiongkok dan hubungan personal antara Soekarno dan Mao Zedong sangat baik. Tiongkok mendukung Indonesia dalam berbagai isu internasional dan mereka sering berbagi pandangan anti-imperialis yang kuat. Selain itu, Tiongkok

¹⁰⁵ Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan, diunduh Tanggal 4 September 24

menjadi mitra dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, termasuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan dan jembatan. Soekarno juga mengundang banyak teknisi dan tenaga ahli dari Tiongkok untuk membantu mengembangkan industri dan pertanian Indonesia.¹⁰⁶

G. Ideological Confrontation

In the 1950s and early 1960s, Indonesia was in the midst of a global political dynamic marked by the PD between the Western Bloc led by the USA and the Eastern Bloc led by the USSR. Under President Sukarno, Indonesia took a unique stance in this geopolitical landscape known as the "Jakarta-Peking-Moscow axis."¹⁰⁷

Sukarno was a leader with political views that were heavily influenced by the ideas of anti-colonialism, anti-imperialism and nationalism. After Indonesia's independence from Dutch colonialism, Sukarno wanted to ensure that Indonesia remained sovereign and did not become a puppet of any great power and he firmly rejected Indonesia's involvement in military or political alliances dominated by Western countries. At the same time, Sukarno saw socialism as an attractive alternative, although he did not fully adopt communist ideology. For him, socialism, especially the versions adopted by the USSR and the People's Republic of China, offered a path to economic and social development free from the capitalist exploitation associated with the West.¹⁰⁸

The term "Jakarta-Peking-Moscow axis" reflects Indonesia's political and ideological closeness to the two major communist countries, the USSR and China, which shows Sukarno's efforts to balance global influence by strengthening relations with the Eastern Bloc, while maintaining Indonesia's independence from the domination of any other power. The USSR was one of the earliest countries to recognize Indonesia's independence and supported Indonesia's struggle in international forums. Sukarno saw the USSR as a strategic

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Kahin, G. M. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press diunduh Tanggal 4 September 24

¹⁰⁸ Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Palgrave Macmillan, diunduh Tanggal 4 September 24

ally to build Indonesia's military and economic strength without having to rely on Western aid. The USSR provided significant military aid to Indonesia, including sophisticated weaponry such as MiG fighter jets and submarines. This aid gave Indonesia one of the strongest armed forces in Southeast Asia at that time, which Sukarno used to press territorial claims, such as in the confrontation with the Netherlands regarding the return of West Irian (Papua), while China, under the leadership of Mao Zedong, was also a close ally of Indonesia during this period. Sukarno was inspired by the Chinese revolution and the personal relationship between Sukarno and Mao Zedong was very good. China supported Indonesia on various international issues and they often shared strong anti-imperialist views. In addition, China became a partner in various development projects in Indonesia, including large infrastructure projects such as road and bridge construction. Soekarno also invited many technicians and experts from China to help develop Indonesian industry and agriculture.¹⁰⁹

Poros Jakarta-Peking-Moskow tersebut menimbulkan kekhawatiran AS yang memimpin Blok Barat dalam PD, mengganggu kedekatan Indonesia dengan Blok Timur sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategi AS di Asia Tenggara. Pada waktu tersebut, kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi AS, terutama setelah jatuhnya Tiongkok ke tangan komunis pada tahun 1949 dan perang di Korea yang mempertegas garis batas ideologi antara komunis dan kapitalis.¹¹⁰ Soekarno secara terbuka mengkritik kebijakan luar negeri AS, beliau menganggap sebagai imperialisme baru. Dalam berbagai pidatonya, Soekarno menuduh AS mencoba mendikte negara-negara berkembang dan mendukung rezim-rezim yang korup untuk mempertahankan pengaruhnya. Salah satu peristiwa penting yang mempertegas sikap anti-AS Soekarno adalah penolakan terhadap aliansi militer seperti SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*), yang dipandang

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ McVey, R. T. (1968). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." *Indonesia*, (6), 91-120 diunduh Tanggal 4 September 24

Soekarno sebagai upaya AS untuk mengontrol kawasan Asia Tenggara. Ketegangan antara Indonesia dan AS memuncak ketika CIA diduga terlibat untuk mendukung pemberontakan regional di Indonesia pada akhir 1950-an. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh kelompok-kelompok militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno. Keterlibatan AS untuk mendukung kelompok-kelompok ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara kedua negara.

Poros Jakarta-Peking-Moskow membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam dinamika PD di Asia Tenggara. Soekarno berhasil memposisikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya penting secara geografis tetapi juga berpengaruh secara politik di kancah internasional. Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 menjadi simbol kuat dari peran Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok, yang menolak tunduk pada kekuatan besar mana pun juga. Namun demikian di dalam negeri, kebijakan luar negeri Soekarno tersebut menciptakan ketegangan yang akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya. Dukungan yang kuat terhadap PKI dan kedekatan dengan Tiongkok dan US membuat banyak kalangan militer dan politik di Indonesia merasa khawatir. Ini menjadi salah satu faktor yang memicu kudeta militer pada tahun 1965, yang membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan dan mengakhiri era Soekarno.

The Jakarta-Peking-Moscow axis raised concerns among the USSR, which led the Western Bloc in PD, considering Indonesia's proximity to the Eastern Bloc as a direct threat to USA strategic interests in Southeast Asia. At that time, the Southeast Asian region was very important to the USA, especially after the fall of China to the communists in 1949 and the war in Korea which emphasized the ideological boundaries between communists and capitalists.¹¹¹ Soekarno openly criticized USA foreign policy, which he considered as new imperialism. In various speeches, Soekarno accused the USA of

¹¹¹ McVey, R. T. (1968). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." *Indonesia*, (6), 91-120 diunduh Tanggal 4 September 24

trying to dictate developing countries and supporting corrupt regimes to maintain its influence. One important event that emphasized Soekarno's anti-USA stance was the rejection of military alliances such as SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), which Soekarno viewed as an attempt by the USA to control the Southeast Asian region. Tensions between Indonesia and the USA peaked when the CIA was suspected of being involved in supporting regional rebellions in Indonesia in the late 1950s. The rebellion was led by military groups dissatisfied with the central government led by Soekarno. The involvement of the US in supporting these groups created a wider gap between the two countries.

The Jakarta-Peking-Moscow axis made Indonesia an important player in the dynamics of PD in Southeast Asia. Soekarno succeeded in positioning Indonesia as a country that was not only geographically important but also politically influential in the international arena. The Asia-Africa Conference held in Bandung in 1955 became a strong symbol of Indonesia's role as a leader of the Non-Aligned Movement, which refused to submit to any great power. However, domestically, Soekarno's foreign policy created tensions that eventually contributed to his downfall. Strong support for the PKI and closeness to China and the US made many military and political circles in Indonesia worried. This was one of the factors that triggered the military coup in 1965, which brought Soeharto to power and ended the Soekarno era.

H. Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan salah satu inisiatif penting dalam sejarah politik internasional yang muncul pada masa PD, yang membagi dunia terbagi menjadi dua blok besar yakni Blok Barat yang dipimpin oleh AS dengan ideologi kapitalis-liberalis, dan Blok Timur yang dipimpin oleh US dengan ideologi komunis. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan Gerakan Non-Blok tersebut. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan. Negara-negara tersebut menghadapi tekanan untuk memilih berpihak pada salah satu blok besar dalam PD, baik Blok Barat

atau Blok Timur, namun demikian banyak pemimpin negara-negara tersebut tersebut merasa bahwa keterlibatan dalam salah satu blok besar akan mengekang kedaulatan mereka dan membatasi kemampuan mereka untuk menentukan kebijakan yang independen. Dalam hubungan inilah, muncul ide untuk menciptakan sebuah gerakan yang tidak berpihak pada salah satu blok, tetapi berfokus pada kepentingan dan kebutuhan negara-negara yang baru merdeka. Gerakan tersebut bertujuan untuk menghindari keterlibatan dalam konflik yang bukan kepentingan mereka dan memperkuat solidaritas di antara negara-negara berkembang.¹¹²

Indonesia, di bawah Soekarno, menjadi salah satu negara utama yang menginisiasi pembentukan Gerakan Non-Blok. Soekarno adalah seorang pemimpin yang kuat dan berkarisma, dengan visi besar untuk memimpin negara-negara yang baru merdeka menuju kemerdekaan yang sejati, tidak hanya secara politik tetapi juga ekonomi dan sosial. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Konferensi tersebut sering dianggap sebagai cikal bakal Gerakan Non-Blok. Di sini, Soekarno memperkenalkan gagasan anti-imperialisme dan solidaritas di antara negara-negara yang baru merdeka. Konferensi tersebut mempertemukan pemimpin-pemimpin dari negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas bagaimana mereka dapat bekerja sama dan mendukung satu sama lain untuk menghadapi tantangan global. Dalam beberapa tahun berikutnya, gagasan tersebut semakin matang. Soekarno, bersama dengan pemimpin India (Jawaharlal Nehru), Mesir (Gamal Abdel Nasser), Yugoslavia (Josip Broz Tito), dan Ghana (Kwame Nkrumah), mulai merencanakan pembentukan sebuah gerakan yang lebih formal. Mereka ingin memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang kuat dalam arena politik internasional dan tidak menjadi korban dari persaingan antara Blok Barat dan Timur. Gerakan Non-Blok secara resmi dibentuk

¹¹² McVey, R. T. (1968). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." *Indonesia*, (6), 91-120 diunduh Tanggal 4 September 24

pada tahun 1961, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok pertama yang diadakan di Beograd, Yugoslavia. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, termasuk Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana, yang menjadi pelopor gerakan tersebut.¹¹³

H. *Non-Aligned Movement*

*The Non-Aligned Movement was one of the important initiatives in the history of international politics that emerged during the PD, which divided the world into two large blocks, namely the Western Bloc led by the USA with a capitalist-liberal ideology, and the Eastern Bloc led by the USSR with a communist ideology. Indonesia, under the leadership of President Soekarno, played an important role in the formation and development of the Non-Aligned Movement. In the late 1950s to early 1960s, many countries in Asia, Africa, and Latin America had just gained independence from colonialism. These countries faced pressure to choose to side with one of the large blocks in the PD, either the Western Bloc or the Eastern Bloc, however, many leaders of these countries felt that involvement in one of the large blocks would curb their sovereignty and limit their ability to determine independent policies. In this connection, the idea arose to create a movement that did not side with either block, but focused on the interests and needs of newly independent countries. The movement aimed to avoid involvement in conflicts that were not in their interests and to strengthen solidarity among developing countries.*¹¹⁴

Indonesia, under Sukarno, became one of the main countries that initiated the formation of the Non-Aligned Movement. Sukarno was a strong and charismatic leader, with a grand vision to lead the newly independent countries to true independence, not only politically but also economically and socially. In 1955, Indonesia hosted the Asia-Africa Conference in Bandung. The conference is often considered the forerunner of the Non-Aligned Movement. Here, Sukarno introduced the ideas of anti-imperialism and solidarity among the newly independent countries. The conference brought together leaders from

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ McVey, R. T. (1968). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." *Indonesia*, (6), 91-120 diunduh Tanggal 4 September 24

*Asian and African countries to discuss how they could work together and support each other to face global challenges. Over the next few years, the ideas matured. Sukarno, along with the leaders of India (Jawaharlal Nehru), Egypt (Gamal Abdel Nasser), Yugoslavia (Josip Broz Tito), and Ghana (Kwame Nkrumah), began planning to form a more formal movement. They wanted to ensure that developing countries had a strong voice in the international political arena and did not become victims of the rivalry between the Western and Eastern Blocs. The Non-Aligned Movement was officially formed in 1961, at the first Non-Aligned Summit held in Belgrade, Yugoslavia. The summit was attended by 25 countries, including Indonesia, India, Egypt, Yugoslavia, and Ghana, which became the pioneers of the movement.*¹¹⁵

Tujuan utama dari Gerakan Non-Blok adalah untuk menjaga kedaulatan nasional, menghindari keterlibatan dalam konflik Blok, memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial. Meskipun Gerakan Non-Blok menyatakan dirinya netral dan tidak berpihak, ada kritik bahwa posisi tersebut sering kali terlihat lebih dekat dengan US dan negara-negara Blok Timur, terutama karena retorika anti-imperialisme dan anti-Barat yang sering kali disuarakan oleh beberapa pemimpin dalam gerakan tersebut, termasuk Soekarno. Beliau sering kali mengkritik kebijakan luar negeri AS dan sekutunya, yang dianggapnya sebagai bentuk neo-imperialisme. Selain itu, Indonesia di bawah Soekarno juga menjalin hubungan yang cukup erat dengan US dan Tiongkok, baik dalam hal ideologi maupun kerja sama militer dan ekonomi, misalnya terlihat dalam pembelian senjata-senjata canggih dari US pada awal 1960-an. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Gerakan Non-Blok bukanlah gerakan pro-komunis.¹¹⁶

Banyak anggotanya, seperti India di bawah Nehru, jelas-jelas menolak komunisme dan lebih menganut jalur sosialisme demokratik atau kapitalisme dengan regulasi, namun demikian,

¹¹⁵.Ibid.

¹¹⁶.Ibid.

karena AS lebih agresif untuk menahan penyebaran komunisme, negara-negara Non-Blok sering kali terlihat lebih simpatik terhadap Blok Timur yang lebih mendukung gerakan kemerdekaan nasional. Gerakan Non-Blok memiliki dampak yang signifikan pada politik internasional selama periode PD yang memberikan *platform* kepada negara-negara berkembang untuk bersuara dalam forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memainkan peran untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Timur. Di Indonesia sebagai salah satu pemimpin Gerakan Non-Blok mengangkat profil internasional Soekarno dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengaruh dalam dunia politik global pada masanya, meskipun demikian, setelah jatuhnya Soekarno pada 1965, dan berubahnya arah politik luar negeri Indonesia di bawah Soeharto yang lebih pro-Barat, peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok menurun, gerakan tersebut tetap menjadi bagian penting untuk sejarah diplomasi Indonesia dan perjuangan negara-negara berkembang untuk mencari posisi yang independen di panggung dunia.

The main objective of the Non-Aligned Movement was to maintain national sovereignty, avoid involvement in bloc conflicts, and fight for economic and social justice. Although the Non-Aligned Movement declared itself neutral and non-partisan, there was criticism that its position often seemed closer to the USSR and the Eastern Bloc countries, especially because of the anti-imperialist and anti-Western rhetoric often voiced by several leaders in the movement, including Sukarno. He often criticized the foreign policy of the USA and its allies, which he considered a form of neo-imperialism. In addition, Indonesia under Sukarno also established quite close relations with the USSR and China, both in terms of ideology and military and economic cooperation, for example seen in the purchase of sophisticated weapons from the US in the early 1960s. However, it should be noted that the Non-Aligned Movement was not a pro-communist movement. Many of its members, such as India under Nehru, explicitly rejected communism and preferred democratic socialism or regulated capitalism, however, as the USA was more aggressive in containing the spread of communism, the

NAM often appeared more sympathetic to the Eastern Bloc, which was more supportive of national independence movements. The NAM had a significant impact on international politics during the WW period, providing a platform for developing countries to speak out in international forums such as the United Nations (UN) and playing a role in easing tensions between the Western and Eastern Blocs. In Indonesia, as one of the leaders of the NAM, it raised Sukarno's international profile and made Indonesia one of the most influential countries in global politics at the time. However, after the fall of Sukarno in 1965, and the shift in Indonesian foreign policy under Suharto to a more pro-Western direction, Indonesia's role in the NAM declined, the movement remains an important part of Indonesian diplomatic history and the struggle of developing countries to find an independent position on the world stage.

I. Pembelian Senjata dari Blok Timur

Pada awal 1960-an, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memasuki salah satu periode paling intens dalam hubungan internasionalnya. Hubungan tersebut dibentuk oleh dinamika global PD, dua negara blok besar, AS dengan sekutunya dan US dengan sekutunya di sisi lain berusaha mendapatkan pengaruh di berbagai bagian dunia. Salah satu manifestasi paling AS nyata dari ketegangan tersebut di Indonesia adalah keputusan Soekarno untuk mulai membeli senjata dari Blok Timur, khususnya US, antara tahun 1961 dan 1964. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia berada dalam posisi yang rentan baik secara politik maupun ekonomi. Negara tersebut masih mencari bentuk pemerintahan yang stabil sambil berurusan dengan berbagai tantangan internal, termasuk ketidakstabilan politik, ancaman separatisme, dan ekonomi yang lemah. Dalam konteks global, Indonesia juga berada dalam posisi yang unik sebagai negara berkembang yang baru merdeka, yang berusaha untuk menavigasi di antara dua kekuatan besar yang bersaing, yakni US dan AS. Presiden Soekarno, dengan visinya tentang sebuah Indonesia yang kuat dan berdaulat, merasa bahwa salah satu cara untuk menegaskan posisi negaranya di panggung internasional adalah dengan

memperkuat kemampuan militer Indonesia. Pada awal 1960-an, beliau semakin khawatir dengan ancaman dari dalam dan luar negeri, termasuk kekuatan kolonial yang masih tersisa dan potensi agresi dari negara-negara tetangga. Untuk mengimbangi hal ini, Soekarno merasa perlu untuk membangun kekuatan militer yang kuat, dan beliau melihat US sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada saat yang sama, hubungan Indonesia dengan AS mulai memburuk. Soekarno merasa tidak percaya dengan niat AS, yang beliau anggap mendukung status quo kolonial di Asia Tenggara dan kurang mendukung perjuangan Indonesia untuk melawan pengaruh kolonialisme di kawasan tersebut, khususnya dalam konfrontasinya dengan Belanda atas Irian Barat (Papua Barat). Di sisi lain, AS yang dipimpin oleh Presiden Eisenhower dan kemudian Kennedy, juga mencurigai Soekarno yang semakin dekat dengan gerakan komunis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. AS enggan memberikan bantuan militer dalam skala besar kepada Indonesia, terutama karena kekhawatiran bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk mendukung tindakan-tindakan agresif yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat, seperti upaya merebut Irian Barat dari Belanda atau keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok yang lebih cenderung mendukung negara-negara komunis. Kecurigaan tersebut semakin diperkuat oleh sikap Soekarno yang semakin bersahabat dengan US dan Tiongkok. Melihat sikap AS yang tidak sepenuhnya mendukung ambisi militer Indonesia, Soekarno kemudian mengalihkan perhatiannya ke US. Pada awal 1960-an, US di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan melihat Indonesia sebagai mitra potensial dalam PD. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan US berkembang pesat, dengan serangkaian kunjungan diplomatik yang diikuti oleh kesepakatan-kesepakatan militer.

I. Arms Purchases from the Eastern Bloc

In the early 1960s, Indonesia, under the leadership of President Sukarno, entered one of the most intense periods in its international relations. These relations were shaped by the global dynamics of the PD, two major blocs of nations, the USSR and its allies on the one hand, seeking to gain influence in various parts of the world. One of the most visible manifestations of these tensions in Indonesia was Sukarno's decision to begin purchasing arms from the Eastern Bloc, particularly the USSR, between 1961 and 1964. Following its independence in 1945, Indonesia was in a vulnerable position both politically and economically. The country was still searching for a stable form of government while dealing with various internal challenges, including political instability, the threat of separatism, and a weak economy. In the global context, Indonesia was also in a unique position as a newly independent developing nation, attempting to navigate between two competing great powers, the USSR and the USA. President Sukarno, with his vision of a strong and sovereign Indonesia, felt that one way to assert his country's position on the international stage was by strengthening Indonesia's military capabilities. In the early 1960s, he became increasingly concerned about threats from within and outside the country, including the remaining colonial powers and potential aggression from neighboring countries. To counteract this, Sukarno felt the need to build a strong military force, and he saw the USA as a strategic partner to achieve this goal.

At the same time, Indonesia's relationship with the USSR began to deteriorate. Sukarno was distrustful of the intentions of the USA, which he saw as supporting the colonial status quo in Southeast Asia and less supportive of Indonesia's struggle against colonialism in the region, especially in its confrontation with the Netherlands over West Irian (West Papua). On the other hand, the USA, led by Presidents Eisenhower and later Kennedy, was also suspicious of Sukarno's growing closeness to the communist movement, both domestically and internationally the USA was reluctant to provide large-scale military assistance to Indonesia, especially because of concerns that the weapons could be used to support aggressive actions that were not in line with Western interests, such as the attempt to seize West Irian from the Netherlands or Indonesia's involvement in the Non-Aligned

Movement which tended to support communist countries. This suspicion was further strengthened by Soekarno's increasingly friendly attitude towards the USsr and China. Seeing the USA's attitude that did not fully support Indonesia's military ambitions, Soekarno then turned his attention to the USSR. In the early 1960s, the USSR under the leadership of Nikita Khrushchev, sought to expand its influence in Asia and saw Indonesia as a potential partner in the PD. Diplomatic relations between Indonesia and the USSR developed rapidly, with a series of diplomatic visits followed by military agreements.

Pada tahun 1961, Indonesia mulai membeli peralatan militer dalam jumlah besar dari US. Peralatan tersebut mencakup berbagai jenis senjata canggih pada masanya, termasuk menyediakan pesawat udara tempur MiG-21 dan MiG-19 kepada Angkatan Udara Indonesia, yang pada saat tersebut menjadi salah satu angkatan udara terkuat di Asia Tenggara. Pesawat-pesawat tersebut memberikan keunggulan udara yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam konfrontasi dengan Belanda di Irian Barat. Selain pesawat udara tempur, US juga memasok Indonesia dengan kapal perang, termasuk kapal penjelajah kelas Sverdlov, kapal selam, dan kapal perusak yang memperkuat Angkatan Laut Indonesia dan membuatnya mampu menghadapi tantangan maritim dari negara-negara tetangga dan kekuatan kolonial. Indonesia juga membeli tank, kendaraan lapis baja, dan artileri berat dari US yang digunakan untuk memperkuat Angkatan Darat Indonesia. Alat-alat tersebut tidak hanya digunakan untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal tetapi juga untuk menekan gerakan separatis di dalam negeri. Total nilai pembelian senjata dari US mencapai sekitar US\$2,5 miliar yang sebagian besar diberikan dalam bentuk kredit lunak. Ini adalah jumlah yang sangat besar pada saat itu, dan menunjukkan komitmen US untuk memperkuat hubungan militer dengan Indonesia. Pembelian senjata besar-besaran tersebut mengkhawatirkan AS dan sekutu-sekutunya di Barat yang melihat sebagai tanda bahwa Indonesia semakin condong ke arah Blok Timur dan menjadi ancaman potensial bagi stabilitas

di Asia Tenggara, yang merupakan wilayah strategis dalam PD. Ada kekhawatiran bahwa Indonesia, dengan kekuatan militernya yang semakin meningkat, dapat menjadi pemicu konflik regional atau bahkan memperkuat gerakan komunis di Asia Tenggara.¹¹⁷

AS merespons dengan mencoba membatasi pengaruh US di Indonesia. Mereka meningkatkan bantuan ekonomi dan mulai menawarkan program-program pendidikan dan bantuan lainnya untuk menyeimbangkan hubungan dengan Indonesia, namun demikian, hingga awal 1965, hubungan antara Indonesia dan AS tetap tegang, dan Soekarno terus menjalin hubungan erat dengan Blok Timur. Pembelian senjata dari US tersebut berdampak jangka panjang bagi Indonesia. Di samping itu, juga Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya di kawasan dan memproyeksikan kekuatannya dalam perselisihan dengan Belanda mengenai Irian Barat, yang akhirnya berhasil diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1963. Ketergantungan pada Blok Timur juga meningkatkan isolasi Indonesia dari negara-negara Barat, yang melihat Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara satelit US.¹¹⁸

In 1961, Indonesia began purchasing large amounts of military equipment from the USSR. This included a variety of advanced weapons for the time, including the provision of MiG-21 and MiG-19 fighter aircraft to the Indonesian Air Force, which at the time was one of the strongest air forces in Southeast Asia. These aircraft provided Indonesia with significant air superiority, especially in the confrontation with the Dutch in West Irian. In addition to fighter aircraft, the USSR also supplied Indonesia with warships, including Sverdlov-class cruisers, submarines, and destroyers that strengthened the Indonesian Navy and made it capable of facing maritime challenges from neighboring countries and colonial powers. Indonesia also

¹¹⁷ McVey, Ruth T. (1971). "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy." *Indonesia*, (11), 131-165, diunduh Tanggal 4 September 24

¹¹⁸ *Foreign Relations of the United States (FRUS)*. (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office diunduh Tanggal 4 September 24

*purchased tanks, armored vehicles, and heavy artillery from the USSR that were used to strengthen the Indonesian Army. These tools were used not only to defend the country from external threats but also to suppress separatist movements at home. The total value of arms purchases from the USSR reached around US\$2.5 billion, most of which was provided in the form of soft loans. This was a very large sum at the time, and demonstrated the US's commitment to strengthening military ties with Indonesia. The massive arms purchases worried the USA and its Western allies who saw it as a sign that Indonesia was increasingly leaning towards the Eastern Bloc and a potential threat to stability in Southeast Asia, a strategic region in the PD. There were concerns that Indonesia, with its growing military power, could become a trigger for regional conflict or even strengthen communist movements in Southeast Asia.*¹¹⁹

*The USA responded by trying to limit USSR influence in Indonesia. They increased economic aid and began offering educational programs and other assistance to balance relations with Indonesia, but by early 1965, relations between Indonesia and the USA remained tense, and Sukarno continued to maintain close ties with the Eastern Bloc. The US R arms purchases had long-term consequences for Indonesia. In addition, Indonesia also sought to assert its sovereignty in the region and project its power in the dispute with the Netherlands over West Irian, which was eventually integrated into Indonesian territory in 1963. Dependence on the Eastern Bloc also increased Indonesia's isolation from Western countries, which saw Indonesia as a potential US satellite state.*¹²⁰

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, ketika kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, Indonesia mengubah orientasi politik luar negerinya secara drastis. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menjauh dari Blok Timur dan kembali mendekat ke AS dan sekutu-sekutunya,

¹¹⁹ McVey, Ruth T. (1971). "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy." *Indonesia*, (11), 131-165, diunduh Tanggal 4 September 24

¹²⁰ *Foreign Relations of the United States (FRUS). (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office* diunduh Tanggal 4 September 24

yang menyebabkan hubungan militer antara Indonesia dan US memudar. Namun, peninggalan senjata dan peralatan militer yang dibeli dari US tetap menjadi bagian penting dari angkatan bersenjata Indonesia selama beberapa dekade.

J. Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia, juga dikenal sebagai "Konfrontasi," adalah konflik bersenjata yang terjadi antara tahun 1963 dan 1966. Konflik tersebut terjadi antara Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, dan negara baru Malaysia, yang didukung oleh Inggris dan sekutu-sekutunya, termasuk AS. Konfrontasi tersebut merupakan salah satu episode paling signifikan dalam sejarah hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat pada masa PD. Pada awal 1960-an, Inggris berencana untuk membentuk *Federasi Malaysia* yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak, sebagai bagian dari rencana dekolonisasi di Asia Tenggara. *Federasi Malaysia* secara resmi dibentuk pada 16 September 1963, namun demikian, pembentukan federasi tersebut menimbulkan ketegangan di kawasan tersebut, terutama dari Presiden Soekarno dan PKI, yang menganggap *Federasi Malaysia* sebagai bentuk neo-kolonialisme.¹²¹

After the G30S/PKI incident in 1965, when power shifted from Sukarno to Suharto, Indonesia changed its foreign policy orientation drastically. The New Order government under Suharto moved away from the Eastern Bloc and back closer to the USSR and its allies, which caused military relations between Indonesia and the USSR to fade. However, the legacy of weapons and military equipment purchased from the USSR remained an important part of the Indonesian armed forces for decades.

¹²¹ United Nations. (1963). Report of the United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (West Irian). United Nations diunduh Tanggal 4 Septembr 24

J. *Confrontation with Malaysia*

*The Indonesia-Malaysia Confrontation, also known as "Konfrontasi," was an armed conflict that took place between 1963 and 1966. The conflict took place between Indonesia, under the leadership of President Sukarno, and the new state of Malaysia, which was supported by Britain and its allies, including the USA. The confrontation was one of the most significant episodes in the history of Indonesia's relations with Western countries during the PD era. In the early 1960s, Britain planned to form a Federation of Malaysia that would include Malaya, Singapore, Sabah, and Sarawak, as part of its decolonization plan in Southeast Asia. The Federation of Malaysia was officially formed on 16 September 1963, however, the formation of the federation caused tensions in the region, especially from President Sukarno and the PKI, who viewed the Federation of Malaysia as a form of neo-colonialism.*¹²²

Soekarno percaya bahwa Malaysia adalah "proyek boneka" Inggris yang dirancang untuk menjaga pengaruh Barat di Asia Tenggara dan mencegah penyebaran komunisme. Dalam pandangan Soekarno, pembentukan Malaysia adalah ancaman bagi revolusi anti-imperialis di kawasan tersebut dan sebagai tindakan melawan integrasi nasional Indonesia, terutama karena Malaysia dianggap sebagai negara yang secara geografis dekat dengan wilayah Indonesia. Pada tahun 1963, setelah pembentukan *Federasi Malaysia*, Soekarno mengumumkan kebijakan "Ganyang Malaysia." Kebijakan tersebut menandai dimulainya kampanye militer dan diplomatik melawan Malaysia. Konfrontasi tidak hanya berlangsung di medan perang tetapi juga dalam bentuk perang diplomatik dan propaganda. Soekarno menggunakan pidato-pidato berapi-api untuk menggalang dukungan di dalam negeri dan di antara negara-negara berkembang lainnya, menuduh Malaysia sebagai alat neo-kolonialisme dan imperialisme.¹²³

¹²² United Nations. (1963). Report of the United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (West Irian). United Nations diunduh Tanggal 4 Septembr 24

¹²³Ibid.

Kemudian, Indonesia meluncurkan operasi militer, yang dikenal sebagai "Operasi Dwikora," di mana pasukan Indonesia melakukan serangan lintas batas ke wilayah Malaysia, terutama di Kalimantan Utara (sekarang Sabah dan Sarawak). Konflik tersebut melibatkan serangan gerilya, infiltrasi pasukan ke wilayah Malaysia, dan pertempuran skala kecil. Meskipun sebagian besar operasi tersebut tidak berhasil mencapai tujuan strategis besar, mereka berhasil menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut. AS, sebagai salah satu sekutu utama Inggris dan kekuatan besar dalam PD, sangat mendukung keberadaan Malaysia sebagai penyeimbang terhadap potensi penyebaran komunisme di Asia Tenggara. AS melihat Konfrontasi sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan sebagai langkah agresif dari pemerintahan Soekarno yang semakin condong ke kiri, terutama dengan kedekatannya dengan US dan Tiongkok. Pada saat tersebut, AS sangat khawatir bahwa konflik dapat memperlemah posisi negara-negara Barat di Asia Tenggara dan membuka jalan bagi komunisme. Selain itu, AS juga khawatir bahwa Konfrontasi dapat memperlemah Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO), sebuah aliansi militer yang dipimpin AS untuk menahan pengaruh komunis di kawasan tersebut, oleh karena itu, AS memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada Malaysia dan Inggris selama konfrontasi, namun demikian, AS berhati-hati untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, mengingat hubungan kompleksnya dengan Indonesia.¹²⁴

Sukarno believed that Malaysia was a British "puppet project" designed to maintain Western influence in Southeast Asia and prevent the spread of communism. In Sukarno's view, the formation of Malaysia was a threat to the anti-imperialist revolution in the region and an act against Indonesian national integration, especially since Malaysia was considered a country geographically close to Indonesian

¹²⁴ United Nations. (1963). Report of the United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (West Irian). United Nations diunduh Tanggal 4 Septembr 24

territory. In 1963, after the formation of the Federation of Malaysia, Sukarno announced the "Crush Malaysia" policy. This policy marked the beginning of a military and diplomatic campaign against Malaysia. The confrontation took place not only on the battlefield but also in the form of diplomatic and propaganda warfare. Sukarno used fiery speeches to rally support at home and among other developing countries, accusing Malaysia of being a tool of neo-colonialism and imperialism.¹²⁵

Then, Indonesia launched a military operation, known as "Operation Dwikora," in which Indonesian troops carried out cross-border raids into Malaysian territory, especially in North Kalimantan (now Sabah and Sarawak). The conflict involved guerrilla attacks, troop infiltrations into Malaysian territory, and small-scale skirmishes. Although most of these operations failed to achieve any major strategic objectives, they did create instability in the region. The US, as one of Britain's main allies and a major power in the PD, strongly supported Malaysia's presence as a counterweight to the potential spread of communism in Southeast Asia. The USA saw Confrontation as a threat to regional stability and as an aggressive move by the Sukarno government that was increasingly leaning to the left, especially with its closeness to the USSR and China. At the time, the USSR was very concerned that the conflict could weaken the position of Western countries in Southeast Asia and open the way for communism. In addition, the USA was also concerned that Confrontation could weaken the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), a USA-led military alliance to contain communist influence in the region, therefore, the USA provided logistical and intelligence support to Malaysia and the UK during the confrontation, however, the USA was careful not to get involved directly in the conflict, given its complex relationship with Indonesia.¹²⁶

¹²⁵Ibid.

¹²⁶ United Nations. (1963). Report of the United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (West Irian). United Nations diunduh Tanggal 4 Septembr 24

Seiring berjalannya waktu, konfrontasi semakin menekan ekonomi dan politik Indonesia. Pada akhir tahun 1965, Indonesia berada dalam kekacauan internal setelah kudeta yang gagal oleh PKI, yang dikenal sebagai Peristiwa G30S. Peristiwa tersebut diikuti oleh pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang menyebabkan jatuhnya Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto ke kekuasaan. Jenderal Soeharto, yang mengambil alih kekuasaan setelah Soekarno semakin kehilangan dukungan politik, memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan luar negeri. Soeharto lebih pragmatis dan menyadari bahwa melanjutkan konfrontasi akan merusak ekonomi Indonesia yang sudah lemah dan isolasi diplomatik dari negara-negara Barat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai membuka kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia dan negara-negara Barat, serta menarik diri dari Konfrontasi. Konfrontasi secara resmi berakhir pada 11 Agustus 1966, setelah Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai yang dimediasi oleh Thailand. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia mengakui keberadaan Malaysia sebagai negara yang sah, dan kedua belah pihak setuju untuk menghentikan segala bentuk permusuhan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, konfrontasi menyebabkan kerusakan ekonomi dan menurunkan reputasi internasional negara tersebut. Bagi Malaysia dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, kemenangan diplomatik dan militer dalam Konfrontasi memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara.¹²⁷

Konfrontasi juga menandai akhir dari era Soekarno yang revolusioner dan awal dari era Orde Baru di bawah Soeharto, yang lebih pro-Barat dan anti-komunis. Perubahan tersebut membawa Indonesia lebih dekat ke AS dan sekutu-sekutunya, sekaligus mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung selama periode PD. Secara keseluruhan, konfrontasi Indonesia-

¹²⁷ Subandrio. (2001). Indonesia menghadapi masa depan. Gunung Agung diunduh Tanggal 4 September 24

Malaysia adalah salah satu episode penting dalam sejarah PD di Asia Tenggara yang mencerminkan dinamika politik global pada masa itu dan bagaimana konflik lokal dapat dipengaruhi oleh persaingan ideologis yang lebih besar antara kekuatan besar dunia.¹²⁸

*Over time, the confrontation increasingly put pressure on Indonesia's economy and politics. In late 1965, Indonesia was in internal turmoil following a failed coup by the PKI, known as the G30S Incident. This was followed by a massive purge of PKI members and sympathizers, leading to the downfall of Sukarno and the rise of General Suharto to power. General Suharto, who took power after Sukarno increasingly lost political support, had a different view on foreign policy. Suharto was more pragmatic and recognized that continuing the confrontation would damage Indonesia's already weak economy and diplomatic isolation from Western countries. Under his leadership, Indonesia began to reopen diplomatic relations with Malaysia and Western countries, and withdrew from the Confrontation. The Confrontation officially ended on 11 August 1966, after Indonesia and Malaysia signed a peace agreement mediated by Thailand. In the agreement, Indonesia recognized Malaysia as a legitimate state, and both parties agreed to cease all hostilities. The Indonesia-Malaysia Confrontation had a significant impact on Indonesia and the Southeast Asian region. For Indonesia, the confrontation caused economic damage and tarnished the country's international reputation. For Malaysia and its allies, including the United States, the diplomatic and military victory in the Confrontation strengthened their position in Southeast Asia.*¹²⁹

The Confrontation also marked the end of the revolutionary Sukarno era and the beginning of the New Order era under Suharto, which was more pro-Western and anti-communist. The changes brought Indonesia closer to the United States and its allies, and ended the tensions that had persisted during the PD period. Overall, the

¹²⁸ United Kingdom National Archives. (1963-1966). Malaysia-Indonesia Confrontation. National Archives, Kew, diunduh Tanggal 4 September 24

¹²⁹ Subandrio. (2001). Indonesia menghadapi masa depan. Gunung Agung diunduh Tanggal 4 September 24

*Indonesia-Malaysia confrontation is one of the important episodes in the history of PD in Southeast Asia, reflecting the dynamics of global politics at the time and how local conflicts could be influenced by larger ideological rivalries between world powers.*¹³⁰

K. Politik Luar Negeri Orde Lama

Pada awal kemerdekaan atau era Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Republik Indonesia telah mengenal empat kebijakan luar negeri. Indonesia masih berkuat dengan upaya mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari intervensi pihak asing. Pada periode orde lama terdapat proses diplomasi yang dapat dihubungkan dengan konteks diplomasi Indonesia sekarang yakni.¹³¹

1. Politik Bebas Aktif.

Indonesia membangun basis keutuhan politik domestik untuk mendukung diplomasi di mana Indonesia dituntut untuk merealisasikan prinsip bebas aktif sesuai amanat UUD 1945, karena kondisi saat tersebut sarat perebutan pengaruh antara blok Timur (Uni Soviet) dan blok Barat (Amerika Serikat). Kondisi tersebut berhubungan dengan *containment policy* AS melalui *Mutual Security Act* (MSA) dengan negara-negara mitranya. MSA adalah sebuah bantuan dana luar negeri yang memengaruhi sejarah peradaban Indonesia modern yang diberlakukan pada periode demokrasi liberal, tepatnya pada 10 Oktober 1951.¹³²

2. Konferensi Asia Afrika.

Sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia mengambil inisiatif menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat pada 1955. KAA menghasilkan Dasa Sila Bandung yang dianggap menjadi perspektif khas Asia dan negara-negara berkembang yang memandang hubungan

¹³⁰ United Kingdom National Archives. (1963-1966). Malaysia-Indonesia Confrontation. National Archives, Kew, diunduh Tanggal 4 September 24

¹³¹ Politik Luar Negeri Orde Lama <https://kids.grid.id/read/473528472/6-poin-kebijakan-politik-luar-negeri-masa-pemerintahan-orde-lama?page=all> diunduh Tanggal 1 September 24

¹³² Ibid.

internasional. Pada awal 1960-an berdasar solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang menjadi awal dari terciptanya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yang menjadi bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia.¹³³

3. State Building.

Pemerintah Indonesia melakukan eksperimen untuk menerapkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Situasi politik tersebut berujung pada ketidakstabilan negara sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Indonesia saat tersebut menunjukkan radikalisasi kebijakan luar negeri RI yang lebih condong ke kubu komunisme (Uni Soviet).¹³⁴

K. Foreign Policy of the Old Order

*At the beginning of independence or the era of the Independence Revolution (1945-1949) the Republic of Indonesia had known four foreign policies. Indonesia was still struggling with efforts to maintain the sovereignty and independence of the nation from foreign intervention. In the old order period there was a diplomatic process that can be connected to the context of Indonesian diplomacy today, namely.*¹³⁵

1. Free and Active Politics.

Indonesia built a basis for domestic political integrity to support diplomacy where Indonesia was required to realize the principle of free and active according to the mandate of the 1945 Constitution, because the conditions at that time were full of struggles for influence between the Eastern bloc (Soviet Union) and the Western bloc (United States). This condition is related to the USA containment policy through the Mutual Security Act (MSA)

¹³³.Ibid.

¹³⁴.Ibid.

¹³⁵ Politik Luar Negeri Orde Lama

<https://kids.grid.id/read/473528472/6-poin-kebijakan-politik-luar-negeri-masa-pemerintahan-orde-lama?page=all>
diunduh Tanggal 1 September 24

*with its partner countries. MSA is a foreign aid fund that influenced the history of modern Indonesian civilization which was implemented during the liberal democracy period, precisely on October 10, 1951.*¹³⁶

2. Asia Africa Conference.

As described above, Indonesia took the initiative to host the Asia Africa Conference (AAC) in Bandung, West Java in 1955. The AAC produced the Bandung Ten Principles which were considered to be a unique perspective for Asia and developing countries in viewing international relations. In the early 1960s, based on the solidarity of Asian-African countries, the Non-Aligned Movement was created, which became part of Indonesia's foreign policy identity.

3. State Building.

*The Indonesian government conducted an experiment to implement parliamentary democracy or liberal democracy. The political situation led to the instability of the country, prompting President Soekarno to issue the Decree of July 5, 1959, returning to the 1945 Constitution, which marked the beginning of the Guided Democracy period in Indonesia. At that time, Indonesia showed a radicalization of RI's foreign policy which was more inclined towards the communist camp (Soviet Union).*¹³⁷

4. Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Sebagaimana disebutkan diatas, kebijakan luar negeri Indonesia lewat proyek anti-neokolonisme dan neo-imperialisme Soekarno menyebabkan konfrontasi dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Konfrontasi tersebut didukung dengan adanya kampanye "Ganyang Malaysia", pada saat tersebut Presiden Soekarno menduduh pembentukan negara federal Malaysia sebagai proyek imperialisme Inggris yang harus ditentang, namun demikian radikalisasi Presiden Soekarno yang condong ke kubu komunisme Uni Soviet, Indonesia dianggap enggak

¹³⁶.Ibid.

¹³⁷.Ibid.

konsisten dalam menjalankan prinsip bebas aktif yang terbukti bahwa prinsip politik bebas-aktif yang dijalankan Indonesia dapat goyah karena ideologis dan kepentingan politik penguasa.¹³⁸

5. Upaya Menjaga Stabilitas dan Keamanan Negara.

Periode 1950-an dan 1960-an Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar sebagai dampak PD dan negara-negara di kawasan yang punya orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka perlu menjaga stabilitas dan keamanan sebuah negara, hal ini lah yang mendorong pembentukan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN pada 8 Agustus 1967.¹³⁹

6. Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia yang dijalankan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Demokrasi Terpimpin tersebut adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan yakni yang berlandaskan musyawarah mufakat. Namun demikian Soekarno pernah melakukan beberapa penyimpangan, termasuk penyimpangan politik luar negeri. Kegagalan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin yakni Proyek Mercusuar sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962. Mengetahui hal tersebut, Presiden Soekarno ingin mengagung-agungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar. Presiden Soekarno menjalankan enam proyek pembangunan antara lain yakni (a) Stadion Gelora Bung Karno; (b) Hotel Indonesia; (c) Jembatan Semanggi; (d) monumen Selamat Datang Monas;

¹³⁸, *Ibid.*

¹³⁹, *Ibid.*

(e) Gedung DPR/MPR. Semua proyek tersebut membuat beban anggaran melonjak tajam hingga terjadi krisis ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 1964, Soekarno juga membuat Poros Jakarta-Peking sebagaimana dijelaskan diatas untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Upaya yang dilakukan supaya Indonesia menjadi negara yang besar dan terhormat namun demikian langkah tersebut dianggap sebagai sebuah penyimpangan politik karena Tiongkok merupakan negara komunis. Beberapa faktor yang membuat Presiden Soekarno membuat Poros Jakarta-Peking yakni (a) konfrontasi dengan Malaysia yang membuat Indonesia membutuhkan bantuan dari negara militer hingga logistik Indonesia yang baru saja merdeka membutuhkan banyak bantuan modal asing; (b) konfrontasi Indonesia-Malaysia antara tahun 1962-1966, terjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia sehubungan penggabungan wilayah Sabah, Brunie, dan Sarawak. Indonesia mengupayakan penyelesaian melalui diplomasi dengan Malaysia.¹⁴⁰

4. Indonesia-Malaysia Confrontation.

As mentioned above, Indonesia's foreign policy through Soekarno's anti-neocolonialism and neo-imperialism projects led to confrontation with neighboring countries, namely Malaysia. The confrontation was supported by the "Crush Malaysia" campaign, at that time President Soekarno accused the formation of the federal state of Malaysia as a British imperialist project that must be opposed, however, President Soekarno's radicalization which leaned towards the Soviet Union's communist camp, Indonesia was considered inconsistent in implementing the principle of free and active which proved that the principle of free and active politics

¹⁴⁰Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/17/100000479/penyimpangan-politik-luar-negeri-pada-masa-demokrasi-terpimpin> diunduh Tanggal 3 September 24.

implemented by Indonesia could be shaken by the ideology and political interests of the rulers.

5. Efforts to Maintain State Stability and Security.

In the 1950s and 1960s, Southeast Asia became an arena for the struggle for influence of major countries as a result of the PD and countries in the region that had different foreign policy orientations. Indonesia as a newly independent country needed to maintain the stability and security of a country, this was what encouraged the formation of an organization of countries in the Southeast Asian region, namely ASEAN on August 8, 1967.

6. Foreign Policy Deviations during the Guided Democracy Era

From 1959 to 1965, President Soekarno implemented a Guided Democracy government system in Indonesia which was implemented based on President Soekarno's Decree of July 5, 1959 and MPRS Decree No. VIII/MPRS/1965. Guided Democracy is a democracy led by the wisdom of deliberation/representation in accordance with the 1945 Constitution. Soekarno explained that Guided Democracy is a family democracy, namely one based on deliberation and consensus. However, Soekarno once made several deviations, including foreign policy deviations. Economic Failure during the Guided Democracy Era, namely the Mercusuar Project as the host of the 1962 Asian Games. Knowing this, President Soekarno wanted to glorify Indonesia's splendor in the eyes of the outside world. President Soekarno carried out six development projects, including (a) Gelora Bung Karno Stadium; (b) Hotel Indonesia; (c) Semanggi Bridge; (d) Monas Welcome Monument; (e) DPR/MPR Building. All of these projects caused the budget burden to soar until an economic crisis occurred in Indonesia. In 1964, Soekarno also created the Jakarta-Peking Axis as explained above to establish cooperation between Indonesia and China. Efforts were made so that Indonesia would become a great and respected country, however, this step was considered a political deviation because China was a communist country. Several factors that made President Soekarno create the Jakarta-Peking Axis were (a) confrontation with Malaysia which made Indonesia need assistance from the military country to the logistics of Indonesia which had just become independent requiring a lot of foreign capital assistance;

*(b) the Indonesia-Malaysia confrontation between 1962-1966, there was a territorial dispute between Indonesia and Malaysia regarding the merger of the Sabah, Brunei, and Sarawak regions. Indonesia sought a resolution through diplomacy with Malaysia.*¹⁴¹

L. Transportasi Udara di Indonesia

Ideopolitik Indonesia pada saat perang dingin cenderung sosialis yang dibuktikan dengan Poros Jakarta - Peking yang sekarang bernama Beijing, oleh karena itu transportasi dilukan oleh pemerintah seperti di Uni Soviet dan Tiongkok. Di US transportasi udara diatur oleh *Civil Aviation Administration* yang merupakan pejabat pemerintah sedangkan operator dilakukan oleh Aeroflot milik pemerintah juga. Rute penerbangan, prekuensi penerbangan, kapasitas tempat duduk dan tarif ditentukan oleh pemerintah misi operator untuk mendukung kebijakan publik, mengabaikan keuntungan operator, Aeroflot terbang di Indonesia walaupun hanya mengangkut 6 (enam) anggota diplomatik, demikian pula Tiongkok penerbangan sipil diatur oleh pemerintah (*civil aviation of China*), operatornya juga milik pemerintah. Indonesia pada masa perang dingin kebijakannya juga cenderung sosialis regulasi diatur oleh Djawatan Penerbangan Sipil (DPS) dipimpin oleh Ir Soetomo sebagai KPS pada waktu itu DPS merupakan bagian dari Kementerian Perjaan Umum seperti berlaku di Belanda, karena itu regulasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, operatornya Garuda Indonesian Airways yang didirikan berdasarkan akte notaris Raden Kadiiman No.137 tanggal 31 Maret 1950 dan Mermapi Nusantara Airline semuanya milik pemerintah.¹⁴² Semua rute penerbangan, prekuensi penerbangan, jenis pesawat udara, kapasitas tempat duduk dan

¹⁴¹Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/17/100000479/penyimpangan-politik-luar-negeri-pada-masa-demokrasi-terpimpin> diunduh Tanggal 3 September 24.

¹⁴² Martono K.,Amad Sudiro.,*Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No.Tahun 2009*.Jakarta: Penerbit Rjagrafindo,2012 hal.8

tarif ddiatur sepenuhnya oleh Djawatan Penerbangan Sipil (DPS) dalam kapasitasnya sebagai penguasa penerbangan.

L. Air Transportation in Indonesia

Indonesia's ideology during the Cold War tended to be socialist as evidenced by the Jakarta-Peking Axis which is now called Beijing, therefore transportation was carried out by the government like in the Soviet Union and China. In the US, air transportation is regulated by the Civil Aviation Administration which is a government official while the operator is carried out by Aeroflot which is also owned by the government. Flight routes, flight frequencies, seating capacity and fares are determined by the government's mission operator to support public policy, ignoring the operator's profits, Aeroflot flies in Indonesia even though it only transports 6 (six) diplomatic members, likewise Tiongkok Siip aviation is regulated by the government (civil aviation of China), the operator is also owned by the government. Indonesia during the Cold War also tended to be socialist in its policies, regulations were regulated by the Civil Aviation Department (DPS) led by Ir Soetomo as KPS at that time DPS was part of the Ministry of Public Works as was the case in the Netherlands, therefore regulation was fully carried out by the government, the operator was Garuda Indonesian Airways which was established based on the notarial deed of Raden Kadiiman No.137 dated March 31, 1950 and Mermapti Nusatara Airline all owned by the government.¹⁴³ All flight routes, flight frequencies, types of aircraft, seating capacity and fares were fully regulated by the Civil Aviation Department (DPS) in its capacity as the ruler of aviation.

M. Kebijakan Luar Negeri Soeharto

Kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966, menggantikan Presiden Soekarno. Di bawah Soekarno, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung konfrontatif dan anti-Barat, serta mendekatkan diri dengan blok komunis, terutama US dan Republik Rakyat Tiongkok, namun

¹⁴³ Martono K.,Amad Sudiro.,Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No.Tahun 2009.Jakarta: Penerbit Rjagrafindo,2012 hal.8

demikian di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan berubah berubah secara drastis, terutama dalam konteks PD yang saat tersebut masih berlangsung. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Perekonomian hancur, inflasi sangat tinggi, dan ketegangan sosial-politik mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang diduga kuat terkait dengan PKI. Dalam suasana penuh kekacauan tersebut, Soeharto mulai melakukan konsolidasi kekuasaan dengan membangun pemerintahan yang lebih terpusat dan mengedepankan stabilitas sebagai prioritas utama. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Soeharto menyadari bahwa dukungan dari negara-negara Barat, terutama AS, sangat penting untuk mengamankan stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri yang mendorong Soeharto untuk melakukan penyesuaian besar terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah berhasil meminggirkan Soekarno dan menghapuskan pengaruh PKI, Soeharto mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya ke arah yang lebih pro-Barat yang ditandai dengan beberapa langkah penting yaitu Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Negara-Negara Barat. Soeharto membuka kembali jalur diplomatik yang lebih intensif dengan negara-negara Barat, terutama AS Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Sebelumnya, di bawah Soekarno, hubungan ini sempat memburuk akibat kebijakan konfrontatif Soekarno.

Soeharto menyadari pentingnya bantuan ekonomi dari negara-negara Barat untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada tahun 1967, Indonesia bergabung kembali dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang kemudian memberikan pinjaman besar kepada Indonesia. Soeharto juga mengundang investasi asing, terutama dari negara-negara Barat, untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Soeharto mengadopsi kebijakan anti-komunis yang sangat keras yang menjadi landasan bagi hubungan yang erat dengan AS, yang pada saat tersebut sangat mendukung rezim-rezim yang anti-komunis di seluruh dunia. Penumpasan

terhadap anggota PKI dan simpatisannya di Indonesia juga mendapatkan dukungan diam-diam dari AS. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Tenggara. ASEAN dianggap sebagai upaya untuk membendung pengaruh komunis di kawasan ini, dan organisasi tersebut didukung penuh oleh AS.

M. Soeharto's Foreign Policy

Indonesia's foreign policy underwent major changes after Soeharto rose to power in 1966, replacing President Soekarno. Under Sukarno, Indonesia had a foreign policy that tended to be confrontational and anti-Western, and was close to the communist bloc, especially the US and the People's Republic of China, but under Suharto's leadership, the policy changed drastically, especially in the context of the PD which was still ongoing at that time. When Suharto took power, Indonesia was in a very unstable condition. The economy was in ruins, inflation was very high, and socio-political tensions reached their peak with the events of the 30 September 1965 Movement (G30S), which was strongly suspected of being related to the PKI. In this chaotic atmosphere, Suharto began to consolidate power by building a more centralized government and prioritizing stability as a top priority. In the context of foreign policy, Suharto realized that support from Western countries, especially the US, was very important to secure political and economic stability at home, which prompted Suharto to make major adjustments to the direction of Indonesia's foreign policy. After successfully marginalizing Sukarno and eliminating the influence of the PKI, Suharto began to direct his foreign policy in a more pro-Western direction, marked by several important steps, namely the Opening of Diplomatic Relations with Western Countries. Suharto reopened more intensive diplomatic channels with Western countries, especially the US, England, and Western European countries. Previously, under Sukarno, this relationship had deteriorated due to Sukarno's confrontational policies. Suharto realized the importance of economic assistance from Western countries to improve the Indonesian economy. In 1967, Indonesia rejoined the

International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, which then provided large loans to Indonesia. Suharto also invited foreign investment, especially from Western countries, to help develop the Indonesian economy. Suharto adopted a very strong anti-communist policy which became the basis for close relations with the US, which at that time strongly supported anti-communist regimes around the world. The suppression of PKI members and their sympathizers in Indonesia also received tacit support from the US. In 1967, Indonesia became one of the founding members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional organization aimed at strengthening economic, political, and security cooperation in Southeast Asia. ASEAN was seen as an attempt to stem the influence of communism in the region, and the organization was fully supported by the US.

Kebijakan luar negeri Soeharto yang pro-Barat membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif, diantaranya dengan mengarahkan kebijakan luar negeri yang lebih pro-Barat, Soeharto berhasil mendapatkan dukungan ekonomi yang besar dari negara-negara Barat. Bantuan ekonomi tersebut penting untuk stabilisasi ekonomi Indonesia pada tahun-tahun awal Orde Baru. Selain itu, Soeharto juga mendapatkan dukungan politik dari negara-negara Barat, yang melihat Indonesia sebagai sekutu penting dalam upaya membendung komunisme di Asia Tenggara. Dukungan Barat membantu Soeharto memperkuat kontrolnya di dalam negeri. Dengan mengamankan dukungan militer dan ekonomi, Soeharto mampu mengonsolidasikan kekuasaannya dan menjaga stabilitas politik di Indonesia selama beberapa dekade. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu pro-Barat juga menimbulkan ketergantungan Indonesia pada bantuan dan investasi asing. Meskipun hal tersebut membantu stabilitas ekonomi, namun juga membuat Indonesia rentan terhadap tekanan dari negara-negara Barat, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik. Meskipun Soeharto berhasil mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan AS serta negara-negara Barat lainnya, sisa-sisa ketegangan dan

ketidak-percayaan ideologis masih tetap ada. Sebagian kalangan masih merasa terikat dengan warisan ideologi Soekarno, yang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Meskipun Soeharto berhasil meminggirkan pengaruh Soekarno dalam politik praktis, namun ideologi tersebut masih hidup dalam benak sebagian masyarakat dan elite politik Indonesia.

Meskipun Indonesia di bawah Soeharto lebih condong ke Barat, namun Indonesia tetap menjadi anggota aktif Gerakan Non-Blok yang menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun pro-Barat, tetap ingin menjaga citra sebagai negara yang tidak terikat secara penuh pada salah satu blok kekuatan besar dunia. Soeharto juga menerapkan kebijakan luar negeri yang fleksibel, yang memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk negara-negara komunis seperti US dan Tiongkok, meskipun dalam konteks yang berbeda dari era Soekarno. Ini mencerminkan upaya Soeharto untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan internasional.

Suharto's pro-Western foreign policy had a variety of impacts on Indonesia, both positive and negative, including by directing a more pro-Western foreign policy, Suharto managed to gain significant economic support from Western countries. This economic assistance was important for stabilizing the Indonesian economy in the early years of the New Order. In addition, Suharto also received political support from Western countries, who saw Indonesia as an important ally in efforts to contain communism in Southeast Asia. Western support helped Suharto strengthen his control at home. By securing military and economic support, Suharto was able to consolidate his power and maintain political stability in Indonesia for decades. On the other hand, policies that were too pro-Western also made Indonesia dependent on foreign aid and investment. Although this helped economic stability, it also made Indonesia vulnerable to pressure from Western countries, especially in terms of economic and political policies. Although Suharto managed to change the direction of Indonesian foreign policy and establish better relations with the USA and other Western countries, remnants of ideological tension and distrust still remain. Some people

still feel bound by Soekarno's ideological legacy, which was anti-imperialist and anti-colonial. Although Soeharto succeeded in marginalizing Soekarno's influence in practical politics, the ideology still lives in the minds of some Indonesian people and political elites. Although Indonesia under Soeharto leaned more towards the West, Indonesia remained an active member of the Non-Aligned Movement, showing that Indonesia, although pro-Western, still wanted to maintain its image as a country that was not fully tied to one of the world's great power blocs. Soeharto also implemented a flexible foreign policy, which allowed Indonesia to establish good relations with various countries, including communist countries such as the USSR and China, although in a different context from the Soekarno era. This reflects Soeharto's efforts to maintain a balance between domestic and international interests.

N. Sejarah dan Pentingnya Satelit Palapa

Nama Palapa diambil dari sumpah palapa yang dicetuskan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit dalam tahun 1334. Berawal dari sejarah tersebut, Palapa saat tersebut digunakan sebagai nama bagi sejumlah satelit telekomunikasi *geostasioner* Indonesia. Satelit palapa hadir karena ide dan gagasan Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto, yang saat tersebut sedang memikirkan bagaimana menyambungkan komunikasi di seluruh wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh dari Sabang sampai Merauke. Menurut buku karya G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. yang berjudul "Soeharto Pikiran" yang mengatakan Indonesia membutuhkan sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar komunikasi dengan semua wilayah Indonesia yang berpulau-pulau. Menurut Soeharta, pada saat tersebut muncul sejarah Gajah Mada, Patih Amengkubumi Kerajaan Majapahit, yang telah mengeluarkan Amukti Palapa (Sumpah Palapa) untuk menyatukan semua kerajaan diseluruh nusantara pada tahun 1336 Masehi, karena itulah sistem satelit domestik Indonesia

diberi nama Palapa sebagai lambang terjemanya sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara.¹⁴⁴

N. History and Importance of Palapa Satellite

The name Palapa is taken from the Palapa oath initiated by Patih Gajah Mada from Majapahit in 1334. Starting from this history, Palapa was used as the name for a number of Indonesian geostationary telecommunications satellites. The Palapa satellite was created because of the ideas and concepts of the 2nd President of the Republic of Indonesia, H.M. Soeharto, who at that time was thinking about how to connect communications throughout the vast archipelago that was separated by such great distances from Sabang to Merauke. According to the book by G. Dwipayana and Ramadhan K.H. entitled "Soeharto Pikiran" which states that Indonesia needs a domestic satellite communications system to facilitate communications with all regions of Indonesia which are islands. According to Soeharta, at that time the history of Gajah Mada emerged, Patih Amengkubumi of the Majapahit Kingdom, who issued the Amukti Palapa (Palapa Oath) to unite all kingdoms throughout the archipelago in 1336 AD, which is why the Indonesian domestic satellite system was given the name Palapa as a symbol of the realization of Gajah Mada's oath to unite the archipelago.¹⁴⁵

Kecepatan komunikasi tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Indonesia setelah masa orde lama, karena tanpa komunikasi yang cepat impian negara Indonesia untuk maju sejajar dengan bangsa lainnya akan menjadi tantangan yang cukup berat. Selanjutnya untuk merealisasikan ide tersebut Soeharto menugaskan Mayjen TNI Soehardjono, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi) serta Ir. Sutanggar Tengker Yahya, Direktur Telekomunikasi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang juga mantan Direktur Utama PN

¹⁴⁴ <https://info.unida.ac.id/artikel/sejarah-dan-pentingnya-satelit-palapa>
diundduh Tanggal 30 Agustus 24

¹⁴⁵ <https://info.unida.ac.id/artikel/sejarah-dan-pentingnya-satelit-palapa>
diundduh Tanggal 30 Agustus 24

Telekomunikasi Indonesia sebagai penanggung jawab untuk merealisasikan ide tersebut.¹⁴⁶

Pada saat tersebut Indonesia menghadapi dua persoalan besar untuk merealisasikan satelit Palapa yakni (a) tidak menguasai teknologi satelit hanya paham fungsi dan kegunaannya; (b) pembiayaan, karena satelit adalah barang yang sangat mahal untuk negara Indonesia yang saat itu masih menuju negara berkembang. Satelit pertama Indonesia Palapa A diketahui memiliki spesifikasi yang mirip dengan satelit domestik yang digunakan Kanada dan AS karena dibuat oleh perusahaan yang sama *Hughes Aircraft Company* dengan model HS-333. Palapa A memiliki 12 transponder dengan kapasitas setara 6.000 sirkuit suara atau 12 saluran televisi warna, memiliki masa aktif hingga 7 tahun dengan tinggi satelit 3.41 meter, diameter 1.9 meter dan berat saat peluncuran sebesar 574 kg. Satelit pertama diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 oleh roket AS dan ditinggal di atas Samudera Hindia pada 83 BT. Satelit Palapa A dioperasikan sepenuhnya oleh PERUMTEL (sekarang TELKOM) dengan *area coverage* satelit Palapa meliputi Indonesia dan Asia Tenggara yang meliputi Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Transponder Satelit Palapa dialokasikan untuk sistem komunikasi yang digunakan oleh PERUMTEL, siaran TVRI dan juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Negara ASEAN juga memanfaatkan transponder satelit Palapa A yaitu Filipina, Thailand dan Malaysia.¹⁴⁷

The speed of communication is very necessary to accelerate the development of Indonesia after the old order, because without fast communication, the dream of the Indonesian nation to advance on par with other nations will be quite a challenge. Furthermore, to realize this idea, Soeharto assigned Major General TNI Soehardjono, Director General of Post and Telecommunications) and Ir. Sutanggar Tengker Yahya, Director of Telecommunications at the Directorate General of Post and Telecommunications who was also the former President

¹⁴⁶.Ibid.

¹⁴⁷.Ibid.

Director of PN Telekomunikasi Indonesia as the person in charge of realizing this idea. At that time, Indonesia faced two major problems in realizing the Palapa satellite, namely (a) not mastering satellite technology, only understanding its functions and uses; (b) financing, because satellites were very expensive goods for Indonesia, which at that time was still heading towards a developing country. Indonesia's first satellite, Palapa A, is known to have specifications similar to domestic satellites used by Canada and the US because it was made by the same company, Hughes Aircraft Company, with the HS-333 model. Palapa A has 12 transponders with a capacity equivalent to 6,000 voice circuits or 12 color television channels, has an active period of up to 7 years with a satellite height of 3.41 meters, a diameter of 1.9 meters and a launch weight of 574 kg. The first satellite was launched on July 8, 1976 by a US rocket and left over the Indian Ocean at 83 BT. The Palapa A satellite is fully operated by PERUMTEL (now TELKOM) with the Palapa satellite coverage area covering Indonesia and Southeast Asia including Singapore, Malaysia, Thailand and the Philippines. The Palapa Satellite transponder is allocated for the communication system used by PERUMTEL, TVRI broadcasts and also the Ministry of Defense and Security. ASEAN countries also utilize the Palapa A satellite transponder, namely the Philippines, Thailand and Malaysia.¹⁴⁸

Atas peluncuran satelit Palapa tersebut Indonesia diketahui merupakan negara pertama di Asia dan negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) menggunakan Satelit GEO setelah AS dan Kanada. Palapa A1 menjadi SKSD pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon dan faksimili antar kota di Indonesia. Kemudian SKSD juga berkembang menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional. Palapa A1 menjadi tonggak sejarah satelit di Indonesia yang kemudian diikuti dengan satelit-satelit berikutnya seperti Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda dan PSN. Di Indonesia sendiri setidaknya tercatat ada lima operator satelit nasional

¹⁴⁸.Ibid.

yang memiliki dan mengelola satelitnya sendiri, antara lain: TELKOM, INDOSAT, PSN, MNC dan BRI.¹⁴⁹

Peluncuran satelit perdana Palapa milik Indonesia itu menjadi tonggak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Hingga pada akhirnya, setiap tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Ada sembilan Jenis Satelit Palapa di Indonesia. Berawal dari penentuan Hari Satelit Palapa, yang menjadi satelit pertama Indonesia, sekarang ada sembilan jenis satelit yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, satelit Palapa pun mengalami regenerasi dan perkembangan, berikut Ini daftarnya:

1. Satelit Palapa A-1 (1976-1983)

Satelit perdana milik Indonesia ini memang didesain untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Satelit ini di bawah pengawasan Perumtel yang sekarang berganti nama menjadi ?Telkom? untuk sistem komunikasi, siaran TVRI dan Kemenhankam. Satelit Palapa memiliki berat 574 kg, tinggi 3,7 meter, diameter 1,9 meter, dan antena berdiameter 1,5 meter.

With the launch of the Palapa satellite, Indonesia is known to be the first country in Asia and the third country in the world to operate a Domestic Satellite Communication System (SKSD) using GEO Satellites after the US and Canada. Palapa A1 became the first SKSD in Indonesia to provide telephone and facsimile services between cities in Indonesia. Then SKSD also developed into the main infrastructure for distributing national television programs. Palapa A1 became a milestone in the history of satellites in Indonesia which was then followed by subsequent satellites such as Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda and PSN. In Indonesia itself, there are at least five national satellite operators that own and manage their own satellites, including: TELKOM, INDOSAT, PSN, MNC and BRI.¹⁵⁰

¹⁴⁹.Ibid.

¹⁵⁰.Ibid.

The launch of Indonesia's first Palapa satellite became a milestone in the progress of communication and information technology in Indonesia. Until finally, every July 9 is commemorated as Palapa Satellite Day. There are nine types of Palapa Satellites in Indonesia. Starting from the determination of Palapa Satellite Day, which became Indonesia's first satellite, now there are nine types of satellites in Indonesia. Along with the development of technology, the Palapa satellite also experienced regeneration and development, here is the list:

1. Palapa A-1 Satellite (1976-1983)

This first satellite owned by Indonesia was indeed designed to optimize signal transmission throughout the archipelago, even to neighboring countries, such as Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. This satellite is under the supervision of Perumtel which has now changed its name to ?Telkom? for communication systems, TVRI broadcasts and the Ministry of Defense. The Palapa satellite weighs 574 kg, is 3.7 meters high, has a diameter of 1.9 meters, and an antenna with a diameter of 1.5 meters.

2. Satelit Palapa A-2 (1977-1987)

Proyek satelit kedua dibuat sebagai cadangan jika satelit A-1 mengalami kegagalan. Satelit A-2 diluncurkan pada Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dengan harapan bisa menjaga stabilnya layanan komunikasi di Indonesia.

3. Satelit Palapa B-1 (1983-1990)

Pada 18 Juni 1983, pemerintah kembali meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenger. Sama seperti satelit seri A, satelit B-1 ini Dibuat oleh perusahaan Hughes Aircraft Company. Satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California, yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. Kala itu, satelit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan negara-negara di ASEAN.

4. Satelit Palapa B-2 (1984-gagal)

Pada 3 Februari 1984, satelit Palapa B-2, yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1, diluncurkan tapi mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Karena kegagalan tersebut, pemerintah kembali membuat proyek satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P, untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya.

5. Satelit Palapa B2P (1987-1996)

Satelit Palapa B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket pada 20 Maret 1987. Sebenarnya peluncuran roket dijadwalkan pada 1986, tapi ditunda hingga 1987 imbas kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat.

6. Satelit Palapa B2R (1990-2000)

Satelit Palapa B2 diperbaiki oleh Sattel Technologies pada 13 April 1990. Satelit ini kemudian diluncurkan melalui Delta 6925 dan dinamakan Satelit Palapa B2R.

7. Satelit Palapa B4 (1992-2005)

Pada 14 Mei 1992, satelit domestik bernama Palapa B4 diluncurkan. Peluncuran berlangsung selama empat hari dengan menguji peralatan dan komunikasi untuk mengecek fungsi transponder dan pengaruhnya setelah diluncurkan.

8. Satelit Palapa C1 (1996-1999) dan Satelit Palapa C2 (1996-2011)

Berbeda dengan Satelit Palapa A dan B, satelit ini mampu menjangkau area yang lebih luas, seperti Asia Tenggara, sebagian China, India, Jepang, dan Australia. Satelit Palapa C ini dioperasikan pula oleh perusahaan dalam negeri, Satelindo, yang kini bernama Indosat.

9. Palapa D (2009-2024)

Satelit Palapa D dibuat oleh Thales Alenia Space di Prancis. Dengan komponen platform SpaceBus 4000-B3, satelit ini mampu mencakup Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia.¹⁵¹

2. Palapa A-2 Satellite (1977-1987)

The second satellite project was created as a backup if the A-1 satellite failed. The A-2 satellite was launched in March 1977 with a Delta 2914 rocket in the hope of maintaining stable communication services in Indonesia.

3. Palapa B-1 Satellite (1983-1990)

On June 18, 1983, the government launched the Palapa B-1 Satellite again via the STS mission 7 Challenger. Just like the A series satellites, the B-1 satellite was made by the Hughes Aircraft Company. This satellite was operated by a control station in Elsegundo California, namely the Operations Control Center and SPU (Main Control Station) Cibinong and Fillmore in Ventura City. At that time, this satellite was expected to be able to meet the needs of ASEAN countries.

4. Palapa B-2 Satellite (1984-failed)

On February 3, 1984, the Palapa B-2 satellite, which was plan B of the Palapa B-1 Satellite, was launched but failed. This was because the perigee motor could not function optimally. Due to this failure, the government again created the Palapa B-2 Replacement satellite project or abbreviated as B2P, to replace the Palapa A-1 Satellite and the Palapa A-2 Satellite which had expired.

5. Palapa B2P Satellite (1987-1996)

The Palapa B2P Satellite was launched conventionally via a rocket system on March 20, 1987. The rocket launch was actually scheduled for 1986, but was postponed until 1987 due to the Challenger plane crash which exploded in the air and killed the crew.

¹⁵¹.Ibid.

6. Palapa B2R Satellite (1990-2000)

The Palapa B2 satellite was repaired by Sattel Technologies on April 13, 1990. This satellite was then launched via Delta 6925 and named the Palapa B2R Satellite.

7. Palapa B4 Satellite (1992-2005)

On May 14, 1992, a domestic satellite named Palapa B4 was launched. The launch lasted for four days by testing equipment and communications to check the function of the transponder and its effects after launch.

8. Palapa C1 Satellite (1996-1999) and Palapa C2 Satellite (1996-2011)

Unlike the Palapa A and B Satellites, this satellite is able to reach a wider area, such as Southeast Asia, parts of China, India, Japan, and Australia. The Palapa C Satellite is also operated by a domestic company, Satelindo, which is now called Indosat.

9. Palapa D (2009-2024)

The Palapa D satellite was built by Thales Alenia Space in France. With the SpaceBus 4000-B3 platform component, this satellite is capable of covering Asia, Southeast Asia, and all of Indonesia.¹⁵²

O. Satelit-Satelit Indonesia, dari Palapa hingga Satria

Pada tanggal 9 Juli 1976, Indonesia pertama kali meluncurkan satelit Palapa A1 dari *Kennedy Space Center*, Tanjung Canaveral, AS. Satelit Palapa A1 merupakan satelit perdana milik Indonesia yang didesain untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sebagaimana diejelaskan di atas, Satelit tersebut diberi nama Palapa oleh Presiden Soeharto yang diambil dari Sumpah Palapa milik Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Satelit Palapa A1 diluncurkan dengan menggunakan roket *Delta 2914* dari *Kennedy Space Center*.^{9 Jul 2024}. Penemu Satelit Palapa adalah Hughes Horward, seorang inovator yang juga mendirikan *Hughes Aircraft Company*, perusahaan yang bergerak di bidang

¹⁵².Ibid.

penerbangan di AS pada tanggal 9 Juli 2024. Pada masa tersebut, Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) menggunakan *Geo Stasioner Orbit (GSO)* setelah AS dan Kanada. SKSD tersebut menjadikan infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional disusul oleh Palapa A2 yang diluncurkan pada 11 Maret 1977 setelah Palapa A1 yang berhenti masa operasinya pada 1983, kemudian secara berturut-turut meluncurkan Palapa B1 pada 16 Juni 1983 yang diluncurkan oleh roket STS 7. Satelit tersebut berhenti beroperasi pada tahun 1990. Di belakang B1, ada satelit Palapa B2P yang diluncurkan oleh roket Delta 6925 pada 21 Maret 1987. Masa bakti satelit tersebut berakhir pada 1996.¹⁵³

Selanjutnya, Palapa B2R diluncurkan pada 14 April 1990 yang beroperasi sampai tahun 2000 berakhir, sedangkan Palapa B4 yang masa baktinya berakhir pada 2005. Satelit tersebut diluncurkan pada 14 Mei 1992. Lalu, satelit Indonesia yang ketujuh adalah Telkom 1 pada 13 Agustus 1999 yang diluncurkan oleh roket Ariane 4 ini berakhir pada 2006, kemudian ada satelit Telkom 2 yang diluncurkan pada 16 November 2005. Berikutnya ada satelit Telkom 3S yang diluncurkan pada 14 Februari 2017. Sebelum Telkom 3S, ada satelit BRI-sat yang meluncur pada 19 Juni 2016. Selanjutnya Telkom 4 atau Satelit Merah Putih yang diluncurkan pada 7 Agustus 2018, dilanjutkan dengan satelit Nusantara 1 yang meluncur pada 22 Februari 2019. Terbaru, Indonesia segera meluncurkan Satelit Multi Fungsi bernama Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 yang meluncur pada 19 Juni 2023.¹⁵⁴

¹⁵³ <https://indonesiabaik.id/infografis/satelit-satelit-indonesia-dari-palapa-hingga-satria> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

¹⁵⁴ *Ibid.*

O. Indonesian Satellites, from Palapa to Satria

On July 9, 1976, Indonesia first launched the Palapa A1 satellite from the Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, USA. The Palapa A1 satellite was Indonesia's first satellite designed to optimize signal transmission throughout the archipelago to neighboring countries, such as Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. As explained above, the satellite was named Palapa by President Soeharto, taken from the Palapa Oath of Gajah Mada from the Majapahit Kingdom. The Palapa A1 satellite was launched using a Delta 2914 rocket from the Kennedy Space Center.⁹ Jul 2024. The inventor of the Palapa Satellite was Hughes Horward, an innovator who also founded the Hughes Aircraft Company, a company engaged in aviation in the US on July 9, 2024. At that time, Indonesia was the third country in the world to operate the Domestic Satellite Communication System (SKSD) using the Geo Stationary Orbit (GSO) after the US and Canada. The SKSD became the main infrastructure for distributing national television programs followed by Palapa A2 which was launched on March 11, 1977 after Palapa A1 which stopped operating in 1983, then successively launched Palapa B1 on June 16, 1983 which was launched by the STS 7 rocket. The satellite stopped operating in 1990. Behind B1, there was the Palapa B2P satellite which was launched by the Delta 6925 rocket on March 21, 1987. The satellite's service period ended in 1996.¹⁵⁵

Furthermore, Palapa B2R was launched on April 14, 1990 which operated until 2000 ended, while Palapa B4 whose service period ended in 2005. The satellite was launched on May 14, 1992. Then, the seventh Indonesian satellite was Telkom 1 on August 13, 1999 which was launched by the Ariane 4 rocket which ended in 2006, then there was the Telkom 2 satellite which was launched on November 16, 2005. Next was the Telkom 3S satellite which was launched on February 14, 2017. Before Telkom 3S, there was the BRI sat satellite which was launched on June 19, 2016. Next was Telkom 4 or the Merah Putih Satellite which was launched on August 7, 2018, followed by the Nusantara 1 satellite which was launched on February 22, 2019. Most recently, Indonesia will soon launch a Multi-Function Satellite called

¹⁵⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/satelit-satelit-indonesia-dari-palapa-hingga-satria> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

*the Republic of Indonesia Satellite (Satria) 1 which will be launched on June 19, 2023.*¹⁵⁶

P. Ars-Vita Alamsyah Perempuan Indonesia Bekerja di Elon Musk AS

Publik sedang riuh membahas sosok wanita berhijab yang memiliki karier mentereng yakni Ars-Vita Alamsyah perempuan Indonesia pertama yang bekerja di perusahaan milik Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Perusahaan tersebut dikenal sebagai *Space X* yang berpusat di California, AS pada tanggal 19 Juni 2023 meluncurkan Satelit Republik Indonesia generasi pertama yang disebut SATRIA-1. Kebanyakan orang berfikir industri penerbangan atau *Aerospace* hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, sekarang dengan berkembangnya teknologi maju *Science Technology Engineering Mathematic (STEM)* semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki dapat dikerjakan oleh wanita seperti Ars-Vita Alamsyah, seorang wanita muslim dari Indonesia yang bekerja di *Space X*.¹⁵⁷

Dilihat dari akun LinkedIn miliknya, Ars-Vita Alamsyah mulai bergabung dengan *Space X* sejak bulan Agustus 2021 dalam kapasitasnya sebagai *Supply Chain Reliability Engineer II*. Sebelumnya beliau bekerja di sebuah perusahaan bernama *Northrop Grumman* selama 3 (tiga) tahun dan dipercaya untuk memegang sejumlah posisi penting, mulai dari posisi sebagai *Project Management-Technology Service, Corporate Global Mobility* hingga *Global Supply Chain*. Beliau merupakan perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan S1 di University of Maryland jurusan Teknik Mesin hanya dalam waktu dua tahun, bahkan pernah memegang di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Pada November 2015 ketika masih kuliah, Vita Alamsyah pernah belajar secara langsung di NASA

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ <https://www.nusantara62.com/nasional/3719207020/guru-besar-hukum-udara-antar-satelit-satria-1-antonov-225-dan-peran-perempuan-indonesia?page=3> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

selama satu bulan. Saat berkuliah, beliau juga merupakan mahasiswa aktif sebagai *Teaching Fellow* selama lima bulan. Sebelum lulus S1 dalam 2017 beliau pernah magang di *Federal Aviation Administration (FAA)* atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, sebuah lembaga regulator penerbangan sipil AS. Dalam sebuah *flyer* yang diterbitkan oleh FAA, Ars-Vita Alamsyah mengaku telah tertarik di dunia teknologi dan *engineering* sejak duduk di bangku sekolah menengah.¹⁵⁸

P. *Ars-Vita Alamsyah, an Indonesian Woman Working for Elon Musk in the US*

*The public is currently discussing the figure of a woman wearing a hijab who has a flashy career, namely Ars-Vita Alamsyah, the first Indonesian woman to work for a company owned by Elon Musk, one of the richest people in the world. The company is known as Space X, which is headquartered in California, USA, on June 19, 2023, launched the first generation of the Republic of Indonesia Satellite called SATRIA-1. Most people think that the aviation or Aerospace industry can only be done by a man, now with the development of advanced technology Science Technology Engineering Mathematic (STEM), all jobs that are usually done by men can be done by women like Ars-Vita Alamsyah, a Muslim woman from Indonesia who works at Space X.*¹⁵⁹

Judging from her LinkedIn account, Ars-Vita Alamsyah joined Space X in August 2021 in her capacity as Supply Chain Reliability Engineer II. Previously, she worked at a company called Northrop Grumman for 3 (three) years and was trusted to hold a number of important positions, ranging from Project Management-Technology Service, Corporate Global Mobility to Global Supply Chain. She is an Indonesian woman who earned her undergraduate degree at the University of Maryland majoring in Mechanical Engineering in just two years, and even held a position at the United States Aeronautics and Space Administration (NASA). In November 2015, while still in college, Vita Alamsyah studied directly at NASA for one month. While

¹⁵⁸.Ibid.

¹⁵⁹ <https://www.nusantara62.com/nasional/3719207020/guru-besar-hukum-udara-untar-satelit-satria-1-antonov-225-dan-peran-perempuan-indonesia?page=3> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

*in college, she was also an active student as a Teaching Fellow for five months. Before graduating with her undergraduate degree in 2017, she had an internship at the Federal Aviation Administration (FAA), a US civil aviation regulatory agency. In a flyer published by the FAA, Ars-Vita Alamsyah admitted that she had been interested in the world of technology and engineering since she was in high school.*¹⁶⁰

Di ulasan yang juga dilampirkan di *LinkedIn*-nya tersebut, Ars-Vita Alamsyah juga bercerita bagaimana bekerja di perusahaan seperti FAA merupakan mimpinya sejak sekolah. Sebelum akhirnya bekerja sebagai insinyur di SpaceX, Ars-Vita Alamsyah telah menempuh pendidikan S2 selama setahun di jurusan *Supply Chain Management* di *Massachusetts Institute of Technology*. Selama menempuh pendidikan S2, beliau berhasil menorehkan sejumlah prestasi lewat penghargaan dari *Deloitte Case Competition* dan *IMSA Student Research Presentation di Supply Chain and Logistics Excellence (SCALE) Scholars Fellowship*. Pada 2019, Vita Alamsyah ternyata pernah mengikuti pelatihan *Economics, Financial Accounting and Business Analytics* di *Harvard Business School*. Di tahun yang sama, Vita Alamsyah membangun komunitas online bernama Locanesia, bertujuan memberikan informasi seputar perjalanan dan destinasi di Indonesia. Nah, itulah sosok Ars-Vita Alamsyah, yang berhasil membuktikan bahwa perempuan juga dapat bekerja di perusahaan besar yang didominasi oleh laki-laki.

In the review that is also attached to her LinkedIn, Ars-Vita Alamsyah also shared how working at a company like the FAA has been her dream since school. Before finally working as an engineer at SpaceX, Ars-Vita Alamsyah had studied for a year in Supply Chain Management at the Massachusetts Institute of Technology. During her studies, she managed to achieve a number of achievements through awards from the Deloitte Case Competition and the IMSA Student Research Presentation at the Supply Chain and Logistics Excellence (SCALE) Scholars Fellowship. In 2019, Vita Alamsyah apparently

¹⁶⁰.Ibid.

attended Economics, Financial Accounting and Business Analytics training at Harvard Business School. In the same year, Vita Alamsyah built an online community called Locanesia, aiming to provide information about travel and destinations in Indonesia. Well, that's the figure of Ars-Vita Alamsyah, who managed to prove that women can also work in large companies dominated by men.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baskara T, Wardaya Sj., INDONESIA MELAWAN AMERIKA: Konflik Perang Dingin 1953-1963. Penerbit GALANGPRESS, Yogyakarta, 2008.
- Kahin, G. M. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press diunduh Tanggal 4 September 24.
- Martono K., Amad Sudiro., Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No. Tahun 2009. Jakrta: Penerbit Rjagrafindo, 2012 hal.8
- McVey, R. T. (1968). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." Indonesia, (6), 91-120 diunduh Tanggal 4 September 24
- Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Palgrave Macmillan, diunduh Tanggal 4 September 24.
- Subandrio. (2001). Indonesia menghadapi masa depan. Gunung Agung diunduh Tanggal 4 September 24

ARTIKEL

- Foreign Relations of the United States (FRUS). (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office diunduh Tanggal 4 September 24
- Foreign Relations of the United States (FRUS). (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office diunduh Tanggal 4 September 24
- McVey, Ruth T. (1971). "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy." Indonesia, (11), 131-165, diunduh Tanggal 4 September 24

DOKUMEN

- United Nations. (1963). Report of the United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (West Irian). United Nations diunduh Tanggal 4 Septembr 24

United Kingdom National Archives. (1963-1966). Malaysia-Indonesia Confrontation. National Archives, Kew, diunduh Tanggal 4 September 24

LAIN-LAIN

[Kilas Balik] 66 Tahun Lalu, Presiden Soekarno Nyaris Terbunuh dalam Tragedi "Cikini",
<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/30/10000081/kilas-balik-66-tahun-lalu-presiden-soekarno-nyaris-terbunuh-dalam-tragedi> diunduh Tanggal 29 Agustus 24

Arsip Rahasia '65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing
<https://kumparan.com/kumparannews/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing> diunduh Tanggal 31 Agustus 24.

Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI
<https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI dan Permesta
<https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Dampak Perang Dingin bagi Indonesia.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/180000869/dampak-perang-dingin-bagi-indonesia?page=all>.
Diunduh Tanggal 25 Pebruari 2024.

<https://indonesiabaik.id/infografis/satelit-satelit-indonesia-dari-palapa-hingga-satria> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

<https://info.unida.ac.id/artikel/sejarah-dan-pentingnya-satelit-palapa> diundddduh Tanggal 30 Agustus 24

<https://www.nusantara62.com/nasional/3719207020/guru-besar-hukum-udara-untar-satelit-satria-1-antonov-225-dan-peran-perempuan-indonesia?page=3> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/100000679/keterlibatan-amerika-serikat-dalam-prri?page=all>
diunduh Tanggal 25 Pebruari 2024

Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955
[https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Pemberontakan PKI Madiun 1948.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh
Tanggal 28 Agustus 24

Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/17/100000479/penyimpangan-politik-luar-negeri-pada-masa-demokrasi-terpimpin> diunduh Tanggal 3 September 24.

Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Peran Indonesia dalam Perang Dingin.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/09/090000379/peran-indonesia-dalam-perang-dingin?page=all>,
diunduh Tanggal 28 Januari 2024

Politik Luar Negeri Orde Lama
<https://kids.grid.id/read/473528472/6-poin-kebijakan-politik-luar-negeri-masa-pemerintahan-orde-lama?page=all>
diunduh Tanggal 1 September 24

Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Mengapa Lirik Lagu Kian Lugas dan Teramat Gamblang? Artikel Kompas.id, diunduh Tanggal 12 September 24

Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all>
diunduh Tanggal 28 Agustus 24

BAB 3

DIPLOMASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA DAN PASCA PERANG DINGIN (PD)¹

INDONESIAN AND UNITED STATES DIPLOMACY DURING AND POST THE COLD WAR (PD)

A. Diplomasi Indonesia dan Amerika Serikat

Perang Dingin (PD) antara URSS dengan USA berlangsung setelah Perang Dunia II dan berakhir tahun 1991. Selama puluhan tahun, persaingan ideologi antara URSS dan USA berdampak buruk terhadap dunia, namun demikian ada juga dampak positifnya bagi Indonesia yakni faktor persaingan dan dampaknya terhadap Indonesia. USA menghalangi ideologi komunisme yang disebar oleh URSS lewat berbagai badan intelijennya seperti *Central Intellegent Agency* (CIA) terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yakni pemberontakan PRRI/Permesta, kegagalan politik luar negeri USA di Vietnam (2015), USA termakan hasutan Belanda, keterlibatan USA dalam pemberontakan PRRI/Permesta dengan tertangkapnya Allan Pope, penerbang USA yang jatuh setelah pesawat udaranya ditembak di Ambon tahun 1958, tidak hanya pengaruh USA, pengaruh URSS mendorong pemberontakan.¹⁶¹

¹⁶¹ Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/180000869/dampak-perang-dingin-bagi-indonesia?page=all>. Diunduh Tanggal 25 Februari 2024; Baca juga Baskara T, Wardaya Sj., INDONESIA MELAWAN AMERIKA: Konflik Perang Dingin 1953-1963. Penerbit GALANGPRESS, Yogyakarta, 2008.

A. Indonesia and United States Diplomacy

The Cold War (CW) between the USSR and the USA lasted after World War II and ended in 1991. For decades, the ideological competition between the USSR and the USA had negative effects on the world; however, there were also positive impacts for Indonesia, particularly regarding the factor of competition and its consequences for the country. The USA sought to block the spread of communism promoted by the USSR through various intelligence agencies, such as the Central Intelligence Agency (CIA), particularly against President Sukarno's government, notably during the PRRI/Permesta rebellion. The USA's failure in foreign policy in Vietnam (2015), its susceptibility to Dutch manipulation, and its involvement in the PRRI/Permesta rebellion were evident, particularly with the capture of Allan Pope, an American pilot who crashed after his aircraft was shot down in Ambon in 1958. Not only did the USA exert influence, but the USSR's influence also spurred the rebellion.

1. Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948 menjadi sebuah peristiwa besar bagi Indonesia yang baru merdeka selama tiga tahun. Peristiwa Madiun memunculkan sejumlah pertanyaan mulai dari tujuan PKI melakukan pemberontakan hingga dugaan keterlibatan USA dalam pembunuhan ribuan komunis daerah tersebut. Pecahnya peristiwa Madiun dimulai dari tekanan politik terhadap Kabinet Hatta. Menurut informasi dalam telegram yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS George Catlett Marshall pada 21 Juli 1948 pemerintah kabinet Hatta keadaan terlalu lama karena dominasi kaum komunis dalam gerakan nasional. Situasi sehubungan dengan komunisme di Indonesia dan pemerintah Belanda harus mengambil tindakan tegas, namun demikian Belanda tidak dapat mengambil tindakan karena khawatir langkah tersebut dapat mempercepat jatuhnya kabinet Hatta. Pada September 1948, Marshall secara terang-terangan menyatakan dukungan Kabinet Hatta untuk menumpas kekuatan komunis. Beliau

menegaskan bahwa USA akan memberikan bantuan dengan segala cara sehingga jelas USA berperan dalam penumpasan kaum komunis di Madiun. USA khawatir dan benci pada gerakan kiri tersebut bahkan telah tampak sejak 1926-1927 saat pemberontakan rakyat yang dikomandoi PKI digagalkan Belanda. Menurut Soemarsono tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang merupakan saksi hidup Peristiwa Madiun, pemerintahan Soekarno-Hatta mengambil langkah untuk membasmi komunis di Madiun agar kedaulatan Indonesia dapat diakui. Adanya kaum komunis dianggap sebagai penghalang bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Barat. Selama kekuatan komunis di Indonesia masih kuat, negara-negara Barat tidak akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang baru merdeka. Sebelum meletus peristiwa Madiun tersebut, telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis buruh dan komunis di Solo oleh tentara. Penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Solo membuat situasi di Madiun sangat tegang mencapai puncaknya dengan Diproklamirkannya Negara Madiun oleh Soemarsono, yang kemudian diambil alih oleh Musso, yang saat tersebut dikenal sebagai Peristiwa Madiun.¹⁶²

Tokoh komunis Indonesia Musso, menggerakkan pemberontakan di Madiun karena bercita-cita menjadikan Indonesia Republik Soviet. Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka mengalami kesulitan membangun dan mensejahterakan rakyatnya, dalam PD Indonesia memperoleh bantuan dari USA. Presiden Soekarno memperoleh bantuan URSS membangun proyek *Asian Games* di kawasan Senayan yang sekarang bernama Gelora Bung Karno (GB) dalam tahun 1961 untuk menunjukkan kehebatan Indonesia lewat *Asian Games* ke-IV dalam tahun 1962. URSS juga memberikan pinjaman lunak senilai US\$12,5

¹⁶² Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

juta, mengirimkan insinyur dan teknisinyna untuk merancang Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perdana Menteri URRS, Nikita Krushev turut hadir dalam penancangan tiang pancang pertama pada 8 Februari 1960.¹⁶³

Sumber yang lain menjelaskan¹⁶⁴ bahwa pemberontakan PKI Madiun atau Peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 tersebut, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun baru dapat diakhiri setelah tiga bulan berlangsung, dengan kekalahan di pihak PKI. Faktor yang membuat gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI adalah PKI memproklamasikan Republik Soviet.¹⁶⁵

Peristiwa tersebut diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin, yang tidak lagi mendapat dukungan setelah dituding membawa kerugian bagi Indonesia ketika mengadakan Perjanjian Renville dengan Belanda. Ketika jabatan perdana menteri Amir Sjarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948, Mohammad Hatta maju membentuk kabinet baru. Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir Sjarifuddin, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir Sjarifuddin menginginkan posisi kunci. Pada akhirnya, Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara

¹⁶³. *Ibid.*

¹⁶⁴ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

¹⁶⁵ Pemberontakan PKI Madiun 1948. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Indonesia. Golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948, membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya. Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI-Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota. Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. FDR lantas mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh. Pemerintah marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan Republik. Kembalinya Musso Situasi semakin memanas saat Musso, tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke URSS, kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Mereka lantas melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan komunisme. Peristiwa tersebut yang dijadikan alasan untuk melancarkan kampanye anti-PKI dan melakukan penculikan perwira kiri. Memasuki September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik. Daerah Madiun menjadi daerah yang tersisa sebagai benteng terakhir FDR yang membuat pimpinan FDR lokal di Madiun khawatir sehingga pecahlah pemberontakan pada 18 September 1948.¹⁶⁶

Pada 18 September 1948 pukul 03.00 pagi, FDR Madiun mulai merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam serangan tersebut terdapat dua perwira

¹⁶⁶ Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Mengapa Lirik Lagu Kian Lugas dan Teramat Gamblang? Artikel Kompas.id

yang tewas terbunuh dan empat orang terluka. Hanya dalam hitungan jam, Madiun sepenuhnya sudah berhasil dikuasai FDR. Dua anggota FDR yaitu Setiadjit dan Wikana mengambil alih pemerintahan sipil dan membentuk Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Musso sudah membentuk "Republik Soviet Indonesia".

Musso pun menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme USA. Beberapa pemimpin FDR menyatakan kesediaan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia dan menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Pada 23 September 1948, Amir Sjarifuddin juga menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia, bendera mereka tetap merah putih, dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, pemerintah Indonesia terlihat abai terhadap upaya FDR untuk mengakhiri konflik. Pemerintah justru menggunakan kesempatan tersebut untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Pemerintah mengirimkan Brigade Siliwangi Letkol Sadikin untuk mengerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Pemberontakan tersebut pun menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, serta beberapa tokoh lainnya.¹⁶⁷

Guna menghindari konflik dengan TNI, FDR/PKI pun mundur ke pegunungan. Di bawah komando Amir Sjarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka setelah tahu bahwa desa itu sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh

¹⁶⁷ *Ibid*

Mayor Sabarudin. Pada 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan Musso berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Sebulan kemudian, 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Sementara itu, Amir Sjarifuddin juga menghadapi nasib yang sama. Beliau ditangkap pada 4 Desember 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan FDR lain yang tertangkap dieksekusi pada 19 Desember 1948. Perkiraan korban dalam peristiwa tersebut berjumlah 24.000 orang, 8.000 di antaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo.¹⁶⁸

1. *America's Role Behind the Madiun PKI Rebellion*

The Madiun rebellion by the Indonesian Communist Party (PKI) in Madiun, East Java, on September 18, 1948, was a significant event for Indonesia, which had just gained independence three years earlier. The Madiun incident raised several questions, from the PKI's objectives in rebelling to allegations of US involvement in the murder of thousands of communists in the region. The outbreak of the Madiun event began with political pressure on Hatta's Cabinet. According to information in a telegram addressed to US Secretary of State George Catlett Marshall on July 21, 1948, the Hatta cabinet had been in power for too long due to the dominance of communists within the national movement. The situation regarding communism in Indonesia required decisive action from the Dutch government; however, they were hesitant to act, fearing that such steps could hasten the fall of Hatta's cabinet. In September 1948, Marshall openly expressed support for Hatta's Cabinet to suppress communist forces, emphasizing that the USA would provide assistance in any way necessary, clearly indicating US involvement in quelling the communists in Madiun. The USA's fear and disdain for the leftist movement had been evident since 1926-1927, when the communist-led people's uprising was thwarted by the Dutch. According to Soemarsono, a leader of the Indonesian Socialist Youth (Pesindo)

¹⁶⁸, *Ibid.*

and a witness to the Madiun incident, the Sukarno-Hatta government took steps to eradicate communism in Madiun to gain international recognition of Indonesia's sovereignty. The presence of communists was seen as an obstacle to Indonesia gaining sovereignty recognition from Western countries. As long as communist power remained strong in Indonesia, Western nations would not recognize the sovereignty of the newly independent Republic of Indonesia. Before the Madiun event erupted, kidnappings and murders of labor and communist activists had already occurred in Solo by the military. The kidnappings and murders in Solo escalated tensions in Madiun, culminating in the proclamation of the Madiun State by Soemarsono, later taken over by Musso, known as the Madiun Incident.

The Indonesian communist leader Musso initiated the rebellion in Madiun with the ambition of establishing a Soviet Republic in Indonesia. As a newly independent nation facing difficulties in building and improving the welfare of its people, Indonesia received aid from the USA during the Cold War. President Sukarno received assistance from the USSR for the Asian Games project in Senayan, now known as Gelora Bung Karno (GB), in 1961 to showcase Indonesia's prowess through the fourth Asian Games in 1962. The USSR also provided a soft loan of \$12.5 million and sent engineers and technicians to design the Gelora Bung Karno Main Stadium. Soviet Premier Nikita Khrushchev attended the groundbreaking ceremony on February 8, 1960.

Other sources explain that the Madiun PKI Rebellion, or the Madiun PKI Incident of 1948, was a conflict between the Indonesian government and left-wing opposition groups. In the incident that erupted on September 18, 1948, the Indonesian Communist Party (PKI), the Indonesian Socialist Party (PSI), the Indonesian Labor Party (PBI), and the Central Organization of All Indonesia Workers (SOBSI) attempted to seize power due to dissatisfaction with government policies. The Madiun PKI Rebellion only ended after three months, with the PKI suffering defeat. The factor that led to the Madiun PKI movement being seen as a threat to the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) was the PKI's proclamation of a Soviet Republic.

The incident was preceded by the fall of the Amir Sjarifuddin Cabinet, which lost support after being accused of harming Indonesia by signing the Renville Agreement with the Dutch. When Amir Sjarifuddin's term as Prime Minister ended on January 28, 1948, Mohammad Hatta moved to form a new cabinet. Hatta offered positions in his cabinet to Sjarifuddin's faction, but no agreement was reached as Sjarifuddin's side wanted key positions. Ultimately, Hatta formed a new cabinet without left-wing factions, with its main program being the implementation of the Renville Agreement and the rationalization of the Indonesian military. The left-wing factions began to enter the opposition and held a meeting in Surakarta on February 26, 1948, forming the People's Democratic Front (FDR), consisting of the PSI, PKI, PBI, Pesindo, and SOBSI, with Amir Sjarifuddin as its leader. Over time, the FDR became radicalized, focusing its program on opposing Hatta's Cabinet program. The FDR had two main bases of power: the Indonesian National Armed Forces (TNI) and SOBSI, the largest labor organization with nearly 300,000 members. Hatred towards the government increased as Hatta began rationalization programs, viewing the TNI as a poorly trained communist military organization. The FDR then sought support from farmers and encouraged labor strikes. The government was angered and accused the strikes of endangering the Republic. The situation intensified when Musso, a senior Indonesian communist leader who had studied in the USSR, returned and formed a new body consisting of left-wing parties. They embarked on propaganda trips to Central and East Java to spread communism. This event was used as a pretext to launch an anti-PKI campaign and carry out kidnappings of left-wing officers. Entering September 1948, the government and left-wing factions engaged in mutual kidnappings. The Madiun area remained the last stronghold of the FDR, causing local FDR leaders in Madiun to become anxious, leading to the rebellion on September 18, 1948.

On September 18, 1948, at 3:00 AM, the Madiun FDR began to seize local government officials, telephone centers, and military barracks led by Sumarsono and Djoko Sujono. In the attack, two officers were killed, and four were injured. Within hours,

the FDR had completely controlled Madiun. Two FDR members, Setiadjit and Wikana, took over the civil government and formed the National Government Front of Madiun. On the night of September 19, 1948, President Sukarno declared that the Madiun rebellion was an attempt to overthrow the Indonesian government and that Musso had formed the "Soviet Republic of Indonesia."

Musso declared war against Indonesia, accusing Sukarno and Hatta of being slaves to US imperialism. Some FDR leaders expressed willingness to negotiate with the Indonesian government, broadcasting over the radio that what happened in Madiun was not a coup but an effort to correct government policies. On September 23, 1948, Amir Sjarifuddin also stated that the FDR's constitution was that of the Republic of Indonesia, their flag remained red and white, and their national anthem was still "Indonesia Raya." Unfortunately, the Indonesian government appeared indifferent to the FDR's efforts to end the conflict. The government used the opportunity to eliminate the left wing in Indonesia. The government dispatched Colonel Sadikin's Siliwangi Brigade to mobilize troops and seize Madiun. The rebellion resulted in the deaths of East Java Governor RM Suryo and several other figures.

To avoid conflict with the TNI, the FDR/PKI retreated to the mountains. Under Amir Sjarifuddin's command, they fled from Madiun to a small village called Kandangan, where they found ammunition and weapons. However, they were shocked to discover that the village had already been occupied by Sungkono Division Battalion led by Major Sabarudin. On October 28, the government arrested 1,500 people, and Musso was shot dead on October 31, 1948, while hiding in a restroom. A month later, on November 29, Djoko Sujono and Maruto Darusman were also arrested. Meanwhile, Amir Sjarifuddin met a similar fate, being arrested on December 4, 1948. The rebellion was successfully suppressed when Amir, Maruto, Djoko, Suripno, and other captured FDR members were executed on December 19, 1948. The estimated casualties in this incident amounted to 24,000 people, with 8,000 from Madiun, 4,000 in Cepu, and 12,000 in Ponorogo.

2. Bantuan Amerika Serikat (AS)

Pada 21 September 1960, USA membantu Indonesia mengembangkan energi atom dengan menjanjikan dana hibah senilai US\$ 350.000. Dana tersebut digunakan untuk operasional reaktor nuklir yang dibangun di Bandung. USA juga berjanji memberi tambahan US\$141.000 untuk mendanai risetnya. Soekarno meresmikan Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI-2000 dari US di Serpong, Tangerang. Pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan PD. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau PD. Soekarno menggelar KAA-1955 yang menjadi Gerakan Non-Blok (GNB), namun demikian, PD pula yang mengakhiri Soekarno. CIA diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Sejak dekade 1950-an, CIA mencoba berbagai operasi rahasia mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. AS mencoba mendekati militer. AS terlibat dalam peristiwa G30S dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya.¹⁶⁹

2. American Assistance

On September 21, 1960, the USA assisted Indonesia in developing atomic energy by promising a grant of \$350,000. This funding was used for the operational costs of a nuclear reactor built in Bandung. The USA also pledged an additional \$141,000 to finance its research. Sukarno inaugurated the Nuclear Research Center using the IRI-2000 reactor from the USA in Serpong, Tangerang. The political turmoil in Indonesia during Sukarno's administration was closely related to the Cold War. One of Sukarno's successes was forming solidarity among formerly colonized countries to counter the Cold War. Sukarno hosted the Asian-African Conference (KAA) in 1955, which led to the establishment of the Non-Aligned Movement (GNB). However, the Cold War also contributed to Sukarno's downfall. The CIA was

¹⁶⁹.Ibid.

tasked with removing Sukarno. Since the 1950s, the CIA had attempted various covert operations, ranging from creating pornographic films featuring a lookalike of Sukarno to supplying weapons for uprisings. The USA sought to engage with the military and was involved in the G30S incident and the subsequent suppression of communism.

B. Peran Indonesia dalam KAA 1955

Indonesia mempunyai peran penting dalam PD sebab sebagai pencetus gerakan non blok (GNB) yang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 (KAA-1955). Konferensi tersebut untuk mencapai perdamaian. Selain itu untuk menciptakan prinsip politik bersama yang bebas blok barat maupun blok timur, menghapus penjajahan dalam segala bentuk, berjalan berdasarkan prinsip koeksistensi damai dan tidak tergabung ke dalam aliansi pasukan-pasukan militer, memilih bersikap netral dengan tidak memihak blok barat maupun blok timur, karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif.

Perang Dingin (PD) berlangsung sejak tahun 1947, setelah PDII berakhir adalah persaingan ideologi URSS dan USA untuk memperebutkan pengaruh dari negara-negara lain, sementara itu, Indonesia berusaha bersikap netral pada PD dengan cara membentuk Gerakan Non-Blok (GNB). KAA-1955 merupakan pertemuan antara negara-negara benua Asia dan Afrika (AA) untuk membendung pengaruh blok timur dan barat. Mereka berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan, terutama komitmen untuk saling mempertahankan kemerdekaan. Dalam KAA-1955 yang dihadiri oleh 29 negara tersebut, mereka membicarakan tentang semua masalah yang sedang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang, misalnya masalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam PD, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi. Semua peserta yang hadir dalam KAA-1955 terutama dari Afrika, menyampaikan aspirasi negara-negara mereka yang masih dalam proses kemerdekaan, yang menghasilkan Dasasila Bandung dan dijadikan harapan oleh

semua peserta KAA-1955, karena sebagian besar pernah merasakan penajahan.¹⁷⁰

Sasaran PD dalam perang ideologi URSS dan USA adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti India dan Indonesia, kemudian membuat Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, dan para pemimpin dunia lainnya mencetus Gerakan Non-Blok (GNB) yang merupakan organisasi internasional terdiri dari 120 negara yang merasa diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Organisasi tersebut didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KAA-1955 yang disebut Dasasila Bandung. Indonesia menjadi salah satu pendiri GNB, yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa PD.

Di samping itu, tujuan GNB untuk mengupayakan hak guna menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota dan menentang adanya sistem pemisahan ras (apartheid), menolak segala bentuk imperialisme dan kolonialisme, mendukung pelucutan senjata, dan tidak mencampuri urusan negara lain. Peran Indonesia dalam PD selanjutnya terus aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, dengan demikian Indonesia dapat meningkatkan hubungannya dengan sesama negara anggota.

Selain itu, Indonesia juga dapat ikut serta dalam kegiatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi perdamaian dunia, seperti mendirikan ASEAN yang diikuti oleh sepuluh negara, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Tidak hanya menjadi anggota, Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967. Negara-negara anggota dalam ASEAN sendiri merupakan negara yang baru saja merdeka, sehingga kondisi politik

¹⁷⁰ Peran Indonesia dalam Perang Dingin. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/09/090000379/peran-indonesia-dalam-perang-dingin?page=all>, diunduh Tanggal 28 Januari 2024

internalnya masih belum stabil, masih terjadi konflik etnis, masalah persatuan, dan sistem pertahanan serta keamanannya masih lemah, karena itu negara-negara di Asia Tenggara terdorong untuk membentuk organisasi regional supaya dapat menjadi alternatif landasan perdamaian daerah.

B. *Indonesia's Role in the 1955 Asian-African Conference (KAA)*

Indonesia played a significant role in the Cold War as the initiator of the Non-Aligned Movement (GNB) that organized the Asian-African Conference in 1955 (KAA-1955). The conference aimed to achieve peace, create a common political principle that was free from both Western and Eastern blocs, eliminate colonialism in all forms, and operate based on the principles of peaceful coexistence without joining any military alliances. Indonesia chose to adopt a neutral stance, refraining from siding with either the Western or Eastern bloc, as it embraced an active and free foreign policy.

The Cold War, which began in 1947 after World War II, was characterized by the ideological rivalry between the USSR and the USA vying for influence over other countries. In this context, Indonesia sought to maintain neutrality by establishing the Non-Aligned Movement (GNB). The KAA-1955 was a meeting of Asian and African countries to counter the influences of both the Eastern and Western blocs. They convened to produce several agreements, primarily a commitment to mutual defense of independence. During the KAA-1955, attended by 29 countries, discussions covered various issues faced by newly independent former colonies, such as peace, the role of third-world countries in the Cold War, economic development, and decolonization. Participants, particularly from Africa, expressed their aspirations for their countries still in the process of achieving independence, leading to the formulation of the Bandung Principles, which served as a beacon of hope for all KAA-1955 attendees, as most had experienced colonization.

The Cold War's ideological battleground targeted newly independent developing nations, such as India and Indonesia, prompting Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and other world leaders to launch the Non-Aligned Movement (GNB). This international organization comprises 120 countries that do not align

with any major power. It was founded based on fundamental principles agreed upon at the KAA-1955, known as the Bandung Principles. Indonesia became one of the founding members of the GNB, aiming to maintain the neutrality of third-world countries during the Cold War.

Moreover, the GNB's objectives include advocating for the right to self-determination, national independence, sovereignty, and territorial integrity of its member states, opposing racial segregation (apartheid), rejecting all forms of imperialism and colonialism, supporting disarmament, and non-interference in the internal affairs of other countries. Indonesia continued to play an active role in international organizations, such as the United Nations (UN), which helped enhance its relations with fellow member states.

Additionally, Indonesia participated in initiatives contributing to world peace, such as the establishment of ASEAN, which includes ten countries: Indonesia, the Philippines, Thailand, Singapore, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, and Cambodia. Not only is Indonesia a member, but it was also one of the founding countries of this organization, formed on August 8, 1967. The member countries of ASEAN are mostly newly independent nations, which means their internal political conditions are still unstable, characterized by ethnic conflicts, issues of unity, and weak defense and security systems. As a result, Southeast Asian countries felt compelled to form a regional organization to serve as an alternative foundation for regional peace.

1. Maksud dan Tujuan KAA-1955 di Bandung.

Maksud dan tujuan KAA-1955 di Bandung yang dihadiri oleh 29 negara Asia-Afrika adalah untuk membahas perdamaian dan peran dunia ketiga dalam PD, pembangunan ekonomi, dan dekolonisasi. Pada prinsipnya KAA-1955 di Bandung adalah penentuan nasib sendiri secara politik, saling menghormati kedaulatan, non-agresi, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, dan kesetaraan, merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh peserta konferensi, yang sebagian besar baru saja keluar dari pemerintahan kolonial. Sponsor KAA-1955 adalah Burma, India, Pakistan dan Sri Lanka, mereka mempertemukan 24

negara tambahan dari AA dan Timur Tengah. Mereka mewakili masyarakat terjajah lainnya, karena proses dekolonisasi masih berlangsung, terutama masyarakat Afrika yang belum membentuk pemerintahan independen. Para delegasi membangun berdasarkan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai; bekerja dalam negosiasi antara India dan Tiongkok pada tahun 1954, ketika mereka berupaya membangun solidaritas di antara negara-negara yang baru saja merdeka.¹⁷¹

1. *Aims and Objectives of the 1955 Asian-African Conference (KAA) in Bandung*

The aims and objectives of the KAA-1955 in Bandung, attended by 29 Asian and African countries, were to discuss peace, the role of the third world in the Cold War, economic development, and decolonization. In essence, the KAA-1955 in Bandung represented the principles of self-determination in political matters, mutual respect for sovereignty, non-aggression, non-interference in domestic affairs, and equality, all of which were vital for the conference participants, many of whom had just emerged from colonial rule. The conference was sponsored by Burma, India, Pakistan, and Sri Lanka, who brought together 24 additional countries from Asia and the Middle East. These nations represented other colonized societies, as the decolonization process was still ongoing, especially in Africa, where many had not yet established independent governments. The delegations built their discussions on the five principles of peaceful coexistence, which were initially developed during negotiations between India and China in 1954, as they sought to foster solidarity among newly independent nations.

¹⁷¹ Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955
[https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHC AEQIRig ATIKCAIQIRgWGB0YHJIKCAMQIRgWGB0YHtBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA &sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHC AEQIRig ATIKCAIQIRgWGB0YHJIKCAMQIRgWGB0YHtBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA &sourceid=chrome&ie=UTF-8) diunduh Tanggal 22 Desember 2023

2. Dasawarsa Bandung (1955)

Pada penutupan KAA (1955) Bandung, memuat asas-asas piagam PBB dan 5 (lima) asas Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Pada dasarnya tujuan Dasasila Bandung sama dengan tujuan piagam PBB yakni (a) menghormati hak-hak dasar manusia serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB, (b) mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil, (c) tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain, (d) menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendirian ataupun secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB, (e) tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan (f) tidak melakukannya terhadap negara lain, (g) tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara, (h) menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB, (i) memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, (j) menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Terbentuknya Dasasila Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, terutama karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.

2. Dasawarsa Bandung (1955)

At the closing of the Asian-African Conference (KAA) in 1955, the principles of the United Nations Charter and the five principles articulated by Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, were outlined. Essentially, the objectives of the Dasasila Bandung align with the goals of the UN Charter, which include:

- a. *Respect for fundamental human rights and the principles contained in the UN Charter.*

- b. *Recognition of the equality of all races and the equality of all nations, large and small.*
- c. *Non-intervention or interference in the internal affairs of other countries.*
- d. *Respect for the rights of every nation to defend itself, individually or collectively, in accordance with the UN Charter.*
- e. *Refraining from using the rules of collective defense to act in the special interest of any one great power.*
- f. *Avoiding actions or threats of aggression or the use of violence against the territorial integrity or political independence of any country.*
- g. *Resolving all international disputes peacefully, through negotiation, agreement, arbitration, or other peaceful means, as chosen by the parties concerned in accordance with the UN Charter.*
- h. *Promoting mutual interests and cooperation.*
- i. *Respecting international law and obligations.*
- j. *The formation of Dasasila Bandung became a hope for all participants of the Bandung Conference, especially as most of them had experienced colonization.*

3. Inspirasi Dasawarsa Bandung (1955)

KAA Bandung menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk GNB, yang mencakup serangkaian tujuan konkrit yakni peningkatan kerja sama ekonomi, budaya, sosial perlindungan hak asasi manusia dan prinsip penentuan nasib sendiri, mengakhiri diskriminasi rasial di mana pun terjadi, penegasan kembali pentingnya hidup berdampingan secara damai. Para pemimpin berharap fokus pada potensi kolaborasi antar negara-negara dunia ketiga, mempromosikan upaya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada apa dan Amerika Utara. Para pemimpin negara-negara berkembang bersatu untuk menghindari keharusan memihak dalam persaingan PD. Pada awalnya motifasinya adalah promosi perdamaian, tetapi pada tahun 1970-an, kelompok tersebut semakin

radikal mengutuk kebijakan negara-negara adidaya PD, namun demikian GNB terus berlanjut hingga PD berakhir.

3. *Inspiration of Dasawarsa Bandung (1955)*

The Bandung Conference inspired Yugoslav President Josip Broz Tito, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, and Egyptian President Gamal Abdel Nasser to establish the Non-Aligned Movement (GNB). This movement encompassed a series of concrete goals, including enhancing economic, cultural, and social cooperation, protecting human rights, and upholding the principle of self-determination. It aimed to end racial discrimination wherever it occurred and reaffirmed the importance of peaceful coexistence. The leaders hoped to focus on the potential for collaboration among third-world countries, promoting efforts to reduce their dependency on the West and North America. The leaders of developing countries united to avoid the necessity of taking sides in the Cold War rivalry. Initially, their motivation was the promotion of peace; however, in the 1970s, the group became increasingly radical, condemning the policies of superpower nations during the Cold War. Nevertheless, the Non-Aligned Movement continued until the end of the Cold War.

4. Sikap AS terhadap KAA-1955

Pemerintah AS pada awalnya memandang KAA dan GNB yang muncul dari KAA (1955) tersebut dengan sikap hati-hati. Para pengamat di USA menyatakan keprihatinannya bahwa pertemuan tersebut merupakan tanda pergeseran ke arah kiri yang cenderung ideologi sosialis. Di samping itu, KAA-1955 tersebut mengungkapkan 2 (dua) kontradiksi dalam kebijakan luar negeri USA terkait dekolonisasi di dunia ketiga sehingga pemerintah USA akan terjebak keinginannya untuk mendukung dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri di Asia Tenggara dan Afrika dan ketergantungannya pada kekuatan kolonial Eropa Barat sebagai sekutu melawan Blok Timur yang komunis yang dipimpian oleh URSS. Bagi USA kerjasama dengan Inggris, Perancis dan Belanda sangat penting bagi kebijakan USA di

Eropa, namun mendukung dekolonisasi sama saja dengan menentang sekutu-sekutu USA. Para pemimpin USA khawatir bahwa anti-kolonialisme di Bandung dan diskusi mengenai politik rasial global yang terjadi di sana dapat berubah menjadi anti-Amerika atau anti-Barat.

4. U.S. Attitude Towards KAA-1955

Initially, the U.S. government viewed the Bandung Conference (KAA) and the subsequent Non-Aligned Movement (GNB) with caution. Observers in the U.S. expressed concern that the meeting signified a shift towards the left, leaning towards socialist ideologies. Furthermore, KAA-1955 revealed two contradictions in U.S. foreign policy regarding decolonization in the Third World, putting the U.S. government in a bind between its desire to support decolonization and self-determination in Southeast Asia and Africa, and its dependence on Western European colonial powers as allies against the communist Eastern Bloc led by the USSR. For the U.S., cooperation with Britain, France, and the Netherlands was crucial for its policy in Europe, but supporting decolonization effectively meant opposing its allies. U.S. leaders feared that the anti-colonial sentiments expressed in Bandung and discussions surrounding global racial politics could morph into anti-American or anti-Western sentiments.

5. Semangat KAA (1955)

Namun demikian, pada akhirnya, KAA-1955 tidak menimbulkan kecemasan umum terhadap Barat seperti yang dikhawatirkan oleh para pengamat USA. Sebaliknya, para peserta menampilkan beragam ideologi dan loyalitas. Sekutu USA di Asia mampu mewakili kepentingan bersama mereka dengan USA dalam pertemuan konferensi tersebut, dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mengambil sikap moderat dalam pidatonya di hadapan para delegasi KAA. Meskipun demikian, Bandung memberikan suara kepada negara-negara berkembang dan menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi kekuatan dalam politik dunia di masa depan, baik di dalam maupun di luar kerangka PD.

5. *Spirit of KAA (1955)*

Despite concerns from U.S. observers, the KAA-1955 ultimately did not result in widespread condemnation of the West. On the contrary, the participants displayed a range of ideologies and loyalties. U.S. allies in Asia were able to represent their shared interests with the U.S. during the conference, and Chinese Premier Zhou Enlai took a moderate stance in his speech to the KAA delegates. Nevertheless, Bandung amplified the voices of developing countries and demonstrated that they could become a force in global politics in the future, both within and outside the context of the Cold War.

6. **Dampak Positif Terhadap Indonesia**

Presiden Soekarno meminta bantuan pada USA. Pelaksanaan Asian Games ke-IV di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet, karena itu dibangunlah Jembatan Semanggi yang sekarang dikenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Jembatan Semanggi dibangun lewat uang AS. Presiden Soekarno juga mengutus Perdana Menteri Djuanda untuk menemui Howard Jones yang berhasil mendapat bantuan membangun jalan baru dari Cawang sampai ke Tanjung Priok yang disebut sebagai Jakarta By Pass (kini Jalan Jenderal A Yani dan Mayjen DI Panjaitan).

Pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan PD. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau PD. Soekarno menggelar KAA-1955 yang menjadi Gerakan Non-Blok (GNB), namun demikian, PD pula yang mengakhiri Soekarno. CIA diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Sejak dekade 1950-an, CIA mencoba berbagai operasi rahasia mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. AS mencoba mendekati militer. AS terlibat dalam peristiwa G30S dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya.

6. Positive Impacts on Indonesia

President Sukarno sought assistance from the USA. The implementation of the Fourth Asian Games in Senayan raised concerns about potential traffic congestion, leading to the construction of the Semanggi Bridge, now known as the Semanggi Interchange. This bridge was built with funds from the U.S. President Sukarno also sent Prime Minister Djuanda to meet with Howard Jones, who successfully secured assistance to construct a new road from Cawang to Tanjung Priok, known as the Jakarta By Pass (now Jalan Jenderal A Yani and Mayjen DI Panjaitan).

The political upheaval in Indonesia during Sukarno's administration was closely related to the Cold War. One of Sukarno's successes was forming solidarity among former colonial nations to counter the Cold War. Sukarno convened the KAA-1955, which led to the establishment of the Non-Aligned Movement (NAM). However, the Cold War also contributed to Sukarno's downfall. The CIA was tasked with removing Sukarno, and since the 1950s, it attempted various covert operations, including producing fake pornographic films featuring a look-alike of Sukarno and supplying weapons for rebellions. The U.S. sought to approach the military and became involved in the G30S incident and the subsequent suppression of communists.

C. Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno

Tragedi Cikini adalah percobaan penggranatan untuk membunuh Presiden Soekarno di Jalan Cikini No. 76 Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 30 November 1957. Upaya pembunuhan tersebut didalangi oleh Jusuf Ismail, anggota pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Beliau bersama rekannya melemparkan enam buah granat ke arah Presiden Soekarno. Lima di antaranya meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah dan mencederai 48 orang. Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur dan Megawati selamat dari insiden tersebut. Latar Belakang Tragedi pelemparan granat di Perguruan Cikini diduga bukan hanya sebuah aksi teror biasa, melainkan bertujuan untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Pada masa

kepemimpinan Soekarno, banyak orang yang merasa tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi saat tersebut. Akibatnya, tercetus sebuah upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Soekarno. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melemparkan granat. Ide tersebut tercetus ketika salah satu pelaku tengah melihat mobil Presiden Soekarno di Perguruan Cikini pada 30 November 1957 itu. Saat tersebut, sedang ada perayaan hari jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Kebetulan, kedua anak Presiden Soekarno, yaitu Guntur dan Megawati juga merupakan murid di sekolah tersebut. Kedatangan Soekarno ke Perguruan Cikini tidak hanya sebagai orangtua dari kedua anaknya, melainkan juga atas undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini, Sumadji Muhammad Sulaimani dan Direktur Percetakan Gunung Sari, Johan Sirie. Akhirnya, para pelaku memutuskan untuk melemparkan granat kepada Presiden Soekarno untuk membuatnya jatuh dari jabatannya.¹⁷²

Pada 30 November 1957 sedang diselenggarakan perayaan hari jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Saat itu, acara berjalan dengan sangat meriah, bahkan, Presiden Soekarno juga turut hadir untuk merayakan. Kehadiran Soekarno tersebut disambut dengan antusias oleh para peserta, terutama para murid sekolah. Usai acara, Presiden Soekarno bergegas untuk segera meninggalkan lokasi. Di sepanjang jalan dari halaman sekolah, warga sudah bergerombol untuk menantikan presiden lewat, namun demikian, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat yang ternyata berasal dari lemparan granat yang diarahkan ke halaman sekolah. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak. Selain itu, mobil yang dikendarai Presiden Soekarno juga hancur di makan lautan api akibat ledakan besar dari granat yang dilemparkan. Soekarno bersama kedua anaknya, Guntur dan Megawati selamat, namun demikian ada 10 anak sekolah

¹⁷² Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

tewas dan 48 orang mengalami cedera. Sebagian besar dari mereka mengalami luka parah.¹⁷³

Penangkapan Pasca-penggranatan tersebut, Presiden Soekarno dengan amarahnya segera memerintahkan pengejaran terhadap para pelaku pelemparan granat. Beliau juga meminta untuk dilakukan penyelidikan terkait dalang di balik peristiwa tersebut. Akhirnya, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, para aparat dan intelijen negara berhasil menangkap empat pemuda yang diduga sebagai pelaku aksi teror tersebut. Mereka adalah Jusuf Ismail, Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, dan Moh Tasin bin Abubakar. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa keempat orang tersebut adalah penghuni Asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/TII). Selain mereka, rupanya Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat juga dicurigai sebagai otak dari tragedi tersebut. Persidangan untuk mengusut peristiwa tersebut, digelar persidangan pada 15 Agustus 1958. Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebutkan bahwa Zulkifli Lubis adalah dalang utamanya. Bahkan, terdakwa juga mengatakan sempat beberapa kali menyusun upaya percobaan untuk membunuh Soekarno. Akan tetapi, beberapa kalangan meragukan pengakuan tersebut. Zulkifli pribadi juga menolak untuk bertanggung jawab atas tragedi Cikini yang menyasar Soekarno sebagai target pembunuhan. Pada akhirnya, Jusuf Ismail mengaku bahwa beliau yang memelopori pelemparan granat tersebut. Zulkifli pun lolos dari tuduhan. Keempat terdakwa pelaku tragedi Cikini diputuskan diberi hukuman mati di hadapan regu tembak pada 28 Mei 1960.¹⁷⁴

¹⁷³ Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

¹⁷⁴.*Ibid.*

Informasi lain¹⁷⁵ pada tanggal 30 Nopember 1957 sebanyak enam granat menghujani sekolah Perguruan Cikini di Jalan Cikini Nomor 76 Jakarta Pusat. Keenam granat tersebut sengaja dilempar ke arah Presiden Soekarno yang malam tersebut tengah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Perguruan Cikini. Lima dari enam granat meledak, lalu menewaskan sepuluh orang anak sekolah dan 48 orang mengalami luka hingga cacat. Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri selamat dari insiden tersebut. Kebetulan, kedua anak Soekarno tersebut merupakan murid di sekolah tersebut. Secara kronologi tragedi tersebut bermula saat Soekarno yang sedang dikerumuni anak-anak berjalan keluar untuk meninggalkan lokasi malam dana amal di sana. Malam tersebut, ramai dengan hiasan balon, carikan kertas warna-warni, musik, nyanyian, lelang, hingga pertunjukan singkat tiba-tiba ada sebuah granat meledak. Granat lainnya kembali dilemparkan dari sisi kiri dan kanan gedung secara bersusulan. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak. Sementara Soekarno merunduk ke arah belakang mobil sambil melindungi anak-anak yang ada di dekatnya.¹⁷⁶

Granat yang dilempar dari jarak lima meter tersebut ternyata menembus mesin, menghancurkan kaca depan, dan meledakkan dua ban. Setelah mobil tersebut diledakkan. ajudan Bung Karno, Mayor Sudrato menarik tangannya. Bung Karno bersama ajudannya lari menyeberangi jalan. Dalam keadaan gelap dan panik, Bung Karno terjatuh ke tanah. ajudannya menolong Bung Karno, lalu mereka lari ke sebuah rumah milik seorang Belanda. Anak-anak berteriak dan lari ketakutan memasuki gedung sekolah. Para bergulingan ke bawah kendaraan untuk menyelamatkan diri. Suasana

¹⁷⁵ [Kilas Balik] 66 Tahun Lalu, Presiden Soekarno Nyaris Terbunuh dalam Tragedi Cikini", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/30/10000081/kilas-balik-66-tahun-lalu-presiden-soekarno-nyaris-terbunuh-dalam-tragedi> diunduh Tanggal 29 Agustus 24

¹⁷⁶.*Ibid.*

mengerikan tersebut terjadi hingga ledakan granat kelima. Tak berselang lama, polisi dan ambulans datang bergantian. Sekolah yang mendadak tersebut berubah menjadi rumah sakit darurat. Pada pukul Pukul 22.00 WIB, kendaraan cadangan membawa Soekarno ke istana dan menenangkan rakyat melalui siaran radio.¹⁷⁷

C. *The Cikini Tragedy of 1957: An Assassination Attempt on Sukarno*

The Cikini Tragedy refers to an assassination attempt on President Sukarno at Jalan Cikini No. 76, Central Jakarta. This event occurred on the night of Saturday, November 30, 1957. The assassination attempt was orchestrated by Jusuf Ismail, a member of the Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) rebel group. He, along with his accomplices, threw six grenades towards President Sukarno. Five of the grenades exploded, killing ten schoolchildren and injuring 48 others. Fortunately, President Sukarno and his two children, Guntur and Megawati, survived the incident.

Background of the Tragedy

The grenade attack at Cikini Institution was not merely a random act of terror; it aimed to remove Sukarno from the presidency. During Sukarno's administration, many people were dissatisfied with the political conditions at that time, leading to a plot to assassinate him. The idea arose when one of the perpetrators spotted Sukarno's car at the Cikini Institution during its 15th-anniversary celebration. Both of Sukarno's children were students at the school, and his attendance was at the invitation of the school's headmaster, Sumadji Muhammad Sulaimani, and the director of Gunung Sari Printing, Johan Sirie. Consequently, the attackers decided to throw grenades at Sukarno in an attempt to unseat him.

¹⁷⁷.Ibid.

The Incident

On November 30, 1957, the 15th-anniversary celebration of Cikini Institution was underway, with Sukarno attending. His presence was enthusiastically welcomed, especially by the students. After the event, as Sukarno was leaving, a loud explosion occurred from grenades thrown towards the school. The explosion caused many people to fall, and Sukarno's vehicle was engulfed in flames from the blasts. Sukarno and his children managed to escape, but the tragedy resulted in the deaths of ten schoolchildren and injuries to 48 others, many of whom sustained severe wounds.

Aftermath and Arrests

Following the grenade attack, an infuriated Sukarno ordered a manhunt for the perpetrators and demanded an investigation into the masterminds behind the incident. Within 24 hours, state security and intelligence forces arrested four young men suspected of carrying out the terrorist act: Jusuf Ismail, Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, and Moh Tasin bin Abubakar. Investigations revealed that they were residents of the Sumbawa Dormitory located in Cikini and members of the DI/TII rebel group. Colonel Zulkifli Lubis, the former Deputy Chief of Army Staff, was also suspected of being the mastermind behind the tragedy. During the trial on August 15, 1958, one defendant claimed that Zulkifli Lubis was the main orchestrator and had attempted multiple times to assassinate Sukarno. However, many doubted this testimony, and Zulkifli denied responsibility for the Cikini Tragedy. Ultimately, Jusuf Ismail confessed to leading the grenade attack, resulting in Zulkifli being exonerated. The four defendants were sentenced to death by firing squad on May 28, 1960.

Additional Information

On November 30, 1957, six grenades were thrown at Cikini Institution in Jakarta. The grenades were deliberately aimed at President Sukarno, who was attending the 15th-anniversary celebration. Five of the grenades exploded, killing ten schoolchildren and injuring 48 others. Sukarno and his children survived the attack, and the incident caused chaos, with people fleeing for safety. In the aftermath, the area transformed into an emergency hospital, and by

10:00 PM, vehicles transported Sukarno back to the palace, where he calmed the public through a radio broadcast.

D. Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI

Pada 1956 hingga 1958, terjadi pemberontakan di Sumatera yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan terjadi karena rasa kecewa para politisi dan perwira di daerah tersebut terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam pemberontakan tersebut, para politisi dan perwira juga turut dibantu oleh AS karena sikap anti-komunis. Keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI adalah memberi bantuan berupa pesawat tempur, dana, perlengkapan, amunisi, dan pilot melalui CIA (*Central Intelligence Agency*). Latar Belakang, tuntutan, anggota, penumpasan, dan dampaknya keterlibatan AS dalam PRRI kekecewaan yang dirasakan oleh para politisi dan perwira tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, tetapi kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga membuat para politisi dan perwira di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti-komunis dan pro-barat. Anti-komunis mereka pun mendapat dukungan dan bantuan dari AS yang pada saat tersebut sedang terlibat perang dingin melawan US dan negara-negara komunis. Bantuan dari AS diberikan melalui CIA pada 1958, dimulai dengan memberi bantuan terselubung untuk PRRI.¹⁷⁸

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan gerakan separatisme yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Gerakan PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1958. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI adalah rasa kecewa para politisi dan perwira di Sumatera terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, yang dinilai

¹⁷⁸ Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/100000679/keterlibatan-amerika-serikat-dalam-prri?page=all> diunduh Tanggal 25 Februari 2024

hanya melancarkan pembangunan di Jawa. Gerakan PRRI sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab ada keterlibatan asing, khususnya Amerika Serikat. Gerakan separatis PRRI tidak hanya disebabkan oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kedekatan Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kian lama semakin dekat juga menimbulkan ketidaksukaan dari golongan anti-komunis dan pro-Barat yang berada di Sumatera. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat serta ketidaksukaan terhadap kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI memicu sejumlah tokoh di Sumatera untuk bersatu dalam gerakan PRRI. Keterlibatan pihak asing dalam pemberontakan PRRI khususnya Amerika Serikat (AS) sangat beralasan. Pasalnya, saat itu Amerika Serikat sedang terlibat Perang Dingin dengan negara-negara komunis, utamanya US. Amerika Serikat terlibat dalam pemberontakan PRRI dengan memberi bantuan terselubung berupa pesawat tempur, tentara, dana, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya. Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis PRRI.¹⁷⁹

D. U.S. Involvement in the Revolutionary Government of the Indonesian Republic (PRRI)

From 1956 to 1958, a rebellion known as the Revolutionary Government of the Indonesian Republic (PRRI) occurred in Sumatra. This uprising stemmed from the dissatisfaction of local politicians and military officers with the policies of the central government of Indonesia. The rebellion was exacerbated by President Sukarno's increasing closeness to the Indonesian Communist Party (PKI), which alienated many anti-communist and pro-Western figures in the region. The United States, motivated by its anti-communist stance during the Cold War, provided support to the PRRI.

¹⁷⁹ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Background of the PRRI

The PRRI was established on February 15, 1958, in Padang, West Sumatra, as a separatist movement following Indonesia's independence. Local politicians and military personnel felt neglected by the central government, which they believed focused its development efforts primarily on Java. This perception of inequity, combined with the growing influence of the PKI, fueled the desire for rebellion among those who were anti-communist.

U.S. Support for PRRI

The U.S. involvement in the PRRI was significant. Through the Central Intelligence Agency (CIA), the U.S. provided covert assistance that included fighter aircraft, funds, military supplies, ammunition, and pilots. This support was part of a broader strategy to counteract the spread of communism during the Cold War. The U.S. aimed to weaken Sukarno's government by backing the anti-communist factions in Sumatra. The involvement of the U.S. in the PRRI was rooted in both the local dissatisfaction with Sukarno's policies and the international context of the Cold War. The increasing alignment of Sukarno with the PKI alarmed many anti-communist factions, prompting them to unite under the PRRI banner.

Challenges and Impacts

The PRRI movement was notably difficult to suppress compared to other uprisings, largely due to foreign support, particularly from the U.S. This external involvement indicated the geopolitical stakes in Indonesia at the time. The PRRI's demands and the local discontent led to a complex interplay of domestic and international politics, shaping Indonesia's trajectory in the years following the rebellion.

E. Keterlibatan AS dalam Gerakan Permesta

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) merupakan gerakan separatisme yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Gerakan Permesta dimulai dengan dicetuskan dan diproklamasikannya Piagam Permesta di Makassar pada 2 Maret 1957. Sedangkan PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1958. Salah satu hal yang menyebabkan

terjadinya Permesta adalah rasa kecewa para politisi dan perwira Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia, yang dinilai hanya melancarkan pembangunan di Jawa. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab ada keterlibatan asing, khususnya Amerika Serikat. Bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam gerakan. Bukti AS terlibat Permesta Gerakan separatis Permesta tidak hanya disebabkan oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kedekatan Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kian lama semakin dekat juga menimbulkan ketidaksukaan dari golongan anti-komunis dan pro-Barat yang berada di Sulawesi.¹⁸⁰

Kekecewaan terhadap pemerintah pusat serta ketidaksukaan terhadap kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI memicu sejumlah tokoh di Sulawesi dalam Permesta. Keterlibatan pihak asing dalam pemberontakan Permesta, khususnya Amerika Serikat (AS) sangat beralasan. Pasalnya, saat tersebut Amerika Serikat sedang terlibat Perang Dingin dengan negara-negara komunis, utamanya US. Alasan Gerakan Permesta Sulit Ditumpas Dibanding Pemberontakan Lainnya Amerika Serikat terlibat dalam pemberontakan Permesta dengan memberi bantuan terselubung berupa pesawat tempur, tentara, dana, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya. Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis Permesta adalah tertangkapnya pesawat udara yang dikendalikan agen Central Intelligence Agency (CIA), Allen Pope. Dukungan yang diberikan CIA dalam pemberontakan Permesta berupa 15 pesawat pengebom B-26 dan beberapa pesawat udara tempur P-51 Mustang. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan Permesta, sebuah pesawat udara berhasil ditembak jatuh. Ternyata, pesawat B-26 yang berhasil ditembak

¹⁸⁰ Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI dan Permesta <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

jatuh di Ambon pada 18 Mei 1958, dikendalikan oleh seorang agen CIA bernama Allen Lawrence Pope. yang tertangkap dalam keadaan hidup, sampai ke markas besar CIA di AS pada hari yang sama. Dalam pemberontakan Permesta. Setelah ditangkap, Allen Pope ditahan dan menjalani serangkaian persidangan di Indonesia. Diketahui bahwa sebelum terjun dalam operasi rahasia bersama Permesta, Allen Pope dikirim ke Filipina untuk mengaburkan identitas pesawatnya. Allen Pope mulai bergabung dengan Permesta pada 27 April 1958, dan beroperasi di bawah perwira militer lokal. Setelah penangkapan Allen Pope, Amerika Serikat memutuskan untuk berhenti memberikan bantuan kepada Permesta. Duta Besar AS Howard P Jones sempat mengatakan Allen Pope adalah tentara bayaran dan menyatakan penyesalannya atas keterlibatan warga AS, namun demikian pernyataan tersebut terbukti omong kosong, karena saat ditangkap, Allen Pope membawa sekitar 30 dokumen yang memberatkan, termasuk catatan penerbangannya. pengadilan militer menyatakan bahwa Allen Pope bersalah atas pembunuhan 17 anggota angkatan bersenjata Indonesia dan enam warga sipil. Atas perbuatannya itu, Allen Pope dijatuhi hukuman mati, namun demikian, eksekusi tidak pernah terjadi. Allen Pope hanya menjadi tahanan rumah selama Pemerintah AS bernegosiasi dengan Presiden Soekarno. Setelah dua tahun tawar-menawar, Allen Pope akhirnya dibebaskan dan diterbangkan ke Amerika pada 2 Juli 1962. Sekembalinya ke AS, Pope masih menerbangkan misi rahasia CIA di berbagai negara.¹⁸¹

E. U.S. Involvement in the Permesta Movement

The Permesta (People's Struggle) movement was a separatist movement that emerged after Indonesia's independence. The Permesta movement began with the proclamation of the Permesta Charter in Makassar on March 2, 1957. Meanwhile, the PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia) was established in Padang, West Sumatra, on February 15, 1958. One of the reasons for the

¹⁸¹.Ibid.

emergence of Permesta was the disappointment of politicians and officers in Sulawesi regarding the central government's policies, which were perceived as favoring development in Java. The Permesta movement was difficult to suppress compared to other rebellions due to foreign involvement, particularly from the United States.

Evidence of U.S. involvement in the Permesta movement is substantial. The separatist movement was not only caused by discontent with the central government's policies but also by the growing closeness between President Sukarno and the Indonesian Communist Party (PKI), which incited dislike from anti-communist and pro-Western factions in Sulawesi. Disappointment with the central government, coupled with dissatisfaction over Sukarno's relationship with the PKI, prompted several figures in Sulawesi to support Permesta.

The involvement of foreign parties in the Permesta rebellion, especially the United States, was highly justified. At that time, the United States was engaged in the Cold War against communist countries. The reasons why the Permesta movement was harder to suppress than other rebellions included the U.S. support, which was provided covertly in the form of fighter planes, soldiers, funds, ammunition, and other military supplies. One piece of evidence of foreign involvement in the Permesta separatist movement was the capture of an aircraft piloted by Central Intelligence Agency (CIA) agent Allen Pope. The CIA's support for the Permesta rebellion included 15 B-26 bombers and several P-51 Mustang fighter planes.

When the Indonesian National Armed Forces (TNI) launched military operations to quell the Permesta rebellion, one aircraft was shot down. It turned out that the B-26 plane, which was shot down in Ambon on May 18, 1958, was piloted by CIA agent Allen Lawrence Pope, who was captured alive and taken to CIA headquarters in the U.S. on the same day. After his capture, Pope was detained and underwent a series of trials in Indonesia. It was revealed that before participating in the covert operations with Permesta, Allen Pope had been sent to the Philippines to obscure the identity of his aircraft. He began collaborating with Permesta on April 27, 1958, operating under a local military officer.

Following Pope's capture, the United States decided to cease its support for Permesta. U.S. Ambassador Howard P. Jones claimed that Allen Pope was a mercenary and expressed regret over the involvement of U.S. citizens. However, this statement was proven to be empty rhetoric, as Pope was found to possess about 30 incriminating documents at the time of his capture, including his flight records. The military court declared Pope guilty of killing 17 members of the Indonesian armed forces and six civilians. For his actions, Allen Pope was sentenced to death; however, the execution never took place. Instead, Pope was placed under house arrest while the U.S. government negotiated with President Sukarno. After two years of negotiations, Pope was eventually released and flown back to the United States on July 2, 1962. Upon returning to the U.S., Pope continued to conduct covert CIA missions in various countries.

F. Indonesia, Amerika Serikat dan Politik Luar Negeri

Sejarah diplomasi Indonesia - USA mengalami pasang dan surut. Secara umum hubungan diplomatik orde lama Indonesia-USA menjauh. Presiden Sukarno memposisikan USA sebagai salah satu kekuatan kapitalis global yang perlu dilawan, sedangkan hubungan diplomatik orde baru Indonesia-USA mendekat, karena Presiden Soeharto membutuhkan USA dan sekutunya untuk mendukung pembangunan nasional. Hubungan diplomatik Indonesia-USA di masa reformasi lebih berimbang karena presiden pada masa tersebut berusaha menegakan prinsip bebas aktif dan memperoleh kontrol yang ketat dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.

F. Indonesia, the United States, and Foreign Policy

The history of diplomacy between Indonesia and the United States has experienced ups and downs. Generally, during the Old Order, diplomatic relations between Indonesia and the U.S. became strained. President Sukarno positioned the U.S. as a global capitalist power that needed to be opposed. In contrast, during the New Order, diplomatic relations between Indonesia and the U.S. improved, as President Suharto needed the U.S. and its allies to support national development. During the Reformasi era, Indonesia-U.S. diplomatic

relations became more balanced, as the presidents of that time sought to uphold the principles of an active, independent foreign policy while maintaining strict control from stakeholders and the public.

G. Politik Luar Negeri Orde Lama

Pada awal kemerdekaan atau era Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Republik Indonesia telah mengenal empat kebijakan luar negeri. Indonesia masih berkuat dengan upaya mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari intervensi pihak asing. Pada periode orde lama terdapat proses diplomasi yang dapat dihubungkan dengan konteks diplomasi Indonesia sekarang yakni.¹⁸²

G. Foreign Policy of the Old Order

At the beginning of independence, during the Revolutionary Era (1945-1949), the Republic of Indonesia adopted four foreign policy strategies. Indonesia was still focused on efforts to maintain the nation's sovereignty and independence from foreign intervention. During the Old Order, there was a diplomatic process that can be linked to the context of Indonesia's diplomacy today.

1. Politik Bebas Aktif.

Indonesia membangun basis keutuhan politik domestik untuk mendukung diplomasi di mana Indonesia dituntut untuk merealisasikan prinsip bebas aktif sesuai amanat UUD 1945, karena kondisi saat tersebut sarat perebutan pengaruh antara blok Timur (Uni Soviet) dan blok Barat (Amerika Serikat). Kondisi tersebut berhubungan dengan *containment policy* AS melalui *Mutual Security Act* (MSA) dengan negara-negara mitranya. MSA adalah sebuah bantuan dana luar negeri yang memengaruhi sejarah

¹⁸² Politik Luar Negeri Orde Lama <https://kids.grid.id/read/473528472/6-poin-kebijakan-politik-luar-negeri-masa-pemerintahan-orde-lama?page=all>
diunduh Tanggal 1 September 24

peradaban Indonesia modern yang diberlakukan pada periode demokrasi liberal, tepatnya pada 10 Oktober 1951.¹⁸³

2. Konferensi Asia Afrika.

Indonesia mengambil inisiatif menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat pada 1955. KAA menghasilkan Dasa Sila Bandung yang dianggap menjadi perspektif khas Asia dan negara-negara berkembang yang memandang hubungan internasional. Pada awal 1960-an berdasar solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang menjadi awal dari terciptanya Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*) yang menjadi bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia.¹⁸⁴

3. State Building.

Pemerintah Indonesia melakukan eksperimen untuk menerapkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Situasi politik tersebut berujung pada ketidakstabilan negara sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Indonesia saat tersebut menunjukkan radikalisasi kebijakan luar negeri RI yang lebih condong ke kubu komunisme (Uni Soviet).¹⁸⁵

4. Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Radikalisasi kebijakan luar negeri Indonesia lewat proyek anti-neokolonisme dan neo-imperialisme Soekarno menyebabkan konfrontasi dengan negara tetangga yakni Malaysia. Konfrontasi tersebut didukung dengan adanya kampanye "Ganyang Malaysia", pada saat tersebut Presiden Soekarno menduduh pembentukan negara federal Malaysia sebagai proyek imperialisme Inggris yang harus ditentang.¹⁸⁶

¹⁸³.Ibid.

¹⁸⁴.Ibid.

¹⁸⁵.Ibid.

¹⁸⁶.Ibid.

5. Penerapan Prinsip Bebas Aktif yang Kurang Konsisten.

Radikalisasi Presiden Soekarno yang condong ke kubu komunisme URSS, Indonesia dianggap tidak konsisten menjalankan prinsip bebas aktif yang terbukti bahwa prinsip politik bebas-aktif yang dijalankan Indonesia dapat goyah karena ideologis dan kepentingan politik penguasa.¹⁸⁷

6. Upaya Menjaga Stabilitas dan Keamanan Negara.

Periode 1950-an dan 1960-an Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar sebagai dampak PD dan negara-negara di kawasan yang punya orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka perlu menjaga stabilitas dan keamanan sebuah negara yang mendorong pembentukan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN pada 8 Agustus 1967.¹⁸⁸

1. *Active Free Policy.*

Indonesia built a foundation for domestic political unity to support diplomacy, where Indonesia was required to realize the principle of an active, independent foreign policy in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. This was due to the prevailing conditions marked by the struggle for influence between the Eastern bloc (the Soviet Union) and the Western bloc (the United States). This situation was connected to the U.S. containment policy through the Mutual Security Act (MSA) with its partner countries. The MSA was a foreign aid initiative that influenced the history of modern Indonesian civilization and was implemented during the liberal democracy period, specifically on October 10, 1951.

2. *Asian-African Conference.*

Indonesia took the initiative to host the Asian-African Conference (KAA) in Bandung, West Java, in 1955. The KAA produced the Bandung Ten Principles, which were regarded as a distinctive perspective of Asia and developing countries regarding

¹⁸⁷.Ibid.

¹⁸⁸.Ibid.

international relations. In the early 1960s, based on the solidarity of Asian-African countries, the Non-Aligned Movement was established, becoming part of Indonesia's foreign policy identity.

3. State Building.

The Indonesian government experimented with implementing parliamentary democracy or liberal democracy. This political situation led to state instability, prompting President Sukarno to issue the July 5, 1959 Decree to return to the 1945 Constitution, marking the beginning of the Guided Democracy period in Indonesia. At this time, Indonesia showed a radicalization of its foreign policy, leaning more toward the communist bloc (the Soviet Union).

4. Indonesia-Malaysia Confrontation.

The radicalization of Indonesia's foreign policy through Sukarno's anti-neocolonialism and neo-imperialism projects led to a confrontation with its neighboring country, Malaysia. This confrontation was supported by the "Ganyang Malaysia" campaign, during which President Sukarno accused the formation of the federal state of Malaysia as a project of British imperialism that needed to be opposed.

5. Inconsistent Implementation of the Active Free Principle.

Sukarno's radicalization toward the communist bloc led to perceptions that Indonesia was inconsistent in implementing the active free principle. This inconsistency was evident as the active foreign policy principle was vulnerable to ideological influences and the political interests of those in power.

6. Efforts to Maintain State Stability and Security.

During the 1950s and 1960s, Southeast Asia became a battleground for the influence of major powers as a result of the Cold War, with countries in the region pursuing differing foreign policy orientations. As a newly independent nation, Indonesia needed to maintain stability and security, which encouraged the formation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on August 8, 1967.

H. Politik Luar Negeri Orde Baru

Pada tanggal 17 Oktober sebanyak 39 dokumen rahasia milik USA berhubungan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 dibuka kepada publik. Dari dokumen-dokumen tersebut terungkap rencana kudeta terhadap Sukarno, kekejaman pembantaian terhadap orang-orang yang berhubungan maupun terduga Partai Komunis Indonesia (PKI), pembunuhan massal yang melibatkan keterlibatan pemerintah USA. Semuanya mengungkapkan bukti-bukti yang kuat tentang tragedi tahun 1965, termasuk dugaan peran aktif USA dalam kudeta dan pembunuhan massal. Peran USA menentukan sejarah Indonesia yang sulit dilepaskan dengan keterlibatan Angkatan Darat dan Soeharto. Kedekatan hubungan Sukarno dengan PKI saat tersebut membuat USA kesulitan untuk *meloby* Sukarno mencapai kepentingan USA di Indonesia. Sukarno paham betul bagaimanapun USA memiliki kepentingan neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Kampanye anti-nekolim yang berarti juga anti-USA pada 1960-an cukup populer di tingkat akar rumput. Indonesia pada saat tersebut merupakan objek penting bagi USA. Selain keinginan untuk merampok kekayaan sumber daya alam, Indonesia dianggap sebagai pemain besar untuk menentukan pengaruhnya di negara-negara Asia Tenggara, karena itu USA mencongkel Sukarno dari kekuasaannya menjadi langkah taktis dan wajib bagi USA. Pada waktu terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diikuti pembantaian massal oleh Angkatan Darat Indonesia, USA diam-diam memberikan dukungan untuk kelangsungan operasi tersebut dan kudeta terhadap Sukarno.¹⁸⁹

Pada tanggal 5 Oktober 1965, telegram dari Marshall Green, Dubes USA di Indonesia kepada Departemen Luar Negeri USA menyebutkan lima poin, di mana pada poin keempat tertulis “Pedoman berikut tersebut mungkin menyediakan sebagian dari jawaban apa sikap kita sebaiknya”.

¹⁸⁹ Arsip Rahasia '65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing <https://kumparan.com/kumparannews/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing> diunduh Tanggal 31 Agustus 24.

Pada poin keempat tersebut tercantum sembilan pedoman, enam di antaranya sangat jelas, yakni (a) menghindari keterlibatan secara terbuka saat perebutan kekuasaan; (b) secara diam-diam, bagaimanapun, menunjukkan dengan jelas kepada orang-orang penting dalam militer seperti Nasution dan Soeharto keinginan USA untuk memberikan bantuan yang dapat dilakukan, sementara pada saat yang sama menyampaikan kepada mereka asumsi bahwa Indonesia mesti menghindari munculnya keterlibatan atau gangguan dengan cara apapun; (c) memelihara dan bilamana mungkin memperpanjang kontrak USA AS dengan militer; (d) menghindari gerakan yang dapat diartikan sebagai catatan ketidakpercayaan dalam tentara; (e) menyebarkan kisah tentang kesalahan, pengkhianatan, dan kebrutalan PKI; (f) memberikan dukungan melalui informasi dan sarana lainnya.¹⁹⁰

Keterlibatan USA juga tercatat dalam 8 dokumen yang memuat surat tertanggal 23 Oktober 1965 dari Norman Hannah, penasihat politik komandan pasukan USA di Pasifik, kepada Dubes AS untuk Indonesia, Marshall Green. Dokumen tersebut mengungkapkan kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada Angkatan Darat untuk melakukan pembunuhan massal. Menurut Norman Hannah, penasihat politik komandan pasukan USA di Pasifik, kemungkinan yang cukup tinggi bahwa AD Indonesia akan meminta bantuan USA untuk melawan pemberontakan PKI. Permintaan semacam tersebut dapat mencakup apapun mulai dari operasi dan bantuan tersembunyi hingga angkutan, dana, peralatan komunikasi, maupun senjata. Seminggu kemudian, Marshall Green mengajukan permohonan agar pemerintahan Presiden USA Lyndn Baines Johnson, mendalami kemungkinan diberikannya bantuan jangka pendek secara tersembunyi, dan tanpa dapat dilacak sumber bantuan tersebut. Bersamaan dengan tersebut dimulailah perluasan dukungan tersembunyi Paman Sam pada Angkatan Darat yang kemudian mencakup dana, peralatan komunikasi, dan senjata.

¹⁹⁰.*Ibid.*

USA mengetahui betul perburuan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berhubungan atau pun dituduh PKI sedang berlangsung, baik dilakukan oleh Angkatan Darat maupun organisasi masyarakat berbasis agama seperti terungkap dalam telegram bernomor 1516 dari American Embassy di Jakarta kepada Secretary of State tertanggal 20 November 1965, banyak dari orang-orang yang dituduh sebagai anggota dan pendukung PKI tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Gerakan 30 September 1965.¹⁹¹

Menurut seorang “jurnalis Australia yang dapat diandalkan yang baru kembali dari Jawa Tengah, menulis dalam telegram sebuah sumber PKI yang menyatakan dirinya dekat dengan 50 orang tokoh terpenting PKI Yogyakarta menyatakan PKI tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang Gerakan 30 September 1965 kebingungan besar dalam partai tentang apa yang perlu mereka lakukan. Jurnalis tersebut menemukan kader-kader PKI di wilayah lokal tersebut sepenuhnya bingung dan menyatakan tidak tahu apa-apa tentang Gerakan 30 September 1965 sebelum terjadinya peristiwa, artinya, USA mengetahui semua, namun demikian tetap mendukung operasi pembantaian, USA ingin menggulingkan Sukarno bilamana tetap mempertahankan kedekatan hubungannya dengan PKI. Keinginan tersebut sudah ada bahkan sebelum tahun prahara bergulir bergulir.¹⁹²

Sumber lain menyebutkan pada tanggal 18 September 1965, CIA mengirim memo kepada Deplu USA berisi bahwa CIA mengajukan tugas yang lebih besar untuk mengintensifkan operasi-operasi rahasia yang dimaksudkan untuk menggagal kekuatan di antara kelompok dan organisasi non-komunis serta mendorong aksi langsung terhadap PKI sebagai sebuah partai. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk menghasut dan mendorong perselisihan internal antara elemen komunis dan non-komunis. Pasca-Gerakan 30 September 1965 terjadi, Sukarno bersikeras menepis tuduhan PKI sebagai dalang dari

¹⁹¹*Ibid.*

¹⁹²*Ibid.*

peristiwa itu. Sementara dari pihak Angkatan Darat terus-menerus mengampanyakan yang sebaliknya yang membuat jalan pergantian rezim seperti yang diinginkan oleh USA dengan dukungan AD tidaklah mudah.¹⁹³

Berdasarkan buku yang dikutip dalam sumber yang sama, disebutkan bahwa USA memang bersedia memberikan bantuan untuk militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Menteri Luar Negeri USA *Dean Rush* pada 13 Oktober 1965 menyimpulkan, waktunya telah tiba “untuk memberi beberapa isyarat kepada militer mengenai sikap USA terhadap perkembangan terakhir dan terkini”. Menunjuk keberhasilan operasi AD terhadap PKI, Rush menulis, “...bersedia atau tidaknya tentara untuk menuntaskan aksinya terhadap PKI tergantung kepada (atau harus dipengaruhi oleh) USA, tidak ingin melewatkan kesempatan bagi USA untuk bertindak”. Sementara itu, Jenderal Nasution mengirimkan ajudannya untuk mendekati Duta Besar USA Marshall Green dan meminta bantuan komunikasi *portable* untuk digunakan Panglima Tertinggi AD. Perkembangan penting lainnya ialah munculnya nama Soeharto sebagai calon Panglima AD untuk menggantikan panglima sebelumnya. Dokumen *The President's Daily Brief, Central Intelligence Agency* tertanggal 11 Oktober 1965 yang dikutip dari “Kronik ‘65” menyebutkan, CIA mengirimkan laporan kepada Presiden USA yang menyatakan bahwa di tubuh AD sudah muncul dan disetujui sebuah nama untuk diajukan menggantikan Panglima AD. Nama itu adalah Soeharto.

H. Foreign Policy of the New Order

On October 17, 39 secret documents belonging to the USA related to the events of the September 30, 1965 Movement were made public. These documents revealed plans for a coup against Sukarno, the brutal massacres of individuals associated with or suspected of being part of the Indonesian Communist Party (PKI), and mass killings involving U.S. government involvement. All of this presented strong evidence regarding the tragedy of 1965, including allegations of an

¹⁹³.Ibid.

active U.S. role in the coup and the mass killings. The role of the USA was pivotal in shaping Indonesia's history, closely tied to the involvement of the Army and Suharto. Sukarno's close relationship with the PKI made it difficult for the USA to lobby him to achieve its interests in Indonesia. Sukarno was well aware that the USA had neo-colonial and imperial interests. The anti-neocolonialism campaign, which also meant being anti-USA in the 1960s, was quite popular at the grassroots level. At that time, Indonesia was a significant target for the USA. Beyond the desire to exploit natural resources, Indonesia was seen as a major player in determining influence in Southeast Asian countries, making the USA's removal of Sukarno a tactical and necessary step.

During the events of the September 30 Movement in 1965, followed by the mass killings by the Indonesian Army, the USA quietly supported the continuation of these operations and the coup against Sukarno. On October 5, 1965, a telegram from Marshall Green, the U.S. Ambassador to Indonesia, to the U.S. Department of State outlined five points, where the fourth point stated, "The following guidelines may provide some answers regarding what our stance should be." This fourth point included nine guidelines, six of which were quite clear: (a) avoid open involvement in the power struggle; (b) quietly, however, clearly indicate to key military figures like Nasution and Suharto the USA's willingness to provide assistance while simultaneously conveying the assumption that Indonesia must avoid any involvement or disturbance; (c) maintain and, where possible, extend U.S. contracts with the military; (d) avoid any movements that could be interpreted as distrust towards the military; (e) spread narratives about the PKI's errors, betrayals, and brutality; (f) provide support through information and other means.

The USA's involvement was also recorded in eight documents containing a letter dated October 23, 1965, from Norman Hannah, political advisor to the U.S. commander in the Pacific, to the U.S. Ambassador to Indonesia, Marshall Green. These documents revealed the possibility of providing support to the Army for carrying out mass killings. According to Norman Hannah, there was a high likelihood that the Indonesian Army would request U.S. assistance to combat the PKI uprising. Such requests could encompass anything from covert

operations and assistance to transportation, funds, communication equipment, and weapons. A week later, Marshall Green submitted a request for President Lyndon Baines Johnson's administration to explore the possibility of providing short-term covert assistance, with untraceable sources of that assistance. Concurrently, the expansion of Uncle Sam's covert support to the Army began, which included funds, communication equipment, and weapons. The USA was fully aware that the hunt, imprisonment, and killing of those associated with or accused of being PKI were ongoing, carried out both by the Army and by religious-based community organizations, as revealed in telegram number 1516 from the American Embassy in Jakarta to the Secretary of State dated November 20, 1965. Many of those accused of being PKI members and supporters had no prior knowledge of the September 30 Movement.

According to a "reliable Australian journalist who had just returned from Central Java," a telegram from a PKI source stated that they were close to 50 of the most important PKI figures in Yogyakarta, claiming that the PKI had not received prior notice about the September 30 Movement and there was great confusion within the party regarding what they should do. The journalist found local PKI cadres completely confused and stated they knew nothing about the September 30 Movement before the events occurred, meaning the USA knew everything yet still supported the massacre operations, as they wanted to overthrow Sukarno while maintaining close ties with the PKI. This desire existed even before the turmoil began.

Other sources indicate that on September 18, 1965, the CIA sent a memo to the U.S. State Department stating that the CIA was proposing a larger mission to intensify secret operations aimed at rallying strength among non-communist groups and organizations while encouraging direct actions against the PKI as a party. All these actions aimed to incite and foster internal disputes between communist and non-communist elements. After the events of September 30, 1965, Sukarno insisted on dismissing accusations of the PKI being the mastermind behind the incident. Meanwhile, the Army continuously campaigned the opposite narrative, making the path to regime change, as desired by the USA with the Army's support, not an easy one.

According to a book cited in the same source, it was stated that the USA was indeed willing to provide assistance to the Indonesian military, particularly the Army. U.S. Secretary of State Dean Rusk concluded on October 13, 1965, that the time had come "to give some signals to the military regarding the USA's stance on the latest developments." Pointing to the Army's successful operations against the PKI, Rusk wrote, "...whether the military is willing to continue its actions against the PKI depends on (or should be influenced by) the USA; we do not want to miss the opportunity for the USA to act." Meanwhile, General Nasution sent his aide to approach Ambassador Marshall Green and request portable communication assistance for the Army's Supreme Commander. Another significant development was the emergence of Suharto's name as a candidate to replace the previous Army commander. The President's Daily Brief from the Central Intelligence Agency dated October 11, 1965, cited from "Chronicles of '65," stated that the CIA sent a report to the U.S. President indicating that a name had emerged and been approved within the Army to propose a replacement for the Army Commander. That name was Suharto.

I. Keterlibatan USA dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980

Sejak dimulainya kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia yang menandai munculnya keterlibatan USA di Indonesia sangat berpengaruh besar berkaitannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia, ditambah lagi adanya peraturan mengenai investasi modal asing di Indonesia. Krisis ekonomi pada periode Orde Lama membuat Soeharto merombak berbagai kebijakan perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi trilogi pembangunan dan REPELITA digagas oleh Soeharto, yang membutuhkan modal yang amat besar. Demi ketercapaian cita-cita tersebut diwujudkan dengan mendekatnya Indonesia kepada USA yang membuat USA memiliki hubungan intim dengan Indonesia. Kebijakan ekonomi Indonesia yang mendasari keterlibatan USA, serta kontribusi

yang diberikan USA dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru.¹⁹⁴

I. U.S. Involvement in Indonesia's Economic Development during the Suharto Era (1966-1980)

Since the beginning of President Suharto's leadership in Indonesia, the involvement of the USA has had a significant impact on Indonesia's economic development, especially with regulations regarding foreign capital investment in the country. The economic crisis during the Old Order period prompted Suharto to overhaul various economic policies in Indonesia. The trilateral development economic policy and the REPELITA (Five-Year Development Plans) were initiated by Suharto, which required substantial capital. To achieve these goals, Indonesia moved closer to the USA, leading to a close relationship between the two countries. This economic policy in Indonesia laid the foundation for U.S. involvement, along with the contributions made by the USA to Indonesia's economic development during the New Order era.

J. Indonesia-AS setelah Donald J. Trump terpilih sebagai Presiden

Di masa pemerintahan Barack Obama, hubungan bilateral Indonesia - USA telah berjalan dengan baik yang dibuktikan Kemitraan Komprehensif oleh kedua negara yang diharapkan dapat terus berlangsung di masa pemerintahan Donald J. Trump. Melalui berbagai pertimbangan mendalam, termasuk melalui mekanisme *checks and balances*, pemerintahan Trump akan terus melihat arti strategis hubungan bilateral Indonesia-USA. USA tidak dapat mengabaikan posisi strategis Indonesia di kawasan, dan begitu juga sebaliknya, Indonesia memandang USA memiliki peran penting bagi keamanan kawasan. Arti strategis yang melingkupi hubungan bilateral kedua negara

¹⁹⁴ <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1222915> diunduh Tanggal 31 Agustus 24

tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Donald J. Trump.¹⁹⁵

J. *Indonesia-U.S. Relations after Donald J. Trump was Elected President*

During Barack Obama's administration, the bilateral relationship between Indonesia and the USA was strong, evidenced by the Comprehensive Partnership established between the two countries, which was expected to continue under Donald J. Trump's presidency. Through various deep considerations, including checks and balances, the Trump administration continued to recognize the strategic importance of the Indonesia-U.S. bilateral relationship. The USA could not overlook Indonesia's strategic position in the region, and likewise, Indonesia viewed the USA as playing a crucial role in regional security. The strategic significance of the bilateral relationship between the two countries could not simply be ignored by the Trump administration.

K. Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Indonesia dengan USA

Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan USA terutama sejak Rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia yakni paruh kedua dekade 1960-an, namun demikian hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup berkembang dibandingkan dengan hubungan ekonomi USA dengan negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia. Dominasi aspek politik dan strategis dalam hubungan kedua negara mengakibatkan USA dan Indonesia kurang mengembangkan potensi-potensi ekonomi diantara keduanya. Sejak tahun 2009 USA juga dilanda krisis ekonomi. Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan Duta Besar Indonesia yang baru dan upaya USA untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani *the US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement (US-Indonesia*

¹⁹⁵ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-22-II-P3DI-November-2016-7.pdf diunduh Tanggal 15 Oktober 24

CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah sektor ekonomi.¹⁹⁶

K. *Economic and Financial Cooperation between Indonesia and the USA*

Indonesia has established a relatively good political and strategic relationship with the USA, especially since the New Order regime came to power in Indonesia in the second half of the 1960s. However, the economic relations between the two parties have not developed as significantly compared to the economic relationships the USA has with Indonesia's neighbors, such as Singapore and Australia. The dominance of political and strategic aspects in the relationship between the two countries has resulted in limited development of economic potentials between them. Since 2009, the USA has also faced an economic crisis. Efforts to enhance the relationship between both parties have emerged in recent years due to the initiative of the new Indonesian Ambassador and the USA's efforts to seek larger markets as part of its economic recovery. In November 2010, the leaders of both countries signed the US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA), which represents a long-term commitment from both nations to enhance and deepen bilateral relations. One of the sectors that became a focus of cooperation is the economic sector.

L. Perjanjian Transportasi Udara Indonesia dengan USA

Pada tanggal 15 Januari 1968 Indonesia menanda tanganai Perjanjian Transportasi Udara dengan USA. Perjanjian transportasi udara yang terdiri dari 13 pasal tersebut mengatur masalah administrasi, persyaratan pesawat udara, persyaratan operasional, persyaratan perusahaan penerbangan yang ditunjuk, masalah ekonomi. Masalah administrasi meliputi

196

<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Cina%20--%20Amerika%20Serikat%20--%20Politik%20ekonomi%20luar%20negeri%20&pType=Subject&pLembarkerja=1&pPilihan=Subject> diunduh Tanggal 15 Oktober 24

pengertian misalnya pengertian perjanjian, perusahaan yang ditunjuk, wilayah, pelayanan, non-traffic purposes, penandatangan, berlakunya perjanjian, dan pengunduran diri; sedangkan persyaratan pesawat udara menyatakan bahwa pesawat udara yang digunakan harus memenuhi sertifikat kelaikan-udara. Para pihak berhak menolak pesawat udara yang digunakan bilamana ternyata bahwa pesawat udara tidak memenuhi kelaik-udara.¹⁹⁷

Persyaratan operasional mengatakan barang-barang digunakan atau ddibawa dalam penerbangan harus dibebaskan dari pungutan bea cukai maupun pengutan lainnya, sedangkan perusahaan penerbangan yang ditunjuk melaksanakan perjanjian harus dimiliki oleh negara yang menunjuk, para pihak berhak menolak atau membatalkan hak yang diberikan oleh pihak yang lain. Masalah ekonomi menyatakan bahwa transportasi udara hanya berlaku untuk penerbangan antara Indonesia dengan USA diutamakan, sedangkan hak penerbangan kelima (*fifth freedom of the air*) hanya sekedar mengisi jangan sampai terjadi tempat duduk yang kosong, tarif disusun oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk, kemudian disetujui oleh kedua pemerintah Indonesia dan USA.¹⁹⁸

L. Air Transport Agreement between Indonesia and the USA

On January 15, 1968, Indonesia signed an Air Transport Agreement with the USA. The air transport agreement, consisting of 13 articles, regulates matters related to administration, aircraft requirements, operational requirements, designated airline requirements, and economic issues. The administrative matters include definitions, such as the definition of the agreement, designated companies, territory, services, non-traffic purposes, signatures, the validity of the agreement, and withdrawal; while the aircraft requirements state that the aircraft used must meet airworthiness certification. The parties have the right to reject an aircraft if it does not

¹⁹⁷ *Bilateral Air Transport Agreements of the Republic of Indonesia*, tidak dipublished

¹⁹⁸ *Ibid.*

meet airworthiness standards. The operational requirements state that goods carried on flights must be exempt from customs duties and other levies, while designated airlines executing the agreement must be owned by the country that designates them. The parties have the right to reject or cancel the rights granted by the other party. The economic provisions state that air transportation is only applicable for flights between Indonesia and the USA, with priority given to these routes, while the fifth freedom of the air is only intended to fill seats and avoid empty flights. The fares are determined by the designated airlines and must be approved by both the Indonesian and US governments.

M. Sejarah dan Pentingnya Satelit Palapa

Nama Palapa diambil dari sumpah palapa yang dicetuskan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit dalam tahun 1334. Berawal dari sejarah tersebut, Palapa saat tersebut digunakan sebagai nama bagi sejumlah satelit telekomunikasi geostasioner Indonesia. Satelit palapa hadir karena ide dan gagasan Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto, yang saat tersebut sedang memikirkan bagaimana menyambungkan komunikasi di seluruh wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh dari Sabang sampai Merauke. Menurut buku karya G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. yang berjudul "Soeharto Pikiran" yang mengatakan Indonesia membutuhkan sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar komunikasi dengan semua wilayah Indonesia yang berpulau-pulau. Menurut Soeharta, pada saat itu muncul sejarah Gajah Mada, Patih Amengkubumi Kerajaan Majapahit, yang telah mengeluarkan Amukti Palapa (Sumpah Palapa) untuk menyatukan semua kerajaan diseluruh nusantara pada 1336 Masehi, karena itulah sistem satelit domestik Indonesia diberi nama Palapa sebagai lambang terjelmanya sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara.¹⁹⁹

¹⁹⁹ <https://info.unida.ac.id/artikel/sejarah-dan-pentingnya-satelit-palapa> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Kecepatan komunikasi tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Indonesia setelah masa orde lama, karena tanpa komunikasi yang cepat impian negara Indonesia untuk maju sejajar dengan bangsa lainnya akan menjadi tantangan yang cukup berat. Selanjutnya untuk merealisasikan ide tersebut Soeharto menugaskan Mayjen TNI Soehardjono, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi) serta Ir. Sutanggar Tengker Yahya, Direktur Telekomunikasi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang juga mantan Direktur Utama PN Telekomunikasi Indonesia sebagai penanggung jawab untuk merealisasikan ide tersebut.²⁰⁰

Pada saat tersebut Indonesia menghadapi dua persoalan besar untuk merealisasikan satelit Palapa yakni (a) tidak menguasai teknologi satelit hanya paham fungsi dan kegunaannya; (b) pembiayaan, karena satelit adalah barang yang sangat mahal untuk negara Indonesia yang saat itu masih menuju negara berkembang. Satelit pertama Indonesia Palapa A diketahui memiliki spesifikasi yang mirip dengan satelit domestik yang digunakan Kanada dan AS karena dibuat oleh perusahaan yang sama *Hughes Aircraft Company* dengan model HS-333. Palapa A memiliki 12 transponder dengan kapasitas setara 6.000 sirkuit suara atau 12 saluran televisi warna, memiliki masa aktif hingga 7 tahun dengan tinggi satelit 3.41 meter, diameter 1.9 meter dan berat saat peluncuran sebesar 574 kg. Satelit pertama diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 oleh roket Amerika Serikat dan ditinggal di atas Samudera Hindia pada 83 BT. Satelit Palapa A dioperasikan sepenuhnya oleh PERUMTEL (sekarang TELKOM) dengan *area coverage* satelit Palapa meliputi Indonesia dan Asia Tenggara yang meliputi Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Transponder Satelit Palapa dialokasikan untuk sistem komunikasi yang digunakan oleh PERUMTEL, siaran TVRI dan juga Kementrian Pertahanan dan Keamanan. Negara ASEAN juga memanfaatkan transponder satelit Palapa A yaitu Filipina, Thailand dan Malaysia.²⁰¹

²⁰⁰, *Ibid.*

²⁰¹, *Ibid.*

Atas peluncuran satelit Palapa tersebut Indonesia diketahui merupakan negara pertama di Asia dan negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) menggunakan Satelit GEO setelah AS dan Kanada. Palapa A1 menjadi SKSD pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon dan faksimili antar kota di Indonesia. Kemudian SKSD juga berkembang menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional. Palapa A1 menjadi tonggak sejarah satelit di Indonesia yang kemudian diikuti dengan satelit-satelit berikutnya seperti Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda dan PSN. Di Indonesia sendiri setidaknya tercatat ada lima operator satelit nasional yang memiliki dan mengelola satelitnya sendiri, antara lain: TELKOM, INDOSAT, PSN, MNC dan BRI.²⁰²

Peluncuran satelit perdana Palapa milik Indonesia itu menjadi tonggak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Hingga pada akhirnya, setiap tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Ada sembilan Jenis Satelit Palapa di Indonesia. Berawal dari penentuan Hari Satelit Palapa, yang menjadi satelit pertama Indonesia, sekarang ada sembilan jenis satelit yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, satelit Palapa pun mengalami regenerasi dan perkembangan, berikut Ini daftarnya:

M. History and Importance of the Palapa Satellite

The name "Palapa" is derived from the Palapa oath proclaimed by Patih Gajah Mada of Majapahit in 1334. Based on this history, Palapa was later used as the name for a series of Indonesian geostationary telecommunications satellites. The Palapa satellites were conceived by Indonesia's second president, H.M. Soeharto, who was thinking about how to connect communication across the vast and distant archipelago from Sabang to Merauke. According to the book by G. Dwipayana and Ramadhan K.H. titled "Soeharto Pikiran," Indonesia needed a domestic satellite communication system to facilitate communication across its many islands. At that time,

²⁰².Ibid.

Soeharto referred to Gajah Mada, the Patih Amengkubumi of the Majapahit Kingdom, who had issued the Amukti Palapa (Palapa Oath) to unite all kingdoms across the archipelago in 1336 AD. Therefore, Indonesia's domestic satellite system was named Palapa as a symbol of Gajah Mada's oath to unite the archipelago.

The speed of communication was essential for accelerating Indonesia's development after the Old Order, as without rapid communication, Indonesia's dream of advancing to be on par with other nations would face significant challenges. To realize this idea, Soeharto appointed Major General TNI Soehardjono, Director-General of Posts and Telecommunications, and Ir. Sutanggar Tengker Yahya, Director of Telecommunications at the Directorate General of Posts and Telecommunications and also a former President Director of PN Telekomunikasi Indonesia, as the responsible parties for implementing this idea.

At that time, Indonesia faced two major challenges in realizing the Palapa satellite: (a) a lack of mastery over satellite technology, only understanding its functions and uses; (b) financing, as satellites were very expensive for a developing country like Indonesia at the time. Indonesia's first satellite, Palapa A, was known to have specifications similar to the domestic satellites used by Canada and the USA, as it was manufactured by the same company, Hughes Aircraft Company, using the HS-333 model. Palapa A had 12 transponders with a capacity equivalent to 6,000 voice circuits or 12 color television channels, with an operational lifespan of up to 7 years. The satellite measured 3.41 meters in height, had a diameter of 1.9 meters, and weighed 574 kg at launch. The satellite was launched on July 8, 1976, by an American rocket and positioned above the Indian Ocean at 83 degrees East. Palapa A was fully operated by PERUMTEL (now TELKOM), covering Indonesia and Southeast Asia, including Singapore, Malaysia, Thailand, and the Philippines. The transponders of the Palapa satellite were allocated for communication systems used by PERUMTEL, TVRI broadcasts, and the Ministry of Defense and Security. ASEAN countries also utilized the Palapa A transponder, including the Philippines, Thailand, and Malaysia.

With the launch of the Palapa satellite, Indonesia became the first country in Asia and the third in the world to operate a Domestic Satellite Communication System (SKSD) using GEO satellites after the USA and Canada. Palapa A1 became the first SKSD in Indonesia, providing telephone and facsimile services between cities in Indonesia. Subsequently, the SKSD evolved into a major infrastructure for distributing national television programs. Palapa A1 marked a historic milestone for satellites in Indonesia, followed by subsequent satellites like Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda, and PSN. In Indonesia, there are at least five national satellite operators that own and manage their satellites: TELKOM, INDOSAT, PSN, MNC, and BRI.

The launch of Indonesia's first Palapa satellite marked a significant advancement in communication and information technology in Indonesia. As a result, every July 9 is commemorated as Palapa Satellite Day. There are nine types of Palapa satellites in Indonesia. From the establishment of Palapa Satellite Day, which celebrates Indonesia's first satellite, there are now nine types of satellites in Indonesia. As technology has evolved, the Palapa satellite has also undergone regeneration and development, and here is the list:

1. Satelit Palapa A-1 (1976-1983)

Satelit perdana milik Indonesia ini memang didesain untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Satelit ini di bawah pengawasan Perumtel yang sekarang berganti nama menjadi ?Telkom? untuk sistem komunikasi, siaran TVRI dan Kemenhankam. Satelit Palapa memiliki berat 574 kg, tinggi 3,7 meter, diameter 1,9 meter, dan antena berdiameter 1,5 meter.

2. Satelit Palapa A-2 (1977-1987)

Proyek satelit kedua dibuat sebagai cadangan jika satelit A-1 mengalami kegagalan. Satelit A-2 diluncurkan pada Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dengan harapan bisa menjaga stabilnya layanan komunikasi di Indonesia.

3. Satelit Palapa B-1 (1983-1990)

Pada 18 Juni 1983, pemerintah kembali meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenger. Sama seperti satelit seri A, satelit B-1 ini Dibuat oleh perusahaan Hughes Aircraft Company. Satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California, yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. Kala itu, satelit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan negara-negara di ASEAN.

4. Satelit Palapa B-2 (1984-gagal)

Pada 3 Februari 1984, satelit Palapa B-2, yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1, diluncurkan tapi mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Karena kegagalan tersebut, pemerintah kembali membuat proyek satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P, untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya.

5. Satelit Palapa B2P (1987-1996)

Satelit Palapa B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket pada 20 Maret 1987. Sebenarnya peluncuran roket dijadwalkan pada 1986, tapi ditunda hingga 1987 imbas kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat.

6. Satelit Palapa B2R (1990-2000)

Satelit Palapa B2 diperbaiki oleh Sattel Technologies pada 13 April 1990. Satelit ini kemudian diluncurkan melalui Delta 6925 dan dinamakan Satelit Palapa B2R.

7. Satelit Palapa B4 (1992-2005)

Pada 14 Mei 1992, satelit domestik bernama Palapa B4 diluncurkan. Peluncuran berlangsung selama empat hari dengan menguji peralatan dan komunikasi untuk mengecek fungsi transponder dan pengaruhnya setelah diluncurkan.

8. Satelit Palapa C1 (1996-1999) dan Satelit Palapa C2 (1996-2011)

Berbeda dengan Satelit Palapa A dan B, satelit ini mampu menjangkau area yang lebih luas, seperti Asia Tenggara, sebagian China, India, Jepang, dan Australia. Satelit Palapa C ini dioperasikan pula oleh perusahaan dalam negeri, Satelindo, yang kini bernama Indosat.

9. Satelit Palapa D (2009-2024)

Satelit Palapa D dibuat oleh Thales Alenia Space di Prancis. Dengan komponen platform SpaceBus 4000-B3, satelit ini mampu mencakup Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia.²⁰³

1. Palapa A-1 Satellite (1976-1983)

Indonesia's first satellite was designed to optimize signal transmission across the archipelago and even to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. This satellite was supervised by Perumtel, which has since changed its name to Telkom, for communication systems, TVRI broadcasting, and the Ministry of Defense and Security. The Palapa satellite weighed 574 kg, stood 3.7 meters tall, had a diameter of 1.9 meters, and featured an antenna with a diameter of 1.5 meters.

2. Palapa A-2 Satellite (1977-1987)

The second satellite project was created as a backup in case the A-1 satellite experienced failure. The A-2 satellite was launched in March 1977 using a Delta 2914 rocket, with the hope of maintaining stable communication services in Indonesia.

3. Palapa B-1 Satellite (1983-1990)

On June 18, 1983, the government launched the Palapa B-1 satellite via the STS mission on the 7th Challenger flight. Like the A series satellites, the B-1 satellite was manufactured by Hughes Aircraft Company. It was operated by control stations in El Segundo, California, namely the Operations Control Center and the Main Control Station in Cibinong and Fillmore in Ventura City.

²⁰³.Ibid.

At that time, this satellite was expected to meet the needs of ASEAN countries.

4. Palapa B-2 Satellite (1984 - failed)

On February 3, 1984, the Palapa B-2 satellite, which was a backup plan for the Palapa B-1 satellite, was launched but failed. This was due to the perigee motor not functioning properly. Following this failure, the government initiated a replacement project for the Palapa B-2, abbreviated as B2P, to replace the Palapa A-1 and Palapa A-2 satellites that had reached the end of their service life.

5. Palapa B2P Satellite (1987-1996)

The Palapa B2P satellite was launched conventionally using a rocket system on March 20, 1987. The rocket launch was originally scheduled for 1986 but was postponed until 1987 due to the Challenger aircraft accident that exploded in mid-air, killing the crew.

6. Palapa B2R Satellite (1990-2000)

The Palapa B2 satellite was repaired by Sattel Technologies on April 13, 1990. It was then launched via Delta 6925 and named the Palapa B2R satellite.

7. Palapa B4 Satellite (1992-2005)

On May 14, 1992, the domestic satellite named Palapa B4 was launched. The launch took four days, testing equipment and communication to check the functionality of the transponders and their performance post-launch.

8. Palapa C1 Satellite (1996-1999) and Palapa C2 Satellite (1996-2011)

Unlike the Palapa A and B satellites, these satellites could reach a broader area, including Southeast Asia, parts of China, India, Japan, and Australia. The Palapa C satellites were also operated by a domestic company, Satelindo, which is now known as Indosat.

9. Palapa D Satellite (2009-2024)

The Palapa D satellite was built by Thales Alenia Space in France. With a SpaceBus 4000-B3 platform, this satellite is capable of covering Asia, Southeast Asia, and the entirety of Indonesia.

N. Satelit-Satelit Indonesia, dari Palapa hingga Satria

Pada tanggal 9 Juli 1976, Indonesia pertama kali meluncurkan satelit Palapa A1 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, AS. Satelit Palapa A1 merupakan satelit perdana milik Indonesia yang didesain untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Satelit tersebut diberi nama Palapa oleh Presiden Soeharto yang diambil dari Sumpah Palapa milik Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Satelit Palapa A1 diluncurkan dengan menggunakan roket *Delta 2914* dari *Kennedy Space Center*.^{9 Jul 2024}. Penemu Satelit Palapa adalah Hughes Horward, seorang inovator yang juga mendirikan *Hughes Aircraft Company*, perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan di Amerika Serikat.^{9 Jul 2024}. Pada masa tersebut, Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) menggunakan *Geo Stasioner Orbit (GSO)* setelah AS dan Kanada. SKSD tersebut menjadikan infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional disusul oleh Palapa A2 yang diluncurkan pada 11 Maret 1977 setelah Palapa A1 yang berhenti masa operasinya pada 1983, kemudian secara berturut-turut meluncurkan Palapa B1 pada 16 Juni 1983 yang diluncurkan oleh roket STS 7. Satelit tersebut berhenti beroperasi pada tahun 1990. Di belakang B1, ada satelit Palapa B2P yang diluncurkan oleh roket Delta 6925 pada 21 Maret 1987. Masa bakti satelit tersebut berakhir pada 1996.²⁰⁴

Selanjutnya, Palapa B2R diluncurkan pada 14 April 1990 yang beroperasi sampai tahun 2000 berakhir, sedangkan Palapa B4 yang masa baktinya berakhir pada 2005. Satelit tersebut diluncurkan pada 14 Mei 1992. Lalu, satelit Indonesia yang ketujuh adalah Telkom 1 pada 13 Agustus 1999 yang diluncurkan oleh roket Ariane 4 ini berakhir pada 2006, kemudian ada satelit Telkom 2 yang diluncurkan pada 16 November 2005. Berikutnya ada satelit Telkom 3S yang

²⁰⁴

<https://indonesiabaik.id/infografis/satelit-satelit-indonesia-dari-palapa-hingga-satria> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

diluncurkan pada 14 Februari 2017. Sebelum Telkom 3S, ada satelit BRIsat yang meluncur pada 19 Juni 2016. Selanjutnya Telkom 4 atau Satelit Merah Putih yang diluncurkan pada 7 Agustus 2018, dilanjut dengan satelit Nusantara 1 yang meluncur pada 22 Februari 2019. Terakhir, Indonesia segera meluncurkan Satelit Multi Fungsi bernama Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 yang meluncur pada 19 Juni 2023.²⁰⁵

N. Indonesian Satellites, from Palapa to Satria

On July 9, 1976, Indonesia launched its first satellite, Palapa A1, from Kennedy Space Center, Cape Canaveral, USA. The Palapa A1 satellite was designed to optimize signal transmission across the archipelago and to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. The satellite was named Palapa by President Suharto, inspired by the Palapa Oath of Gajah Mada from the Majapahit Kingdom. The Palapa A1 satellite was launched using a Delta 2914 rocket from Kennedy Space Center. At that time, Indonesia was the third country in the world to operate a Domestic Satellite Communication System (SKSD) using a Geostationary Orbit (GSO), following the USA and Canada. This SKSD became the main infrastructure for distributing national television programs, followed by Palapa A2, which was launched on March 11, 1977, after Palapa A1 ceased operations in 1983. Subsequently, Palapa B1 was launched on June 16, 1983, using the STS-7 rocket and ceased operations in 1990. Following B1 was the Palapa B2P satellite, launched by Delta 6925 on March 21, 1987, with its service life ending in 1996.

Next, the Palapa B2R satellite was launched on April 14, 1990, operating until 2000, while Palapa B4, launched on May 14, 1992, ended its service life in 2005. The seventh Indonesian satellite was Telkom 1, launched on August 13, 1999, by an Ariane 4 rocket, which ceased operations in 2006. This was followed by Telkom 2, launched on November 16, 2005, and then Telkom 3S, launched on February 14, 2017. Before Telkom 3S, there was BRIsat, which was launched on June 19, 2016. Subsequently, Telkom 4, also known as the Red and White Satellite, was launched on August 7, 2018, followed by Nusantara 1,

²⁰⁵.Ibid.

launched on February 22, 2019. Most recently, Indonesia launched a multifunction satellite called the Republic of Indonesia Satellite (Satria) 1 on June 19, 2023.

O. Ars-Vita Alamsyah Perempuan Indonesia Bekerja di Elon Musk AS

Publik sedang riuh membahas sosok wanita berhijab yang memiliki karier mentereng yakni Ars-Vita Alamsyah perempuan Indonesia pertama yang bekerja diperusahaan milik Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Perusahaan tersebut dikenal sebagai *Space X* yang berpusat di California, AS pada tanggal 19 Juni 2023 meluncurkan Satelit Republik Indonesia generasi pertama yang disebut SATRIA-1. Kebanyakan orang berfikir industri penerbangan atau *Aerospace* hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, sekarang dengan berkembangnya teknologi maju *Science Technology Engineering Mathematic (STEM)* semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki dapat dikerjakan oleh wanita seperti Ars-Vita Alamsyah, seorang wanita muslim dari Indonesia yang bekerja di *Space X*.²⁰⁶

Dilihat dari akun LinkedIn miliknya, Ars-Vita Alamsyah mulai bergabung dengan *Space X* sejak bulan Agustus 2021 dalam kapasitasnya sebagai *Supply Chain Reliability Engineer II*. Sebelumnya beliau bekerja di sebuah perusahaan bernama *Northrop Grumman* selama 3 (tiga) tahun dan dipercaya untuk memegang sejumlah posisi penting, mulai dari posisi sebagai *Project Management-Technology Service, Corporate Global Mobility* hingga *Global Supply Chain*. Beliau merupakan perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan S1 di University of Maryland jurusan Teknik Mesin hanya dalam waktu dua tahun, bahkan pernah memegang di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Pada November 2015 ketika masih kuliah, Vita Alamsyah pernah belajar secara langsung di NASA

²⁰⁶ <https://www.nusantara62.com/nasional/3719207020/guru-besar-hukum-udara-antar-satelit-satria-1-antonov-225-dan-peran-perempuan-indonesia?page=3> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

selama satu bulan. Saat berkuliah, beliau juga merupakan mahasiswa aktif sebagai *Teaching Fellow* selama lima bulan. Sebelum lulus S1 dalam 2017 beliau pernah magang di *Federal Aviation Administration (FAA)* atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, sebuah lembaga regulator penerbangan sipil AS. Dalam sebuah *flyer* yang diterbitkan oleh FAA, Ars-Vita Alamsyah mengaku telah tertarik di dunia teknologi dan *engineering* sejak duduk di bangku sekolah menengah.²⁰⁷

Di ulasan yang juga dilampirkan di *LinkedIn*-nya tersebut, Ars-Vita Alamsyah juga bercerita bagaimana bekerja di perusahaan seperti FAA merupakan mimpinya sejak sekolah. Sebelum akhirnya bekerja sebagai insinyur di SpaceX, Ars-Vita Alamsyah telah menempuh pendidikan S2 selama setahun di jurusan *Supply Chain Management* di *Massachusetts Institute of Technology*. Selama menempuh pendidikan S2, beliau berhasil menorehkan sejumlah prestasi lewat penghargaan dari *Deloitte Case Competition* dan *IMSA Student Research Presentation* di *Supply Chain and Logistics Excellence (SCALE) Scholars Fellowship*. Pada 2019, Vita Alamsyah ternyata pernah mengikuti pelatihan *Economics, Financial Accounting and Business Analytics* di *Harvard Business School*. Di tahun yang sama, Vita Alamsyah membangun komunitas online bernama Locanesia, bertujuan memberikan informasi seputar perjalanan dan destinasi di Indonesia. Nah, itulah sosok Ars-Vita Alamsyah, yang berhasil membuktikan bahwa perempuan juga dapat bekerja di perusahaan besar yang didominasi oleh laki-laki.

O. Ars-Vita Alamsyah: An Indonesian Woman Working at Elon Musk's Company

The public is abuzz with discussions about a woman in a hijab who has an impressive career: Ars-Vita Alamsyah, the first Indonesian woman to work at a company owned by Elon Musk, one of the richest people in the world. The company is SpaceX, which is based in California, USA. On June 19, 2023, it launched the first-generation Indonesian satellite, SATRIA-1. Most people think that the aviation or

²⁰⁷.Ibid.

aerospace industry can only be pursued by men. However, with the advancement of technology in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), all jobs traditionally held by men can now also be performed by women like Ars-Vita Alamsyah, a Muslim woman from Indonesia working at SpaceX.

According to her LinkedIn account, Ars-Vita Alamsyah joined SpaceX in August 2021 as a Supply Chain Reliability Engineer II. Previously, she worked at Northrop Grumman for three years, where she held several key positions, including Project Management-Technology Service, Corporate Global Mobility, and Global Supply Chain. She is an Indonesian woman who earned her Bachelor's degree in Mechanical Engineering from the University of Maryland in just two years and has even worked at the National Aeronautics and Space Administration (NASA). In November 2015, while still in college, Vita Alamsyah spent a month studying at NASA. During her studies, she was also an active student as a Teaching Fellow for five months. Before graduating with her Bachelor's degree in 2017, she interned at the Federal Aviation Administration (FAA), the U.S. civil aviation regulatory agency. In a flyer published by the FAA, Ars-Vita Alamsyah expressed her interest in technology and engineering since she was in high school.

In a post also shared on her LinkedIn profile, Ars-Vita Alamsyah shared how working at the FAA has been her dream since school. Before becoming an engineer at SpaceX, Ars-Vita Alamsyah completed a Master's degree in Supply Chain Management at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in one year. During her Master's studies, she achieved several accomplishments, including awards from the Deloitte Case Competition and the IMSA Student Research Presentation in the Supply Chain and Logistics Excellence (SCALE) Scholars Fellowship. In 2019, Vita Alamsyah participated in a training program on Economics, Financial Accounting, and Business Analytics at Harvard Business School. In the same year, Vita Alamsyah founded an online community called Locanesia, aimed at providing information about travel and destinations in Indonesia.

This is the story of Ars-Vita Alamsyah, who has proven that women can also work in large companies that are predominantly male-dominated.

P. Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat

Pesawat udara jenis Antonov AN-225 yang rencananya akan membawa satelit Satria-1 milik Indonesia ke USA, terkena bom saat terbang dari pabriknya di Prancis. Peristiwa tersebut akan menghambat transportasi satelit Satria-1. Produsen satelit, Thales Alenia Space pada saat tersebut sedang mencari jalan keluar dan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PT Satelit Nusantara Tiga. Menurut Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo perang antara Rusia vs Ukraina tersebut memang berdampak terhadap proyek (satelit Satria-1), khususnya dengan transportasi yang rencananya membawa dari pabrikan Thales Alenia Space di Prancis ke tempat peluncuran di USA menggunakan roket dari SpaceX.²⁰⁸

Pesawat udara jenis Antonov-225 dengan kapasitas besar yang biasa membawa barang-barang besar, salah satunya satelit, dibom yang mengakibatkan berkurang pasoknya sehingga mengurangi potensi proyek Satelit Satria-1 yang dirakit di tiga lokasi, yakni di Toulouse, Belfast dan Cannes. Satelit internet tersebut terdiri dari empat tingkat dengan lokasi produksi berbeda untuk setiap bagiannya. Satelit Satria-1 tersebut diandalkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital Indonesia termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan Perbatasan. Satelit Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps akan mendukung penyebaran akses layanan internet di 150 ribu titik lokasi layanan publik. Thales Alenia Space selaku produsen satelit Satria-1 disebut sedang menjajaki ketersediaan transportasi lain untuk membawa satelit Satria-1 dari Prancis ke USA.²⁰⁹

²⁰⁸ Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220313182111-213-770638/pesawat-terbesar-dunia-dibom-rusia-proyek-satelit-ri-terhambat> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

²⁰⁹.Ibid.

P. World's Largest Aircraft Bombed by Russia, Indonesia's Satellite Project Delayed

The Antonov AN-225 aircraft, which was scheduled to transport Indonesia's Satria-1 satellite to the USA, was bombed while flying from its manufacturer in France. This incident will hinder the transportation of the Satria-1 satellite. The satellite manufacturer, Thales Alenia Space, is currently seeking solutions and coordinating with the Telecommunications and Information Accessibility Agency (Bakti) of the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and PT Satelit Nusantara Tiga. According to Anang Latif, the President Director of Bakti Kominfo, the ongoing war between Russia and Ukraine has indeed impacted the Satria-1 satellite project, particularly concerning transportation, which was planned to use a SpaceX rocket to move the satellite from the Thales Alenia Space facility in France to the launch site in the USA.

The Antonov-225 aircraft, known for its large capacity to transport oversized cargo, including satellites, was bombed, resulting in a reduced supply and diminishing the potential of the Satria-1 satellite project, which is assembled in three locations: Toulouse, Belfast, and Cannes. This internet satellite consists of four levels, with production taking place at different sites for each component. The Satria-1 satellite is crucial for the government to accelerate the development of digital infrastructure in Indonesia, especially in the regions classified as Disadvantaged, Leading, and Outermost (3T) and Border Areas. With a capacity of 150 Gbps, the Satria-1 satellite will support the deployment of internet access services at 150,000 public service locations. Thales Alenia Space, the manufacturer of the Satria-1 satellite, is reportedly exploring alternative transportation options to move the satellite from France to the USA.

Q. Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS)

Pada awal tahun 1980-an, di dalam Angkasan Udara USA ada fasilitas yang dikenal sebagai Blue Cube terletak tidak jauh dari Jalan Tol 101 di Lembah Silikon di California Utara. Sebuah foto besar yang tergantung di dinding berwarna hitam putih dan memperlihatkan sebuah wahana antariksa yang tampak tidak sedap dipandang, sebuah silinder dengan panel surya dan

hidung berbentuk kerucut di salah satu ujungnya. Wahana tersebut diluncurkan oleh URSS dan dikenal sebagai *Transportnyi Korabl Snabzheniya*, atau Wahana Antariksa Transportasi Suplai singkatnya "TKS". Foto tersebut sangat rahasia dan diambil oleh wahana antariksa pengintai GAMBIT USA, yang menunjukkan kemampuannya untuk memotret wahana antariksa lain di orbit bumi. TKS dirancang untuk membawa awak dan perbekalan ke stasiun antariksa rahasia URSS yang dikenal sebagai Almaz ("berlian"), yang dilengkapi dengan sistem kamera meriam 23 milimeter yang dapat meledakkan GAMBIT dari langit bilamana terlalu dekat.²¹⁰

Tiga stasiun Almaz diluncurkan dengan nama samaran Salyut-2, Salyut-3, dan Salyut-5 masing-masing pada tahun 1973, 1974, dan 1976, megekan bahwa mereka adalah jenis yang sama dengan stasiun Salyut sipil dari biro desain Korolev. Seperti yang akan diketahui kemudian, stasiun sipil (secara internal disebut "Stasiun Orbital Jangka Panjang" (DOS) belum disetujui sampai tahun 1970 dan pada kenyataannya adalah versi modifikasi dari Almaz, yang berasal tahun 1964. Sementara Salyut-2 gagal mengorbit setelah peluncuran, Salyut-3 dan 5 dapat menampung tiga awak terbang ke stasiun-stasiun dengan pesawat ruang angkasa Soyuz milik biro Korolev. TKS milik Chelomei, sebuah wahana seberat 20 ton yang ukurannya hampir sama dengan Almaz, akhirnya hanya terbang ke stasiun-stasiun Salyut milik warga sipil dan menjadi cikal bakal modul-modul stasiun ruang angkasa berikutnya, termasuk Modul Laboratorium Serbaguna Nauka, yang diluncurkan ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) pada bulan Juli 2021. Pengamat Barat menyadari sifat ganda stasiun ruang angkasa Salyut sejak tahun 1970-an, rincian tentang desain dan sejarah Almaz baru mulai muncul dari sumber-sumber Rusia setelah runtuhnya URSS yang memungkinkan untuk memperoleh

²¹⁰ <https://www.thespacereview.com/article/4708/1> diunduh Tanggal 6 Oktober 24

pemahaman yang cukup baik tentang proyek tersebut pada pergantian abad.²¹¹

Proyek tersebut diperluas secara signifikan dengan penerbitan ensiklopedia pada tahun 2015 tentang proyek ruang angkasa berawak Federasi Rusia (FR) yang mendedikasikan sekitar 70 halaman untuk Almaz. Apa yang mungkin menjadi sejarah definitif Almaz ditulis oleh tim penulis NPO Mashinostroyeniya dan diterbitkan pada tahun 2019. Berjudul *Ogranka Almazov* ("Pemotongan Berlian"), buku setebal 500 halaman tersebut berisi banyak informasi baru tentang proyek tersebut dan diilustrasikan dengan mewah dengan gambar dan gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya yang diambil dari arsip perusahaan yang memang menceritakan sejarah proyek dari perspektif bias organisasi yang menjalankannya dan tidak mengandung dokumen pemerintah utama yang akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tujuan, kemampuan, dan pengembangan Almaz.²¹²

Almaz adalah mitra Soviet untuk Laboratorium Pengorbit Berawak (MOL) milik USA yang dirancang sebagai platform pengintaian berawak, tetapi tidak seperti Almaz, MOL dibatalkan pada tahun 1969 sebelum satu misi pun diterbangkan. Kantor Pengintaian Nasional, yang mengembangkan MOL pada tahun 1960-an, akhirnya mendeklasifikasi program tersebut pada tahun 2015, merilis sejarah resmi bersama dengan ribuan halaman dokumen. NRO kemudian menindaklanjutinya dengan sejarah yang menampilkan banyak wawancara dengan para astronot MOL yang selamat. Dengan banyaknya aspek MOL dan Almaz yang telah dideklasifikasi, sekarang menjadi mungkin untuk membandingkan tujuan, fitur desain, dan alasan pembatalannya. Baik MOL maupun Almaz gagal menunjukkan peran militer yang layak bagi manusia di orbit Bumi. Pesawat ruang angkasa Gemini milik NASA menawarkan kesempatan bagi Angkatan Udara USA untuk memanfaatkan investasi

²¹¹ Ibid.

²¹² Ibid.

badan antariksa sipil dalam pesawat ruang angkasa yang dapat diadaptasi untuk misi militer.

Proyek awal ruang angkasa militer berawak

Gagasan astronot militer yang bertugas di luar angkasa sudah ada sejak puluhan tahun lalu sebelum era antariksa. Cerita fiksi ilmiah sering kali menggambarkan penjelajah antariksa sebagai anggota militer, dan program antariksa Soviet dan Amerika, bahkan saat mengejar tujuan antariksa sipil, direkrut dari kalangan militer. Namun, demikian pada awal tahun 1960-an, saat astronot dan kosmonot mengorbit Bumi, tidak jelas bahwa ada misi antariksa militer yang membutuhkan astronot militer. Angkatan Udara USA memiliki beberapa program yang sedang berlangsung pada awal tahun 1960-an yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan militer, tetapi nasib mereka menyoroti dilema peran astronaut militer.

Q. International Space Station (ISS)

In the early 1980s, within the USAF, there was a facility known as Blue Cube located not far from Highway 101 in Silicon Valley, Northern California. A large black-and-white photo hung on the wall, depicting an unappealing spacecraft – a cylinder with solar panels and a conical nose at one end. The spacecraft was launched by the URRS and was known as the Transportnyi Korabl Snabzheniya, or the Transport Supply Spacecraft, abbreviated as “TKS.” The photo was highly classified and taken by the USA’s GAMBIT reconnaissance spacecraft, showcasing its ability to photograph other spacecraft in Earth orbit. The TKS was designed to transport crew and supplies to a secret URRS space station known as Almaz (“diamond”), equipped with a 23-millimeter cannon camera system capable of shooting down a GAMBIT if it came too close.

Three Almaz stations were launched under the aliases Salyut-2, Salyut-3, and Salyut-5 in 1973, 1974, and 1976, respectively, suggesting they were of the same type as the civilian Salyut stations from Korolev's design bureau. As later understood, the civilian station (internally referred to as the "Long-Term Orbital Station" (DOS)) was not approved until 1970 and was, in fact, a modified version of Almaz, which originated in 1964. While Salyut-2 failed to achieve orbit after

launch, Salyut-3 and Salyut-5 could accommodate three crews traveling to the stations via Soyuz spacecraft from Korolev's bureau. The Chelomei TKS, a 20-ton spacecraft nearly the same size as Almaz, ultimately only flew to the civilian Salyut stations and became the precursor to subsequent space station modules, including the Multipurpose Laboratory Module Nauka, which was launched to the International Space Station (ISS) in July 2021. Western observers recognized the dual nature of the Salyut space stations as early as the 1970s, and details about the design and history of Almaz only began to emerge from Russian sources after the collapse of the URRS, allowing for a reasonably good understanding of the project by the turn of the century.

The project was significantly expanded with the publication of an encyclopedia in 2015 on the crewed space projects of the Russian Federation (FR), dedicating around 70 pages to Almaz. What may be the definitive history of Almaz was written by a team from NPO Mashinostroyeniya and published in 2019. Titled **Ogranka Almazoo** ("Diamond Cuttings"), the 500-page book contains much new information about the project and is lavishly illustrated with images and illustrations previously unseen, taken from the company's archives, which indeed recount the project's history from the perspective of the organization running it and lacks primary government documents that would provide deeper insights into the goals, capabilities, and development of Almaz.

Almaz served as the Soviet counterpart to the USA's Manned Orbiting Laboratory (MOL), designed as a crewed reconnaissance platform; however, unlike Almaz, MOL was canceled in 1969 before a single mission was flown. The National Reconnaissance Office, which developed MOL in the 1960s, ultimately declassified the program in 2015, releasing an official history along with thousands of pages of documents. The NRO subsequently followed up with a history featuring many interviews with surviving MOL astronauts. With many aspects of both MOL and Almaz now declassified, it has become possible to compare their objectives, design features, and reasons for cancellation. Neither MOL nor Almaz was able to demonstrate a viable military role for humans in Earth orbit. NASA's Gemini spacecraft

offered the USAF an opportunity to leverage the civilian space agency's investments in spacecraft that could be adapted for military missions.

Early Crewed Military Space Projects

The idea of military astronauts operating in space has existed for decades, predating the space age. Science fiction stories often portrayed space explorers as military personnel, and both the Soviet and American space programs, even while pursuing civilian space goals, drew from military ranks. However, by the early 1960s, when astronauts and cosmonauts were orbiting the Earth, it was unclear that any military space missions required military astronauts. The USAF had several ongoing programs in the early 1960s intended to pursue military objectives, but their fates highlighted the dilemma of the military astronaut's role.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baskara T, Wardaya Sj., INDONESIA MELAWAN AMERIKA: Konflik Perang Dingin 1953-1963. Penerbit GALANGPRESS, Yogyakarta, 2008.
- Martono K., Perang Dingin, KAA (1955), Hukum Angkasa dan Serpihan Roket di Kalimantan Barat, Webinar diselenggarakan oleh Universitas Tanjung Pura Pontianak tanggal 24 Februari 2024

LAIN-LAIN

- [Kilas Balik] 66 Tahun Lalu, Presiden Soekarno Nyaris Terbunuh dalam Tragedi "Cikini", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/30/10000081/kilas-balik-66-tahun-lalu-presiden-soekarno-nyaris-terbunuh-dalam-tragedi> diunduh Tanggal 29 Agustus 24
- Arsip Rahasia '65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing <https://kumparan.com/kumparannews/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing> diunduh Tanggal 31 Agustus 24.
- Bilateral Air Transport Agreements of the Republic of Indonesia*, tidak dipublished
- Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI dan Permesta <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24
- Bukti Keterlibatan Amerika Serikat dalam Gerakan PRRI <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/05/220000279/bukti-keterlibatan-amerika-serikat-dalam-gerakan-prri-dan-permesta?page=all> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

- Dampak Perang Dingin bagi Indonesia.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/180000869/dampak-perang-dingin-bagi-indonesia?page=all>.
 Diunduh Tanggal 25 Pebruari 2024; Baca juga Baskara T, Wardaya Sj., INDONESIA MELAWAN AMERIKA: Konflik Perang Dingin 1953-1963. Penerbit GALANGPRESS, Yogyakarta, 2008.
- https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-22-II-P3DI-November-2016-7.pdf diunduh Tanggal 15 Oktober 24
- <https://indonesiabaik.id/infografis/satelit-satelit-indonesia-dari-palapa-hingga-satria> diunduh Tanggal 30 Agustus 24
- <https://info.unida.ac.id/artikel/sejarah-dan-pentingnya-satelit-palapa> diundduh Tanggal 30 Agustus 24
- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1222915> diunduh Tanggal 31 Agustus 24
- <https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Cina%20--%20Amerika%20Serikat%20--%20Politik%20ekonomi%20luar%20negeri%20&pType=Subject&pLembarkerja=-1&pPilihan=Subject> diunuh Tanggal 15 Oktober 24
- <https://www.nusantara62.com/nasional/3719207020/guru-besar-hukum-udara-untar-satelit-satria-1-antonov-225-dan-peran-perempuan-indonesia?page=3> diunduh Tanggal 30 Agustus 24
- <https://www.thespacereview.com/article/4708/1> diunduh Tanggal 6 Oktober 24
- Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/100000679/keterlibatan-amerika-serikat-dalam-prri?page=all>
 diunduh Tanggal 25 Pebruari 2024

Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955
[https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika), 1955
[https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+\(Konferensi+Asia+Afrika\)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&rlz=1C1ONGR_enID1042ID1042&oq=Konferensi+Bandung+(Konferensi+Asia+Afrika)%2C+1955&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIKCAIQIRgWGB0YHjIKCAMQIRgWGB0YHtIBCTcwMjJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diunduh Tanggal 22 Desember 2023

Pemberontakan PKI Madiun 1948.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Peran Amerika di Balik Pemberontakan PKI Madiun
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822728/peran-amerika-di-balik-pemberontakan-pki-madiun?page=all> diunduh Tanggal 28 Agustus 24

Peran Indonesia dalam Perang Dingin.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/09/090000379/peran-indonesia-dalam-perang-dingin?page=all>,
diunduh Tanggal 28 Januari 2024

Pesawat Terbesar Dunia Dibom Rusia, Proyek Satelit RI Terhambat
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220313182111-213-770638/pesawat-terbesar-dunia-dibom-rusia-proyek-satelit-ri-terhambat> diunduh Tanggal 30 Agustus 24

Politik Luar Negeri Orde Lama
<https://kids.grid.id/read/473528472/6-poin-kebijakan-politik-luar-negeri-masa-pemerintahan-orde-lama?page=all>
diunduh Tanggal 1 September 24

Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Mengapa Lirik Lagu Kian Lugas dan Teramat Gamblang? Artikel Kompas.id

Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/27/100000879/tragedi-cikini-1957-upaya-pembunuhan-soekarno?page=all>
diunduh Tanggal 28 Agustus 24

BAB

4

DEPLOMASI INDONESIA DAN URRSS, KEGIATAN HUKUM UDARA DAN ANGKASA DEWASA INI¹

INDONESIAN DEPLOMATION AND URRSS, AIR AND SPACE LEGAL ACTIVITIES TODAY

A. URRSS Dibalik Peristiwa Madiun 1948

Tidak benar URRSS di Balik Peristiwa Madiun 1948. Peristiwa Madiun 1948 yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Moeso ternyata tidak ditemukan bukti keterlibatan URRSS) Tidak ada instruksi langsung dari URRSS, namun demikian Moeso lebih terinspirasi kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) atas kelompok nasionalis pimpinan Dr Sun Yat Sen. Jalan baru Republik Indonesia-nya Moeso sebagai pedoman gerakan komunis di Indonesia lebih sebagai kreatifitas Moeso sendiri daripada cetak biru dari URRSS. Moeso lebih terpicat cara-cara PKC. Menurut sejarawan Dr Budiawan dalam bedah buku "Dari Moskow ke Madiun?"²¹³

Stalin-PKI dan hubungan diplomatik Indonesia-URRSS 1947-1953, karya Larissa M. Efimova di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dan berpendapat kaum intelektual barat maupun Indonesia, bahkan penulisan sejarah resmi menyebutkan peristiwa Madiun 1948 adalah sebagai berdirinya negara URRSS, pemberontakan yang didukung URRSS yang komunis dan pemerintahan URRSS di bawah Moeso, dengan perkataa lain ada keterlibatan URRSS atas peristiwa Madiun 1948 tersebut, namun demikian dalam

²¹³ Tidak Benar Soviet di Balik Peristiwa Madiun 1948.
<https://news.detik.com/berita/d-1463760/tidak-benar-soviet-di-balik-peristiwa-madiun-1948> diunduh Tanggal 21 September 24

dokumen yang sudah diklasifikasikan oleh Indonesia asal Rusia, Prof Larissa M. Efimova, menunjukkan tidak ditemukan bukti-bukti mengenai perintah Moskow secara instruktif dan pasti kepada Moeso. Beliau menunjukkan tidak ada garis perintah langsung. Dari dokumen-dokumen yang ada, dapat disimpulkan Moeso menuangkan pandangan dan gagasan politiknya sendiri. Menurut Budiawan Moeso pulang ke Indonesia bulan Agustus 1948 lebih didasari atas keprihatinan terpecah dan tercerai-beraninya kaum kiri pimpinan Amir Syarifuddin Cs. Moeso waktu tersebut ingin menyelamatkan kaum kiri terhadap tekanan kelompok lain.²¹⁴

Buku tersebut setebal 171 halaman yang diterbitkan oleh Syarikat Indonesia dan Kelopak Semata (Kelompok Penyimak Sejarah Masyarakat Tanah Air). Buku tersebut juga mengungkap seputar awal mula hubungan Indonesia-URRSS antara tahun 1947-1953 sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data-data resmi di Rusia yang telah diklasifikasi setelah URRSS tahun 1989. Berdasarkan data-data tersebut menurut Budiawan, terungkap bahwa bagi URRSS, Indonesia bukan arena untuk menyebarkan pengaruh politiknya terutama saat PD. Sesuai perjanjian Yalta oleh Inggris, URRSS dan USA, URRSS lebih mengarahkan ke Eropa Timur, dan USA ke Asia Timur seperti Jepang dan Korea, sedangkan Inggris ke wilayah Asia Tenggara. Pimpinan URRSS lebih patuh pada perjanjian internasional. Kajian Efimova terungkap bilamana Indonesia setelah kemerdekaan mencoba mendekati URRSS dengan membuka jalur hubungan diplomatik seperti yang dilakukan Menlu waktu itu LN Palar untuk mendapatkan dukungan internasional. Dalam catatan Efimova, URRSS-lah yang mungkin merupakan negara pertama yang menyeret Indonesia ke dalam kancah PD, namun demikian Indonesia juga mampu memanfaatkan rivalitas dalam PD untuk kepentingan nasionalnya. Pada saat tersebut URRSS juga sangat hati-hati terhadap Indonesia

²¹⁴ Tidak Benar Soviet di Balik Peristiwa Madiun 1948. <https://news.detik.com/berita/d-1463760/tidak-benar-soviet-di-balik-peristiwa-madiun-1948> diunduh Tanggal 21 September 24

terutama saat ada peninjauan pembukaan jalur hubungan diplomatik. Bagi kelompok anti-kiri sendiri juga khawatir bilamana hubungan dengan URRSS dibuka akan dimanfaatkan oleh kelompok kiri.²¹⁵

A. *The USSR Behind the Madiun Events of 1948*

It is not accurate to claim that the USSR was behind the Madiun Events of 1948. The Madiun incident, known in Indonesian history as the PKI rebellion led by Moeso, has no evidence of direct involvement from the USSR. There was no direct instruction from the USSR; however, Moeso was inspired more by the victory of the Chinese Communist Party (CCP) over the nationalist group led by Dr. Sun Yat-sen. Moeso's vision for a new Republic of Indonesia can be seen as his own creativity rather than a blueprint from the USSR. He was more captivated by the methods of the CCP. According to historian Dr. Budiawan, in his review of the book "From Moscow to Madiun? Stalin-PKI and Indonesia-USSR Diplomatic Relations 1947-1953," authored by Larissa M. Efimova at the Faculty of Cultural Sciences, Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta, both Western and Indonesian intellectuals, as well as official historical writings, describe the Madiun events of 1948 as a result of the establishment of the USSR, a rebellion supported by the communist USSR and the government under Moeso. In other words, there is an alleged involvement of the USSR in the Madiun events; however, classified documents from Russia indicate that no direct and definite orders from Moscow to Moeso have been found. Efimova demonstrates that there were no direct commands. From the existing documents, it can be concluded that Moeso articulated his own political views and ideas. Budiawan argues that Moeso's return to Indonesia in August 1948 was primarily based on concerns about the fragmentation of the left led by Amir Syarifuddin and others. At that time, Moeso wanted to save the left from pressure from other groups.

²¹⁵ Tidak Benar Soviet di Balik Peristiwa Madiun 1948. <https://news.detik.com/berita/d-1463760/tidak-benar-soviet-di-balik-peristiwa-madiun-1948> diunduh Tanggal 21 September 24

The book, consisting of 171 pages and published by Syarikat Indonesia and Kelopak Semata (a Historical Society Monitoring Group), also reveals the early stages of Indonesia-USSR relations between 1947 and 1953, based on official data from Russia that was classified after the USSR's dissolution in 1989. According to Budiawan, this data reveals that for the USSR, Indonesia was not an arena for spreading its political influence, especially during World War II. According to the Yalta Agreement between the UK, USSR, and USA, the USSR was more directed towards Eastern Europe, while the USA focused on East Asia, such as Japan and Korea, and the UK on Southeast Asia. The USSR leadership adhered more to international agreements. Efimova's study indicates that after gaining independence, Indonesia attempted to approach the USSR by opening diplomatic channels, as evidenced by the actions of then-Foreign Minister LN Palar to gain international support. Efimova notes that the USSR might have been the first country to draw Indonesia into the World War II arena; however, Indonesia was also able to leverage the rivalry during the war for its national interests. During this time, the USSR was also very cautious towards Indonesia, especially regarding the potential opening of diplomatic relations. For anti-leftist groups, there was concern that opening relations with the USSR would be exploited by leftist factions.

B. Negara Soviet Madiun

Sumber lain²¹⁶ menjelaskan Negara Soviet Madiun atau yang dikenal juga sebagai Soviet Republik Indonesia (SRI) merupakan puncak pemberontakan PKI Madiun 1948. Negara Soviet Madiun diproklamasikan di Madiun oleh kaum komunis pada 18 September 1948. Tokoh utamanya, yakni Muso dan Amir Syariffudin justru tidak ada di Madiun. Proklamasikan tersebut dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwa mereka tidak terlibat dalam proklamasi Negara Soviet Madiun. Berdirinya Negara Soviet Madiun merupakan puncak provokasi dan permusuhan kelompok sayap kiri terhadap Kabinet Hatta.

²¹⁶ Negara Soviet Madiun https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Negara_Sovyet_Madiun diunduh Tanggal 21 September 24

Konflik tersebut sesungguhnya berawal dari tuntutan kelompok sayap kiri, terutama PKI, Partai Buruh dan Pesindo agar mereka mendapat empat kementerian penting dengan Amir Syarifuddin meneruskan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Hatta, namun demikian, tuntutan tersebut ditolak sehingga mereka menjadi kelompok oposisi dalam Kabinet Hatta.

Kelompok sayap kiri yang terdiri dari PKI, Partai Buruh, Pesindo, Federasi Serikat Buruh, dan Partai Sosialis (tanpa Kelompok Syahrir) dalam rapat umum di Surakarta 26 Februari 1948 melakukan reorganisasi dengan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir Syarifuddin. FDR dalam Program politiknya menolak Persetujuan Renville, tidak mengadakan perundingan dengan Belanda sebelum mereka mengundurkan diri dari Indonesia, nasionalisasi harta kekayaan Belanda dan orang asing lainnya tanpa ganti rugi. FDR juga menolak Program Re-Ra (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) Kabinet Hatta. FDR mengisukan bahwa pertahanan rakyat sudah dilemahkan dan Republik Indonesia akan diserahkan kepada Belanda.²¹⁷

FDR pada pertengahan Juli 1948 menyusun program untuk menentang Kabinet Hatta. Program tersebut “Meninjak Tingkat Perjuangan Militer Baru”. Dalam program tersebut dicantumkan dua cara perjuangan, yakni parlementer dan non-parlementer (dengan kekuatan militer). Kekuatan FDR semakin bertambah dengan kedatangan Muso pada Agustus 1948. Muso adalah seorang tokoh PKI yang bermukim di Moskow sejak tahun 1926. Kedatangan Muso membawa perubahan besar dalam gerakan Komunis. Partai yang berhaluan komunis, Partai Sosialis dan Partai Buruh pada akhir Agustus 1948 berfusi dengan PKI. Menurut Amir Syarifuddin fusi dilakukan karena perubahan keadaan politik internasional sesudah PD II, sehingga terjadi perubahan dalam struktur polit biro PKI. Muso duduk dalam Sekretariat Umum sedangkan Amir Syarifuddin

²¹⁷ Negara Soviet Madiun https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Negara_Sovyet_Madiun diunduh Tanggal 21 September 24

menjabat Sekretaris Pertahanan. Sejak itu kelompok kiri yang tergabung dalam FDR semakin giat melakukan oposisi terhadap pemerintah. Mereka juga melakukan persiapan yang rapi sebelum pemberontakan. Mereka menyiapkan tokoh-tokoh yang akan menggantikan para pejabat RI di Madiun. Abdul Mutholib dipersiapkan menjadi residen dan Supardi sebagai walikota Madiun. Beberapa tokoh juga disiapkan untuk menjadi bupati di beberapa kabupaten. PKI antara 10-18 September 1948 kemudian melakukan agitasi dengan menculik dan membunuh 11 pejabat pemerintah dan tujuh orang tokoh partai dan organisasi massa. Pembunuhan terhadap bupati, penilik sekolah, guru, perwira TNI dan Polri terjadi di Magetan.²¹⁸

Pemberontakan dimulai pada 18 September 1948 dengan beberapa kali tembakan pistol di beberapa tempat sebagai isyarat. Pasukan PKI segera menguasai beberapa tempat penting, seperti Kantor karesidenan, Markas CPM, dan Markas Kompi Brigade Mobil Polisi. Bersamaan dengan itu, Sumarsono, Supardi dan kawan-kawannya memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia" dan pembentukan Pemerintahan Front Nasional di halaman Karesidenan Madiun yang menandakan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Kaum pemberontak mengangkat Kolonel Djokosuyono sebagai Gubernur Militer di Madiun dan Letnan Kolonel Dahlan sebagai Komandan Pertempuran. Kolonel Djokosuyono dalam pidato radionya menunduh TNI melakukan kampanye terhadap kelompok "pasukan revolusioner" di Solo. Keesokan harinya, Muso tiba di Madiun untuk mengambil alih pimpinan Pemerintahan Front Nasional. Muso melalui pidato radio menyerang Pemerintah RI.²¹⁹

Pemerintah kemudian bertindak cepat, Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa, Kolonel Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer. Pimpinan operasi militer diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang menandai dilakukan, karena

²¹⁸, *Ibid.*

²¹⁹, *Ibid.*

Panglima Besar Jendral Soedirman sedang sakit. Pelaksanaan operasi militer diserahkan kepada Gubernur Militer II Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto. Operasi dilakukan Kesatuan Reserve Umum (KRU)-Z dari Pasukan Siliwangi.²²⁰

B. *The Soviet State of Madiun*

Other sources explain that the Soviet State of Madiun, also known as the Soviet Republic of Indonesia (SRI), was the peak of the PKI rebellion in Madiun in 1948. The Soviet State of Madiun was proclaimed by the communists in Madiun on September 18, 1948. The main figures, Muso and Amir Syarifuddin, were not actually present in Madiun at the time. The proclamation was made to create the impression that they were not involved in the declaration of the Soviet State of Madiun. The establishment of the Soviet State of Madiun marked the climax of provocations and hostilities from the leftist groups against the Hatta Cabinet.

The conflict actually began with demands from the leftist groups, particularly the PKI, the Labor Party, and Pesindo, for four key ministries, with Amir Syarifuddin continuing his role as Minister of Defense in the Hatta Cabinet. However, these demands were rejected, leading them to become an opposition group within the Hatta Cabinet.

The leftist coalition, consisting of the PKI, the Labor Party, Pesindo, the Federation of Labor Unions, and the Socialist Party (excluding the Syahrir Group), reorganized during a public meeting in Surakarta on February 26, 1948, emerging as the People's Democratic Front (FDR), led by Amir Syarifuddin. The FDR, in its political program, rejected the Renville Agreement, demanded no negotiations with the Dutch until they withdrew from Indonesia, and advocated for the nationalization of Dutch and other foreign assets without compensation. The FDR also opposed the Reconstruction and Rationalization (Re-Ra) program of the Hatta Cabinet, claiming that the people's defense had been weakened and that the Republic of Indonesia would be surrendered to the Dutch.

By mid-July 1948, the FDR drafted a program to oppose the Hatta Cabinet, titled "Stepping Up the Level of New Military

²²⁰.Ibid.

Struggle." This program included two methods of struggle: parliamentary and non-parliamentary (using military force). The strength of the FDR increased with the arrival of Muso in August 1948. Muso, a PKI figure residing in Moscow since 1926, brought significant changes to the communist movement. By the end of August 1948, the communist party, the Socialist Party, and the Labor Party merged with the PKI. According to Amir Syarifuddin, the merger occurred due to changes in the international political landscape after World War II, resulting in a shift in the political structure of the PKI's political bureau. Muso became a member of the General Secretariat, while Amir Syarifuddin served as Secretary of Defense. From that point, the leftist groups within the FDR intensified their opposition to the government, preparing meticulously before the rebellion. They arranged for figures to replace Indonesian officials in Madiun, with Abdul Mutholib prepared to become the resident and Supardi as the mayor of Madiun. Several figures were also prepared to become district heads in various regions. Between September 10 and 18, 1948, the PKI engaged in agitation, abducting and murdering 11 government officials and seven leaders of political parties and mass organizations. The killings of the regent, school supervisors, teachers, and military and police officers occurred in Magetan.

The rebellion began on September 18, 1948, marked by gunfire in several locations as a signal. PKI forces quickly seized several key places, such as the residency office, the CPM Headquarters, and the Mobile Police Brigade Command. Concurrently, Sumarsono, Supardi, and their associates proclaimed the establishment of the "Soviet Republic of Indonesia" and the formation of the National Front Government in front of the Madiun Residency, marking the PKI rebellion in Madiun. The rebels appointed Colonel Djokosuyono as the Military Governor of Madiun and Lieutenant Colonel Dahlan as the Combat Commander. In his radio speech, Colonel Djokosuyono accused the military of conducting a campaign against the "revolutionary troops" in Solo. The next day, Muso arrived in Madiun to take over the leadership of the National Front Government. Muso, through a radio address, attacked the Indonesian government.

The government acted quickly, designating East Java as a special region, appointing Colonel Sungkono as the Military Governor. The leadership of military operations was assigned to Colonel A.H. Nasution, Commander of the Djawa Main Command (MBKD), since General Soedirman was ill. The execution of military operations was handed over to the Military Governor of Central Java, Colonel Gatot Subroto. The operation was carried out by the General Reserve Unit (KRU)-Z of the Siliwangi Force.

C. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia 1945 - 2011

Peran URRSS dalam Perjuangan Pengakuan Kemerdekaan Indonesia di Dunia Internasional. Periode 1945-1950 merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. URRSS mempunyai peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia tersebut. URRSS merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan mengancam segala bentuk kolonialisme. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI mengharapkan dukungan dan bantuan dari URRSS. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) URRSS berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.²²¹

Empat hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di London pada tanggal 21 Januari 1946 Delegasi URRSS yang merupakan utusan dari Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengancam Agresi Militer Belanda yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan serta menghimbau DK PBB

²²¹ Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
<https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu> diunduh Tanggal 22 September 24

melakukan langkah-langkah untuk mengentikan agresi tersebut. Selain itu, URRSS membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya, misalnya pada tahun 1947-1948 dalam sidang ECOSOC diajukan sejumlah usulan untuk diakuiinya kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi, Januari 1949 URRSS mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan URRSS tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia dan berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat atau pidato-pidato yang disampaikan antara lain oleh Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik kepada utusan URRS di PBB, seperti A.A. Gromyko, D.Z. Manuilsky, Ya.A. Malik dan V. Zorin.²²²

Diplomat Indonesia yang merupakan Wakil Indonesia di PBB, L.N. Palar menyampaikan bahwa sejak tahun-tahun pertama keberadaan PBB, sudah terjalin hubungan tidak resmi antara delegasi kedua negara di PBB. Ditambahkan bahwa bangsa Indonesia menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan yang diberikan delegasi URRSS terhadap delegasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada rapat tanggal 1 Mei 1946 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan URRSS dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskow. Untuk memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, wakil Indonesia di Praha, Suripno mempunyai surat mandat yang ditandatangani Presiden Soekarno pada bulan Desember 1947 untuk mewakili pemerintah Indonesia melakukan perundingan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur dan URRSS.²²³

²²² Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
<https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu> diunduh Tanggal 22 September 24

²²³ Ibid.

Pada bulan Mei 1948 dilakukan perundingan antara Duta Besar URRSS untuk Czechoslovakia, M. Silin dengan Suripno dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan Konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim yang membuktikan adanya hubungan antara Indonesia dengan URRSS pada masa revolusi di Indonesia, namun demikian, kesepakatan tersebut tidak dapat terealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan Agresi Militer Belanda.²²⁴

C. *Bilateral Relations Between Indonesia and Russia (1945 - 2011)*

The Role of the USSR in the Struggle for Indonesia's Recognition of Independence in the International Community

The period from 1945 to 1950 was a crucial time for Indonesia's diplomatic efforts to seek international recognition of its independence and sovereignty following the proclamation of independence on August 17, 1945. The USSR played a significant role in this struggle. The USSR was one of the first countries to welcome Indonesia's emergence as an independent nation and condemned all forms of colonialism. The Indonesian independence fighters hoped for support and assistance from the USSR.

At the United Nations (UN), the USSR repeatedly raised the issue of Indonesia, demanding that the UN stop the Dutch military aggression and urging the international community to recognize Indonesia as an independent state.

Four days after the UN Security Council began its work in London on January 21, 1946, the USSR delegation, represented by Dmitry Manuilsky from Soviet Ukraine, brought up the situation in Indonesia during a Security Council meeting. He condemned the Dutch military aggression as a threat to peace and security, calling for the Security Council to take steps to halt the aggression. Additionally, the USSR defended Indonesia at meetings of the UN and other international organizations. For example, in 1947-1948, the Economic and Social Council (ECOSOC) was presented with proposals for the

²²⁴.Ibid.

recognition of Indonesia's sovereignty, and at the Delhi Conference in January 1949, the USSR condemned military aggression against Indonesia and urged the international community to recognize Indonesia's independence.

This support from the USSR was warmly received by the Indonesian people, and various expressions of gratitude were conveyed through letters and speeches by figures such as Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sartono, Wilopo, and Adam Malik to the USSR representatives at the UN, including A.A. Gromyko, D.Z. Manuilsky, Ya.A. Malik, and V. Zorin.

L.N. Palar, Indonesia's representative at the UN, stated that since the early years of the UN's existence, unofficial relations had developed between the delegations of the two countries at the UN. He added that Indonesia expressed its gratitude for the support provided by the USSR delegation in advocating for Indonesia's independence. In a meeting on May 1, 1946, in Yogyakarta, President Sukarno announced that the Indonesian government was ready to establish relations with the USSR and set up diplomatic missions in Jakarta and Moscow.

To advocate for Indonesia in Eastern Europe, Suripno, Indonesia's representative in Prague, received a mandate signed by President Sukarno in December 1947 to represent the Indonesian government in negotiations and friendship with Eastern European countries and the USSR.

In May 1948, negotiations took place between the USSR Ambassador to Czechoslovakia, M. Silin, and Suripno, leading to an agreement to establish consular relations between the two countries. The consular agreement was signed by the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Haji Agus Salim, confirming the existence of relations between Indonesia and the USSR during Indonesia's revolutionary period. However, this agreement could not be realized due to political turmoil in Indonesia, such as the Madiun incident and Dutch military aggression.

D. Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-URRSS

Pada tanggal 25 Januari 1950 Menteri Luar Negeri URRSS A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa URRSS mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yakni kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif URRSS mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.²²⁵

Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke VIII bulan September 1953 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sunarjo memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri URRSS, A. Vyshinsky mengenai keinginan Pemerintah Indonesia untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di URRSS dan pada tanggal 30 November 1953 Menteri Sunarjo mengirimkan maksud tersebut secara tertulis. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 17 Desember 1954 A. Vyshinsky menyampaikan kepada Sunarjo bahwa Pemerintah URRSS menyambut positif keinginan Pemerintah Indonesia dan siap menerima Duta Besar Indonesia di Moskow. Di samping itu, pihaknya siap membuka perwakilannya di Jakarta.²²⁶

Pada tanggal 21 Januari 1954 Pemerintah URRSS memberikan *agreement* kepada Dr. Soebandrio sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Pada tanggal 13 April 1954 Dr. Soebandrio didampingi oleh Kumoro, Hudiono Sujoko, Gusti Rusli Noor, Supeno dan Sukanto menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan kepada Ketua Presidium Dewan Tertinggi URRSS, Voroshilov di Kremlin yang turut hadir pula Wakil

²²⁵.Ibid.

²²⁶.Ibid.

Menteri Luar Negeri URRSS, Fedorenko, Kepala Bagian Protokol, Molochkov dan Kepala Departemen Asia Tenggara, Maksimov. Pada saat tersebut Kedutaan Besar Republik Indonesia berkantor sementara di Hotel Metropol, kemudian pindah ke sebuah gedung di jalan Sadovo-Somatechnaya 14. Selanjutnya sejak tahun 1960-an sampai sekarang berlokasi di jalan Novokuznetskaya 12-14 tidak jauh dari Lapangan Merah dan Istana Presiden Rusia “Kremlin”. Pada tanggal 24 Mei 1954 Pemerintah Indonesia menyampaikan persetujuannya menerima D. Zhukov sebagai Duta Besar URRSS di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus 1954 rombongan pertama diplomat URRSS yang terdiri dari Sekretaris Kedua Vzhos dan Atase Sholmov tiba di Jakarta untuk mempersiapkan pembukaan perwakilannya, namun demikian untuk sementara mereka tinggal di salah satu bekas hotel Belanda “Des Indes” yang kemudian diketahui bahwa di hotel tersebut pernah berkantor Konsulat pertama Rusia, M. Bakunin (1894-1899).²²⁷

Pada tanggal 14 September 1954 D. Zhukov, Kepala Perwakilan URRSS, tiba di Jakarta, kedatangan beliau disambut oleh Kepala Keprotokolan Departemen Luar Negeri RI, Kusumo Utoyo. Pada tanggal 20 September 1954 D. Zhukov didampingi oleh Sekretaris Kedua Vzhos, Sekretaris Ketiga Sholmov, Sekretaris Ketiga Kurochkin dan Sekretaris Ketiga Sharobarov dan Atase Yuri Sholmov menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Acara tersebut dihadiri pula oleh Perdana Menteri/Pejabat Sementara Menteri Luar Negeri, Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Kepala Departemen Eropa dan Afrika Nazir Datuk Pamuncak dan Kepala Bagian Protokol R.M.A. Kusumo Atmojo.²²⁸

²²⁷.Ibid.

²²⁸.Ibid.

D. Opening Diplomatic Relations Between Indonesia and the USSR

On January 25, 1950, Soviet Foreign Minister A. Vyshinsky sent a written communication to Prime Minister and Foreign Minister Moch. Hatta, stating that the USSR recognized the independence and sovereignty of Indonesia and expressed a desire to establish diplomatic relations with the country. The Indonesian government welcomed this initiative.

In May 1950, an Indonesian delegation led by N. Palar, along with members Yusuf Wibisono, Yamin, and Hadinoto, visited Moscow for negotiations. The results of these discussions were presented at a Cabinet meeting attended by President Sukarno on May 16, 1950, which included an agreement to open embassies and a positive response from the USSR regarding Indonesia's entry into the United Nations (UN).

During the 8th UN General Assembly in September 1953, Indonesian Foreign Minister Sunarjo informed Soviet Foreign Minister A. Vyshinsky of the Indonesian government's desire to open an embassy in the USSR. On November 30, 1953, Minister Sunarjo formally communicated this intention in writing. In response, on December 17, 1954, A. Vyshinsky conveyed to Sunarjo that the USSR government positively welcomed Indonesia's proposal and was prepared to accept the Indonesian Ambassador in Moscow. The USSR was also ready to establish its diplomatic representation in Jakarta.

On January 21, 1954, the USSR government granted approval for Dr. Soebandrio to serve as the Indonesian Ambassador in Moscow. On April 13, 1954, Dr. Soebandrio, accompanied by Kumoro, Hudiono Sujoko, Gusti Rusli Noor, Supeno, and Sukanto, presented his credentials to the Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, Voroshilov, in the Kremlin. Present at the ceremony were also Soviet Deputy Foreign Minister Fedorenko, Head of the Protocol Division Molochkov, and Head of the Southeast Asia Department Maksimov. At that time, the Indonesian Embassy temporarily operated from the Metropol Hotel before moving to a building at 14 Sadovo-Somatechnaya Street. Since the 1960s, the embassy has been located at 12-14 Novokuznetskaya Street, not far from Red Square and the Kremlin.

On May 24, 1954, the Indonesian government approved the appointment of D. Zhukov as the USSR Ambassador in Jakarta. On August 19, 1954, the first group of Soviet diplomats, consisting of Second Secretary Vzhos and Attaché Sholmov, arrived in Jakarta to prepare for the opening of the Soviet diplomatic mission. They temporarily stayed at the former Dutch hotel "Des Indes," which was known to have previously housed the first Russian Consulate, led by M. Bakunin (1894-1899).

On September 14, 1954, D. Zhukov, the head of the Soviet representation, arrived in Jakarta, where he was welcomed by Kusumo Utoyo, the Head of Protocol of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. On September 20, 1954, D. Zhukov, accompanied by Second Secretary Vzhos, Third Secretary Sholmov, Third Secretary Kurochkin, Third Secretary Sharobarov, and Attaché Yuri Sholmov, presented his credentials to President Sukarno. The event was also attended by the Prime Minister and Acting Foreign Minister Ali Sastroamidjojo, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Ruslan Abdulgani, Head of the European and African Department Nazir Datuk Pamuncak, and Head of the Protocol Division R.M.A. Kusumo Atmojo.

E. Bantuan URRSS terhadap Indonesia

Tahun 1956-1962 merupakan puncak "kemesraan" hubungan Indonesia-URSS yang tercermin dari kedekatannya hubungan kedua kepala negara dengan adanya saling kunjung. Pada tanggal 28 Agustus-12 September 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956 dihadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi URSS seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdulgani dan Wakil Menteri Luar Negeri URSS Gromyko menandatangani Kesepakatan Bersama (*Joint Statement*). Pada bulan Juni 1961 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke URSS dan pada tahun 1957 Ketua Presidium URSS Tertinggi K.Y. Voroshilov serta pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khushev berkunjung ke Indonesia. Hasil dari saling kunjung tersebut dicapai kesepakatan-

kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, seperti pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek dan pemasokan peralatan militer dari URRSS untuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan bantuan URRSS seperti pembangunan Rumah Sakit "Persahabatan", stadion "Gelora Bung Karno", Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja dan fasilitas-fasilitas lainnya.²²⁹

E. USSR Assistance to Indonesia

The years 1956-1962 marked the peak of the "intimacy" in relations between Indonesia and the USSR, characterized by close ties between the leaders of both countries, highlighted by mutual visits. From August 28 to September 12, 1956, President Sukarno visited Moscow. During this visit, on September 11, 1956, in front of President Sukarno and senior Soviet officials such as Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich, and Malenkov, Indonesian Foreign Minister Ruslan Abdulgani and Soviet Deputy Foreign Minister Gromyko signed a Joint Statement.

In June 1961, President Sukarno made another visit to the USSR, while in 1957, Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet K.Y. Voroshilov visited Indonesia, followed by Prime Minister Nikita Khrushchev in February 1960. These reciprocal visits resulted in agreements to enhance relations and cooperation across various fields, including politics, economics, social culture, humanitarian efforts, and military matters.

The USSR provided financial assistance, contributed to various development projects, and supplied military equipment to Indonesia. Notable projects included the construction of the "Friendship" Hospital, Gelora Bung Karno Stadium, Hotel Indonesia, as well as the building of roads, bridges, and airports in several regions of Indonesia. The USSR also assisted in the establishment of steel mills and other facilities, significantly contributing to Indonesia's infrastructure development during this period.

²²⁹.Ibid.

F. Peran URRSS dalam Pembebasan Irian Barat

Masalah Irian Barat merupakan salah satu dasar kedekatan hubungan Indonesia dengan URRSS. Pemerintahan Presiden Soekarno berupaya untuk mengakhiri secara tuntas sisa-sisa kolonialisme Belanda di bumi Pertiwi, terutama di Irian Barat. Pada tahun 1952 Belanda secara sepihak memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³⁰

Indonesia memerlukan Angkatan Bersenjata dengan peralatan militer yang kuat untuk menjaga terjadinya perang terbuka dengan Belanda. Indonesia harus memilih pendekatan kepada USA atau URRSS untuk pengadaan peralatan militer, karena kedua negara tersebut sedang terjadi PD dan saling berebut pengaruh terhadap negara-negara lain yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” tidak memihak pada salah satu blok. Sebelumnya Indonesia melakukan penjajakan pengadaan peralatan militer dari USA, namun demikian tidak berhasil mengingat Belanda adalah sekutunya. Kemudian Indonesia mencoba melakukan penjajakan ke URRSS dan mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah URRSS. Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI A.H. Nasution di Moskow, Perdana Menteri Nikita Khrushchev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer di URRSS. Pada tanggal 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962 peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi kuat yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam, pesawat tempur dan peralatan militer lainnya. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat

²³⁰.Ibid.

diselesaikan melalui jalan damai dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.²³¹

F. *The Role of the USSR in the Liberation of West Irian*

The issue of West Irian was a significant factor in the close relationship between Indonesia and the USSR. Under President Sukarno's administration, efforts were made to thoroughly eliminate the remnants of Dutch colonialism in the Indonesian archipelago, particularly in West Irian. In 1952, the Dutch unilaterally incorporated West Irian into their territory, while Indonesia maintained that West Irian was an inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

To prevent open conflict with the Dutch, Indonesia required a strong armed forces equipped with military hardware. The country faced a dilemma of whether to approach the USA or the USSR for military procurement, as both nations were competing for influence in developing countries, including Indonesia, during the Cold War. Adhering to a foreign policy principle of "active non-alignment," Indonesia sought to avoid siding with either bloc. Initially, Indonesia explored the possibility of acquiring military equipment from the USA; however, this effort was unsuccessful due to the USA's alliance with the Dutch.

Subsequently, Indonesia turned its attention to the USSR and received a warm welcome from the Soviet government. During a meeting in Moscow with TNI General A.H. Nasution, Premier Nikita Khrushchev stated that Indonesia could obtain all the necessary military equipment from the USSR. On December 28, 1960, Indonesia signed a contract for the procurement of military equipment, and by early 1962, shipments of military supplies began arriving in Indonesia continuously.

Within a short period, the Indonesian Armed Forces grew stronger, equipped with submarines, fighter aircraft, and other military equipment. Given this development, the issue of West Irian could be resolved peacefully, allowing West Irian to return to the embrace of the Motherland.

²³¹.Ibid.

G. Hubungan di Era Orde Baru

Pada tahun 1965 Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru. Pada awal Orde Baru hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan URRSS tidak begitu dekat seperti terjadi pada awal tahun 1960-an, karena itu, URRSS seolah-olah jauh dari “radar” Indonesia, namun demikian upaya-upaya untuk mengatasi kemandekan hubungan bilateral terus berlangsung. Terobosan untuk memajukan kembali hubungan kedua negara dimulai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke URRSS pada tanggal 7-12 September 1989, di mana ditandatangani Pernyataan mengenai Dasar-dasar Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Indonesia dengan URRSS pada tanggal 11 September 1989. Dokumen tersebut mempunyai arti penting yang menggariskan dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama guna mengembangkan lagi kerjasama di berbagai bidang.

G. Relations During the New Order Era

In 1965, Indonesia faced significant social and political turmoil, culminating in the events of the September 30th Movement (Gerakan 30 September) led by the Communist Party of Indonesia (PKI). Following the successful resolution of this crisis, Indonesia embarked on a national commitment to economic development that required substantial foreign investment, international trade, and assistance from advanced industrial nations, particularly from the West. This marked the beginning of the New Order era. At the outset of the New Order, relations and cooperation between Indonesia and the USSR were not as close as they had been in the early 1960s; thus, the USSR seemed to be off Indonesia's diplomatic radar. Nevertheless, efforts to revitalize bilateral relations continued. A breakthrough occurred during President Suharto's visit to the USSR from September 7 to 12, 1989.

During this visit, a Declaration on the Principles of Friendly Relations and Cooperation between Indonesia and the USSR was signed on September 11, 1989. This document was significant as it outlined the foundations for friendship and cooperation, aimed at further developing collaboration in various fields. It represented an important step in re-establishing ties and fostering a renewed spirit of partnership between the two nations during the New Order period.

H. Hubungan setelah URRSS Bubar

Pada tahun 1990-an terjadi perubahan geopolitik di fora internasional yang ditandai runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya URRSS sebagai bukti berakhirnya “Perang Dingin” yang mempunyai dampak pada hubungan Indonesia dan Federasi Rusia (FR). URRSS dibentuk pada tanggal 30 Desember 1922, dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 1991. Pada tanggal 28 Desember 1991 melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozyrev, Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” (*legal successor*) URRSS.

Memasuki tahun 1990-an hubungan kedua negara mulai menunjukkan peningkatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan. Pada tahun 1991 Deputy Perdana Menteri Yury Maslyukov melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada tahun 1997 Menteri Koordinator Bidang Keuangan, Ekonomi dan Industri Ginanjar Kartasmita dan Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie berkunjung ke Federasi Rusia (FR), sementara itu, kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri FR semakin erat yang didasarkan pada Protokol Konsultasi Bersama yang ditandatangani pada tahun 1988. Menteri Luar Negeri kedua negara sering melakukan pertemuan dalam berbagai kegiatan, seperti pada saat Sidang Umum PBB atau dalam pertemuan-pertemuan organisasi internasional lainnya.

Keinginan kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan dan persahabatan tercermin dengan adanya keinginan untuk memperbaharui Pernyataan mengenai Dasar-

dasar Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Indonesia dengan URRSS yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Presiden Mikhail Gorbachev pada tanggal 11 September 1989. Suatu rancangan deklarasi telah dipersiapkan untuk ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Boris Yeltsin ke Indonesia pada tahun 1997, namun demikian kunjungan tersebut tidak terlaksana. Di penghujung abad XX, tepatnya pada tahun 1997-1998 kedua negara menghadapi masalah dalam negeri sebagai dampak dari krisis ekonomi.

H. Relations After the Dissolution of the USSR

In the 1990s, the international geopolitical landscape underwent significant changes, marked by the fall of the Berlin Wall and the dissolution of the USSR, which signaled the end of the Cold War. The USSR, established on December 30, 1922, officially dissolved on December 25, 1991. On December 28, 1991, Indonesian Foreign Minister Ali Alatas sent a letter to Foreign Minister Andrei Vladimirovich Kozyrev, officially recognizing the Russian Federation as the "legal successor" to the USSR. Entering the 1990s, relations between Indonesia and Russia began to improve in various sectors, including education, social, cultural, economic, and trade. In 1991, Deputy Prime Minister Yury Maslyukov visited Indonesia. In 1997, Indonesia's Coordinating Minister for Finance, Economy, and Industry Ginanjar Kartasasmita, along with Minister of Research and Technology B.J. Habibie, visited the Russian Federation. Meanwhile, cooperation between the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and the Russian Foreign Ministry became increasingly close, based on a Joint Consultation Protocol signed in 1988. The foreign ministers of both countries frequently met during various events, such as the UN General Assembly and other international organization meetings. The desire of both countries to enhance their relationship and friendship was reflected in the intention to renew the Declaration on the Principles of Friendly Relations and Cooperation between Indonesia and the USSR, signed by President Suharto and President Mikhail Gorbachev on September 11, 1989. A draft declaration was prepared for signing during President Boris Yeltsin's planned visit to Indonesia in 1997; however, this visit did not take place. By the end of the 20th century,

particularly in 1997-1998, both countries faced internal challenges due to the economic crisis.

I. Hubungan pada Abad Milenium

Memasuki abad Milenium hubungan dan kerjasama Indonesia dengan FR memasuki babak baru dan mengalami peningkatan yang signifikan yang ditandai dengan saling kunjung Kepala Negara dan para pejabat pemerintahan kedua negara, serta saling dukung di forum internasional. Hubungan dan kerjasama bilateral tidak hanya tercipta pada tingkat *government to government (G to G contact)*, namun demikian pada tingkat-tingkat lainnya, yakni pada tingkat antar pelaku usaha (*B to B contact*), antar masyarakat (*P to P contact*), antar media massa, antar tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.

Pada tingkat tinggi telah tercatat beberapa kali pertemuan antara kedua kepala negara yakni (a) pertemuan pertama antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Abdurrahman Wahid di sela-sela “Summit Millenium” di New York, September 2000; (b) pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela forum APEC di Sanghai, Oktober 2001; (c) pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarnoputri pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 20-22 April 2003; (d) pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela forum APEC di Busan, 19 November 2005; (e) pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, 29 November-1 Desember 2006; (f) pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan Presiden Putin ke Indonesia, 6 September 2007.

I. Relations in the New Millennium

Entering the new millennium, Indonesia's relationship and cooperation with the Russian Federation (RF) entered a new chapter, marked by significant improvements characterized by reciprocal visits between heads of state and government officials from both countries, as well as mutual support in international forums. Bilateral relations and cooperation expanded beyond government-to-government (G to G) contacts to include business-to-business (B to B) interactions, people-to-people (P to P) exchanges, media cooperation, and collaborations among religious leaders and civil society organizations.

At the high-level meetings, several notable encounters between the heads of state were recorded: (a) the first meeting between President Vladimir Putin and President Abdurrahman Wahid during the Millennium Summit in New York in September 2000; (b) the meeting between President Vladimir Putin and President Megawati Soekarnoputri during the APEC forum in Shanghai in October 2001; (c) the meeting between President Putin and President Megawati during her visit to Russia from April 20 to 22, 2003; (d) the meeting between President Putin and President Susilo Bambang Yudhoyono at the APEC forum in Busan on November 19, 2005; (e) the meeting during President Yudhoyono's visit to Russia from November 29 to December 1, 2006; and (f) the meeting between President Putin and President Yudhoyono during Putin's visit to Indonesia on September 6, 2007.

These interactions reflect the evolving dynamics of Indonesia-Russia relations in various fields, promoting greater collaboration and understanding between the two nations in the 21st century.

J. Poros Jakarta-Tingkok-Moskow

Pada era 1950-an dan awal 1960-an, Indonesia berada di tengah-tengah dinamika politik global yang ditandai dengan PD antara Blok Barat yang dipimpin oleh USA dan Blok Timur yang dipimpin oleh URRSS. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengambil sikap yang unik dalam lanskap

geopolitik tersebut yang dikenal sebagai "poros Jakarta-Peking-Moskow."²³²

Istilah "poros Jakarta-Peking-Moskow" mencerminkan kedekatan politik dan ideologi Indonesia dengan dua negara besar komunis tersebut yakni URRSS dan Tiongkok yang menunjukkan upaya Soekarno untuk menyeimbangkan pengaruh global dengan memperkuat hubungan dengan Blok Timur, sambil tetap mempertahankan independensi Indonesia dari dominasi kekuatan mana pun juga. URRSS adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan Indonesia di forum internasional. Soekarno melihat URRSS sebagai sekutu strategis untuk membangun kekuatan militer dan ekonomi Indonesia tanpa harus bergantung pada bantuan Barat. URRSS memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Indonesia, termasuk persenjataan canggih seperti pesawat tempur MiG dan kapal selam. Bantuan tersebut membuat Indonesia memiliki salah satu angkatan bersenjata terkuat di Asia Tenggara pada waktu tersebut, yang digunakan Soekarno untuk menekan klaim teritorial, seperti dalam konfrontasi dengan Belanda sehubungan dengan pengembalian Irian Barat (Papua), sedangkan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, juga merupakan sekutu dekat Indonesia selama periode tersebut. Soekarno terinspirasi oleh revolusi Tiongkok dan hubungan personal antara Soekarno dan Mao Zedong sangat baik. Tiongkok mendukung Indonesia dalam berbagai isu internasional dan mereka sering berbagi pandangan anti-imperialis yang kuat. Selain itu, Tiongkok menjadi mitra dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, termasuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan dan jembatan. Soekarno juga mengundang banyak teknisi dan tenaga ahli dari

²³² Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press dinduh Tanggal 4 September 24

Tiongkok untuk membantu mengembangkan industri dan pertanian Indonesia.²³³

J. The Jakarta-Beijing-Moscow Axis

In the 1950s and early 1960s, Indonesia found itself at the center of global political dynamics marked by the Cold War between the Western Bloc, led by the USA, and the Eastern Bloc, led by the Soviet Union (URRSS). Under the leadership of President Sukarno, Indonesia adopted a unique stance within this geopolitical landscape known as the "Jakarta-Beijing-Moscow axis."

The term "Jakarta-Beijing-Moscow axis" reflects Indonesia's political and ideological closeness with the two major communist countries, the URRSS and China, highlighting Sukarno's efforts to balance global influences by strengthening ties with the Eastern Bloc while maintaining Indonesia's independence from any dominant power. The URRSS was one of the first countries to recognize Indonesia's independence and supported its struggle in international forums. Sukarno viewed the URRSS as a strategic ally to build Indonesia's military and economic strength without relying on Western aid.

The URRSS provided significant military assistance to Indonesia, including advanced weaponry such as MiG fighter jets and submarines. This support helped Indonesia develop one of the strongest armed forces in Southeast Asia at the time, which Sukarno used to assert territorial claims, particularly during the confrontation with the Netherlands regarding the return of West Irian (Papua). Meanwhile, China, under Mao Zedong, also served as a close ally of Indonesia during this period. Sukarno was inspired by the Chinese revolution, and his personal relationship with Mao Zedong was very positive. China supported Indonesia on various international issues, and both nations often shared a strong anti-imperialist perspective. Additionally, China became a partner in several development projects in Indonesia, including large infrastructure initiatives such as road and bridge construction. Sukarno also invited many Chinese technicians and experts to assist in developing Indonesia's industry and agriculture.

²³³ Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan, diunduh Tanggal 4 September 24

The Jakarta-Beijing-Moscow axis thus represented a strategic alliance aimed at enhancing Indonesia's sovereignty and development while navigating the complexities of the Cold War era.

K. Tonggak Baru Hubungan Indonesia-Federasi Rusia (FR)

Hubungan bilateral Indonesia-Federasi Rusia (FR) mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Kerangka Kerjasama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan FR dalam Abad ke-21 (*Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century*) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 21 April 2003. Dokumen tersebut membentuk landasan hukum baru hubungan kerjasama strategis dalam tingkatan global, regional dan bilateral. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara tersebut dibahas peluang-peluang yang besar untuk mengaktifkan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, teknologi dan teknik militer.

Persetujuan-persetujuan yang ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rusia adalah Persetujuan kerjasama di bidang Teknologi Antariksa dan Pemanfaatannya antara LAPAN dan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia, Persetujuan kerjasama Teknik-Militer antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia, Persetujuan kerjasama Informasi antara Bank Indonesia dan Bank Sentral FR, Federasi Rusia, Persetujuan kerjasama antara Vnesheconom bank (*the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR*) dan PT. Bank Mandiri, dan Persetujuan kerjasama antara Vneshtorgbank (Bank of Foreign Trade) dan Bank Mandiri.

K. A New Milestone in Indonesia-Russian Federation Relations

The bilateral relationship between Indonesia and the Russian Federation (FR) experienced significant development following the signing of the "Declaration on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century" by President Megawati

Soekarnoputri and President Vladimir Putin during Megawati's visit to Russia on April 21, 2003. This document established a new legal foundation for strategic cooperation at global, regional, and bilateral levels.

During the meeting between the two heads of state, various opportunities were discussed to activate relations between the two countries in the areas of politics, economics, trade, technology, and military engineering. This marked a pivotal moment in Indonesia-Russia relations, signaling a commitment to deepening cooperation across multiple sectors.

Agreements signed during President Megawati Soekarnoputri's visit to Russia included:

- 1. Cooperation in Space Technology and Its Utilization between LAPAN (National Institute of Aeronautics and Space) and the Russian Space Agency.*
- 2. Military-Technical Cooperation between the Indonesian government and the Russian government.*
- 3. Information Cooperation between Bank Indonesia and the Central Bank of the Russian Federation.*
- 4. Cooperation between Vnesheconombank (the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR) and PT. Bank Mandiri.*
- 5. Cooperation between Vneshtorgbank (Bank of Foreign Trade) and Bank Mandiri.*

These agreements laid the groundwork for enhanced collaboration in various fields, underscoring a renewed commitment to building a strategic partnership that aligns with both nations' interests in the 21st century.

L. Kerjasama Berbagai Bidang

Pada tahun 2010 Indonesia dan FR merayakan 60 Tahun Hubungan Diplomatik. Berbagai kegiatan diselenggarakan baik di Indonesia maupun di Rusia yakni (a) pemberian ucapan selamat kedua kepala negara; (b) *roundtable discussion: "60 Years Indonesia-Russia Relations, Achievements, Opportunities and Challenges"* pada bulan April 2010 di Moskow; (c) kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI ke Rusia bulan Mei 2010; (d) festival Budaya Indonesia Tim Kesenian Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata RI, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada bulan Mei 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tver dan St. Petersburg), sedangkan pagelaran budaya Indonesia (a) Tim Kesenian Sumatera Utara pada bulan Mei 2010 di Moskow; (b) pameran lukisan Bali karya seniman-seniman Rusia pada bulan April-Mei 2010 di Moskow; (c) think-tank Seminar: “Advancing Indonesia-Russia” pada bulan Juni 2010 di Jakarta; (d) penerbitan buku “Sahabat Lama Era Baru” pada bulan Juni 2010 di Jakarta; (e) Indonesian Culinary Week pada bulan Juli 2010 di Moskow; (f) promosi budaya dan ekonomi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2010 di Moskow; (g) pemberian penghargaan kepada “Friends of Indonesia” pada bulan Agustus 2010 di Moskow; (h) pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian ISI Bali pada bulan Agustus 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tula dan Kazan).

L. Cooperation in Various Fields

In 2010, Indonesia and Russia celebrated 60 Years of Diplomatic Relations. Various activities were organized both in Indonesia and Russia, including: (a) congratulatory messages from both heads of state; (b) a roundtable discussion titled “60 Years Indonesia-Russia Relations, Achievements, Opportunities and Challenges” held in April 2010 in Moscow; (c) a visit by the Indonesian Minister of Culture and Tourism to Russia in May 2010; (d) an Indonesian Cultural Festival featuring the Arts Team from the Indonesian Ministry of Culture and Tourism, DKI Jakarta, and DI Yogyakarta in May 2010 across three cities in Russia (Moscow, Tver, and St. Petersburg); (e) cultural performances by the North Sumatra Arts Team in May 2010 in Moscow; (f) an exhibition of Balinese paintings by Russian artists in April-May 2010 in Moscow; (g) a think-tank seminar titled “Advancing Indonesia-Russia” in June 2010 in Jakarta; (h) the publication of the book “Old Friends, New Era” in June 2010 in Jakarta; (i) the Indonesian Culinary Week in July 2010 in Moscow; (j) promotion of culture and economy from North Sulawesi in July 2010 in Moscow; (k) the awarding of “Friends of Indonesia” in August 2010 in Moscow; (l) cultural performances by the ISI Bali Arts Team in August 2010 in three cities in Russia (Moscow, Tula, and Kazan).

M. Kerjasama Perdagangan

Pada kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Rusia bulan September 2010 diadakan kegiatan yakni (a) business Forum Indonesia-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow dan St. Petersburg; (b) 15 peluncuran *Artistic Stamped Envelop* dalam rangka 60 Tahun RI-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow; (c) pameran dagang dan Investasi pada bulan Mei dan September 2010 di Moskow; (d) kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Rusia pada bulan Oktober 2010; (e) pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2010 di empat kota Rusia (Vladimir, Moskow, Kazan dan St. Petersburg); (f) Penerbitan *commemorative cover* 60 tahun Hubungan Indonesia-Rusia pada bulan November 2010 di Jakarta; (g) round Table Discussion: “Years End Conference 2010” pada bulan Desember di Moskow.

M. Trade Cooperation

During the visit of the Indonesian Minister of Trade to Russia in September 2010, several activities were held, including: (a) the Indonesia-Russia Business Forum in September 2010 in Moscow and St. Petersburg; (b) the launch of 15 Artistic Stamped Envelopes in commemoration of 60 Years of Indonesia-Russia Relations in September 2010 in Moscow; (c) a trade and investment exhibition in May and September 2010 in Moscow; (d) the visit of the Indonesian Minister of Foreign Affairs to Russia in October 2010; (e) cultural performances by the South Sulawesi Arts Team in October 2010 in four cities in Russia (Vladimir, Moscow, Kazan, and St. Petersburg); (f) the publication of a commemorative cover for 60 Years of Indonesia-Russia Relations in November 2010 in Jakarta; (g) a round table discussion titled “Year-End Conference 2010” in December in Moscow.

N. Kerjasama Parlemen

Kerjasama yang intensif terjalin pula antar parlemen kedua negara. Sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Parlemen kedua negara bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong hubungan langsung antar pejabat tinggi parlemen dan koordinasi dan kerjasama dalam berbagai forum parlemen

internasional dan kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, kedua parlemen selalu berpegang teguh pendirian menghormati sistem politik yang dianut masing-masing negara. Menganut politik co-eksistensi dan tidak mencampuri politik dalam negeri bahkan bilamana diperlukan saling membantu untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara. Kedua parlemen membentuk group kerjasama antar parlemen di FR dan di Indonesia melaksanakan tugas mereka. Pada bulan Juli 2011 Ketua DPR RI Marzuki Ali beserta delegasi berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan Ketua Parlemen Rusia “Duma Negara”.

N. *Parliamentary Cooperation*

Intensive cooperation has also developed between the parliaments of both countries. As stated in the Declaration of the Parliaments of both nations, the two countries agree to promote direct relations between senior parliamentary officials and to coordinate and cooperate in various international and Asia-Pacific parliamentary forums. In addition, both parliaments consistently uphold the principle of respecting the political systems adopted by each country. They adhere to a policy of coexistence and non-interference in domestic politics, and when necessary, assist each other in respecting the sovereignty of each nation. Both parliaments have formed a parliamentary cooperation group in Russia, and in Indonesia, they carry out their duties. In July 2011, the Speaker of the Indonesian House of Representatives, Marzuki Ali, along with a delegation, visited Russia to fulfill an invitation from the Speaker of the Russian Parliament, the State Duma.

O. *Kerjasama Bidang Lainnya*

Peningkatan kerjasama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer, pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan hingga masalah pemilihan umum. Pada bulan Maret 2011 di Moskow Indonesia dan Rusia telah menandatangani *Air Service Agreement*. Selain itu, pada bulan Juni 2011 di Moskow telah

ditandatangani pula perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Federasi Rusia.

O. Cooperation in Other Areas

The enhancement of cooperation between the two countries has not only occurred in the fields of politics, economics, trade, and investment, social and cultural affairs, and education, but also in other areas such as the military, tourism, transportation, disaster management, counter-terrorism, sports, religious affairs, and electoral issues. In March 2011, Indonesia and Russia signed an Air Service Agreement in Moscow. Furthermore, in June 2011, an agreement was also signed in Moscow between the General Elections Commission of the Republic of Indonesia and the Central Election Commission of the Russian Federation.

P. Kerjasama Transportasi Udara, Nuklir, dan Angkasa

Sebelum kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, 1 Desember 2006, Indonesia pada masa PD tanggal 2 Nopember 1961 telah menanda tangani perjanjian transportasi udara timbal balik (*bilateral air transport agreement-BATA*) dengan pemerintah Uni Republik-Republik Soviet (URRSS). Dalam BATA yang terdiri dari 11 Pasal tersebut antara lain diatur maksud dan tujuan, mereka sepakat menunjuk pesawat udara yang memenuhi syarat tehnis maupun operasi, dalam penerbangan harus dilengkapi dengan dokumen penerbangan yang diperlukan, para pihak dapat menolak atau membatalkan perstujuan bilamana pesawat udara yang di gunakan tidak memenuhi syarat teknis dan operasional, barang-barang dibawa dalam transportasi udara yang digunakan dalam penerbangan harus dibebaskan dari pungutan pelayanan maupun bea cukai, menunjuk perusahaan penerbangan nasional masing-masing untuk melaksanakan penerbangan antara Indonesia dengan URRS secara imbal balik, tarif transportasi disetujui oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dan setuju oleh pejabat penerbangan sipil yang berangkutan, perusahaan

penerbangan melakukan pendaratan pada bandar udara yang telah disepakati bersama.²³⁴

Setelah tanggal 28 Desember 1991 URRS bubar maka lahirlah Federasi Rusia (FR), Indonesia melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozyrev, Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” (*legal successor*) URRS. Dalam perkembangannya terjadi perang antara Federasi Rusia (FR) vs Ukraina yang berlanjut, karena itu pemerintah Indonesia tetap bersikap hati-hati dan menyiapkan strategi untuk mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM).²³⁵

Menurut Tutuka Ariadi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi fluktuasi harga minyak mentah tahun 2023 diperkirakan berkisar antara US\$80-90 per barel. Sementara terkait pasokan minyak mentah, Indonesia sebagian besar mengimpor dari Saudi Arabia dan Nigeria yang tidak berhubungan langsung dengan negara konflik, sedangkan untuk BBM, Indonesia mengimpor dari Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut juga tidak berhubungan langsung dengan negara konflik meskipun tidak terdampak langsung dengan negara yang berperang, Indonesia tetap bersikap hati-hati, apalagi akhir-akhir ini produksi minyak Indonesia menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya 600.000 barel per hari, meningkat menjadi sekitar 610.000 hingga 630.000 barel per hari yang disebabkan optimasi produksi yang dilakukan KKKS berjalan dengan baik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.²³⁶

²³⁴ Bilateral Air Transport Agreement of the Republic of Indonesia No.27, Tidak diterbitkan.

²³⁵ Perang Rusia-Ukraina Masih Berlanjut, Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Amankan Pasokan BBM <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/perang-rusia-ukraina-masih-berlanjut-pemerintah-indonesia-siapkan-strategi-amankan-pasokan-bbm> diunduh Tanggal 23 September 2024

²³⁶ Perang Rusia-Ukraina Masih Berlanjut, Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Amankan Pasokan BBM <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/perang-rusia-ukraina-masih-berlanjut-pemerintah-indonesia-siapkan-strategi-amankan-pasokan-bbm>

Pemerintah Indonesia terus mendukung upaya perbaikan kinerja yang dilakukan KKKS. Beberapa lapangan yang permasalahannya seperti itu sudah diidentifikasi dan akan tinjau langsung ke lapangan untuk peningkatan produksi masing-masing KKKS, sedangkan untuk keamanan pasokan BBM dan gas jangka menengah dan panjang, Pemerintah telah mengidentifikasi potensi migas di wilayah utara Sumatera, Bali, Lombok, Selat Makassar, Maluku dan Papua, dengan banyaknya potensi tersebut, berharap memanfaatkan sumber daya gas bumi tersebut sebagai strategi jangka menengah untuk menyelesaikan persoalan impor BBM.²³⁷

Indonesia di samping kerjasama dengan FR dibidang udara, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung FR, 1 Desember 2006 menanda tangani 10 persetujuan, salah persetujuan adalah persetujuan nuklir. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Keselamatan Nuklir, Indonesia berkewajiban melaporkan laporan keselamatan nuklir sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia di bidang keselamatan nuklir (*nuclear safety*). Di dalam Konvensi Keselamatan Nuklir ke-7, yang digelar 27 Maret-7 April 2017, Jazi Eko Istiyanto, Kepala BAPETEN memaparkan laporan tersebut di dalam *Country Group-6*. Di dalam paparannya, beliau menyampaikan berbagai informasi sehubungan dengan kebijakan nuklir nasional. Di samping tersebut dipaparkan pula berbagai misi IAEA yang telah dilaksanakan di Indonesia untuk menilai sejauh mana komitmen terhadap keselamatan nuklir tersebut diterapkan.²³⁸

berlanjut-pemerintah-indonesia-siapkan-strategi-amankan-pasokan-bbm-diunduh
Tanggal 23 September 24

²³⁷.Ibid.

²³⁸ Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama di Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir
Kembali <https://bapeten.go.id/berita/indonesiarusia-perkuat-kerjasama-di-bidang-pengawasan-tenaga-nuklir-134827?lang=en> diunduh Tanggal 23 September
24

Beberapa misi IAEA dimaksud adalah IRRS Mission, Pre-SEED Mission, SEED Mission, dan EPREV Mission yang penting lain yang juga disampaikan Jazi Eko adalah tindak lanjut yang telah dilaksanakan Indonesia setelah konvensi ke-6 terkait dengan kecelakaan Fukushima, termasuk upaya meningkatkan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional, melalui I-CoNSEP (*Indonesia* ²³⁹*Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness*).²⁴⁰

Selain mengikuti berbagai macam kegiatan yang menjadi rangkaian Konvensi Keselamatan Nuklir ke-7, Jazi Eko Istiyanto Kepala BAPETEN juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Agen Federal Pengawasan Lingkungan, Industri, dan Nuklir-Federasi Rusia (*Rostekhnadzor*). Beberapa lingkup yang menjadi poin penting dalam nota kesepahaman tersebut adalah pengembangan kerangka peraturan di bidang keselamatan nuklir dan radiasi dan keamanan nuklir; pengembangan dan implementasi program perizinan, pengkajian, dan inspeksi instalasi nuklir dan fasilitas radiasi; pengembangan peraturan dan pengawasan penambangan dan penggilingan mineral radioaktif; serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat.²⁴¹ Diharapkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, kedua negara akan memperoleh manfaat di bidang pengaturan dan pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi, melalui pertukaran informasi; serta program pengembangan kapasitas melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan.²⁴²

²³⁹ Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama di Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir Kembali <https://bapeten.go.id/berita/indonesiarusia-perkuat-kerjasama-di-bidang-pengawasan-tenaga-nuklir-134827?lang=en> diunduh Tanggal 23 September 24

²⁴⁰.*Ibid.*

²⁴¹.*Ibid.*

²⁴².*Ibid.*

P. Cooperation in Air Transportation, Nuclear, and Space

Before President Susilo Bambang Yudhoyono's visit to Russia on December 1, 2006, Indonesia had signed a bilateral air transport agreement (BATA) with the government of the Soviet Union (USSR) on November 2, 1961. The BATA, which consists of 11 articles, covers various matters, including the purpose and objectives of the agreement, mutual agreement to designate aircraft that meet technical and operational standards, and the requirement for flights to be equipped with necessary flight documents. The parties can refuse or cancel approval if the aircraft used does not meet technical and operational requirements, and items transported in air transport must be exempt from service charges and customs duties. Each party designates its national airline to operate flights between Indonesia and the USSR on a reciprocal basis, and transport tariffs are agreed upon by the designated airlines and approved by the relevant civil aviation authorities, with airlines landing at airports mutually agreed upon.

After the dissolution of the USSR on December 28, 1991, the Russian Federation (RF) was established, and Indonesia, through a letter from the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ali Alatas, to Foreign Minister Andrei Vladimirovich Kozyrev, officially recognized the Russian Federation as the "legal successor" of the USSR. Following this, the ongoing conflict between the Russian Federation and Ukraine has led the Indonesian government to remain cautious and prepare strategies to secure fuel supply.

According to Tutuka Ariadji, the Director General of Oil and Gas, the fluctuation of crude oil prices in 2023 is estimated to range between US\$80-90 per barrel. Regarding crude oil supply, Indonesia primarily imports from Saudi Arabia and Nigeria, which are not directly involved in the conflict, while for fuel, Indonesia imports from Singapore and Malaysia. Both countries also do not have direct relations with the conflict-affected nations. Although not directly impacted by the war, Indonesia remains cautious, especially as recent production levels have shown improvement. Oil production has increased from 600,000 barrels per day to about 610,000 to 630,000 barrels per day due to effective optimization efforts by the Contractor for the Cooperation Contract (KKKS) compared to previous years.

The Indonesian government continues to support efforts to improve performance by the KKKS. Several fields facing issues have been identified, and direct site visits will be conducted for each KKKS to enhance production. For the security of fuel and gas supplies in the medium to long term, the government has identified potential oil and gas resources in northern Sumatra, Bali, Lombok, the Makassar Strait, Maluku, and Papua. With these abundant resources, Indonesia hopes to leverage natural gas as a medium-term strategy to address fuel import issues.

In addition to cooperation with the RF in the aviation sector, following President Susilo Bambang Yudhoyono's visit to the RF on December 1, 2006, 10 agreements were signed, one of which was a nuclear agreement. As a country that has ratified the Nuclear Safety Convention, Indonesia is obligated to report on nuclear safety as part of its commitment to nuclear safety. In the seventh Nuclear Safety Convention held from March 27 to April 7, 2017, Jazi Eko Istiyanto, the head of BAPETEN, presented this report in Country Group-6. In his presentation, he shared various information related to national nuclear policy. He also outlined the various IAEA missions that have been conducted in Indonesia to assess the extent to which commitments to nuclear safety are being implemented.

Some of the IAEA missions mentioned include the IRRS Mission, Pre-SEED Mission, SEED Mission, and the EPREV Mission. Another important aspect communicated by Jazi Eko was the follow-up actions taken by Indonesia after the sixth convention regarding the Fukushima accident, including efforts to improve the national nuclear preparedness system through I-CoNSEP (Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness).

In addition to participating in various activities related to the seventh Nuclear Safety Convention, Jazi Eko Istiyanto, head of BAPETEN, also signed a memorandum of understanding (MoU) with the Federal Environmental, Industrial, and Nuclear Supervision Agency of the Russian Federation (Rostekhnadzor). Some key areas covered in the MoU include the development of a regulatory framework in nuclear safety and radiation protection; the development and implementation of licensing, review, and inspection programs for

nuclear installations and radiation facilities; the development of regulations and oversight for the mining and milling of radioactive minerals; and emergency preparedness and response. It is hoped that with the signing of this MoU, both countries will benefit in the field of nuclear safety and radiation regulation and oversight through information exchange and capacity development programs via seminars, workshops, and training.

Q. Kerjasama Dibidang Pesawat Udara Tempur

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (Bung Karno) militer Indonesia sangat disegani bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di dunia belahan selatan, karena pada masa tersebut alutsista Indonesia yang pengalaman perang gerilya pada masa revolusi. Pada masa perang dingin antara 195-1960 Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Sebagai negara baru, kekuatan militer menjadi penting yang harus dimiliki Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka.²⁴³

Q. Cooperation in Combat Aircraft

During the presidency of Sukarno (Bung Karno), Indonesia's military was highly respected, and some even referred to Indonesia as the largest military power in the Southern Hemisphere. This was due to the experience gained from Indonesia's guerrilla warfare during the revolution. During the Cold War, between 1950 and 1960, Bung Karno had to protect Indonesia from foreign invasions that still aimed to undermine the sovereignty of the nation. As a newly established country, military strength became crucial for Indonesia, not only to ensure national security but also to demonstrate to the world that Indonesia deserved to be an independent nation.

²⁴³ Melihat Kembali Kejayaan Militer Indonesia di Era Bung Karno oleh adminkesbangpol 05 Oktober 2023 37547 views

³⁹ <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/856/melihat-kembali-kejayaan-militer-indonesia-di-era-bung-karno> diunduh Tanggal 24 September 24

R. Kerjasama Alat Perang/Alutsista

Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang/alutsista, bilamana melihat postur pertahanan, pengadaan alutsista Indonesia pada masa Sukarno didominasi oleh impor dari URRSS. Pengadaan alutsista yang sangat masif pada masa Sukarno menyebabkan Indonesia disebut sebagai Macan Asia. Dalam periode tersebut, dua sistem senjata yang paling banyak dimiliki adalah kapal perang dan pesawat udara tempur yang sesuai dengan kondisi geopolitik dimana ada kebutuhan bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang merupakan negara kepulauan. Bantuan URRSS untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer. Mereka membantu Indonesia dengan mengajari struktur militer yang dimiliki URRSS kala tersebut dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia.²⁴⁴

R. Cooperation in Weapons/Defense Equipment

One of Indonesia's strategies to strengthen its military was through the procurement of weapons and defense equipment. Looking at the defense posture, Indonesia's procurement of defense equipment during Sukarno's era was dominated by imports from the USSR. The massive procurement of defense equipment during Sukarno's time led to Indonesia being referred to as the "Tiger of Asia." During this period, the two most commonly possessed weapon systems were warships and combat aircraft, which aligned with Indonesia's geopolitical conditions, as the country needed to defend its status as an archipelagic nation. One of the forms of assistance from the USSR to Indonesia was military training. They helped Indonesia by teaching the military structure of the USSR, which was recognized as a relatively strong country in the eyes of the world at that time.

²⁴⁴ Melihat Kembali Kejayaan Militer Indonesia di Era Bung Karno oleh adminkesbangpol 05 Oktober 2023 37547 views

³⁹ <https://kesbangpol.kulonprogo.go.id/detil/856/melihat-kembali-kejayaan-militer-indonesia-di-era-bung-karno> diunduh Tanggal 24 September 24

S. Kapal Laut untuk Armada AL

Tidak hanya pelatihan, URRSS juga membantu Indonesia membangun armada laut dan angkatan udara RI. Bantuan yang diberikan untuk Indonesia mencapai US\$2,5 milyar dan juga mendapat bantuan berupa 17 kapal perang untuk Angkatan Laut (AL) Indonesia. Saat tersebut Indonesia bahkan memiliki kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov yang dilengkapi dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci, memiliki KRI Irian, yang bernama Ordzhonikidze 310 tersebut dibeli dari URRSS pada tahun 1962 yang berbobot hingga 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira. Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata tabung torpedo, puluhan meriam, dan senjata otomatis.²⁴⁵

S. *Naval Ships for the Navy Fleet*

Not only training, but the USSR also assisted Indonesia in building its naval fleet and air force. The assistance provided to Indonesia amounted to US\$2.5 billion and included 17 warships for the Indonesian Navy (AL). At that time, Indonesia even possessed the largest and fastest warship in the world, a Soviet-made Sverdlov-class ship equipped with 12 giant 6-inch caliber guns. The ship, named KRI Irian, originally known as Ordzhonikidze 310, was purchased from the USSR in 1962, weighing up to 16,640 tons and manned by a crew of 1,270, including 60 officers. The ship was equipped with torpedo tubes, dozens of guns, and automatic weapons.

T. Pesawat Udara Tempur

Angkatan udara Indonesia menjadi angkatan udara paling ditakuti di seluruh dunia. Indonesia dikabarkan memiliki ratusan pesawat udara tempur canggih, yakni 20 pesawat udara pemburu supersonic MiG-21 Fishbed, 30 pesawat udara MiG-15, 49 pesawat udara tempur high-subsonic MiG-17, dan 10 pesawat udara supersonic MiG-19. Pesawat udara tempur jenis MiG-21 Fishbed (Mikoyan-Gurevich MiG-21), buatan ilmuwan URRSS,

²⁴⁵.*Ibid.*

adalah salah satu pesawat udara supersonic paling canggih pada waktu itu, bahkan mengalahkan pesawat udara tercanggih yang dimiliki USA; pesawat udara supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II, seperti P-51 Mustang. Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis TU-16 Tupolev (Badger A dan B) yang membuat Indonesia menjadi salahsatu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun. Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey, yang memiliki penembak peluru kendali, plus 2(dua) kapal sebagai pasokan suku cadang. Kesemuanya pensiun begitu Soekarno jatuh, sedangkan satu buah dijadikan museum di Surabaya.²⁴⁶

Selain itu, Indonesia juga punya puluhan kapal tempur kelas Corvette, 9 helikopter terbesar di dunia MI-6, 41 helikopter MI-4, berbagai pesawat udara pengangkut termasuk pesawat udara pengangkut berat Antonov AN-12B. Bilamana ditotal semuanya, maka Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur. Senjata mesin AK-47, senjata buatan URRSS yang sangat populer pada jamannya, juga pernah dipergunakan oleh angkatan perang Indonesia di era Bung Karno. Alutsista militer Indonesia yang canggih pada saat itu didukung oleh personil militer Indonesia yang militan sehingga kekuatan militer Indonesia era Soekarno sangat disegani dan tidak dapat dianggap remeh. Bahkan, Belanda sampai mau angkat kaki dari Papua karena kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia.²⁴⁷

USA juga sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru URRSS. Maka dari itu, USA mendesak Belanda agar mau menyerahkan Papua ke Indonesia agar perang besar tidak pecah dibelahan bumi selatan, meskipun demikian sehebat apapun sebuah angkatan perang, tetapi kalau tidak dilandasi

²⁴⁶.*Ibid.*

²⁴⁷.*Ibid.*

oleh semangat atau patriotisme, maka itu tidak ada gunanya. Napoleon Bonaparte pernah berkata; “Hanya ada dua kekuatan di dunia ini; pedang dan semangat.”²⁴⁸

T. Combat Aircraft

The Indonesian Air Force became one of the most feared air forces in the world. Indonesia reportedly possessed hundreds of advanced combat aircraft, including 20 supersonic fighter jets MiG-21 Fishbed, 30 MiG-15 aircraft, 49 high-subsonic MiG-17 fighter jets, and 10 supersonic MiG-19 jets. The MiG-21 Fishbed (Mikoyan-Gurevich MiG-21), manufactured by Soviet scientists, was one of the most advanced supersonic aircraft of its time, even surpassing the most advanced aircraft owned by the USA; the supersonic F-104 Starfighter and F-5 Tiger. Meanwhile, the Netherlands still relied on World War II-era aircraft, such as the P-51 Mustang. Indonesia also had a fleet of 26 strategic long-range bombers TU-16 Tupolev (Badger A and B), making Indonesia one of only four nations in the world with strategic bombers, alongside the United States, the Soviet Union, and the United Kingdom. Their base was located at Iswahyudi Airfield in Madiun. Indonesia also possessed 12 Whiskey-class submarines, which had missile-launching capabilities, plus 2 additional submarines for spare parts. All of them were retired after Sukarno fell, while one was turned into a museum in Surabaya.

In addition, Indonesia also had dozens of Corvette-class warships, 9 of the largest helicopters in the world (MI-6), 41 MI-4 helicopters, and various transport aircraft, including the heavy transport aircraft Antonov AN-12B. When totaled, Indonesia had 104 warships. The AK-47, a weapon manufactured by the USSR that was very popular at the time, was also used by the Indonesian military during the Sukarno era. The sophisticated military equipment of Indonesia at that time was supported by highly militant Indonesian military personnel, making Indonesia's military strength during Sukarno highly respected and not to be underestimated. Even the Netherlands was compelled to withdraw from Papua because their strength was no longer comparable to that of Indonesia.

²⁴⁸.Ibid.

The USA was also very concerned about the development of Indonesia's military strength, which was heavily supported by the latest technology from the USSR. As a result, the USA pressured the Netherlands to hand over Papua to Indonesia to prevent a major war from breaking out in the Southern Hemisphere. However, regardless of how powerful a military force is, if it is not grounded in spirit or patriotism, it is of no use. Napoleon Bonaparte once said, "There are only two powers in this world; the sword and the spirit."

U. Pada Masa Kini Indonesia Memiliki Berbagai Pesawat Udara

Pada saat ini militer Indonesia mempunyai berbagai pesawat udara tempur yang dibuat di USA misalnya F-15EX, Pesawat Tempur Rafale, Pesawat Tempur F-16 C/D, Perancis yakni Dassault, di Brazil Pesawat Tempur EMB-134, Militer Indonesia ternyata memiliki pesawat udara tempur yang beragam. Pesawat-pesawat tempur tersebut dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, ada berbagai jenis pesawat udara tempur. Pada 2023 lalu, Indonesia telah mengaktifkan perjanjian pengadaan 48 jet tempur baru yang terdiri dari 24 unit buatan Boeing dan 24 unit jet buatan Dassault Prancis yang berarti militer Indonesia bakal dilengkapi dengan pesawat jet tempur yang baru, namun demikian berdasarkan situs Kementerian Pertahanan dan TNI-AU pesawat jet yang canggih dimiliki Indonesia yakni pesawat udara tempur F-15EX yang dibuat oleh Boeing sebagai varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 dan diakui sebagai yang paling canggih di dunia. Keunggulan dari F-15EX sebagai pesawat udara canggih yakni dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara-ke-udara, bom, hingga senjata khusus lainnya. Kecanggihannya lain yakni (a) dapat membawa hingga 29.500 pound (sekitar 13.380 kilogram) muatan; (b) memiliki mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan lebih; (c) didesain untuk memiliki umur layanan hingga 20.000 jam terbang; (d) memiliki sistem radar canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi; (e) memiliki perlindungan elektronik, termasuk sistem perang elektronik yang canggih

untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang; (f) dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim; (g) dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas, memungkinkannya berkolaborasi dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat udara lain.²⁴⁹

U. Currently, Indonesia Has Various Aircraft

At present, the Indonesian military possesses various combat aircraft manufactured in the USA, such as the F-15EX, Rafale fighter jets, and F-16 C/D. Additionally, there are French Dassault aircraft and Brazilian EMB-134 fighter jets. The Indonesian military has a diverse range of combat aircraft operated by the Indonesian National Armed Forces (TNI) Air Force, which includes different types of fighter jets. In 2023, Indonesia activated an agreement to procure 48 new fighter jets, consisting of 24 units made by Boeing and 24 units manufactured by Dassault of France. This means that the Indonesian military will be equipped with new fighter jets.

However, based on information from the Ministry of Defense and TNI-AU websites, one of the advanced fighter jets in Indonesia's fleet is the F-15EX, produced by Boeing, which is recognized as the latest variant of the F-15 family and regarded as one of the most advanced in the world. The advantages of the F-15EX as a sophisticated aircraft include its capability to carry various types of weapons, ranging from air-to-air missiles and bombs to other specialized armaments. Other advancements include: (a) the ability to carry up to 29,500 pounds (approximately 13,380 kilograms) of payload; (b) modern engines that provide increased speed and agility; (c) designed for a service life of up to 20,000 flight hours; (d) equipped with advanced radar systems and other avionics that allow the aircraft to detect and track targets with high accuracy; (e) electronic protection features, including advanced electronic warfare systems to enhance survival capabilities on the battlefield; (f) capable of performing various

²⁴⁹ Ini Daftar Pesawat Tempur Milik Indonesia, Mana yang Paling Canggih? <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7506795/ini-daftar-pesawat-tempur-milik-indonesia-mana-yang-paling-canggih-diunduh> Tanggal 24 September 24

missions, including air superiority, ground attack, and maritime operations; (g) able to communicate and operate effectively within a broader combat network, enabling collaboration with other systems such as satellites, UAVs, and other aircraft.

1. Pesawat udara Tempur Buatan USA.

Pesawat udara tempur buatan USA adalah (a) pesawat udara tempur kedua yang akan dimiliki Indonesia adalah Rafale. Pesawat tersebut dikenal canggih dengan generasi 4.5, yang menjadi salah satu andalan negara-negara anggota NATO. Pesawat udara tempur tersebut memiliki beberapa keunggulan dan salah satu yang mencolok yakni kompatibilitasnya dengan berbagai macam persenjataan seperti rudal udara-ke-udara jarak jauh "Beyond Visual Range (BVR)" METEOR dan MICA. Pesawat udara Rafale juga termasuk pesawat udara omnirole sehingga mampu melakukan berbagai jenis misi, mulai superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, sampai serangan anti-kapal; (b) Pesawat Tempur F-16 C/D yang dimiliki TNI-AU yang dilengkapi dilengkapi senjata, amunisi tempur, misil, inframerah, hingga rudal udara untuk mrnhmsnksn Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo.

2. Pesawat Tempur EMB-134

Mengutip situs TNI AU, Indonesia diketahui memiliki 16 pesawat Super Tucano, yang bernama lengkap EMB-314 Super Tucano. Pesawat tempur jenis tersebut dibeli dari Pabrikan pesawat asal Brasil, Embraer, pada tahun 2012. Keunggulan EMB-314 Super Tucano antara lain (a) memiliki spesifikasi serangan ringan dengan biaya operasional yang rendah; (b) mampu lepas landas dari landasan non-aspal yang pendek; (c) kokpit pesawat udara dilengkapi teknologi canggih untuk penglihatan malam bagi pilot; (d) sistem avionik yang dirancang oleh Elbit System.

3. Pesawat udara tempur Sukhoi Su-27 dan SU-30

Pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 merupakan pesawat tempur multifungsi, yang efektif dipakai sebagai pesawat serang darat. SU-27 SKM dan SU-30

MK2 diproduksi oleh *Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO)*, yakni anak perusahaan dari grup Sukhoi yang mengembangkan varian Su-30.

Sukhoi SU-35 merupakan model terbaru dari Su-27M Flanker, yang memiliki peningkatan terhadap kemampuan superioritas tempur udara, dan didesain agar bisa menembak berbagai target dengan menggunakan peluru kendali maupun non-kendali.

1. Combat Aircraft Made in the USA

The combat aircraft produced in the USA include: (a) the second combat aircraft that Indonesia will acquire is the Rafale. This aircraft is known for its advanced capabilities as a 4.5 generation fighter and is one of the mainstays of NATO member countries. The Rafale fighter jet has several advantages, with one of the most notable being its compatibility with various types of weapons, such as the long-range air-to-air missiles "Beyond Visual Range (BVR)" METEOR and MICA. The Rafale is also classified as an omnirole aircraft, capable of performing a variety of missions, including air superiority and air defense, close air support, deep strike, aerial reconnaissance, and anti-ship attacks; (b) The F-16 C/D fighter jets operated by the TNI-AU are equipped with weapons, combat munitions, infrared missiles, and air-to-air missiles, and have been utilized in preparation for the ASEAN Summit (KTT) in Labuan Bajo.

2. EMB-134 Fighter Aircraft

According to the TNI AU website, Indonesia is known to have 16 Super Tucano aircraft, officially named EMB-314 Super Tucano. These fighter jets were purchased from the Brazilian manufacturer Embraer in 2012. The EMB-314 Super Tucano has several advantages, including (a) lightweight attack specifications with low operational costs; (b) the ability to take off from short, unpaved runways; (c) the cockpit is equipped with advanced technology for night vision for pilots; (d) avionics systems designed by Elbit Systems.

3. Sukhoi Su-27 and Su-30 Fighter Aircraft

The Sukhoi Su-27 SKM and Su-30 MK2 are multifunctional fighter aircraft, effective for ground attack roles. The SU-27 SKM and SU-30 MK2 are produced by the Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO), a subsidiary of the Sukhoi group that develops the Su-30 variants.

The Sukhoi SU-35 is the latest model of the Su-27M Flanker, which has enhancements in air combat superiority and is designed to engage various targets using both guided and unguided munitions.

V. Kerjasama Indonesia dan Rusia Bidang Nuklir

Menurut sumber yang lain²⁵⁰ perwakilan Rosatom menjelaskan kepada delegasi Indonesia tentang Akademik *Lomonosov*, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung pertama yang dikembangkan dan beroperasi di Rusia, di sela-sela forum ATOMEXPO 2024 di Kota Sochi, menyatakan senang untuk berbagi pengalaman dan keahliannya di bidang nuklir, yang telah ditekuni oleh Rosatom lebih dari 80 tahun tersebut. Rosatom sebagai BUMN energi nuklir Rusia, menyatakan siap berbagi pengalaman dengan Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk mendukung transisi ke energi bersih. Menurut Anna Belokoneva Perwakilan Rosatom di Indonesia, ketika ditemui di sela-sela pameran dan forum industri nuklir global ATOMEXPO 2024 di Sochi, Rusia, nuklir adalah masa depan karena hanya dengan nuklir dapat menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan dunia dengan nol emisi karbon.²⁵¹ Pengembangan tenaga nuklir juga bekerjasama dengan perusahaan listrik URRSS Raoues.

²⁵⁰ Rusia siap berbagi pengalaman dengan RI untuk kembangkan energi nuklir <https://www.antaranews.com/berita/4030296/rusia-siap-berbagi-pengalaman-dengan-ri-untuk-kembangkan-energi-nuklir> diunduh Tanggal 23 September 24

²⁵¹ Rusia siap berbagi pengalaman dengan RI untuk kembangkan energi nuklir <https://www.antaranews.com/berita/4030296/rusia-siap-berbagi->

Menurut beliau, selama ini FR telah bekerja sama dengan Indonesia, terutama di sektor pendidikan, dengan banyak mahasiswa Indonesia mempelajari teknologi nuklir dan pemanfaatannya langsung di negara tersebut.

Rosatom secara aktif terus menjalin komunikasi dengan Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir, meskipun belum ada diskusi yang mengarah pada kerja sama konkret tertentu. Mereka senang untuk berbagi pengalaman dan keahlian di bidang nuklir, yang telah ditekuni oleh Rosatom lebih dari 80 tahun tersebut. Kirill Komarov Direktur Pengembangan dan Bisnis Internasional, mengungkapkan makin banyak negara menyadari pentingnya pemanfaatan energi nuklir. Secara global, teknologi nuklir Rosatom telah hadir di sejumlah besar negara seperti Turki, Mesir, India, Bangladesh, Tiongkok, dan Belarusia dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut Kirill Komarov makin banyak negara di dunia yang meyakini bahwa energi nuklir tidak hanya akan bertahan lama, tetapi akan berkembang pesat dan kepercayaan diri mereka dalam pemanfaatan nuklir pun makin meningkat. Berdasarkan perkiraan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pembangkit listrik tenaga nuklir akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2050, yang akan memproduksi 9 persen dari total bauran energi global.²⁵²

V. Cooperation Between Indonesia and Russia in the Nuclear Sector

According to other sources, representatives from Rosatom explained to the Indonesian delegation about the Akademik Lomonosov, the first floating nuclear power plant (NPP) developed and operated in Russia. During the ATOMEXPO 2024 forum in Sochi, they expressed their pleasure in sharing their experience and expertise in the nuclear field, which Rosatom has pursued for more than 80 years. As a state-

pengalaman-dengan-ri-untuk-kembangkan-energi-nuklir diunduh Tanggal 23 September 24

²⁵².Ibid.

owned nuclear energy company in Russia, Rosatom stated its readiness to share its experience with Indonesia to develop nuclear technology to support the transition to clean energy. According to Anna Belokoneva, a representative of Rosatom in Indonesia, who was met during the global nuclear industry exhibition and forum ATOMEXPO 2024 in Sochi, Russia, nuclear energy is the future because it is only through nuclear that we can address climate change and achieve a world with zero carbon emissions. The development of nuclear energy is also in collaboration with the Soviet Union's electric company Raoues.

She noted that the Russian Federation has been cooperating with Indonesia, particularly in the education sector, with many Indonesian students studying nuclear technology and its applications directly in that country. Rosatom continues to actively communicate with Indonesia to develop nuclear technology, although there have been no discussions leading to specific concrete cooperation yet. They are eager to share their experience and expertise in the nuclear field, which Rosatom has mastered for over 80 years. Kirill Komarov, the Director of Development and International Business, revealed that more countries are recognizing the importance of utilizing nuclear energy. Globally, Rosatom's nuclear technology has been implemented in numerous countries such as Turkey, Egypt, India, Bangladesh, China, and Belarus, and they are exploring cooperation with countries in Southeast Asia, including Indonesia. According to Kirill Komarov, an increasing number of countries around the world believe that nuclear energy will not only last long but will also develop rapidly, and their confidence in utilizing nuclear energy is growing. Based on estimates from the International Atomic Energy Agency (IAEA), nuclear power plants are expected to grow 2.5 times by 2050, producing 9 percent of the total global energy mix.

W. Kerjasama Senjata Indonesia-Rusia

Pada lawatan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Moskow saat tersebut agenda utama dalam perbincangan kedua pemimpin negara Indonesia dan Federasi Rusia (FR) memberikan kredit untuk pembelian alat utama sistem senjata (*alutsista*), termasuk pesawat tempur SU-27, kapal selam Kelas Kilo dan heli serbu Mi 35. Makmur Keliat pengamat militer yang juga pakar

hubungan internasional mencatat kerjasama tersebut merupakan respon jangka pendek terhadap berbagai hal untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap peralatan militer Amerika. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pembelian persenjataan dari FR tersebut penting untuk menjaga keseimbangan politik pertahanan Indonesia, di samping memberikan keuntungan teknis dari sisi teknologi. Dalam kunjungannya di Negara Beruang Merah tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan FR, sehingga Indonesia dapat memperoleh kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada tahun 1960-an, Indonesia pernah menggunakan alutsista buatan URRSS. Kehadiran alat utama sistem pertahanan URRSS tersebut di masa lalu menyumbang keberhasilan Angkatan Laut dan Udara Indonesia. Menurut Makmur Keliat dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia (HI-UI) menyayangkan, kerjasama tersebut tidak tampak adanya upaya alih teknologi dari USSR untuk industri militer di Indonesia.²⁵³

W. Indonesia-Russia Weapon Cooperation

During President Susilo Bambang Yudhoyono's visit to Moscow, the main agenda in discussions between the leaders of Indonesia and the Russian Federation (RF) was to provide credit for the purchase of primary weaponry systems (alutsista), including the SU-27 fighter jets, Kilo-class submarines, and Mi-35 attack helicopters. Military observer and international relations expert Makmur Keliat noted that this cooperation was a short-term response to various factors aimed at reducing Indonesia's dependence on American military equipment. Previously, Defense Minister Juwono Sudarsono stated that the purchase of weapons from the RF was essential to maintain Indonesia's defense political balance, as well as providing technical advantages in terms of technology.

²⁵³ Kerjasama Senjata Indonesia-Rusia <https://www.dw.com/id/kerjasama-senjata-indonesia-rusia/a-2956696> diunduh Tanggal 23 September 24

During his visit to the Bear Country, President Yudhoyono expressed gratitude for the RF's support, which allowed Indonesia to obtain a non-permanent seat on the United Nations Security Council. In the 1960s, Indonesia had previously used military equipment produced by the USSR. The presence of these primary defense systems from the USSR in the past contributed to the strength of Indonesia's Navy and Air Force. According to Makmur Keliat from the University of Indonesia's International Relations Department, he regretted that there seemed to be no efforts for technology transfer from the USSR for the military industry in Indonesia.

X. Kerjasama di Bidang Angkasa

Selain di bidang nuklir, militer, senjata tersebut diatas, Indonesia juga melakukan kerjasama di bidang ruang angkasa luar. Lokasi Indonesia yang berada di kawasan katulistiwa merupakan lokasi ideal untuk peluncuran satelit. Biak diusulkan menjadi lokasi peluncuran roket di masa mendatang. Indonesia dan URRSS menandatangani perjanjian kerjasama antara perusahaan energi *Gazprom* dan *Lukoil* untuk pemanfaatan proyek minyak dan gas bumi di Kalimantan.

X. Cooperation in Outer Space

*In addition to the fields of nuclear energy, military, and weaponry mentioned above, Indonesia is also engaging in cooperation in the field of outer space. Indonesia's location near the equator makes it an ideal site for satellite launches. Biak has been proposed as a future rocket launch site. Indonesia and the USSR signed cooperation agreements between energy companies *Gazprom* and *Lukoil* for the utilization of oil and natural gas projects in Kalimantan.*

Y. Pembelian Senjata dari Blok Timur

Pada awal 1960-an, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memasuki salah satu periode paling intens dalam hubungan internasionalnya. Hubungan tersebut dibentuk oleh dinamika global PD, dua negara blok besar, USA dengan sekutunya dan URRSS dengan sekutunya di sisi lain berusaha mendapatkan pengaruh di berbagai bagian dunia.

Salah satu manifestasi paling nyata dari ketegangan tersebut di Indonesia adalah keputusan Soekarno untuk mulai membeli senjata dari Blok Timur, khususnya URRSS, antara tahun 1961 dan 1964. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia berada dalam posisi yang rentan baik secara politik maupun ekonomi. Negara tersebut masih mencari bentuk pemerintahan yang stabil sambil berurusan dengan berbagai tantangan internal, termasuk ketidakstabilan politik, ancaman separatisme, dan ekonomi yang lemah. Dalam konteks global, Indonesia juga berada dalam posisi yang unik sebagai negara berkembang yang baru merdeka, yang berusaha untuk menavigasi di antara dua kekuatan besar yang bersaing, yakni URRSS dan USA. Presiden Soekarno, dengan visinya tentang sebuah Indonesia yang kuat dan berdaulat, merasa bahwa salah satu cara untuk menegaskan posisi negaranya di panggung internasional adalah dengan memperkuat kemampuan militer Indonesia. Pada awal 1960-an, beliau semakin khawatir dengan ancaman dari dalam dan luar negeri, termasuk kekuatan kolonial yang masih tersisa dan potensi agresi dari negara-negara tetangga. Untuk mengimbangi hal tersebut, Soekarno merasa perlu untuk membangun kekuatan militer yang kuat, dan beliau melihat URRSS sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada saat yang sama, hubungan Indonesia dengan USA mulai memburuk. Soekarno merasa tidak percaya dengan niat USA, yang beliau anggap mendukung status quo kolonial di Asia Tenggara dan kurang mendukung perjuangan Indonesia untuk melawan pengaruh kolonialisme di kawasan tersebut, khususnya dalam konfrontasinya dengan Belanda atas Irian Barat (Papua Barat). Di sisi lain, USA yang dipimpin oleh Presiden Eisenhower dan kemudian Kennedy, juga mencurigai Soekarno yang semakin dekat dengan gerakan komunis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. USA enggan memberikan bantuan militer dalam skala besar kepada Indonesia, terutama karena kekhawatiran bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk mendukung tindakan-tindakan

agresif yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat, seperti upaya merebut Irian Barat dari Belanda atau keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok yang lebih cenderung mendukung negara-negara komunis. Kecurigaan tersebut semakin diperkuat oleh sikap Soekarno yang semakin bersahabat dengan URRSS dan Tiongkok. Melihat sikap USA yang tidak sepenuhnya mendukung ambisi militer Indonesia, Soekarno kemudian mengalihkan perhatiannya ke URRSS. Pada awal 1960-an, URRSS di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan melihat Indonesia sebagai mitra potensial dalam PD. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan US berkembang pesat, dengan serangkaian kunjungan diplomatik yang diikuti oleh kesepakatan-kesepakatan militer.

Pada tahun 1961, Indonesia mulai membeli peralatan militer dalam jumlah besar dari URRSS. Peralatan tersebut mencakup berbagai jenis senjata canggih pada masanya, termasuk menyediakan pesawat udara tempur MiG-21 dan MiG-19 kepada Angkatan Udara Indonesia, yang pada saat tersebut menjadi salah satu angkatan udara terkuat di Asia Tenggara. Pesawat-pesawat tersebut memberikan keunggulan udara yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam konfrontasi dengan Belanda di Irian Barat. Selain pesawat udara tempur, URRSS juga memasok Indonesia dengan kapal perang, termasuk kapal penjelajah kelas Sverdlov, kapal selam, dan kapal perusak yang memperkuat Angkatan Laut Indonesia dan membuatnya mampu menghadapi tantangan maritim dari negara-negara tetangga dan kekuatan kolonial. Indonesia juga membeli tank, kendaraan lapis baja, dan artileri berat dari URRSS yang digunakan untuk memperkuat Angkatan Darat Indonesia. Alat-alat tersebut tidak hanya digunakan untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal tetapi juga untuk menekan gerakan separatis di dalam negeri. Total nilai pembelian senjata dari URRSS mencapai sekitar US\$2,5 miliar yang sebagian besar diberikan dalam bentuk kredit lunak. Ini adalah jumlah yang sangat besar pada saat itu, dan

menunjukkan komitmen URRSS untuk memperkuat hubungan militer dengan Indonesia. Pembelian senjata besar-besaran tersebut mengkhawatirkan USA dan sekutu-sekutunya di Barat yang melihat sebagai tanda bahwa Indonesia semakin condong ke arah Blok Timur dan menjadi ancaman potensial bagi stabilitas di Asia Tenggara, yang merupakan wilayah strategis dalam PD. Ada kekhawatiran bahwa Indonesia, dengan kekuatan militernya yang semakin meningkat, dapat menjadi pemicu konflik regional atau bahkan memperkuat gerakan komunis di Asia Tenggara.²⁵⁴

AS merespons dengan mencoba membatasi pengaruh URRSS di Indonesia. Mereka meningkatkan bantuan ekonomi dan mulai menawarkan program-program pendidikan dan bantuan lainnya untuk menyeimbangkan hubungan dengan Indonesia, namun demikian, hingga awal 1965, hubungan antara Indonesia dan USA tetap tegang, dan Soekarno terus menjalin hubungan erat dengan Blok Timur. Pembelian senjata dari URRSS tersebut berdampak jangka panjang bagi Indonesia. Di samping itu, juga Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya di kawasan dan memproyeksikan kekuatannya dalam perselisihan dengan Belanda mengenai Irian Barat, yang akhirnya berhasil diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1963. Ketergantungan pada Blok Timur juga meningkatkan isolasi Indonesia dari negara-negara Barat, yang melihat Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara satelit URRSS.²⁵⁵

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, ketika kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, Indonesia mengubah orientasi politik luar negerinya secara drastis. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menjauh dari Blok Timur dan kembali mendekat ke USA dan sekutu-sekutunya,

²⁵⁴ McVey, Ruth T. (1971). "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy." *Indonesia*, (11), 131-165, diunduh Tanggal 4 September 24

²⁵⁵ *Foreign Relations of the United States (FRUS). (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office* diunduh Tanggal 4 September 24

yang menyebabkan hubungan militer antara Indonesia dan URSS memudar. Namun, peninggalan senjata dan peralatan militer yang dibeli dari URSS tetap menjadi bagian penting dari angkatan bersenjata Indonesia selama beberapa dekade.

Y. Arms Purchases from the Eastern Bloc

In the early 1960s, Indonesia, under President Sukarno's leadership, entered one of its most intense periods in international relations. This relationship was shaped by the global dynamics of the Cold War, where the two major blocs, the USA with its allies and the USSR with its allies, sought to gain influence in various parts of the world. One of the most tangible manifestations of the USA's tension in Indonesia was Sukarno's decision to begin purchasing arms from the Eastern Bloc, particularly the USSR, between 1961 and 1964.

After gaining independence in 1945, Indonesia found itself in a politically and economically vulnerable position. The country was still searching for a stable form of governance while dealing with various internal challenges, including political instability, separatist threats, and a weak economy. In the global context, Indonesia also occupied a unique position as a newly independent developing nation striving to navigate between the competing powers of the USSR and the USA. President Sukarno, with his vision of a strong and sovereign Indonesia, felt that one way to assert his country's position on the international stage was to strengthen Indonesia's military capabilities.

By the early 1960s, Sukarno was increasingly concerned about threats both internally and externally, including lingering colonial powers and the potential aggression from neighboring countries. To counter these threats, Sukarno felt the need to build a strong military, viewing the USSR as a strategic partner to achieve this goal.

At the same time, Indonesia's relationship with the USA began to deteriorate. Sukarno distrusted the USA's intentions, perceiving them as supportive of the colonial status quo in Southeast Asia and less supportive of Indonesia's struggle against colonial influences in the region, particularly in its confrontation with the Netherlands over West Irian (West Papua). On the other hand, the USA, led first by President Eisenhower and then Kennedy, also grew suspicious of Sukarno, who was increasingly aligned with communist movements

both domestically and internationally. The USA was reluctant to provide large-scale military assistance to Indonesia, mainly due to concerns that the arms could be used to support aggressive actions not aligned with Western interests, such as attempts to seize West Irian from the Netherlands or Indonesia's involvement in the Non-Aligned Movement, which tended to support communist nations. This suspicion was further reinforced by Sukarno's increasingly friendly relations with the USSR and China.

Seeing the USA's lack of full support for Indonesia's military ambitions, Sukarno shifted his focus to the USSR. In the early 1960s, under Nikita Khrushchev's leadership, the USSR sought to expand its influence in Asia and viewed Indonesia as a potential partner in the Cold War. Diplomatic relations between Indonesia and the USSR rapidly developed, with a series of diplomatic visits followed by military agreements.

In 1961, Indonesia began purchasing military equipment in large quantities from the USSR. The equipment included various types of advanced weaponry for its time, such as providing MiG-21 and MiG-19 fighter jets to the Indonesian Air Force, which at that time became one of the strongest air forces in Southeast Asia. These aircraft provided Indonesia with a significant air advantage, especially in the confrontation with the Netherlands over West Irian. In addition to fighter jets, the USSR also supplied Indonesia with warships, including Sverdlov-class cruisers, submarines, and destroyers, which strengthened the Indonesian Navy and enabled it to face maritime challenges from neighboring countries and colonial powers. Indonesia also purchased tanks, armored vehicles, and heavy artillery from the USSR to bolster the Indonesian Army. These tools were not only used to defend the country against external threats but also to suppress separatist movements within. The total value of arms purchases from the USSR reached approximately \$2.5 billion, mostly provided in the form of soft loans. This was a significant amount at the time and indicated the USSR's commitment to strengthening military ties with Indonesia.

The large-scale arms purchases raised concerns for the USA and its Western allies, who viewed it as a sign that Indonesia was increasingly leaning towards the Eastern Bloc and becoming a potential

threat to stability in Southeast Asia, a strategically important region in the Cold War. There were fears that Indonesia, with its increasing military strength, could become a catalyst for regional conflict or even strengthen communist movements in Southeast Asia.

The USA responded by attempting to limit the USSR's influence in Indonesia. They increased economic aid and began offering educational programs and other assistance to balance relations with Indonesia. However, by early 1965, relations between Indonesia and the USA remained tense, and Sukarno continued to forge close ties with the Eastern Bloc. The arms purchases from the USSR had long-term effects for Indonesia, asserting its sovereignty in the region and projecting its strength in disputes with the Netherlands over West Irian, which was ultimately successfully integrated into Indonesian territory in 1963. Dependence on the Eastern Bloc also increased Indonesia's isolation from Western countries, which viewed Indonesia as potentially becoming a satellite state of the USSR.

After the G30S/PKI events in 1965, when power shifted from Sukarno to Suharto, Indonesia dramatically changed its foreign policy orientation. The New Order government under Suharto distanced itself from the Eastern Bloc and moved closer to the USA and its allies, leading to a decline in military relations between Indonesia and the USSR. However, the legacy of the weapons and military equipment purchased from the USSR remained an important part of the Indonesian armed forces for decades.

Z. Transportasi Udara di Indonesia

Ideopolitik Indonesia pada saat perang dingin cenderung sosialis yang dibuktikan dengan Poros Jakarta-Peking yang sekarang bernama Beijing, oleh karena itu transportasi dilakukan oleh pemerintah seperti di URRSS dan Tiongkok. Di URRSS transportasi udara diatur oleh *Civil Aviation Administration* yang merupakan pejabat pemerintah sedangkan operator dilakukan oleh *Aeroflot* milik pemerintah juga. Rute penerbangan, prekuensi penerbangan, kapasitas tempat duduk dan tarif ditentukan oleh pemerintah misi operator untuk mendukung kebijakan publik, mengabaikan keuntungan operator, *Aerflot* terbang di Indonesia walaupun hanya mengangkut 6 (enam)

anggota diplomatik, demikian pula Tingkok penerbangan sipil diatur oleh pemerintah (*civil aviation of China*), operatornya juga milik pemerintah. Indonesia pada masa perang dingin kebijakannya juga cenderung sosialis regulasi ddiatur oleh Djawatan Penerbangan Sipil (DPS) dipimpin oleh Ir Soetomo sebagai KPS pada waktu itu DPS merupakan bgian dari Kementerian Perjaan Umum seperti berlaku di Belanda, karena itu regulasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, operatornya *Garuda Indonesian Airways* yang didirikan berdasarkan akte noataris Raden Kadiiman No.137 tanggal 31 Maret 1950 dan *Mermapti Nusantara Airline* semuanya milik pemerintah.²⁵⁶ Semua rute penerbangan, prekuensi penerbangan, jenis pesawat udara, kapasitas tempat duduk dan tarif ddiatur sepenuhnya oleh Djawatan Penerbangan Sipil (DPS) dalam kapasitasnya sebagai penguasa penerbangan.

Kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966, menggantikan Presiden Soekarno. Di bawah Soekarno, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung konfrontatif dan anti-Barat, serta mendekatkan diri dengan blok komunis, terutama URRSS dan Republik Rakyat Tiongkok, namun demikian di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan berubah berubah secara drastis, terutama dalam konteks PD yang saat tersebut masih berlangsung. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Perekonomian hancur, inflasi sangat tinggi, dan ketegangan sosial-politik mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang diduga kuat terkait dengan PKI. Dalam suasana penuh kekacauan tersebut, Soeharto mulai melakukan konsolidasi kekuasaan dengan membangun pemerintahan yang lebih terpusat dan mengedepankan stabilitas sebagai prioritas utama.

²⁵⁶ Martono K.,Amad Sudiro.,Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No.Tahun 2009.Jakrta: Penerbit Rjagrafindo,2012 hal.8

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Soeharto menyadari bahwa dukungan dari negara-negara Barat, terutama USA, sangat penting untuk mengamankan stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri yang mendorong Soeharto untuk melakukan penyesuaian besar terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah berhasil meminggirkan Soekarno dan menghapuskan pengaruh PKI, Soeharto mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya ke arah yang lebih pro-Barat yang ditandai dengan beberapa langkah penting yakni Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Negara-Negara Barat. Soeharto membuka kembali jalur diplomatik yang lebih intensif dengan negara-negara Barat, terutama USA, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Sebelumnya, di bawah Soekarno, hubungan tersebut sempat memburuk akibat kebijakan konfrontatif Soekarno.

Soeharto menyadari pentingnya bantuan ekonomi dari negara-negara Barat untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada tahun 1967, Indonesia bergabung kembali dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang kemudian memberikan pinjaman besar kepada Indonesia. Soeharto juga mengundang investasi asing, terutama dari negara-negara Barat, untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Soeharto mengadopsi kebijakan anti-komunis yang sangat keras yang menjadi landasan bagi hubungan yang erat dengan USA, yang pada saat tersebut sangat mendukung rezim-rezim yang anti-komunis di seluruh dunia. Penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya di Indonesia juga mendapatkan dukungan diam-diam dari USA. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Tenggara. ASEAN dianggap sebagai upaya untuk membendung pengaruh komunis di kawasan ini, dan organisasi tersebut didukung penuh oleh USA.

Z. Air Transportation in Indonesia

During the Cold War, Indonesia's ideopolitics leaned towards socialism, as evidenced by the Jakarta-Beijing axis (formerly Peking). Consequently, air transportation was managed by the government similarly to that in the USSR and China. In the USSR, air transportation was regulated by the Civil Aviation Administration, a government body, while operations were handled by Aeroflot, a state-owned enterprise. Flight routes, frequency, seating capacity, and tariffs were determined by the government to support public policy, disregarding the operators' profits. Aeroflot operated in Indonesia, even if it only transported six diplomatic members. Similarly, in China, civil aviation was regulated by the government, with operations also run by state-owned enterprises.

During the Cold War, Indonesia's policies were also socialist in nature. The regulations were overseen by the Djawatan Penerbangan Sipil (DPS), led by Ir. Soetomo as the KPS at that time. DPS was part of the Ministry of Public Works, similar to practices in the Netherlands, meaning that regulations were entirely government-controlled. The operators were Garuda Indonesian Airways, established by notarial deed Raden Kadiiman No. 137 on March 31, 1950, and Mermpati Nusantara Airlines, all of which were state-owned. All flight routes, frequency, aircraft types, seating capacity, and tariffs were fully regulated by DPS in its capacity as the aviation authority.

Indonesia's foreign policy underwent significant changes after Suharto rose to power in 1966, replacing President Sukarno. Under Sukarno, Indonesia had a confrontational and anti-Western foreign policy, aligning itself more closely with the communist bloc, especially the USSR and the People's Republic of China. However, under Suharto's leadership, the policy changed drastically, particularly in the context of the ongoing Cold War.

When Suharto took power, Indonesia was in a very unstable condition. The economy was devastated, inflation was extremely high, and socio-political tensions peaked with the events of the September 30th Movement (G30S) in 1965, strongly suspected to be linked to the Indonesian Communist Party (PKI). In this chaotic atmosphere, Suharto began consolidating power by establishing a more centralized government, prioritizing stability.

In terms of foreign policy, Suharto recognized that support from Western countries, particularly the USA, was crucial for securing political and economic stability domestically. This understanding led Suharto to make significant adjustments to Indonesia's foreign policy direction. After successfully sidelining Sukarno and eliminating the PKI's influence, Suharto shifted Indonesia's foreign policy towards a more pro-Western stance marked by several important steps, including reopening diplomatic relations with Western countries. He established more intensive diplomatic ties with Western nations, particularly the USA, the UK, and Western European countries, which had deteriorated under Sukarno's confrontational policies.

Suharto understood the importance of economic aid from Western countries to improve Indonesia's economy. In 1967, Indonesia rejoined the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, which subsequently provided substantial loans to Indonesia. Suharto also invited foreign investment, especially from Western countries, to assist in Indonesia's economic development. He adopted a very stringent anti-communist policy, which formed the basis for close relations with the USA, which at the time strongly supported anti-communist regimes worldwide. The crackdown on PKI members and sympathizers in Indonesia also received covert support from the USA. In 1967, Indonesia became one of the founding countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional organization aimed at strengthening economic, political, and security cooperation in Southeast Asia. ASEAN was seen as an effort to contain communist influence in the region and was fully supported by the USA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Martono K., Amad Sudiro., Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009. Jakrta: Penerbit Rjagrafindo, 2012 hal.8

ARTIKEL

Foreign Relations of the United States (FRUS). (1961-1963). Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office diunduh Tanggal 4 September 24

JURNAL

Volume XXIII, Southeast Asia. United States Government Printing Office diunduh Tanggal 4 September 24

LAIN-LAIN

Bilatera Air Transport Agreement of the Republic of Indonesia No.27, Tidak diterbitkan.

Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
<https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu> diunduh Tanggal 22 September 24

Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama di Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir
Kembali
<https://bapeten.go.id/berita/indonesiarusia-perkuat-kerjasama-di-bidang-pengawasan-tenaga-nuklir-134827?lang=en> diunduh Tanggal 23 September 24

Ini Daftar Pesawat Tempur Milik Indonesia, Mana yang Paling Canggih? <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7506795/ini-daftar-pesawat-tempur-milik-indonesia-mana-yang-paling-canggih> diunduh Tanggal 24 September 24

Kahin, G. M. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press diunduh Tanggal 4 September 24

- Kerjasama Senjata Indonesia-Rusia
<https://www.dw.com/id/kerjasama-senjata-indonesia-rusia/a-2956696> diunduh Tanggal 23 September 24
- Martono K., Perang Dingin, KAA(1955), Hukum Angkasa dan Serpihan Roket di Kalimantan Barat, Webinar diselenggarakan oleh Universitas Tanjung Pura Pontianak tanggal 24 Pebruari 2024
- McVey, Ruth T. (1971). "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy." *Indonesia*, (11), 131-165, diunduh Tanggal 4 September 24
- Melihat Kembali Kejayaan Militer Indonesia di Era Bung Karno oleh adminkesbangpol 05 Oktober 2023 37547 views 39
<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/856/melihat-kembali-kejayaan-militer-indonesia-di-era-bung-karno>
 diunduh Tanggal 24 September 24
- Negara Soviet Madiun
https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Negara_Sovyet_Madiun
 diunduh Tanggal 21 September 24
- Perang Rusia-Ukraina Masih Berlanjut, Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Amankan Pasokan BBM
<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/perang-rusia-ukraina-masih-berlanjut-pemerintah-indonesia-siapkan-strategi-amankan-pasokan-bbm> diunduh Tanggal 23 Septebmer 24
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan, diunduh Tanggal 4 September 24
- Rusia siap berbagi pengalaman dengan RI untuk mengembangkan energi nuklir
<https://www.antaranews.com/berita/4030296/rusia-siap-berbagi-pengalaman-dengan-ri-untuk-kembangkan-energi-nuklir> diunduh Tanggal 23 September 24

Tidak Benar Soviet di Balik Peristiwa Madiun 1948.
<https://news.detik.com/berita/d-1463760/tidak-benar-soviet-di-balik-peristiwa-madiun-1948> diunduh Tanggal 21
September 24

BAB

5

KESIMPULAN

CONCLUSION

Hukum udara dan hukum angkasa memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai dinamika hubungan internasional, baik dalam situasi konflik maupun perdamaian. Hukum ini, yang mencakup aturan-aturan terkait penggunaan wilayah udara dan ruang angkasa, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi penerbangan dan eksplorasi ruang angkasa. Hukum udara dan hukum angkasa mengatur berbagai aspek, mulai dari transportasi udara, keamanan penerbangan, eksplorasi ruang angkasa, hingga penggunaan satelit, yang secara langsung mempengaruhi sektor-sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.²⁵⁷

Keberadaan dan penerapan hukum ini tidak hanya berlaku pada masa damai, tetapi juga berperan krusial saat terjadi persengketaan antarnegara. Hukum udara dan hukum angkasa menjadi instrumen vital dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas internasional, baik di waktu damai maupun saat konflik muncul.²⁵⁸

Hukum udara dan hukum angkasa merupakan dua bidang hukum yang semakin mendapatkan perhatian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi penerbangan dan eksplorasi ruang angkasa. Dalam konteks internasional, peran kedua hukum ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kelangsungan hubungan antarnegara. Baik dalam situasi konflik

²⁵⁷ ICAO (International Civil Aviation Organization) - *Chicago Convention* (1944)

²⁵⁸ K. Martono. (2015). *Hukum Udara Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

maupun damai, hukum udara dan hukum angkasa tidak hanya mencakup aspek teknis penerbangan atau eksplorasi luar angkasa, tetapi juga memengaruhi dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan suatu negara.²⁵⁹

Air law and space law hold a crucial role in various dynamics of international relations, both in situations of conflict and peace. These laws, encompassing regulations related to the use of airspace and outer space, have evolved alongside advancements in aviation technology and space exploration. Air and space law regulate various aspects, including air transportation, flight safety, space exploration, and satellite use, directly impacting sectors such as economy, society, culture, politics, and security.

The existence and application of these laws are not only relevant during peacetime but also play a critical role when disputes arise between countries. Air and space law serve as vital instruments in maintaining balance and international stability, whether in times of peace or when conflicts emerge.

Air law and space law are two legal fields that are increasingly gaining attention with the rapid development of aviation technology and space exploration. In the international context, the roles of these laws are essential in maintaining stability, security, and continuity in inter-state relations. Whether in situations of conflict or peace, air and space law encompass not only the technical aspects of aviation or space exploration but also influence the political, economic, social, cultural, and defense dynamics of a country.

Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, hukum udara dan angkasa berfungsi sebagai kerangka yang memungkinkan negara-negara dan perusahaan swasta mengakses sumber daya di udara dan luar angkasa secara aman dan adil. Di era globalisasi ini, pesawat dan satelit memainkan peranan penting dalam transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Aturan yang mengatur penggunaan wilayah udara internasional, serta pengelolaan satelit dan objek lain

²⁵⁹ The Outer Space Treaty (1967) - Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

di angkasa luar, memberikan landasan hukum yang memungkinkan negara-negara melakukan perdagangan lintas batas dan eksplorasi ruang angkasa tanpa menimbulkan konflik. Hukum udara dan angkasa berfungsi sebagai penetralisir ketegangan ekonomi dengan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap negara atau entitas.²⁶⁰

Hukum udara dan hukum angkasa tidak hanya membatasi diri pada aspek-aspek teknis, tetapi juga memberikan kerangka untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks mobilitas global dan eksplorasi angkasa. Misalnya, dalam era modern, penerbangan internasional telah menjadi jembatan penting bagi perdagangan global, migrasi tenaga kerja, serta pariwisata internasional, yang semuanya diatur oleh hukum udara. Di sisi lain, hukum angkasa memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam eksplorasi angkasa dan mendapatkan manfaat ekonomi dari teknologi luar angkasa, meskipun dengan keterbatasan teknis dan finansial.²⁶¹

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, hukum udara dan hukum angkasa memainkan peran sentral sebagai kerangka yang memungkinkan negara-negara dan perusahaan swasta mengakses sumber daya di udara dan luar angkasa secara aman, adil, dan berkelanjutan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pesawat dan satelit telah menjadi tulang punggung penting dalam transportasi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Hukum udara dan hukum angkasa menyediakan dasar hukum yang diperlukan untuk pengaturan penggunaan wilayah udara internasional serta pengelolaan satelit dan objek lain di angkasa luar. Hal ini memberikan kepastian hukum yang memungkinkan negara-negara dan entitas swasta menjalankan perdagangan lintas batas dan melakukan eksplorasi ruang angkasa tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan.

Lebih jauh lagi, hukum udara dan hukum angkasa tidak hanya mencakup aspek teknis operasional, tetapi juga memfasilitasi

²⁶⁰ Bin Cheng (1997) - *Studies in International Space Law*

²⁶¹ K. Martono. (2017). *Hukum Angkasa dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(2), 123-145.

stabilitas ekonomi global dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap negara atau entitas diakui dan dihormati. Dalam ranah hukum udara, ketentuan ini mencakup hak negara untuk mengatur wilayah udara mereka sendiri, hak lalulintas udara internasional, serta prosedur untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran wilayah udara. Dengan demikian, negara-negara memiliki rujukan hukum yang jelas dalam mengatur pesawat yang melintas atau memasuki wilayah udara mereka, termasuk pesawat komersial yang membawa penumpang, barang, atau komoditas lainnya. Aturan-aturan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan meluncurkan perdagangan internasional.

Di sisi lain, hukum angkasa memberikan landasan untuk eksplorasi dan pemanfaatan angkasa luar dengan cara yang adil, khususnya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya teknologi dan finansial negara-negara berkembang. Hukum ini, yang berlandaskan prinsip bahwa ruang angkasa merupakan "milik bersama umat manusia," membuka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam program luar angkasa dan mengambil manfaat ekonomi dari teknologi luar angkasa. Dalam hal ini, perjanjian internasional seperti Traktat Luar Angkasa 1967 menetapkan prinsip bahwa ruang angkasa dan benda langit lainnya tidak boleh menjadi wilayah kedaulatan negara manapun, dan setiap negara memiliki hak untuk mengakses ruang angkasa secara bebas, asalkan untuk tujuan damai. Ini memungkinkan semua negara, termasuk yang tidak memiliki kapabilitas teknologi yang tinggi, untuk memperoleh manfaat dari eksplorasi angkasa, baik secara langsung melalui partisipasi mereka sendiri, maupun secara tidak langsung melalui kerja sama dengan negara lain.

Selain berfungsi sebagai penetralisir ketegangan ekonomi, hukum udara dan hukum angkasa juga memberikan landasan untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks mobilitas global dan eksplorasi angkasa. Penerbangan internasional, misalnya, telah menjadi sarana utama bagi perdagangan global, migrasi tenaga kerja, serta pariwisata internasional. Hukum udara

mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan mobilitas ini, termasuk keselamatan dan keamanan penumpang, perlindungan terhadap hak-hak pekerja di sektor penerbangan, dan bahkan perlindungan data pribadi penumpang. Di sini, hukum udara berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu sekaligus memastikan operasi yang aman dan efisien di sektor penerbangan.

Lebih luas lagi, dalam konteks eksplorasi luar angkasa, hukum angkasa memiliki ketentuan-ketentuan yang memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan penggunaan sumber daya angkasa dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap umat manusia. Aspek lingkungan luar angkasa, misalnya, menjadi perhatian yang semakin penting karena meningkatnya jumlah satelit dan benda buatan manusia yang diluncurkan ke orbit. Ketentuan mengenai mitigasi sampah antariksa, perlindungan dari bahaya tabrakan di orbit, dan perlindungan lingkungan luar angkasa menjadi bagian dari hukum ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ruang angkasa sebagai sumber daya bersama yang lestari bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, hukum udara dan hukum angkasa memberikan struktur dan panduan penting dalam pengelolaan sumber daya udara dan angkasa. Dengan adanya hukum ini, negara-negara dan entitas swasta dapat berpartisipasi dalam ekonomi global, baik melalui jalur udara maupun melalui eksplorasi luar angkasa, dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi dan dihormati. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi global, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia di era mobilitas global dan eksplorasi ruang angkasa yang semakin pesat.

Economy

In the economic context, air and space law serve as frameworks enabling countries and private companies to access resources in the air and outer space safely and fairly. In this era of globalization, airplanes and satellites play crucial roles in transportation, communication, and trade. Regulations governing the use of international airspace, as well as the management of satellites and other objects in outer space, provide a legal

foundation that allows countries to engage in cross-border trade and space exploration without generating conflict. Air and space law act as neutralizers of economic tensions by clarifying the rights and obligations of each country or entity.

Air and space law not only focus on technical aspects but also provide frameworks to protect human rights within the context of global mobility and space exploration. For example, in the modern era, international aviation has become an essential bridge for global trade, labor migration, and international tourism – all governed by air law. On the other hand, space law offers developing countries opportunities to participate in space exploration and gain economic benefits from space technology, despite technical and financial limitations.

In an increasingly integrated global economy, air and space law play a central role as frameworks enabling countries and private companies to access resources in air and outer space in a safe, fair, and sustainable manner. With rapid technological advancements, airplanes and satellites have become vital backbones in international transportation, communication, and trade. Air and space law provide the necessary legal basis for regulating the use of international airspace and managing satellites and other outer space objects. This legal certainty enables countries and private entities to engage in cross-border trade and conduct space exploration without causing conflict or tension.

Moreover, air and space law do not only encompass operational technical aspects but also facilitate global economic stability by ensuring that the rights and obligations of each country or entity are recognized and respected. In air law, these provisions include the rights of countries to regulate their own airspace, international air traffic rights, and procedures for resolving disputes that may arise due to airspace violations. Thus, countries have clear legal references for regulating aircraft crossing or entering their airspace, including commercial planes carrying passengers, goods, or other commodities. These rules are essential for maintaining market stability and facilitating international trade.

On the other hand, space law provides a foundation for fair exploration and utilization of outer space, especially considering the technological and financial limitations of developing countries. Based on the principle that outer space is the “common heritage of mankind,” space law opens opportunities for developing countries to participate in space

programs and benefit economically from space technology. International treaties like the 1967 Outer Space Treaty set forth the principle that outer space and celestial bodies cannot become the sovereign territory of any country, and every nation has the right to freely access outer space for peaceful purposes. This allows all countries, including those with limited technological capability, to benefit from space exploration – either directly through their own participation or indirectly through cooperation with other countries.

In addition to serving as a neutralizer of economic tensions, air and space law also provide a foundation for protecting human rights in the context of global mobility and space exploration. For example, international aviation has become a primary means for global trade, labor migration, and international tourism. Air law governs various aspects related to mobility, including passenger safety and security, the protection of workers' rights in the aviation sector, and even the protection of passengers' personal data. Here, air law serves to protect individual rights while ensuring safe and efficient operations in the aviation sector.

Furthermore, in the context of space exploration, space law contains provisions ensuring that exploration activities and the use of space resources are conducted with regard to their impact on humanity. Environmental aspects of outer space, for instance, are of increasing concern as the number of satellites and human-made objects launched into orbit grows. Provisions on space debris mitigation, protection from collision hazards in orbit, and environmental protection of outer space are part of this law, aiming to preserve outer space as a sustainable shared resource for future generations.

Overall, air and space law provide essential structures and guidelines for managing air and space resources. With these laws in place, countries and private entities can participate in the global economy, whether through air routes or space exploration, with confidence that their rights and obligations are protected and respected. Thus, these laws not only support global economic development but also promote the principles of justice, sustainability, and human rights in an era of increasing global mobility and space exploration.

Sosial dan Budaya

Hukum udara dan angkasa juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Transportasi udara internasional, yang diatur oleh hukum udara, mempertemukan orang-orang dari berbagai budaya, meningkatkan interaksi lintas budaya, dan memfasilitasi pertukaran informasi serta ide. Di ruang angkasa, pengiriman sinyal televisi, radio, dan layanan internet yang bergantung pada satelit, juga diatur oleh hukum angkasa, yang memungkinkan masyarakat global untuk saling terhubung. Perkembangan ini memperkuat kerja sama internasional dan menciptakan platform yang lebih inklusif untuk pertukaran budaya dan sosial.

Secara sosial dan budaya, hukum udara mendukung kerjasama global dalam bidang pariwisata dan pertukaran budaya. Regulasi penerbangan internasional memungkinkan terjalinnya hubungan antarkebudayaan melalui peningkatan akses terhadap destinasi internasional. Hukum udara juga mengatur hal-hal seperti perlindungan hak-hak penumpang dan keamanan penerbangan, yang memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi udara.

Hukum angkasa turut berperan dalam memperkuat konektivitas sosial melalui teknologi satelit yang mendukung telekomunikasi global, internet, serta layanan GPS. Ini memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk terhubung secara real-time, melampaui batasan geografis. Selain itu, hukum angkasa juga mengatur aktivitas penelitian ilmiah yang melibatkan negara-negara dari seluruh dunia, menciptakan wadah untuk kerjasama budaya dan pendidikan lintas negara.²⁶²

Hukum udara dan hukum angkasa memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk interaksi sosial dan budaya di seluruh dunia. Dalam konteks transportasi udara internasional, yang diatur oleh hukum udara, dunia menjadi semakin terhubung. Dengan adanya peraturan internasional yang mengatur penerbangan komersial, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dapat bertemu dan saling bertukar ide, nilai, serta perspektif. Hal ini

²⁶² U.N. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

meningkatkan interaksi lintas budaya, yang kemudian memperkaya pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya di dunia. Di sisi lain, hukum angkasa memungkinkan masyarakat global saling terhubung melalui layanan yang disediakan oleh satelit, seperti televisi, radio, dan internet. Dengan akses global terhadap informasi dan hiburan, masyarakat dari berbagai negara dapat mengikuti perkembangan budaya di belahan dunia lain, menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan memperkuat kohesi sosial.

Dalam bidang pariwisata dan pertukaran budaya, hukum udara memberikan dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih luas antara masyarakat dari berbagai negara. Regulasi penerbangan internasional, misalnya, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai destinasi internasional dengan mudah dan aman. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga pada peningkatan pemahaman budaya dan sosial di antara negara-negara. Pertukaran budaya yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata ini memperkuat kerja sama internasional dan menumbuhkan rasa saling menghormati antarbudaya. Di samping itu, hukum udara juga mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penumpang, keamanan penerbangan, dan kenyamanan perjalanan. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki jaminan keselamatan dan hak-hak mereka terlindungi saat menggunakan layanan transportasi udara.

Sementara itu, hukum angkasa memainkan peranan penting dalam memperkuat konektivitas sosial melalui teknologi satelit yang mendukung berbagai layanan telekomunikasi global, termasuk internet, telepon, dan GPS. Teknologi ini memungkinkan masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung secara real-time, melampaui batas-batas geografis yang ada. Bagi banyak negara dan komunitas terpencil, akses terhadap telekomunikasi satelit memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar, sehingga mempercepat arus informasi, membuka peluang edukasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya hukum angkasa yang mengatur

penggunaan satelit, konektivitas ini dapat terus berfungsi dengan baik tanpa mengganggu satelit milik negara atau entitas lain, menciptakan ruang untuk hubungan lintas negara yang aman dan teratur.

Selain aspek komunikasi, hukum angkasa juga mendukung kegiatan penelitian ilmiah internasional yang melibatkan kolaborasi dari berbagai negara. Aktivitas penelitian ilmiah di angkasa, seperti eksplorasi luar angkasa dan studi perubahan iklim melalui satelit, memberikan landasan bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi bagi tantangan global. Hukum angkasa menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan para ilmuwan dari berbagai negara untuk berkolaborasi dalam penelitian, saling berbagi data dan penemuan, serta mempromosikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan bersama. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat kerja sama budaya dan pendidikan antarbangsa, karena melibatkan transfer pengetahuan, teknologi, dan budaya ilmiah dari berbagai latar belakang.

Lebih jauh lagi, hukum angkasa memungkinkan masyarakat global untuk terhubung secara kultural melalui pertukaran informasi yang didukung teknologi satelit. Banyak acara budaya seperti festival musik, pertunjukan olahraga internasional, dan upacara budaya yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui jaringan satelit, memungkinkan masyarakat dari berbagai negara untuk merasakan dan menghargai keragaman budaya. Hukum angkasa menjamin bahwa layanan ini dapat diakses oleh masyarakat secara adil dan tanpa gangguan, sehingga budaya dan tradisi dari satu negara dapat disaksikan oleh masyarakat di belahan dunia lainnya, menciptakan pengalaman budaya yang inklusif dan mendekatkan masyarakat global.

Secara keseluruhan, hukum udara dan hukum angkasa berperan penting dalam memfasilitasi konektivitas sosial dan budaya global. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek-aspek teknis dalam penerbangan dan eksplorasi angkasa, tetapi juga mendukung kerangka kerja yang memungkinkan interaksi lintas budaya, saling berbagi informasi, dan kolaborasi internasional

dalam berbagai bidang sosial dan budaya. Dengan adanya hukum ini, masyarakat di seluruh dunia dapat saling terhubung, belajar, dan bekerja sama dengan lebih mudah, aman, dan teratur. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, hukum udara dan hukum angkasa menjadi dasar yang penting untuk memperkuat hubungan antarbudaya dan menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis.

Social and Cultural

Air and space law also impact social and cultural aspects. International air transportation, regulated by air law, brings together people from diverse cultures, enhancing cross-cultural interaction and facilitating the exchange of information and ideas. In outer space, the transmission of television signals, radio, and internet services reliant on satellites is also governed by space law, allowing global communities to connect. These developments strengthen international cooperation and create more inclusive platforms for cultural and social exchange.

Socially and culturally, air law supports global collaboration in tourism and cultural exchange. International flight regulations enable the establishment of intercultural relationships through increased access to international destinations. Air law also governs aspects such as passenger rights protection and flight safety, providing assurances for communities using air transportation.

Space law plays a role in enhancing social connectivity through satellite technologies that support global telecommunications, internet services, and GPS. This allows communities worldwide to connect in real time, transcending geographical boundaries. Additionally, space law regulates scientific research activities involving countries worldwide, creating a platform for cross-national cultural and educational cooperation.

Air and space law significantly shape social and cultural interactions globally. In the context of international air transportation governed by air law, the world becomes increasingly interconnected. With international regulations overseeing commercial flights, people from various cultural backgrounds can meet and exchange ideas, values, and perspectives. This enhances cross-cultural interaction, enriching understanding and appreciation of global cultural diversity. On the other hand, space law enables global communities to connect through satellite

services such as television, radio, and the internet. With global access to information and entertainment, people from different countries can follow cultural developments elsewhere, creating a more inclusive community and reinforcing social cohesion.

In the realms of tourism and cultural exchange, air law provides the basis for broader interactions among societies from different countries. For example, international flight regulations facilitate easy and safe access to various international destinations. The impacts are not only on economic growth through tourism but also on increased cultural and social understanding among nations. The cultural exchange resulting from tourism activities strengthens international cooperation and fosters mutual respect among cultures. Additionally, air law regulates aspects related to the protection of passenger rights, flight safety, and travel comfort. These provisions are vital for ensuring that communities have safety assurances and that their rights are protected when using air transportation services.

Meanwhile, space law plays a crucial role in enhancing social connectivity through satellite technologies that support various global telecommunications services, including the internet, telephony, and GPS. These technologies enable communities worldwide to connect in real time, transcending existing geographical limitations. For many countries and remote communities, access to satellite telecommunications allows them to stay connected with the outside world, facilitating the flow of information, opening educational opportunities, and improving the quality of life. With space law regulating satellite use, this connectivity can continue to function effectively without interfering with the satellites of other countries or entities, creating a safe and orderly space for cross-national relationships.

Beyond communication aspects, space law also supports international scientific research activities involving collaboration among various countries. Scientific research activities in space, such as space exploration and climate change studies through satellites, provide a foundation for countries to collaborate in seeking solutions to global challenges. Space law creates a framework that allows scientists from different nations to collaborate in research, share data and discoveries, and promote science for the common good. This collaboration not only enriches scientific knowledge but also strengthens cultural and educational

cooperation among nations, as it involves the transfer of knowledge, technology, and scientific culture from diverse backgrounds.

Furthermore, space law enables global communities to connect culturally through information exchange supported by satellite technology. Many cultural events, such as music festivals, international sporting events, and cultural ceremonies, are broadcast live worldwide via satellite networks, allowing people from various countries to experience and appreciate cultural diversity. Space law ensures that these services can be accessed fairly and without disruption, allowing the culture and traditions of one country to be witnessed by communities in other parts of the world, creating inclusive cultural experiences and bringing global communities closer together.

Overall, air and space law play crucial roles in facilitating global social and cultural connectivity. These laws not only regulate technical aspects of aviation and space exploration but also support frameworks enabling cross-cultural interaction, information sharing, and international collaboration in various social and cultural fields. With these laws in place, communities worldwide can connect, learn, and collaborate more easily, safely, and orderly. In an evolving globalization era, air and space law provide an essential foundation for strengthening intercultural relationships and creating a more inclusive and harmonious world.

Politik

Dalam bidang politik, hukum udara dan hukum angkasa memiliki peran yang sangat strategis. Penguasaan wilayah udara dan angkasa sering kali menjadi elemen yang menentukan dalam hubungan antarnegara, terutama saat terjadi konflik atau ketegangan geopolitik. Dalam persengketaan wilayah udara, hukum udara memastikan bahwa hak-hak setiap negara dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan udara, sementara dalam konteks eksplorasi ruang angkasa, hukum angkasa berfungsi untuk menghindari dominasi satu negara atas sumber daya di luar angkasa. Pada masa damai, aturan-aturan ini memperkuat dialog

diplomatik, mendorong transparansi, serta memastikan bahwa tidak ada negara yang melanggar batas yang disepakati.²⁶³

Dalam konteks politik internasional, hukum udara dan hukum angkasa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keadilan antarnegara. Penguasaan wilayah udara dan angkasa sering kali menjadi elemen kunci dalam hubungan antarnegara, terutama ketika menyangkut keamanan dan kedaulatan nasional. Hukum udara menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas wilayah daratan dan perairannya, dan ini merupakan prinsip fundamental yang diakui dalam hukum internasional. Ketika terjadi persengketaan atau pelanggaran wilayah udara, hukum udara memberikan pedoman mengenai hak-hak setiap negara dalam melindungi wilayah udaranya. Sebagai contoh, pesawat asing yang masuk tanpa izin ke wilayah udara suatu negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut. Dengan demikian, hukum udara tidak hanya melindungi integritas teritorial suatu negara, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk menjaga ketertiban dalam interaksi lintas batas, baik pada masa damai maupun saat terjadi ketegangan.

Di luar batas-batas atmosfer, hukum angkasa memainkan peran yang mirip tetapi dengan prinsip yang lebih kompleks. Mengingat bahwa ruang angkasa adalah wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun, hukum angkasa menekankan prinsip bahwa ruang angkasa merupakan "warisan bersama umat manusia." Hal ini berarti bahwa tidak ada negara yang memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas wilayah atau benda langit tertentu. Prinsip ini dirumuskan dalam Traktat Luar Angkasa 1967, yang mengatur bahwa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya angkasa harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan dengan tujuan damai. Dengan aturan ini, hukum angkasa mencegah dominasi satu negara atas sumber daya di luar angkasa, seperti air es di bulan atau mineral di asteroid, yang diprediksi memiliki nilai ekonomi tinggi di masa depan. Prinsip ini

²⁶³ Katherine McKenzie (2015) - *Space Diplomacy: International Relations and the Outer Space Treaty*

menumbuhkan semangat kolaborasi internasional dalam eksplorasi angkasa, sekaligus mencegah potensi konflik terkait kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya angkasa.

Pada masa damai, hukum udara dan hukum angkasa juga berfungsi untuk memperkuat dialog diplomatik dan mendorong transparansi antarnegara. Kedua hukum ini menyediakan dasar untuk pertukaran informasi dan kolaborasi internasional dalam berbagai program, mulai dari program pengawasan keamanan melalui sistem radar dan satelit, hingga misi eksplorasi angkasa yang melibatkan beberapa negara. Sebagai contoh, melalui perjanjian udara bilateral, negara-negara dapat menjalin kerja sama penerbangan sipil yang saling menguntungkan, mencakup izin rute penerbangan, hak-hak transit, dan layanan penerbangan antarnegara. Di bidang eksplorasi luar angkasa, hukum angkasa memungkinkan negara-negara untuk berbagi data dan teknologi melalui proyek bersama, seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) yang melibatkan partisipasi dari banyak negara. Kolaborasi semacam ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menciptakan platform diplomasi ilmiah yang dapat meredakan ketegangan politik.

Lebih lanjut, hukum udara dan hukum angkasa juga berperan sebagai penyeimbang dalam menjaga keseimbangan kekuatan antarnegara. Dalam konteks geopolitik, negara-negara dengan kapabilitas teknologi angkasa yang maju sering kali memiliki pengaruh lebih besar dalam arena politik global. Negara-negara ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan satelit pemantau, komunikasi, dan bahkan satelit militer yang dapat memengaruhi keamanan global. Dengan adanya hukum angkasa, terdapat batasan-batasan yang mengatur penggunaan teknologi ini untuk tujuan damai. Prinsip bahwa angkasa hanya boleh digunakan untuk tujuan damai tercantum dalam Traktat Luar Angkasa, yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di luar angkasa atau di benda langit mana pun. Ketentuan ini membantu mencegah perlombaan senjata di angkasa luar dan memberikan jaminan bagi negara-negara lain bahwa kapabilitas teknologi angkasa tidak akan digunakan untuk ancaman militer.

Dalam kondisi tertentu, hukum udara dan hukum angkasa juga membantu menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran wilayah udara, hukum udara memberikan prosedur penanganan dan resolusi yang dapat dilakukan melalui jalur diplomatik. Di sisi lain, hukum angkasa mengatur cara menangani klaim-klaim antarnegara terkait kecelakaan atau insiden yang melibatkan objek angkasa. Contoh nyata adalah Konvensi Pertanggungjawaban 1972, yang mengatur tanggung jawab negara terhadap kerusakan yang disebabkan oleh objek angkasa mereka. Melalui kerangka hukum ini, negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan terkait kecelakaan satelit atau puing angkasa tanpa harus mengambil tindakan militer atau melibatkan perselisihan yang lebih serius.

Secara keseluruhan, hukum udara dan hukum angkasa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik global. Kedua hukum ini memberikan kepastian hukum yang memungkinkan negara-negara berinteraksi secara damai dan saling menghormati batas-batas kedaulatan, baik di udara maupun di angkasa luar. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, hukum ini berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang melindungi kepentingan bersama dan menghindari dominasi atau eksploitasi yang berlebihan. Dengan demikian, hukum udara dan hukum angkasa tidak hanya mendukung stabilitas internasional dalam bidang politik, tetapi juga mendorong kerja sama yang harmonis di antara negara-negara untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan seimbang.

Politics

In the political realm, air and space law play a strategically significant role. Control over airspace and outer space often becomes a determining factor in international relations, especially during conflicts or geopolitical tensions. In disputes over airspace, air law ensures that the rights of each nation are protected according to the principles of air sovereignty, while in the context of space exploration, space law aims to prevent any one country from dominating resources beyond Earth. During peacetime, these regulations strengthen diplomatic dialogue, promote transparency, and ensure that no country violates agreed-upon boundaries.

In international political contexts, air and space law are crucial for maintaining stability, sovereignty, and justice among nations. Control over airspace and outer space is a key element in international relations, particularly concerning national security and sovereignty. Air law establishes that each country has full sovereignty over the airspace above its territory and waters, which is a fundamental principle recognized in international law. When disputes or violations of airspace occur, air law provides guidelines on the rights of each country to protect its airspace. For instance, foreign aircraft entering a nation's airspace without permission are considered a violation of that nation's sovereignty. Thus, air law not only protects a nation's territorial integrity but also provides a legal basis for maintaining order in cross-border interactions, whether during peacetime or times of tension.

Beyond the atmospheric boundaries, space law plays a similar role but with more complex principles. Since outer space is not under the sovereignty of any nation, space law emphasizes that space is the "common heritage of mankind." This means that no country has the right to claim ownership of specific territories or celestial bodies. This principle is articulated in the 1967 Outer Space Treaty, which stipulates that the exploration and use of outer space resources must be conducted for the benefit of all and for peaceful purposes. This legal framework prevents any single nation from dominating space resources, such as ice water on the Moon or minerals in asteroids, which are predicted to have high economic value in the future. This principle fosters a spirit of international collaboration in space exploration while preventing potential conflicts over ownership and use of space resources.

In peacetime, air and space law also serve to strengthen diplomatic dialogue and encourage transparency among nations. Both laws provide a basis for information exchange and international collaboration in various programs, ranging from security monitoring through radar and satellite systems to collaborative space exploration missions. For example, through bilateral air agreements, countries can establish mutually beneficial civil aviation cooperation, covering flight route permissions, transit rights, and intercountry flight services. In the context of space exploration, space law allows countries to share data and technology through joint projects, such as the International Space Station (ISS), which involves participation from multiple nations. Such collaboration not only promotes scientific and

technological growth but also creates a platform for scientific diplomacy that can ease political tensions.

Furthermore, air and space law also act as a balancing mechanism in maintaining the equilibrium of power among nations. In geopolitical contexts, countries with advanced space technology often wield greater influence in the global political arena. These nations can launch surveillance, communication, and even military satellites that can affect global security. With space law in place, there are limitations regulating the use of this technology for peaceful purposes. The principle that outer space must only be used for peaceful purposes is enshrined in the Outer Space Treaty, which prohibits the placement of weapons of mass destruction in outer space or on any celestial bodies. These provisions help prevent an arms race in outer space and provide assurances to other nations that space technology capabilities will not be used for military threats.

Under certain conditions, air and space law also assist in peacefully resolving disputes between countries. For example, when airspace violations occur, air law provides handling procedures and resolutions that can be pursued through diplomatic channels. Conversely, space law regulates how to address inter-state claims related to accidents or incidents involving space objects. A concrete example is the 1972 Liability Convention, which outlines state responsibilities for damages caused by their space objects. Through this legal framework, countries can resolve disputes related to satellite accidents or space debris without resorting to military action or involving more serious conflicts.

Overall, air and space law play a vital role in maintaining global political stability. These laws provide legal certainty that allows nations to interact peacefully and respect each other's sovereignty boundaries, both in the air and outer space. Amid increasing geopolitical tensions in various regions, these laws serve as balancing mechanisms that protect common interests and prevent excessive domination or exploitation. Thus, air and space law not only support international political stability but also promote harmonious cooperation among nations to create a more peaceful and balanced future.

Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan udara menjadi salah satu aspek terpenting dalam penerapan hukum udara. Setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya, tetapi penerbangan internasional yang melintasi batas negara diatur ketat untuk menghindari konflik militer atau kegiatan yang mencurigakan. Dalam hal hukum angkasa, keamanan juga menjadi perhatian utama, terutama dengan berkembangnya teknologi satelit dan potensi penggunaannya untuk tujuan militer. Hukum angkasa dirancang untuk mengatur penggunaan damai ruang angkasa, termasuk peluncuran objek antariksa, pemantauan satelit, dan pengembangan teknologi berbasis ruang angkasa. Keberadaan hukum ini memungkinkan adanya kontrol terhadap perlombaan senjata di angkasa dan memberikan kerangka kerja untuk kerja sama internasional dalam upaya menjaga keamanan global.²⁶⁴

Dalam bidang politik dan pertahanan, hukum udara dan hukum angkasa memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keamanan nasional dan internasional. Negara-negara menggunakan ruang udara dan angkasa luar sebagai elemen strategis dalam kebijakan pertahanan mereka, baik untuk pengawasan, intelijen, atau sistem persenjataan. Hukum udara dan angkasa menyediakan kerangka untuk memastikan penggunaan wilayah udara dan luar angkasa secara damai dan legal, serta untuk mencegah eskalasi ketegangan melalui pelanggaran hukum internasional.

Peningkatan militerisasi angkasa luar telah menyebabkan hukum angkasa menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi angkasa untuk keperluan pertahanan dilakukan dengan mematuhi norma internasional. Perjanjian-perjanjian seperti *Outer Space Treaty* berfungsi sebagai fondasi dalam memastikan bahwa luar angkasa tetap digunakan untuk kepentingan damai dan melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit bumi atau di benda langit lainnya.²⁶⁵

²⁶⁴ K. Martono. (2019). *Regulasi Penerbangan dan Keamanan Udara*.

²⁶⁵ Thomas H. Kean & Brian J. L. M. LeClair (2001) - *The Impact of Space Activities on National Security*

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, hukum udara dan hukum angkasa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, mencegah konflik militer, dan memastikan penggunaan ruang udara dan angkasa secara damai. Setiap negara memiliki hak penuh atas ruang udara di atas wilayahnya sesuai dengan prinsip kedaulatan, dan hal ini dilindungi oleh hukum udara internasional. Kedaulatan atas wilayah udara mencakup kontrol penuh atas penerbangan yang melintas di wilayah tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun militer. Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi penerbangan internasional yang melintas agar tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Melalui peraturan-peraturan ini, negara-negara dapat mengelola risiko yang terkait dengan pelanggaran wilayah udara, termasuk penerbangan yang tidak sah atau pesawat yang mencurigakan yang mungkin membawa ancaman keamanan.

Selain itu, hukum udara juga berfungsi sebagai dasar untuk pengaturan lalu lintas udara internasional yang aman, terutama di perbatasan negara. Dalam skenario di mana terdapat potensi konflik atau ketegangan geopolitik, hukum udara menjadi alat penting untuk mencegah eskalasi yang dapat berujung pada konfrontasi militer. Dengan adanya peraturan mengenai zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), negara dapat menentukan wilayah di sekitar perbatasan udara mereka untuk mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat dan menghindari risiko konflik. Negara-negara yang memiliki ADIZ dapat meminta pesawat asing yang memasuki zona tersebut untuk mengidentifikasi diri dan menyatakan tujuan penerbangannya, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan dan mengurangi risiko insiden tak terduga yang dapat memicu ketegangan.

Dalam konteks hukum angkasa, keamanan juga menjadi perhatian utama karena berkembangnya teknologi satelit dan potensi penggunaannya untuk tujuan militer. Teknologi satelit memiliki aplikasi yang luas dalam bidang pertahanan dan keamanan, termasuk pemantauan wilayah, pengumpulan intelijen, dan pengawasan pergerakan militer di seluruh dunia. Namun,

potensi penggunaan satelit untuk tujuan militer dapat menimbulkan kekhawatiran internasional, terutama terkait dengan risiko perlombaan senjata di angkasa. Untuk menghindari situasi ini, hukum angkasa dirancang untuk memastikan bahwa ruang angkasa digunakan secara damai. Salah satu instrumen hukum yang penting adalah Traktat Luar Angkasa (Outer Space Treaty) tahun 1967, yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit Bumi atau di benda langit lainnya. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa angkasa luar hanya boleh digunakan untuk tujuan damai, sehingga menciptakan batasan terhadap aktivitas militer yang berlebihan di luar angkasa.

Di tingkat internasional, hukum angkasa juga memainkan peran penting dalam mengatur peluncuran objek antariksa, pemantauan satelit, dan pengembangan teknologi berbasis ruang angkasa. Prosedur peluncuran satelit, misalnya, memerlukan pemberitahuan kepada komunitas internasional untuk memastikan transparansi dan menghindari potensi ancaman keamanan. Dengan adanya kerangka kerja ini, negara-negara memiliki panduan untuk memastikan bahwa aktivitas peluncuran satelit atau objek angkasa lainnya tidak menimbulkan risiko bagi keamanan negara lain atau menciptakan ketegangan geopolitik. Selain itu, hukum angkasa juga mengatur penggunaan spektrum frekuensi untuk komunikasi satelit, yang sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara tidak saling mengganggu satu sama lain dalam komunikasi berbasis angkasa.

Di samping menjaga keamanan nasional, hukum udara dan hukum angkasa juga berperan penting dalam kebijakan keamanan internasional. Dalam hal pertahanan, negara-negara menggunakan ruang udara dan ruang angkasa sebagai bagian dari strategi keamanan mereka, baik untuk pengawasan, intelijen, maupun sistem persenjataan. Penggunaan satelit pemantauan atau satelit komunikasi untuk keperluan intelijen adalah hal yang umum dalam strategi pertahanan modern. Dengan adanya hukum angkasa yang mengatur penggunaan damai ruang angkasa, terdapat kontrol terhadap penggunaan teknologi angkasa untuk keperluan militer. Hal ini mencegah eskalasi ketegangan yang dapat terjadi akibat

perlombaan senjata di angkasa, sekaligus memberikan jaminan bahwa negara-negara saling menghormati batas-batas yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Peningkatan militerisasi angkasa luar telah menyebabkan hukum angkasa menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa teknologi angkasa untuk keperluan pertahanan digunakan secara bertanggung jawab. Perjanjian seperti Outer Space Treaty menjadi fondasi hukum untuk menjaga ruang angkasa agar tetap digunakan untuk tujuan damai. Selain larangan terhadap senjata pemusnah massal, traktat ini juga mengatur bahwa negara-negara harus bertanggung jawab atas aktivitas di ruang angkasa yang melibatkan entitas swasta yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Artinya, negara harus memastikan bahwa perusahaan atau organisasi swasta yang meluncurkan objek angkasa atau menyediakan layanan satelit mematuhi aturan internasional. Hal ini penting untuk menjaga keamanan kolektif dan menghindari risiko yang mungkin muncul dari aktivitas luar angkasa yang tidak diawasi dengan baik.

Pada akhirnya, hukum udara dan hukum angkasa berfungsi sebagai pilar yang penting dalam menjaga keamanan global. Hukum udara mengatur agar ruang udara suatu negara tetap aman dari potensi ancaman, sementara hukum angkasa memastikan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa dilakukan secara damai. Dengan adanya kedua hukum ini, negara-negara dapat menjalin kerja sama internasional dalam bidang keamanan, berbagi informasi untuk deteksi dini terhadap ancaman, dan saling mendukung dalam memelihara perdamaian global. Kedua hukum ini tidak hanya berperan dalam mencegah konflik, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, hukum udara dan hukum angkasa menjadi dasar penting bagi stabilitas dan keamanan bersama, baik di Bumi maupun di luar angkasa.

Defense and Security

Air defense and security represent one of the most crucial aspects in the application of air law. Every country has full sovereign rights over the airspace above its territory, but international flights crossing national boundaries are strictly regulated to prevent military conflicts or suspicious activities. In terms of space law, security is also a primary concern, especially with the advancement of satellite technology and its potential military applications. Space law is designed to govern the peaceful use of outer space, including the launch of space objects, satellite monitoring, and the development of space-based technologies. The existence of this law allows for the control of an arms race in space and provides a framework for international cooperation in efforts to maintain global security.

In the fields of politics and defense, air and space law significantly influence national and international security policies. Countries utilize airspace and outer space as strategic elements in their defense policies, whether for surveillance, intelligence, or weapon systems. Air and space law provide the framework to ensure the peaceful and legal use of air and outer space, as well as to prevent escalating tensions through violations of international law.

The increasing militarization of outer space has made space law particularly important in ensuring that the use of space technology for defense purposes complies with international norms. Agreements such as the Outer Space Treaty serve as a foundation for ensuring that outer space remains utilized for peaceful purposes and prohibits the placement of weapons of mass destruction in Earth orbit or on other celestial bodies.

In the context of defense and security, air and space law play a vital role in maintaining a country's sovereignty, preventing military conflicts, and ensuring the peaceful use of airspace and outer space. Each nation has full rights over the airspace above its territory according to the principle of sovereignty, and this is protected by international air law. Sovereignty over airspace includes complete control over flights passing through that area, whether for commercial or military purposes. Nations have the right to regulate and monitor international flights crossing their territories to mitigate potential threats to national security. Through these regulations, countries can manage risks associated with airspace violations, including unauthorized flights or suspicious aircraft that may pose security threats.

Additionally, air law also serves as the basis for regulating safe international air traffic, particularly at national borders. In scenarios where potential conflicts or geopolitical tensions exist, air law becomes an important tool to prevent escalation that could lead to military confrontation. With regulations regarding Air Defense Identification Zones (ADIZ), countries can designate areas around their air borders to identify approaching foreign aircraft and avoid conflict risks. Countries with an ADIZ can request that foreign aircraft entering the zone identify themselves and declare their flight purposes, providing an additional layer of security and reducing the risk of unexpected incidents that could trigger tensions.

In terms of space law, security is also a primary concern due to the advancement of satellite technology and its potential military applications. Satellite technology has wide-ranging applications in defense and security, including territorial monitoring, intelligence gathering, and surveillance of military movements worldwide. However, the potential military use of satellites raises international concerns, especially regarding the risks of an arms race in space. To avoid this situation, space law is designed to ensure that outer space is used peacefully. One important legal instrument is the 1967 Outer Space Treaty, which prohibits the placement of weapons of mass destruction in Earth orbit or on other celestial bodies. This treaty also emphasizes that outer space should only be used for peaceful purposes, creating limits on excessive military activity in space.

At the international level, space law also plays an important role in regulating the launch of space objects, satellite monitoring, and the development of space-based technologies. Satellite launch procedures, for example, require notification to the international community to ensure transparency and avoid potential security threats. With this framework in place, countries have guidelines to ensure that satellite launches or other space activities do not pose risks to the security of other nations or create geopolitical tensions. Additionally, space law regulates the use of frequency spectrum for satellite communications, which is crucial to ensure that countries do not interfere with each other's space-based communications.

In addition to safeguarding national security, air and space law also play a critical role in international security policy. In terms of defense, nations utilize airspace and outer space as part of their security strategies for surveillance, intelligence, and weapon systems. The use of monitoring

satellites or communication satellites for intelligence purposes is common in modern defense strategies. With space law governing the peaceful use of outer space, there is control over the use of space technology for military purposes. This helps to prevent the escalation of tensions that may arise from an arms race in space while providing assurance that countries respect the boundaries established by international law.

The increasing militarization of outer space has made space law increasingly important in ensuring that space technology for defense purposes is used responsibly. Agreements such as the Outer Space Treaty serve as the legal foundation to keep outer space used for peaceful purposes. Besides prohibiting weapons of mass destruction, this treaty also mandates that countries are responsible for activities in outer space that involve private entities under their jurisdiction. This means that nations must ensure that private companies or organizations launching space objects or providing satellite services comply with international regulations. This is vital for maintaining collective security and avoiding risks that may arise from poorly supervised outer space activities.

Ultimately, air and space law serve as important pillars in maintaining global security. Air law regulates the safety of a nation's airspace from potential threats, while space law ensures that the exploration and utilization of outer space are conducted peacefully. With these two laws in place, countries can establish international cooperation in security, share information for early threat detection, and support each other in maintaining global peace. These laws not only prevent conflicts but also provide mechanisms for peacefully resolving inter-state disputes. In an increasingly complex and interconnected world, air and space law become an essential foundation for mutual stability and security, both on Earth and in outer space.

1. Peran dalam Sengketa Internasional

Dalam situasi sengketa internasional, hukum udara dan hukum angkasa memainkan peran kritis. Kedaulatan udara suatu negara sering menjadi pokok permasalahan dalam sengketa, terutama jika terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat militer atau sipil dari negara lain. Contohnya, pelanggaran wilayah udara oleh negara lain sering kali dianggap sebagai bentuk agresi, yang dapat memicu konflik internasional

atau menimbulkan ketegangan diplomatik. Di sini, hukum udara berperan dalam memberikan batasan-batasan yang jelas terkait hak dan kewajiban setiap negara dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya.²⁶⁶

Ketika terjadi perselisihan antarnegara, hukum udara dan angkasa dapat menjadi alat yang efektif untuk penyelesaian sengketa. Pada masa konflik bersenjata, hukum udara menentukan batas-batas penggunaan kekuatan di udara dan memastikan bahwa perjanjian internasional, seperti Konvensi Chicago, diikuti oleh semua pihak. Dalam kasus sengketa luar angkasa, PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya bertindak sebagai penengah, menggunakan ketentuan dalam Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) dan instrumen hukum lainnya untuk menyelesaikan konflik mengenai kepemilikan satelit, eksplorasi planet, atau penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan militer.

Demikian juga, dalam eksplorasi angkasa, penggunaan satelit untuk komunikasi, pengamatan bumi, dan kepentingan militer sering kali menjadi sumber ketegangan antar negara. Misalnya, penggunaan satelit untuk tujuan mata-mata atau pemantauan militer dapat meningkatkan ketegangan geopolitik. Dalam konteks ini, hukum angkasa memberikan kerangka kerja yang mengatur penggunaan ruang angkasa, memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum internasional.²⁶⁷

Dalam konteks sengketa, hukum udara dan hukum angkasa seringkali menjadi acuan penting dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan batas wilayah udara, penggunaan sumber daya angkasa, serta pengaturan aktivitas penerbangan internasional. Ketika terjadi ketegangan antarnegara, masalah-masalah seperti pelanggaran wilayah udara, hak lintas penerbangan, serta pengelolaan satelit menjadi isu krusial. Hukum udara berperan sebagai landasan untuk menyelesaikan

²⁶⁶ K. Martono. (2021). *Konflik dan Hukum Angkasa: Pendekatan Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁶⁷ David S. McRae (2018) - *Airspace and the Law*

masalah terkait pelanggaran kedaulatan udara, sementara hukum angkasa mengatur konflik yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di luar angkasa, termasuk satelit, asteroid, dan benda langit lainnya.

Dalam sengketa militer atau geopolitik²⁶⁸, hukum udara memainkan peran dalam mengatur penggunaan pesawat militer dan aktivitas penerbangan di zona konflik. Hukum ini membantu memastikan bahwa negara-negara tidak menggunakan wilayah udara negara lain tanpa izin, dan memberikan kerangka hukum bagi hak-hak negara dalam mempertahankan wilayah udara mereka dari pelanggaran. Pada saat yang sama, hukum angkasa semakin penting dengan meningkatnya militerisasi ruang angkasa, di mana satelit dan teknologi luar angkasa sering kali digunakan untuk keperluan strategis dalam konflik modern.

Dalam situasi sengketa internasional, hukum udara dan hukum angkasa memiliki peran krusial dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antarnegara, serta menjaga stabilitas dan keamanan global. Kedaulatan wilayah udara menjadi aspek utama dalam hukum udara, dan sering kali menjadi sumber perselisihan ketika terjadi pelanggaran oleh pesawat militer atau sipil dari negara lain. Sebagai contoh, masuknya pesawat militer suatu negara ke wilayah udara negara lain tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara tersebut. Tindakan semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk agresi dan memiliki potensi untuk memicu ketegangan diplomatik atau bahkan konflik militer. Dalam kasus ini, hukum udara memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara dalam menjaga dan mempertahankan wilayah udaranya, serta prosedur internasional yang harus diikuti ketika terjadi pelanggaran. Melalui peraturan ini, hukum udara membantu mencegah eskalasi konflik dengan mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.

²⁶⁸ Peter J. Cook (2008) - *The Politics of Airspace*

Dalam situasi di mana terjadi ketegangan di wilayah udara internasional, hukum udara juga menyediakan kerangka hukum untuk pengaturan lintas wilayah dan hak transit bagi penerbangan sipil. Konvensi Chicago 1944, sebagai dasar hukum penerbangan internasional, menetapkan aturan tentang hak-hak negara atas wilayah udaranya dan hak transit udara. Misalnya, negara-negara memiliki kewajiban untuk memberikan izin transit bagi penerbangan sipil dalam kondisi damai, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menutup wilayah udara mereka jika merasa bahwa keamanan nasional terancam. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk mencegah terjadinya konflik terkait pergerakan pesawat internasional dan memastikan bahwa kepentingan kedaulatan serta keamanan setiap negara tetap terlindungi.

Di sisi lain, hukum angkasa berfungsi sebagai kerangka kerja dalam menyelesaikan sengketa terkait eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, terutama dengan meningkatnya aktivitas satelit untuk komunikasi, observasi bumi, dan kepentingan militer. Ruang angkasa adalah wilayah tanpa kedaulatan nasional, yang diatur dengan prinsip bahwa angkasa adalah "warisan bersama umat manusia." Dalam hal ini, hukum angkasa memastikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk mengeksplorasi ruang angkasa, namun aktivitas ini harus dilakukan secara damai dan tidak mengganggu kepentingan negara lain. Contoh nyata dari peraturan ini adalah larangan penggunaan satelit untuk kegiatan yang secara eksplisit bersifat agresif atau sebagai alat spionase. Meskipun satelit dapat digunakan untuk pemantauan dan pengumpulan data intelijen, hukum angkasa menekankan bahwa aktivitas ini harus tetap dalam batas-batas tertentu dan dilakukan tanpa melanggar privasi atau kedaulatan negara lain.

Ketika terjadi perselisihan di luar angkasa, misalnya terkait kepemilikan satelit atau klaim terhadap benda langit tertentu, hukum angkasa menyediakan kerangka penyelesaian yang melibatkan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite PBB untuk Penggunaan

Damai Luar Angkasa (COPUOS). Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai penengah dan memiliki wewenang untuk memberikan saran atau rekomendasi dalam penyelesaian konflik. Misalnya, jika terjadi perselisihan mengenai hak penggunaan atau posisi satelit di orbit geostasioner, hukum angkasa menetapkan bahwa negara-negara harus mencari solusi damai melalui perundingan atau arbitrase. Selain itu, Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) juga melarang adanya klaim kepemilikan atas benda langit, seperti bulan atau asteroid, sehingga mencegah adanya potensi konflik yang mungkin timbul akibat perebutan sumber daya.

Di era modern, teknologi angkasa juga digunakan untuk kepentingan militer dan keamanan, dan hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga perdamaian di luar angkasa. Negara-negara maju telah memanfaatkan satelit untuk berbagai tujuan strategis, termasuk pemantauan pergerakan militer, komunikasi pertahanan, serta pengumpulan data intelijen. Peningkatan militerisasi ruang angkasa ini menjadi isu krusial, karena penggunaan satelit atau teknologi angkasa untuk tujuan militer berpotensi memicu ketegangan antarnegara. Untuk mengatasi tantangan ini, Perjanjian Luar Angkasa melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit bumi atau di benda langit lainnya. Dengan demikian, hukum angkasa memberikan batasan yang tegas terhadap aktivitas militer di luar angkasa dan mencegah perlombaan senjata di angkasa luar.

Dalam konteks sengketa militer atau geopolitik, hukum udara juga memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan pesawat militer dan aktivitas penerbangan di zona konflik. Hukum udara membantu memastikan bahwa negara-negara tidak menggunakan wilayah udara negara lain untuk tujuan militer tanpa izin. Misalnya, selama konflik bersenjata, hukum udara memberikan pedoman mengenai batas-batas penggunaan kekuatan di udara dan menetapkan aturan-aturan mengenai penerbangan militer di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan negara lain. Negara yang merasa terancam oleh keberadaan pesawat militer asing di dekat wilayah

udaranya memiliki hak untuk mengambil tindakan pertahanan, tetapi hukum udara menekankan pentingnya penggunaan cara-cara damai terlebih dahulu sebelum eskalasi terjadi.

Lebih jauh lagi, hukum udara dan hukum angkasa juga menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan kepentingan ekonomi dan strategis di ruang udara dan ruang angkasa. Dengan berkembangnya eksplorasi komersial di angkasa, seperti penambangan asteroid, isu kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya angkasa menjadi semakin kompleks. Hukum angkasa memberikan prinsip dasar bahwa sumber daya di ruang angkasa harus digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau negara tertentu. Hal ini menciptakan batasan untuk memastikan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya angkasa dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

Secara keseluruhan, hukum udara dan hukum angkasa memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas yang melibatkan wilayah udara dan luar angkasa, serta dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran kedaulatan, kepentingan keamanan, atau eksplorasi ekonomi. Dengan adanya kedua hukum ini, negara-negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjaga hubungan yang damai dan saling menghormati dalam lingkungan internasional yang semakin kompleks. Ketika terjadi ketegangan, hukum udara dan hukum angkasa memberikan mekanisme yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatik dan menghindari eskalasi konflik. Ini memastikan bahwa wilayah udara dan ruang angkasa dapat terus digunakan untuk tujuan damai, memperkuat kolaborasi internasional, dan menciptakan dunia yang lebih aman.

1. Role in International Disputes

In situations of international disputes, aviation law and space law play a critical role. The sovereignty of a country's airspace often becomes a central issue in disputes, especially if there are violations of airspace by military or civilian aircraft from other countries. For example, incursions into airspace by foreign nations are often considered acts of aggression, which can trigger international conflict or diplomatic tensions. Here, aviation law serves to provide clear limitations regarding the rights and obligations of each country in maintaining the sovereignty of its airspace.

When disputes arise between nations, aviation law and space law can serve as effective tools for dispute resolution. During armed conflicts, aviation law determines the boundaries for the use of force in the air and ensures that international agreements, such as the Chicago Convention, are adhered to by all parties. In cases of disputes related to outer space, the UN and other international institutions act as mediators, using provisions in the Outer Space Treaty and other legal instruments to resolve conflicts regarding satellite ownership, planetary exploration, or the military use of outer space.

Similarly, in space exploration, the use of satellites for communication, earth observation, and military interests often becomes a source of tension among nations. For instance, the use of satellites for espionage or military monitoring can escalate geopolitical tensions. In this context, space law provides a framework governing the use of outer space, ensuring that these activities are conducted in good faith and do not violate international law.

In the context of disputes, aviation law and space law often serve as important references for resolving conflicts involving airspace boundaries, the use of outer space resources, and the regulation of international flight activities. When tensions arise between countries, issues such as airspace violations, transit rights, and satellite management become crucial. Aviation law acts as a foundation for addressing issues related to violations of airspace sovereignty, while space law governs conflicts related to the exploration and exploitation of resources in outer space, including satellites, asteroids, and other celestial bodies.

In military or geopolitical disputes, aviation law plays a role in regulating the use of military aircraft and flight activities in conflict zones. This law helps ensure that countries do not use another nation's airspace without permission, providing a legal framework for a country's rights to defend its airspace from violations. At the same time, space law is becoming increasingly important as the militarization of outer space rises, where satellites and space technology are often employed for strategic purposes in modern conflicts.

In international dispute situations, aviation law and space law play crucial roles in preventing and resolving conflicts between nations, as well as in maintaining global stability and security. The sovereignty of airspace becomes a major aspect of aviation law, often serving as a source of disputes when violations occur by military or civilian aircraft from other nations. For example, the incursion of a military aircraft into the airspace of another nation without permission is considered a serious violation of that nation's sovereignty. Such actions can be viewed as acts of aggression and have the potential to trigger diplomatic tensions or even military conflict. In this case, aviation law provides clear limitations regarding the rights and obligations of nations in safeguarding and defending their airspace, as well as the international procedures that must be followed when violations occur. Through these regulations, aviation law helps prevent the escalation of conflict by governing peaceful dispute resolution methods.

In situations where tensions arise in international airspace, aviation law also provides a legal framework for the regulation of transboundary transit rights for civil flights. The Chicago Convention of 1944, as the legal basis for international aviation, establishes rules regarding countries' rights over their airspace and air transit rights. For instance, countries are obligated to grant transit rights to civil flights under peaceful conditions, but they also have the right to close their airspace if they feel that national security is threatened. These regulations are designed to prevent conflicts related to the movement of international aircraft and ensure that each country's sovereignty and security interests are protected.

On the other hand, space law functions as a framework for resolving disputes related to the exploration and use of outer space, especially with the increase in satellite activities for communication, earth observation, and military interests. Outer space is an area without national sovereignty, regulated by the principle that space is "the common heritage of mankind." In this regard, space law ensures that every nation has equal rights to explore outer space, but these activities must be conducted peacefully and without interfering with the interests of other nations. A real example of this regulation is the prohibition against using satellites for explicitly aggressive activities or as tools for espionage. Although satellites can be used for monitoring and intelligence gathering, space law emphasizes that these activities must remain within certain limits and be conducted without violating the privacy or sovereignty of other nations.

When disputes occur in outer space, such as those related to satellite ownership or claims to specific celestial bodies, space law provides a resolution framework involving international bodies such as the United Nations (UN) and the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). These institutions act as mediators and have the authority to provide advice or recommendations for resolving conflicts. For instance, in the case of disputes over the rights to use or the position of satellites in geostationary orbit, space law stipulates that countries must seek peaceful solutions through negotiation or arbitration. Additionally, the Outer Space Treaty also prohibits claims of ownership over celestial bodies, such as the Moon or asteroids, thus preventing potential conflicts that could arise from resource competition.

In the modern era, space technology is also used for military and security purposes, presenting new challenges in maintaining peace in outer space. Developed nations have utilized satellites for various strategic purposes, including monitoring military movements, defense communications, and intelligence gathering. The increasing militarization of outer space has become a crucial issue, as the use of satellites or space technology for military purposes could potentially escalate tensions between countries. To address these challenges, the Outer Space Treaty prohibits the placement of weapons of mass destruction in Earth orbit or on other celestial bodies. Thus, space law

imposes strict limitations on military activities in outer space and prevents an arms race in outer space.

In the context of military or geopolitical disputes, aviation law also plays a significant role in regulating the use of military aircraft and flight activities in conflict zones. Aviation law helps ensure that countries do not use another nation's airspace for military purposes without permission. For example, during armed conflicts, aviation law provides guidelines on the boundaries for the use of force in the air and establishes rules regarding military flights near the borders of other nations. A country that feels threatened by the presence of foreign military aircraft near its airspace has the right to take defensive action, but aviation law emphasizes the importance of first employing peaceful means before escalation occurs.

Furthermore, aviation law and space law also serve as the basis for resolving disputes involving economic and strategic interests in airspace and outer space. With the development of commercial exploration in space, such as asteroid mining, issues of ownership and utilization of space resources are becoming increasingly complex. Space law establishes the fundamental principle that resources in outer space should be used for the common interest of mankind and cannot be owned by specific individuals or countries. This creates limitations to ensure that the exploration and exploitation of space resources are conducted fairly and do not harm others.

Overall, aviation law and space law play important roles in regulating activities involving airspace and outer space, as well as in resolving disputes that may arise from violations of sovereignty, security interests, or economic exploration. With the existence of these two bodies of law, countries have a strong legal foundation to maintain peaceful and respectful relations in an increasingly complex international environment. When tensions arise, aviation law and space law provide mechanisms that allow countries to resolve disputes diplomatically and avoid escalating conflicts. This ensures that airspace and outer space can continue to be used for peaceful purposes, strengthening international collaboration and creating a safer world.

2. Peran dalam Perdamaian dan Kerja Sama Antar Negara

Di sisi lain, hukum udara dan hukum angkasa juga memainkan peran penting dalam memperkuat perdamaian dan kerja sama antar negara, terutama dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pada sektor ekonomi, misalnya, hukum udara mendukung perkembangan industri penerbangan komersial internasional, yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa antar negara menjadi lebih cepat dan efisien. Perjanjian bilateral dan multilateral terkait hak lintas wilayah udara menjadi landasan bagi maskapai penerbangan untuk menjalankan operasinya dengan aman dan efisien. Ini memberikan dampak positif yang besar bagi pertumbuhan ekonomi global.²⁶⁹

Hukum udara dan hukum angkasa mempromosikan kerja sama antarnegara, tidak hanya di waktu damai, tetapi juga sebagai langkah mitigasi dalam situasi ketegangan. Persetujuan dan perjanjian internasional yang mengatur lalu lintas udara sipil dan eksplorasi luar angkasa membantu membangun saling kepercayaan antarnegara, mendorong kemajuan teknologi, serta membuka peluang baru untuk kolaborasi dalam bidang-bidang seperti pengembangan satelit komersial, penerbangan luar angkasa berawak, dan penelitian ilmiah. Selain itu, hukum ini juga berperan dalam menghindari potensi konflik atas pemanfaatan sumber daya di ruang angkasa, seperti mineral di asteroid, yang diprediksi akan menjadi topik utama di masa depan.²⁷⁰

Di saat negara-negara dalam kondisi damai, hukum udara dan hukum angkasa menjadi fondasi dalam kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan penelitian ilmiah. Dalam ekonomi, hukum udara mengatur industri penerbangan global, termasuk hak transit, rute udara internasional, dan aturan keselamatan penerbangan. Hukum ini mendukung pertumbuhan ekonomi global melalui

²⁶⁹ Robert C. Smith (2009) - *The Role of International Cooperation in Space Exploration*

²⁷⁰ Hendrik J. A. Verheij (2014) - *Air Transport Law*

pengembangan infrastruktur penerbangan sipil, yang memungkinkan perdagangan antarnegara serta pergerakan manusia dan barang yang efisien.

Hukum angkasa, di sisi lain, mengatur aktivitas komersial dan ilmiah di luar angkasa, termasuk peluncuran satelit untuk telekomunikasi, cuaca, serta eksplorasi sumber daya angkasa. Ini memberikan landasan hukum untuk kolaborasi internasional dalam eksplorasi ruang angkasa, seperti dalam program luar angkasa multinasional (seperti ISS), dan pengaturan hak atas sumber daya di luar angkasa. Hukum angkasa juga mencakup perlindungan lingkungan angkasa dari ancaman sampah antariksa dan aktivitas yang merusak kestabilan angkasa luar.

Dalam aspek sosial dan budaya, hukum udara dan hukum angkasa memungkinkan pertukaran budaya melalui peningkatan mobilitas manusia dan informasi. Komunikasi global yang didukung oleh jaringan satelit memungkinkan negara-negara saling berbagi informasi, budaya, dan ide secara cepat dan luas. Ini memperkuat hubungan antar masyarakat dunia, mendorong pemahaman lintas budaya, dan mendukung kerja sama internasional dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian ilmiah.

Dari sudut pandang politik, hukum udara dan hukum angkasa menyediakan landasan bagi diplomasi udara dan angkasa yang sehat, di mana negara-negara dapat menjalin hubungan yang lebih erat melalui kerjasama dalam program-program eksplorasi angkasa atau penerbangan sipil. Salah satu contoh yang nyata adalah kerja sama internasional dalam pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station - ISS), yang melibatkan banyak negara dalam satu proyek global. Kerjasama ini menunjukkan bagaimana hukum angkasa dapat menjadi alat penting dalam diplomasi dan memperkuat hubungan internasional.²⁷¹

²⁷¹ Robert C. Smith (2009) - *The Role of International Cooperation in Space Exploration*

Hukum udara dan hukum angkasa memainkan peran vital dalam memajukan perdamaian dan memperkuat kerja sama internasional, baik melalui hubungan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dengan adanya regulasi yang jelas, kedua hukum ini berfungsi sebagai landasan bagi negara-negara untuk saling berkolaborasi secara aman dan damai, baik dalam aktivitas di udara maupun di luar angkasa.

Dari sisi ekonomi, hukum udara mendukung industri penerbangan komersial internasional, yang memungkinkan arus perdagangan dan mobilitas manusia meningkat secara signifikan. Aturan mengenai hak lintas wilayah udara, hak transit, dan pengaturan rute penerbangan internasional adalah dasar bagi maskapai penerbangan dalam menjalankan operasinya. Berbagai perjanjian bilateral dan multilateral, seperti Chicago Convention, memberikan kejelasan hukum terkait operasional penerbangan komersial, sehingga setiap negara dapat mengelola dan mengatur akses wilayah udaranya dengan prinsip resiprokal. Keberadaan hukum ini tidak hanya memastikan keamanan penerbangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi global dengan memungkinkan pergerakan barang dan jasa antarnegara yang lebih efisien. Maskapai penerbangan dapat membuka rute internasional dengan aman, mempercepat perdagangan dan memperkuat ekonomi negara-negara yang terlibat.

Hukum angkasa, di sisi lain, memberikan fondasi yang kuat bagi kolaborasi internasional dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan satelit untuk telekomunikasi, pemantauan cuaca, dan eksplorasi sumber daya ruang angkasa telah menjadi hal yang krusial bagi perkembangan ekonomi global. Regulasi yang terkandung dalam perjanjian internasional, seperti Outer Space Treaty, mengatur agar aktivitas komersial dan ilmiah di angkasa luar dilakukan dengan prinsip “kepentingan seluruh umat manusia.” Misalnya, peluncuran satelit komersial untuk layanan internet global yang dilakukan oleh berbagai negara memperkuat ekonomi dan mendukung pembangunan

infrastruktur telekomunikasi di banyak wilayah. Selain itu, perjanjian ini mendorong terjadinya kolaborasi multinasional dalam proyek luar angkasa, seperti pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), yang merupakan contoh kerja sama internasional dalam penelitian ilmiah dan teknologi yang manfaatnya bisa dirasakan secara global.

Dari perspektif sosial dan budaya, hukum udara dan hukum angkasa berperan besar dalam meningkatkan interaksi antarbudaya dan pertukaran informasi. Mobilitas global melalui transportasi udara memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk saling mengunjungi, belajar, dan berinteraksi, sehingga memperkuat pemahaman antarbudaya dan meningkatkan toleransi. Misalnya, keberadaan maskapai internasional yang mengikuti regulasi hukum udara memungkinkan wisatawan, pekerja migran, pelajar, dan pebisnis untuk bepergian antarnegara dengan lebih mudah. Ini menciptakan jembatan yang menghubungkan budaya yang berbeda, mendorong pertukaran pengetahuan, dan meningkatkan hubungan diplomatik serta kerja sama di bidang pendidikan, seni, dan pariwisata.

Hukum angkasa turut memfasilitasi konektivitas global melalui jaringan satelit yang mendukung komunikasi, televisi, radio, dan internet. Keberadaan satelit ini memungkinkan berbagai negara untuk berbagi budaya, ide, dan informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Televisi satelit, misalnya, memungkinkan penayangan program dari berbagai negara di seluruh dunia, yang secara tidak langsung mendukung penyebaran nilai-nilai budaya yang positif dan memperluas wawasan masyarakat global. Selain itu, internet yang didukung oleh jaringan satelit memungkinkan pertukaran data dan komunikasi real-time antarnegara, sehingga masyarakat global semakin terkoneksi tanpa batasan geografis. Regulasi yang diterapkan dalam hukum angkasa memastikan bahwa layanan-layanan ini dilakukan secara adil dan aman, tanpa mengganggu kepentingan pihak lain.

Di ranah politik, hukum udara dan hukum angkasa menjadi landasan penting bagi diplomasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, negara-negara dapat merencanakan dan mengembangkan kerja sama dalam berbagai program internasional yang melibatkan udara dan luar angkasa. Sebagai contoh, kerja sama multinasional dalam pembangunan dan pengelolaan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) mencerminkan bagaimana hukum angkasa memfasilitasi kolaborasi negara-negara, termasuk negara-negara dengan sistem politik yang berbeda. Proyek ISS menunjukkan bahwa eksplorasi ruang angkasa dapat menjadi alat diplomasi yang efektif, memperkuat hubungan antarnegara, dan membangun kepercayaan internasional. Selain ISS, terdapat berbagai program lain yang melibatkan negara-negara dalam kolaborasi pengembangan teknologi ruang angkasa, pengiriman satelit penelitian, serta program-program antariksa bersama.

Hukum udara juga memainkan peran dalam diplomasi, terutama dalam memastikan bahwa aktivitas penerbangan sipil antarnegara dapat dilakukan tanpa hambatan politik yang mengganggu stabilitas hubungan internasional. Misalnya, ketentuan hukum udara mengatur agar penerbangan internasional dapat melewati wilayah udara negara lain dengan prinsip transit damai. Ini memberikan dasar hukum untuk menghindari konflik terkait akses wilayah udara, yang sering kali menjadi isu sensitif dalam hubungan antarnegara. Dengan adanya ketentuan ini, negara-negara dapat menghindari ketegangan dan memastikan bahwa penerbangan internasional tetap berjalan aman dan sesuai aturan, sekaligus memberikan perlindungan bagi penumpang dan kru penerbangan yang melintas.

Dalam hal mitigasi konflik dan kerja sama pertahanan, hukum angkasa memberikan pedoman agar penggunaan ruang angkasa dilakukan untuk tujuan damai. Ini penting terutama dalam konteks meningkatnya ketergantungan negara-negara pada satelit untuk keperluan keamanan dan militer. Meskipun

satelit digunakan untuk tujuan pemantauan dan intelijen, perjanjian internasional menekankan bahwa aktivitas ini tidak boleh mengganggu negara lain. Larangan penempatan senjata pemusnah massal di ruang angkasa yang tercantum dalam Outer Space Treaty adalah contoh regulasi yang berupaya mencegah eskalasi perlombaan senjata di luar angkasa dan menjaga agar ruang angkasa tetap netral dan damai.

Secara keseluruhan, hukum udara dan hukum angkasa berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun perdamaian dan kerja sama global. Kedua hukum ini memberikan kepastian hukum bagi negara-negara dalam menjalankan aktivitas di udara dan luar angkasa secara aman, serta mendorong kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Melalui regulasi yang komprehensif, hukum udara dan hukum angkasa menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi tercapainya tujuan bersama di tingkat global, memastikan bahwa wilayah udara dan ruang angkasa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan damai dan kesejahteraan bersama umat manusia.

2. Role in Peace and Cooperation Between Countries

On the other hand, air and space law also play a significant role in strengthening peace and cooperation between nations, particularly in social, economic, cultural, and political aspects. In the economic sector, for instance, air law supports the development of international commercial aviation, enabling the exchange of goods and services between countries to be faster and more efficient. Bilateral and multilateral agreements related to air transit rights serve as the foundation for airlines to operate safely and efficiently. This has a substantial positive impact on global economic growth.

Air and space law promote cooperation between countries, not only in times of peace but also as a mitigation step in situations of tension. International agreements governing civil air traffic and space exploration help build mutual trust among countries, encourage technological advancement, and open new opportunities for collaboration in areas such as commercial satellite development, manned spaceflight, and scientific research. Furthermore, these laws

also play a role in preventing potential conflicts over the utilization of space resources, such as minerals on asteroids, which are predicted to become a major topic in the future.

When countries are at peace, air and space law serve as a foundation for international cooperation, particularly in the fields of economics, social interactions, culture, and scientific research. In economics, air law regulates the global aviation industry, including transit rights, international flight routes, and aviation safety regulations. This law supports global economic growth by developing civil aviation infrastructure, enabling trade between nations and the efficient movement of people and goods.

Space law, on the other hand, governs commercial and scientific activities in space, including satellite launches for telecommunications, weather monitoring, and the exploration of space resources. It provides a legal basis for international collaboration in space exploration, as seen in multinational space programs (such as the International Space Station - ISS) and the regulation of rights over resources in space. Space law also encompasses the protection of the space environment from threats posed by space debris and activities that disrupt the stability of outer space.

In social and cultural aspects, air and space law facilitate cultural exchanges through increased human mobility and information flow. Global communication supported by satellite networks allows countries to share information, culture, and ideas quickly and broadly. This strengthens relationships among global communities, promotes cross-cultural understanding, and supports international cooperation in various fields, including education and scientific research.

From a political perspective, air and space law provide a foundation for healthy air and space diplomacy, where countries can forge closer ties through collaboration in space exploration programs or civil aviation. A tangible example is the international cooperation in developing the International Space Station (ISS), which involves multiple countries in a global project. This collaboration demonstrates how space law can serve as an essential tool in diplomacy and strengthen international relations.

Air and space law play a vital role in promoting peace and enhancing international cooperation, whether through economic, social, cultural, or political relationships. With clear regulations in place, these laws serve as a basis for countries to collaborate safely and peacefully, both in activities in the air and in outer space.

From the economic side, air law supports the international commercial aviation industry, significantly increasing the flow of trade and human mobility. Regulations regarding air transit rights, transit rights, and international flight route management are fundamental for airlines in conducting their operations. Various bilateral and multilateral agreements, such as the Chicago Convention, provide legal clarity regarding commercial aviation operations, allowing each country to manage and regulate access to its airspace based on reciprocal principles. The existence of this law not only ensures flight safety but also supports global economic growth by enabling more efficient movement of goods and services between countries. Airlines can safely open international routes, expedite trade, and strengthen the economies of the involved countries.

Space law, on the other hand, provides a strong foundation for international collaboration in the exploration and utilization of outer space. In recent decades, the use of satellites for telecommunications, weather monitoring, and resource exploration has become crucial for global economic development. Regulations contained in international agreements, such as the Outer Space Treaty, stipulate that commercial and scientific activities in outer space should be conducted with the principle of "the interests of all humankind." For example, the launch of commercial satellites for global internet services by various countries strengthens economies and supports the development of telecommunications infrastructure in many regions. Moreover, this treaty encourages multinational collaboration in space projects, such as the construction of the International Space Station (ISS), which serves as a model for international cooperation in scientific research and technology with benefits that can be felt globally.

From a social and cultural perspective, air and space law greatly enhance intercultural interaction and information exchange. Global mobility through air transportation allows people from various countries to visit, learn from, and interact with each other, thus

strengthening cross-cultural understanding and increasing tolerance. For instance, the existence of international airlines that adhere to air law regulations enables tourists, migrant workers, students, and businesspeople to travel between countries more easily. This creates bridges connecting different cultures, encourages the exchange of knowledge, and enhances diplomatic relations and cooperation in education, arts, and tourism.

Space law also facilitates global connectivity through satellite networks that support communication, television, radio, and the internet. The presence of these satellites allows various countries to share culture, ideas, and information on an unprecedented scale. Satellite television, for example, enables the broadcasting of programs from different countries worldwide, indirectly supporting the dissemination of positive cultural values and expanding the horizons of global society. Additionally, the internet supported by satellite networks allows real-time data exchange and communication between countries, thus connecting the global community without geographical boundaries. The regulations applied in space law ensure that these services are conducted fairly and safely, without infringing on the interests of others.

In the political realm, air and space law provide an essential foundation for sustainable and healthy diplomacy. With a clear legal framework, countries can plan and develop cooperation in various international programs involving air and space. For example, multinational cooperation in the development and management of the International Space Station (ISS) reflects how space law facilitates collaboration among countries, including those with different political systems. The ISS project demonstrates that space exploration can be an effective diplomatic tool, strengthening international relationships and building mutual trust. Beyond the ISS, there are various other programs that involve countries in collaborative space technology development, satellite research missions, and joint space programs.

Air law also plays a role in diplomacy, particularly in ensuring that international civil aviation activities can occur without political hindrances that disrupt the stability of international relations. For instance, air law provisions regulate that international flights can pass through other countries' airspace based on the principle of peaceful

transit. This provides a legal basis for avoiding conflicts related to airspace access, which often become sensitive issues in inter-country relations. With these provisions in place, countries can avoid tensions and ensure that international flights operate safely and according to regulations while providing protection for passengers and flight crews crossing borders.

In terms of conflict mitigation and defense cooperation, space law provides guidelines that ensure the use of outer space is for peaceful purposes. This is particularly important in the context of increasing dependence on satellites for security and military purposes. Although satellites are used for monitoring and intelligence purposes, international agreements emphasize that these activities should not disturb other countries. The prohibition of placing weapons of mass destruction in outer space, as stated in the Outer Space Treaty, is an example of regulations aiming to prevent an arms race in space and maintain outer space as a neutral and peaceful domain.

Overall, air and space law serve as important pillars in building peace and global cooperation. These laws provide legal certainty for countries to conduct activities in the air and outer space safely, as well as encourage cooperation in various fields such as economics, social interactions, culture, and politics. Through comprehensive regulations, air and space law create a framework that facilitates the achievement of common goals at the global level, ensuring that airspace and outer space can be utilized for peaceful purposes and the welfare of all humankind.

3. Pentingnya Kepatuhan terhadap Hukum Internasional²⁷²

Namun, baik dalam masa sengketa maupun perdamaian, kepatuhan terhadap hukum udara dan hukum angkasa internasional sangatlah penting. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat serius, mulai dari denda ekonomi, embargo, hingga tindakan militer. Sebagai contoh, ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang pembatasan wilayah udara dapat menimbulkan insiden militer, seperti penembakan jatuh pesawat asing yang melanggar wilayah udara tanpa izin. Di sisi

²⁷² K. Martono. (2022). *Perkembangan Teknologi dan Tantangan Hukum Udara*. Jurnal Hukum Udara, 9(1), 45-67.

lain, negara yang terlibat dalam eksplorasi ruang angkasa yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional dapat menghadapi sanksi dari masyarakat internasional.²⁷³

Kepatuhan terhadap hukum internasional dalam konteks hukum udara dan hukum angkasa adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, tetapi juga untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan bahwa seluruh aktivitas udara dan angkasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketika negara-negara mengikuti aturan yang disepakati secara internasional, mereka tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian dan kerja sama global, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik yang mendukung kemajuan bersama.

Pelanggaran hukum udara dan angkasa dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi negara yang melakukannya. Ketidakpatuhan terhadap aturan dalam hukum udara, misalnya, bisa mencakup pelanggaran wilayah udara negara lain tanpa izin atau penggunaan wilayah udara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan seperti ini sering dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara yang wilayah udaranya dilanggar, dan dapat memicu respons militer sebagai bentuk perlindungan. Contoh nyata adalah insiden penembakan jatuh pesawat asing yang memasuki wilayah udara tanpa izin. Situasi ini tidak hanya meningkatkan ketegangan antarnegara, tetapi juga dapat memicu krisis diplomatik atau bahkan konflik bersenjata jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, hukum udara memberikan panduan yang ketat tentang hak dan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya, serta menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Di sisi lain, hukum angkasa juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang mengatur eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Aktivitas di ruang angkasa harus dilakukan berdasarkan prinsip “kepentingan

²⁷³ Michael Milde (2012) - *International Air Law and ICAO*

bersama umat manusia,” yang artinya tidak boleh ada negara yang mengeksploitasi sumber daya angkasa atau menggunakan ruang angkasa untuk tujuan militer tanpa memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian seperti Outer Space Treaty bisa menimbulkan sanksi dari masyarakat internasional. Misalnya, jika suatu negara melakukan aktivitas eksplorasi di luar angkasa yang melanggar batas-batas perjanjian atau menggunakan satelit untuk tujuan militer yang tidak sesuai dengan kesepakatan, negara tersebut dapat dikenakan sanksi berupa embargo, pembatasan teknologi, atau isolasi diplomatik. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan ruang angkasa dilakukan secara damai dan tidak mengganggu kepentingan negara lain.

Lebih jauh lagi, kepatuhan terhadap hukum udara dan hukum angkasa internasional merupakan faktor penting dalam menjaga hubungan internasional yang stabil. Ketika suatu negara melanggar peraturan udara atau angkasa, ini tidak hanya merugikan negara lain, tetapi juga merusak citra internasional negara tersebut. Pelanggaran hukum internasional dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari negara lain, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan dagang, kerja sama ekonomi, dan aliansi diplomatik. Sebagai contoh, sebuah negara yang tidak mematuhi aturan mengenai hak lintas wilayah udara atau eksplorasi angkasa dapat dipandang sebagai ancaman bagi keamanan global. Ini dapat membuat negara lain enggan bekerja sama dalam proyek-proyek internasional atau bahkan mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan defensif yang lebih keras. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum udara dan hukum angkasa adalah hal esensial yang berfungsi sebagai jaminan bahwa hubungan antarnegara tetap berada dalam koridor damai dan saling menghormati.

Selain aspek keamanan dan diplomasi, kepatuhan terhadap hukum udara dan angkasa juga memainkan peran penting dalam keberlanjutan aktivitas manusia di ruang angkasa. Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya jumlah satelit dan benda antariksa lainnya telah menimbulkan

ancaman serius berupa sampah antariksa, yang dapat mengganggu misi-misi luar angkasa di masa depan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum angkasa yang mengatur peluncuran, pengoperasian, dan pengelolaan objek antariksa sangat penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan ruang angkasa. Negara atau entitas yang tidak mematuhi regulasi ini dan meninggalkan benda-benda antariksa yang rusak di orbit dapat dihadapkan pada sanksi internasional atau bahkan tuntutan hukum jika sampah antariksa tersebut menyebabkan kerusakan pada satelit atau objek antariksa lainnya. Oleh karena itu, regulasi mengenai mitigasi sampah antariksa menjadi semakin penting dalam hukum angkasa untuk memastikan bahwa eksplorasi ruang angkasa dapat berlanjut tanpa risiko besar terhadap aset atau misi lainnya.

Dalam aspek komersial, kepatuhan terhadap hukum udara juga mendukung industri penerbangan internasional yang aman dan tertib. Maskapai penerbangan yang beroperasi lintas negara harus mematuhi regulasi yang ditetapkan dalam hukum udara, termasuk hak-hak lintas udara dan persyaratan keselamatan penerbangan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda ekonomi yang besar, pembatasan izin terbang, atau bahkan pelarangan operasional di negara tertentu. Hal ini tidak hanya berdampak pada maskapai yang bersangkutan, tetapi juga pada negara asal maskapai tersebut, yang mungkin akan mendapatkan dampak buruk secara ekonomi dan diplomatik. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan pada hukum udara juga dapat mempengaruhi wisata internasional dan perdagangan, karena menciptakan ketidakstabilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap industri penerbangan internasional.

Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap hukum udara dan hukum angkasa internasional adalah landasan yang tidak hanya menjaga keamanan dan stabilitas global, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan di udara dan luar angkasa dapat dicapai dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Melalui kepatuhan ini, negara-negara dapat memperkuat hubungan

diplomatik, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi internasional, dan mencegah eskalasi konflik yang tidak diinginkan. Dengan mengikuti aturan yang disepakati secara internasional, negara-negara menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kerja sama yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

3. The Importance of Compliance with International Law

Both in times of dispute and peace, compliance with international air law and space law is crucial. Violations of these rules can have serious consequences, ranging from economic sanctions, embargoes, to military actions. For example, non-compliance with regulations regarding airspace restrictions can lead to military incidents, such as the shooting down of foreign aircraft that violate airspace without permission. On the other hand, countries engaged in space exploration that do not adhere to international treaties may face sanctions from the international community.

Compliance with international law in the context of air law and space law is vital not only for maintaining stability and peace but also for preventing the escalation of conflicts and ensuring that all air and space activities operate in accordance with principles of justice. When countries adhere to internationally agreed-upon rules, they not only demonstrate their commitment to peace and global cooperation but also strengthen diplomatic relations that support mutual progress.

Violations of air and space law can lead to serious consequences for the offending countries. Non-compliance with air law, for instance, may involve breaching another country's airspace without permission or using airspace in a manner that contravenes established regulations. Such actions are often viewed as serious violations of the sovereignty of the country whose airspace has been infringed upon and may provoke a military response as a form of protection. A real-world example is the incident involving the shooting down of a foreign aircraft that entered airspace without authorization. This situation not only heightens tensions between countries but can also trigger diplomatic crises or even armed conflict if not managed properly. Therefore, air law provides strict guidelines on the rights and obligations of countries in

maintaining the sovereignty of their airspace, as well as establishing sanctions for those who violate it.

On the other hand, space law also emphasizes the importance of compliance with international treaties governing the exploration and utilization of outer space. Activities in space must be conducted based on the principle of "the interests of all mankind," meaning no country should exploit space resources or use outer space for military purposes without considering applicable international law. Non-compliance with treaties such as the Outer Space Treaty can lead to sanctions from the international community. For instance, if a country conducts exploration activities in outer space that violate the boundaries of the treaty or uses satellites for military purposes not aligned with the agreements, that country may face sanctions such as embargoes, technology restrictions, or diplomatic isolation. This is to ensure that space use is conducted peacefully and does not disrupt the interests of other countries.

Furthermore, compliance with international air law and space law is a crucial factor in maintaining stable international relations. When a country violates air or space regulations, it not only harms other countries but also damages its own international reputation. Violations of international law can lead to a loss of trust from other nations, ultimately affecting trade relations, economic cooperation, and diplomatic alliances. For example, a country that fails to adhere to rules regarding transit rights in airspace or space exploration may be viewed as a threat to global security. This perception can lead other countries to be reluctant to cooperate on international projects or even prompt them to adopt stricter defensive policies. Thus, compliance with air law and space law is essential, serving as a guarantee that inter-state relations remain within the corridors of peace and mutual respect.

In addition to security and diplomacy, compliance with air and space law also plays a vital role in the sustainability of human activities in outer space. In recent decades, the increasing number of satellites and other space objects has posed serious threats in the form of space debris, which can disrupt future space missions. Therefore, adherence to space law governing the launch, operation, and management of space objects is essential for ensuring the safety and sustainability of outer space. Countries or entities that fail to comply with these regulations and leave

damaged space objects in orbit may face international sanctions or even legal actions if the space debris causes damage to satellites or other space objects. Thus, regulations regarding debris mitigation are becoming increasingly important in space law to ensure that space exploration can continue without significant risks to other assets or missions.

From a commercial perspective, compliance with air law also supports a safe and orderly international aviation industry. Airlines operating across borders must adhere to regulations established in air law, including transit rights and flight safety requirements. Violations of these regulations can result in significant economic fines, flight permit restrictions, or even operational bans in specific countries. This not only impacts the airlines involved but also the home country of the airline, which may suffer negative economic and diplomatic consequences. In some cases, non-compliance with air law can also affect international tourism and trade, as it creates instability and diminishes public trust in the international aviation industry.

Overall, compliance with international air law and space law is a foundational element that not only maintains global security and stability but also ensures that advancements in air and space can be achieved in a sustainable and equitable manner. Through compliance, countries can strengthen diplomatic relationships, create a conducive environment for international collaboration, and prevent the escalation of unwanted conflicts. By following internationally agreed rules, countries demonstrate their commitment to the principles of peace, justice, and sustainable cooperation, ultimately supporting the well-being of humanity as a whole.

4. Tantangan di Masa Depan²⁷⁴

Masa depan hukum udara dan hukum angkasa akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Munculnya kendaraan udara tanpa awak (drone) dan rencana perjalanan komersial ke luar angkasa, misalnya, memunculkan tantangan baru bagi pengaturan hukum di bidang ini.²⁷⁵ Hukum udara dan hukum angkasa perlu terus

²⁷⁴ Robert C. Smith (2019) - *Commercial Space Travel: The Regulatory Challenges Ahead*

²⁷⁵ James J. Clark (2017) - *Regulating Drones: The New Frontier of Air Law*

berkembang untuk mengakomodasi inovasi-inovasi ini sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, keselamatan penerbangan, dan eksplorasi ruang angkasa yang damai.²⁷⁶

Selain itu, kepentingan ekonomi dan militer yang semakin meningkat terkait dengan eksplorasi ruang angkasa juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi militerisasi ruang angkasa. Hukum angkasa harus mampu mengatasi masalah ini dengan menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa ruang angkasa digunakan untuk tujuan damai dan demi kepentingan seluruh umat manusia.

Di masa depan, hukum udara dan hukum angkasa akan menghadapi tantangan yang semakin rumit seiring kemajuan teknologi yang melaju cepat dan munculnya inovasi yang tidak terduga di bidang penerbangan dan eksplorasi ruang angkasa. Perkembangan pesat ini menciptakan berbagai pertanyaan baru yang membutuhkan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dan efektif. Tantangan utama yang akan dihadapi meliputi munculnya teknologi baru seperti kendaraan udara tanpa awak (drone), rencana perjalanan komersial dan pariwisata ke luar angkasa, serta peningkatan kepentingan ekonomi dan militer dalam eksplorasi antariksa.

Pertama, pesatnya perkembangan teknologi drone dan kendaraan otonom udara telah menantang aturan konvensional yang mengatur ruang udara. Drone, yang digunakan dalam berbagai sektor mulai dari logistik hingga pemantauan, telah menimbulkan dilema terkait privasi, keselamatan, dan kedaulatan udara. Regulasi mengenai penggunaan drone harus memperhatikan hak-hak negara dalam melindungi wilayah udara mereka, sambil tetap mendukung inovasi dalam sektor transportasi dan logistik. Misalnya, penggunaan drone untuk pengiriman barang secara komersial di wilayah perkotaan menghadapi tantangan mengenai kontrol lalu lintas udara dan risiko keselamatan bagi penduduk. Hukum udara di masa

²⁷⁶ John J. McCarthy (2018) - *Emerging Issues in International Air Law*

depan perlu mencakup pedoman yang jelas tentang ketinggian dan wilayah yang diperbolehkan untuk penggunaan drone komersial dan non-komersial, serta persyaratan keselamatan untuk menghindari kecelakaan udara. Peraturan ini harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menghalangi kemajuan teknologi tetapi tetap menjamin keselamatan dan kedaulatan negara.

Selanjutnya, rencana untuk mengembangkan pariwisata luar angkasa dan perjalanan komersial ke orbit menimbulkan pertanyaan mengenai perizinan, keselamatan, dan tanggung jawab hukum dalam situasi darurat. Saat ini, beberapa perusahaan swasta sedang berlomba-lomba mengembangkan roket dan pesawat luar angkasa untuk membawa turis dan individu ke luar angkasa. Namun, hal ini memerlukan aturan yang jauh lebih spesifik, termasuk tentang keamanan penumpang, prosedur evakuasi dalam kondisi darurat, dan ketentuan asuransi yang jelas. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan di luar angkasa yang melibatkan penumpang dari berbagai negara? Aturan yang ada harus diperbarui untuk mengatasi aspek-aspek ini dan memastikan bahwa pariwisata luar angkasa dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Kekhawatiran lainnya adalah meningkatnya minat ekonomi dan militer dalam eksplorasi ruang angkasa. Potensi sumber daya alam yang melimpah di asteroid dan planet lain, seperti logam mulia atau sumber daya energi, telah menarik minat negara dan perusahaan swasta untuk mengeksplorasi luar angkasa secara lebih intensif. Namun, tanpa regulasi yang jelas, hal ini dapat memicu persaingan dan konflik antarnegara. Hukum angkasa di masa depan perlu mengatasi tantangan ini dengan menetapkan kerangka yang memastikan bahwa eksplorasi sumber daya ruang angkasa dilakukan secara adil dan tidak merugikan negara-negara yang tidak memiliki akses teknologi tinggi. Sementara itu, meskipun Outer Space Treaty melarang kepemilikan wilayah di ruang angkasa dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer, perjanjian ini

perlu diperkuat agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi modern dan potensi militerisasi yang semakin meningkat.

Potensi militerisasi ruang angkasa menjadi isu penting lainnya yang memerlukan perhatian serius dalam hukum angkasa. Di masa lalu, ruang angkasa digunakan terutama untuk tujuan damai dan ilmiah. Namun, dengan berkembangnya teknologi satelit untuk kepentingan pertahanan dan intelijen, ada kekhawatiran bahwa ruang angkasa bisa berubah menjadi medan perang baru. Beberapa negara telah mengembangkan teknologi satelit yang mampu melakukan pengintaian atau bahkan melacak dan mengganggu satelit lain, yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan global. Oleh karena itu, hukum angkasa di masa depan harus mencakup regulasi yang ketat mengenai aktivitas militer di ruang angkasa, termasuk pembatasan terhadap penggunaan satelit untuk tujuan agresif atau teknologi senjata di orbit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ruang angkasa tetap menjadi wilayah damai yang dapat digunakan bersama untuk kemajuan umat manusia.

Selain tantangan terkait keamanan dan militerisasi, hukum angkasa juga perlu memperhatikan isu lingkungan antariksa, terutama dengan meningkatnya jumlah sampah antariksa yang dihasilkan oleh peluncuran roket dan satelit yang rusak atau tidak digunakan lagi. Sampah antariksa ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap misi luar angkasa lainnya, termasuk risiko tabrakan dengan satelit aktif atau pesawat luar angkasa berawak. Untuk mengatasi masalah ini, hukum angkasa harus mengatur kewajiban negara atau perusahaan yang meluncurkan objek ke luar angkasa untuk memastikan bahwa sampah antariksa mereka tidak merusak lingkungan antariksa atau membahayakan misi luar angkasa lainnya. Ini dapat mencakup kewajiban untuk mengatur jalur peluncuran, membatasi jumlah peluncuran, atau mengembangkan teknologi yang dapat membantu membersihkan sampah antariksa.

Selain itu, tantangan dalam mengembangkan hukum udara dan angkasa juga terletak pada kemampuan hukum internasional untuk tetap mengikuti kecepatan inovasi teknologi

yang sangat pesat. Sebagai contoh, hukum udara dan angkasa yang ada saat ini mungkin tidak lagi relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi masa depan, seperti teknologi hipersonik, yang memungkinkan perjalanan udara dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari pesawat komersial biasa. Oleh karena itu, hukum internasional harus lebih fleksibel dan siap untuk ditinjau dan diperbarui secara berkala guna menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan masa depan.

Secara keseluruhan, masa depan hukum udara dan hukum angkasa akan memerlukan kolaborasi internasional yang kuat, inovasi dalam regulasi, dan komitmen yang tinggi untuk menjaga prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan, keselamatan, dan eksplorasi damai. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan baru dalam pembuatan kebijakan dan pengaturan hukum, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis tetapi juga dampak sosial, politik, dan ekonomi di tingkat global. Dengan demikian, hukum udara dan hukum angkasa di masa depan dapat terus berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi dan eksplorasi di wilayah udara dan luar angkasa dilakukan dengan cara yang adil, aman, dan menguntungkan bagi seluruh umat manusia.

4. Future Challenges

The future of air law and space law will become increasingly complex with the rapid advancement of technology. The emergence of unmanned aerial vehicles (drones) and plans for commercial space travel, for example, present new challenges for legal regulations in these areas. Air law and space law must continue to evolve to accommodate these innovations while upholding fundamental principles such as national sovereignty, flight safety, and peaceful exploration of outer space.

Moreover, the growing economic and military interests related to space exploration raise concerns about the potential militarization of space. Space law must be able to address this issue by providing a framework that ensures outer space is used for peaceful purposes and for the benefit of all humanity.

In the future, air law and space law will face increasingly intricate challenges as technological advancements accelerate and unforeseen innovations emerge in the fields of aviation and space exploration. This rapid development creates various new questions that necessitate regulatory adjustments to remain relevant and effective. Key challenges will include the rise of new technologies such as unmanned aerial vehicles (drones), plans for commercial tourism and travel to outer space, and increasing economic and military interests in space exploration.

First, the rapid development of drone technology and unmanned aerial vehicles has challenged conventional regulations governing airspace. Drones, used in various sectors ranging from logistics to surveillance, have raised dilemmas concerning privacy, safety, and air sovereignty. Regulations regarding drone usage must consider the rights of countries to protect their airspace while still supporting innovation in transportation and logistics sectors. For example, the use of drones for commercial package delivery in urban areas faces challenges related to air traffic control and safety risks for residents. Future air law needs to include clear guidelines regarding the permitted altitudes and areas for both commercial and non-commercial drone use, as well as safety requirements to prevent air accidents. These regulations should be designed in such a way that they do not hinder technological progress while ensuring safety and national sovereignty.

Next, plans to develop space tourism and commercial travel to orbit raise questions about licensing, safety, and legal responsibilities in emergency situations. Currently, several private companies are racing to develop rockets and spacecraft to take tourists and individuals into space. However, this requires much more specific regulations, including those regarding passenger safety, emergency evacuation procedures, and clear insurance provisions. Additionally, who is responsible in the event of an accident in space involving passengers from various countries? Existing rules must be updated to address these aspects and ensure that space tourism is conducted safely and responsibly.

Another concern is the growing economic and military interest in space exploration. The potential for abundant natural resources on asteroids and other planets, such as precious metals or energy resources,

has attracted the attention of countries and private companies to explore outer space more intensively. However, without clear regulations, this could trigger competition and conflict among nations. Future space law must address these challenges by establishing a framework that ensures that the exploration of space resources is conducted fairly and does not harm countries without access to high technology. Meanwhile, while the Outer Space Treaty prohibits the ownership of territory in outer space and the use of outer space for military purposes, this treaty needs to be strengthened to remain relevant in light of modern technological advancements and the increasing potential for militarization.

The potential militarization of space is another significant issue that requires serious attention in space law. In the past, outer space was primarily used for peaceful and scientific purposes. However, with the development of satellite technology for defense and intelligence purposes, there are concerns that outer space could become a new battlefield. Some countries have developed satellite technologies capable of reconnaissance or even tracking and disrupting other satellites, which could threaten global security stability. Therefore, future space law must include strict regulations regarding military activities in outer space, including limitations on the use of satellites for aggressive purposes or weapon technologies in orbit. This is crucial to ensure that outer space remains a peaceful domain that can be jointly used for the advancement of humanity.

In addition to security and militarization challenges, space law must also address environmental issues in outer space, particularly with the increasing amount of space debris generated by rocket launches and defunct satellites. This space debris poses serious risks to other space missions, including the risk of collisions with active satellites or crewed spacecraft. To address this issue, space law should regulate the obligations of countries or companies launching objects into outer space to ensure that their space debris does not harm the outer space environment or endanger other space missions. This may include obligations to regulate launch trajectories, limit the number of launches, or develop technologies that can help clean up space debris.

Furthermore, challenges in developing air and space law also lie in the ability of international law to keep pace with the rapid pace of technological innovation. For example, existing air and space laws may

no longer be relevant in the face of future technological advancements, such as hypersonic technology, which allows for air travel at speeds far exceeding those of conventional commercial aircraft. Therefore, international law must be more flexible and prepared for regular review and updates to meet technological developments and future challenges.

Overall, the future of air law and space law will require strong international collaboration, innovative regulatory approaches, and a high commitment to uphold fundamental principles such as sovereignty, safety, and peaceful exploration. These challenges necessitate a new approach to policy-making and legal regulation that considers not only technical aspects but also social, political, and economic impacts at a global level. Thus, air law and space law in the future can continue to play an essential role in ensuring that technological progress and exploration in air and outer space are conducted in a fair, safe, and beneficial manner for all of humanity.

TENTANG PENULIS



Prof. Anis H. Bajrektarevic

Anis H. Bajrektarevic is chairperson and professor in international law and global political studies, Vienna, Austria. He has authored nine books (for American and European publishers) and numerous articles on, mainly, geopolitics energy and technology. Professor is editor of the NY-based GHIR (Geopolitics, History and Intl. Relations) journal, and editorial board member of several similar specialized magazines on three continents. His 10th book 'Justice and Home Affairs Diplomacy' is scheduled for release later this year in New York.



Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. is the youngest professor of business law in Indonesia, recognized by the Indonesian World Records Museum (MURI). Prof. Dr. Ariawan Gunadi often serves as an expert witness in various court cases, both domestically and internationally.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi is currently the Chairman of the Tarumanagara Foundation. The Tarumanagara Foundation is the parent organization of Tarumanagara University, Royal Taruma Hospital, Tarumanagara Institute, and several other companies under its umbrella. Prof. Dr. Ariawan also has experience as a visiting lecturer at various higher education institutions, both within Indonesia and abroad. He currently serves as the Honorary Professor of the Military Law College (STHM). He served as the Vice Rector of Tarumanagara University from 2016 to 2020 and has experience as a Rector at other institutions. Additionally, he is active as a Trustee, Supervisor, and Manager in various social foundations.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi has corporate experience, having served as a member of the Board of Commissioners and as a Director in several companies. He has also previously served as an expert in

the Ministry, the Supreme Audit Agency (BPK), the Agency for Pancasila Ideology Education (BPIP), and the Jakarta Provincial Government. Furthermore, he founded the law firm AG & Partners and currently serves as its President Director/

Managing Partner. He currently serves as the Supervisory Board/Commissioner of Global Entrepreneurship Network (GEN) Indonesia. Prof. Ariawan is also an accredited arbitrator and mediator in Indonesia and Singapore.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi's academic experience includes studying Foundation/Corporate Governance at several universities in the United States. He frequently presents at international conferences, such as the Asian Law Institute Conference and ASIANSIL, alongside the UN Secretary-General and at other international events in Asia, Australia, Europe, China, and the United States. He has been invited as a Visiting Professor at Tsinghua University and several other universities.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi has also been invited as a delegate in a meeting with the Indonesian Special Envoy to the United Nations (UN) & World Trade Organization (WTO) at the UN & WTO headquarters in Geneva, Switzerland. He has also served as an Expert at ICC Singapore at (International Chamber of Commerce). He is also appointed as the Chairman of the Central Board of ALPENINDO (ALUMNI PENABUR INDONESIA) and Vice Chairman of the Indonesian Chinese Social Association Central Board for Education and Health Affairs.

He is often a resource person on national TV and received the Best Professional 2020 award from Obsession Award, as well as the Indonesia Leadership and Professional Award 2021. Prof. Dr. Ariawan Gunadi is a MURI record holder and received the PWI Award 2023 from the Indonesian Journalists Association, the Indonesia Stock Exchange Award 2023 from the Indonesia Stock Exchange / IDX Channel, and awards from Tribun and Kompas Gramedia in the Mata Lokal Award as the Ace of Education.



Columbanus Priaardanto, S.H. lahir di Batang 20 November 1969. Penulis menikah dengan Fridah Lumintang dan memiliki 3 buah hati yang bernama Privando Eduardus Putradanto (Almarhum), Laurensia Mutiara Anindya, dan Luisa Christina Kinanthi. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri Beji 2 Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tahun 1976- 1982; SMPN 3

Batang Jawa Tengah tahun 1982-1985 SMAN Batang Jawa Tengah tahun 1985-1988 Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 1988 tidak lulus; dan Wisuda Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Beberapa pengalaman penulis di berbagai organisasi perusahaan yakni PT Utomo Deck Metal Work Surabaya 1993 sebagai Staf Marketing PT Graha Sarana Fiberglass (Graha Group) 1993-2001. Terakhir sebagai General Manager membuat inovasi pembuatan Water Treatment Plan (WTP) kapasitas 1 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pesisir Pantai utara Demak Jawa Tengah. Ini merupakan terobosan dan penemuan Pertama di Dunia; dan pernah bekerja di PT Firpec Graha Sarana (Graha Group) tahun 2001-2013.

Membuat desain Tangki Air Hidran Umum untuk keperluan Pengungsi bencana Tsunami Aceh 2004. Sehingga kebutuhan tangki penampungan air yang diperlukan pada kondisi darurat tercukupi dalam waktu singkat. Karena diperlukan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Ini Penemuan desain Tangki yang bisa disusun pertama di dunia yang menggunakan Molding Besi untuk Tangki penampungan air berbahan PolyEthylene (HDPE). Pada masa itu Tangki air yang bisa disusun di buat dengan material Fiberglass (FRP) yang memerlukan waktu 1 hari untuk 1 Tangki air di produksi. Pada pembuatan Tangki air berbahan dasar HDPE dengan 1 mesin Rotary Moulding bisa menghasilkan 2 buah Tangki air setiap 1,5 jam.

Menjadi Manager khusus Proyek besar di perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur air minum Perkotaan seluruh Indonesia pada PT Maswandi 2014-2015. Penulis juga bekerja di PT Dinamika Daya Utama dari tahun 2015 hingga sekarang, sebagai pendiri, pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama.

Menangani pembangunan Sanitary Landfill Terbesar di Indonesia dalam hal ini bekerja sama aktif sebagai investor pendanaan dan detail pelaksanaan dan operasional PT Lepen Kencana Utama di TPPSA Nambo Bogor Jawa Barat tahun 2015-2017 dan PT. Darmaprema Mandala di TPPSA Legok Nangka Bandung Jawa Barat tahun 2015-2017. Founder and Managing Partner Kantor Pengacara/Firma Hukum Danto dan Tomi & Rekan tahun 2018-Sekarang.

Sebagai Founder dan Funder utama dan Managing Partner Firma hukum dalam membantu pemahaman hukum penerbangan, hukum perdata dan hukum pidana yang diperlukan yang merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan Lion Air JT 610. Dalam proses persiapan penuntutannya melibatkan ahli hukum penerbangan terbaik di Indonesia DR Ahmad Sudiro yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara di Jakarta.

Berhasil Membantu dan mendampingi keluarga korban kecelakaan Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018. Dalam menuntut penggantian atas kerugian Materil dan Immateriil atas dugaan cacat produk pesawat Boeing 737 Max 8 di Pengadilan Federal Chicago USA dalam hal ini bekerjasama bersama Charles Herrmann dari kantor Pengacara Herrmann Law Group di Seattle, Washington USA. Pada kasus ini memawakili sekitar 46 orang keluarga korban JT 610 dengan kemenangan penuh yang diterima keluarga korban JT 610 dan menerima penggantian yang sangat memuaskan.

Berhasil membantu dan mendampingi 24 dari 62 Keluarga korban Sriwijaya SJ 182 yang terjadi pada 9 Januari 2021. Pada putusan sela saat ini sudah memenangkan penolakan mosi FNC yg ditiukan Boeing pada . pengadilan Federal di Virginia US, Demikian Curiculhsn Vitae ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Oktober 2024
Columbanus Priaardanto. S.H

Columbanus Priaardanto, SH, was born in Batang on November 20, 1969. He is married to Fridah Lumintang and has three children: Privando Eduardus Putradanto (deceased), Laurensia Mutiara Anindya, and Luisa Christina Kinanthi.

Education

1. Elementary School: SD Negeri Beji 2, Tulis District, Batang, 1976–1982
2. Junior High School: SMPN 3 Batang, Central Java, 1982–1985
3. High School: SMAN Batang, Central Java, 1985–1988
4. University: Faculty of Engineering, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan (did not graduate, 1988); Faculty of Law, Tarumanagara University, Jakarta (graduation: October 20, 2024)

Professional Experience

1. Marketing Staff, PT Utomo Deck Metal Work, Surabaya (1993)
2. PT Graha Sarana Fiberglass (Graha Group) (1993–2001), culminating as General Manager. Innovated the design of a Water Treatment Plant (WTP) with a capacity of 1 liter per second, the first globally to provide clean water for low-income communities along the northern coast of Demak, Central Java.
3. PT Firpec Graha Sarana (Graha Group) (2001–2013). Designed stackable emergency water tanks for the 2004 Aceh tsunami disaster relief using HDPE materials, a groundbreaking innovation in rapid emergency water tank production.
4. Project Manager for urban water infrastructure, PT Maswandi (2014–2015).

5. Founder, Majority Shareholder, and CEO, PT Dinamika Daya Utama (2015–present). Managed major projects like Indonesia's largest sanitary landfill projects at TPPSA Nambo, Bogor, and TPPSA Legok Nangka, Bandung (2015–2017).

Legal Career

1. Founder and Managing Partner, Danto and Tomi & Partners Law Firm (2018–present). Focused on aviation, civil, and criminal law.
2. Supported families of victims of Lion Air JT 610 (October 29, 2018) in their lawsuit against Boeing for material and immaterial damages due to defects in the Boeing 737 Max 8. Represented 46 families alongside Charles Herrmann (Herrmann Law Group, Seattle) at the Federal Court in Chicago, achieving a successful settlement.
3. Represented 24 out of 62 families affected by the Sriwijaya Air SJ 182 crash (January 9, 2021). Successfully rejected Boeing's FNC motion in the Federal Court in Virginia, USA.

This curriculum vitae is prepared truthfully.

Jakarta, October 2024

Columbanus Priaardanto, SH



Ekky Widha Atmaka AMd, SH, CPLA

Air Traffic Controller

Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

Penulis lahir di Tulungagung tanggal 01 Januari 1992. Penulis adalah Profesional Air Traffic Controller (ATC) dan juga sebagai dosen terbang pada Program Studi dibidang Penerbangan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan ilmu hukum di Universitas Ekasakti Padang – Sumatera Barat dan sedang menjalani pendidikan S2 pada konsentrasi Hukum Komersial di Universitas Wijaya Putra – Surabaya. Penulis menekuni inovasi dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan operasi keselamatan serta navigasi penerbangan, selain itu penulis juga menekuni tentang pendidikan, ilmu hukum

dan juga ilmu aviasi. Motivasi penulis untuk membagikan ilmu pengetahuan dan juga menekuni hobi sebagai penulis. Karya yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah Buku Referensi yang terbit di Indonesia adalah Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now, Mengenal Lebih Dekat ICAO, Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia, Bunga Rampai Hukum Udara, Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif, Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis, Literasi Digital dalam Pendidikan: Integrasi dan Inovasi, serta satu Buku Monograf yang diterbitkan di Italia yang berjudul Air Traffic Control Service From Home (ATCS-FH). Buku-buku tersebut merupakan buku tentang ilmu penerbangan/aviasi, ilmu pendidikan dan juga ilmu hukum.

Air Traffic Controller
Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

The author was born in Tulungagung on January 1, 1992. He is a professional Air Traffic Controller (ATC) and also serves as a visiting lecturer in aviation-related study programs. He completed his undergraduate education in law at Ekasakti University, Padang – West Sumatra, and is currently pursuing a Master's degree with a concentration in Commercial Law at Wijaya Putra University, Surabaya. The author is deeply engaged in innovations in technology, science, and operations related to aviation safety and navigation. Additionally, he has a strong interest in education, legal studies, and aviation science. Motivated to share knowledge, he also pursues his passion for writing. His published works include reference books in Indonesia, such as Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now (Air Law in Indonesia: Current Trends in Air Navigation), Mengenal Lebih Dekat ICAO (Getting to Know ICAO), Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia (Innovation for the Future of Indonesia's ANSP), Bunga Rampai Hukum Udara (An Anthology of Air Law), Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif (Opening the Door to Legal Knowledge: A Comprehensive Beginner's Guide), Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis (Education Planning: Concepts and Strategic Steps), and Literasi Digital dalam Pendidikan:

Integrasi dan Inovasi (Digital Literacy in Education: Integration and Innovation). Furthermore, he has authored a monograph published in Italy, titled Air Traffic Control Service From Home (ATCS-FH). These books focus on aviation science, education, and legal studies.



Elfi Amir, SSiT, SE, MM yang biasa dipanggil **TEVI** lahir di Bukit Tinggi 29 Desember 1961, Lulus Diploma 2 tahun 1982, lanjut Diploma 3 tahun 1993 di Pendidikan dan Latihan Penerbangan (PLP) dan lanjut Diploma 4 Tahun 2000 di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Serta menyelesaikan Sarjana S1 tahun 2001, Pasca Sarjana S2 tahun 2003. Memiliki istri bernama Helma, S.IP dan seorang putri bernama dr.Oktavia Tiffani,M.M serta seorang putra bernama Jhandika Binanda,S.M.

Pernah sebagai Anggota Dewan Pengawas BUMN Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) sejak tahun 2018 sampai 2022, saat ini sebagai Dosen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) sejak Agustus tahun 2021, dan mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Penerbangan Aeronautika sejak Oktober 2021 sampai sekarang, serta aktif dalam organisasi profesi menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Curug (IAC) periode 2022-2026, Ketua Umum PENKOPURI (Pensiunan Korp Pegawai Perhubungan Udara R.I periode 2024-2027

Pernah mengikuti Diklat General Instructor Course (2017), Safety Management System (2017) dan Human Factor (2017) dan Training Instructor Course tahun 2022 yang diselenggarakan oleh TransAir Plus. Disamping itu juga pernah mengikuti Diklat Instruktur Keamanan Penerbangan pada 2022, dan Diklat PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Tahun 2022)

Memiliki beberapa pengalaman kerja profesional dalam Kementerian Perhubungan Indonesia antara lain sebagai Kepala Bandara Cut Nyak Dhien-Nagan raya, Aceh (tahun 2011), Kepala Bandara HAS Hanandjoeddin-Belitung (2012), Kasubdit

Manajemen Lalu Lintas Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan (Tahun 2013-2016), Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan (2016-2018), Kepala Bandara Juwata Tarakan-Kalimantan Utara (Tahun 2018), Direktur Navigasi Penerbangan (2018-2019). Kepala Kantor Otoritas Wilayah IV membawahi Provinsi Bali, NTB dan NTT (2019-2020.) dan Direktur Keamanan Penerbangan (2020-2021) dan saat ini sebagai Dosen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (tahun 2021 s/d sekarang)

AUTHOR HISTORY

Elfi Amir, SSiT, SE, MM who is usually called TEVI was born in Bukit Tinggi 29 December 1961, graduated with Diploma 2 in 1982, continued with Diploma 3 in 1993 in Aviation Education and Training (PLP) and continued with Diploma 4 in 2000 at the Indonesian Civil Aviation Institute . As well as completing his Bachelor's Degree in 2001, Master's Degree in 2003. Has a wife named Helma, S.IP and a daughter named Dr. Oktavia Tiffani, M.M and a son named Jhandika Binanda, S.M.

Has been a Member of the Supervisory Board of BUMN Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) from 2018 to 2022, currently as a Lecturer at the Indonesian Civil Aviation Polytechnic (PPI) Curug since August 2021, and has had additional duties as Head of the Aeronautical Information Study Program from October 2021 until now, and is active in professional organizations as General Chair of the Curug Alumni Association (IAC) for the 2022-2026 period, General Chair of PENKOPURI (Retired Indonesian Air Transportation Employees Corps for the 2024-2027 period.

He has attended the General Instructor Course (2017), Safety Management System (2017) and Human Factor (2017) and the 2022 Instructor Training Course organized by TransAir Plus. Apart from that, he also participated in Aviation Security Instructor Training in 2022, and PEKERTI Training (Increasing Basic Skills in Instructional Techniques (2022)

Has several professional work experiences in the Indonesian Ministry of Transportation, including as Head of Cut Nyak Dhien-Nagan Raya Airport, Aceh (2011), Head of HAS Hanandjoeddin-Belitung Airport (2012), Head of Aviation Traffic Management Sub-Directorate, Directorate of Aviation Navigation (2013-2016), Head of Sub-Directorate for Aviation Navigation Personnel (2016-2018), Head of Juwata Airport Tarakan-North Kalimantan (2018), Director of Aviation Navigation (2018-2019). Head of the Regional IV Authority Office in charge of the Provinces of Bali, NTB and NTT (2019-2020.) and Director of Aviation Security (2020-2021) and currently a Lecturer at the Indonesian Civil Aviation Polytechnic Curug (2021 to now)

Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH

Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH merupakan seorang Dosen Tetap FH-UNTAR tahun 1988-sekarang. Beralamat di Jl. Palimanan 101, Golf Mediterania 2, Sentul City-Sentul Selatan Kabupaten Bogor.

Riwayat Pendidikan:

1. Sarjana Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Lulus tahun 1985
2. Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta Lulus. tahun 1988
3. Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Lulus tahun 2001
4. Spesialis Notariat Universitas Indonesia Jakarta. Lulus tahun 1996
5. Sarjana Sastra Universitas Nasional Jakarta. Lulus tahun 1987

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Tetap FH-UNTAR tahun 1988-sekarang
2. Pudek II FH-UNTAR tahun 1989
3. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Untar tahun 1991-2000
4. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Untar tahun 2001-2005
5. Sebagai Co-Promotor dan Penguji Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Universitas Parahyangan, Universitas

Trisakti dan Universitas Tarumanagara sejak tahun 2002-sekarang.

6. Sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta untuk program S1 dan S2 sejak tahun 2001-2010
7. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Serang Banten 2018-2020

Sentul, 03 Februari 2021

DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, SH.SS,MH.

Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH

Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH, has been a permanent lecturer at the Faculty of Law, Tarumanagara University (FH-UNTAR) since 1988. He resides at Jl. Palimanan 101, Golf Mediterania 2, Sentul City-South Sentul, Bogor Regency.

Educational Background

1. Bachelor of Law, University of Indonesia, Jakarta (Graduated 1985)
2. Master of Law, University of Indonesia, Jakarta (Graduated 1988)
3. Doctor of Law, University of Indonesia, Jakarta (Graduated 2001)
4. Notarial Specialist, University of Indonesia, Jakarta (Graduated 1996)
5. Bachelor of Literature, National University, Jakarta (Graduated 1987)

Work Experience

1. Permanent Lecturer at FH-UNTAR (1988-present)
2. Vice Dean II, FH-UNTAR (1989)
3. Secretary of the Master of Law Program, Tarumanagara University (1991-2000)
4. Head of the Master of Law Program, Tarumanagara University (2001-2005)

5. Co-Promoter and Examiner for Doctor of Law Programs at the University of Indonesia, Parahyangan University, Trisakti University, and Tarumanagara University (2002–present)
6. Assessor for the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT), for undergraduate and master's programs at public and private universities (2001–2010)
7. Director of Postgraduate Studies, Mathla'ul Anwar University, Serang, Banten (2018–2020)

Sentul, February 3, 2021

Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS,
MH

Prof. Dr. Gunardi Lie SH, MH

Dr. Gunardi Lie, SH., MH., lahir di Cirebon 25 Maret 1959. Sejak tahun 1987 ia menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga sekarang. Dr. Gunardi menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan-Bandung pada tahun 1986, selanjutnya menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1994, dan menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2016. Penelitian yang pernah dilakukan adalah “Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia”; “Analisis Yuridis UUD 45 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia”; “Kebijakan Perijinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat”; dan “Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi Quasi Peradilan dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten di Indonesia; dll. Berbagai artikel ilmiah internasional di antaranya: “Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in The Pancasila Perspective and Indonesian Constitution Law’; “Political of Law Due to The Protection of Land Right Holders Based in The Rechtsverwerking Pricipal’; A Negative Pedge as an Alternative Solution to Achieve the Pari Passu Pro-Rata Parte Principle’; dll. Buku-Buku yang pernah ditulis: ‘Sistem Peradilan Kepailitan dan Penalaran Hukum’; “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”; “Kapita Selektta Hukum Bisnis”; Organisasi

yang diikuti di antaranya adalah Forum Dekan/Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Swasta dan menjadi ketua selama 2 periode 2006-2010; Majelis Pengawas Notaris Daerah-Jakarta Barat dan menjabat sebagai Wakil Ketua 2005-2008; Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Untar 2012-2018; PERADI 86.10041; Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); Resimen Mahawarman Bataliyon Unpar 1980 (C.80.11710); Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) sebagai Ketua Departemen/Direktur Eksekutif 2020-2024 dan 2022-2026; dll. Selama menjadi dosen, pernah menduduki jabatan struktural Sekretaris dan Kepala Pusat Penelitian FH Untar 1989-1999; Pudek I tahun 1998-2004; dua periode sebagai Dekan FH Untar 2004-2012; Ketua Program Studi Magister Hukum 2006-2008; dan dua kali menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara 2012-2022. Terhitung 1 Mei 2023 diangkat sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNTAR.

Prof. Dr. Gunardi Lie, SH, MH

Dr. Gunardi Lie, SH., MH., was born in Cirebon on March 25, 1959. Since 1987, he has been a permanent lecturer at the Faculty of Law, Tarumanagara University, and continues in this role to date. Dr. Gunardi completed his undergraduate studies at the Faculty of Law, Parahyangan Catholic University, Bandung, in 1986. He earned his Master's degree from the Faculty of Law, University of Indonesia, in 1994, and his Doctorate from the Faculty of Law, Tarumanagara University, in 2016.

Research Undertaken

1. "Decisions of Commercial Courts in the Indonesian Judicial System"
2. "Juridical Analysis of the 1945 Constitution as the Foundation of the Indonesian State Constitution"
3. "Mining Permit Policies and Their Issues in Indramayu Regency, West Java"

4. "Independent Commission for Personal Data Protection: Quasi-Judiciary and Efforts to Establish the Right to be Forgotten in Indonesia"

Selected International Scientific Articles

1. "Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in the Pancasila Perspective and Indonesian Constitutional Law"
2. "Politics of Law Due to the Protection of Land Rights Holders Based on the Rechtsverwerking Principle"
3. "A Negative Pledge as an Alternative Solution to Achieve the Pari Passu Pro-Rata Parte Principle"

Books Authored

1. "The Insolvency Judicial System and Legal Reasoning"
2. "Legal Research Methods Textbook"
3. "Selected Topics in Business Law"

Organizational Affiliations

1. Forum of Deans/Leaders of Private Law Schools (Chairperson for two terms, 2006–2010)
2. Regional Supervisory Council for Notaries in West Jakarta (Vice Chairperson, 2005–2008)
3. Chairperson of the Consultation and Legal Aid Center, Faculty of Law, Tarumanagara University (2012–2018)
4. Member of PERADI 86.10041
5. Member of the Indonesian Advocates Association (AAI)
6. Resimen Mahawarman Battalion Unpar, 1980 (C.80.11710)
7. Indonesian Association of Private Higher Education Institutions (ABPPTSI) as Department Head/Executive Director (2020–2024 and 2022–2026)

Administrative Positions Held

1. Secretary and Head of the Research Center at the Faculty of Law, Tarumanagara University (1989–1999)
2. Vice Dean I (1998–2004)
3. Dean of the Faculty of Law, Tarumanagara University (2004–2012, two terms)
4. Chairperson of the Master of Law Program (2006–2008)

5. Chairperson of the Tarumanagara Foundation Board (2012–2022, two terms)
6. Effective May 1, 2023, Dr. Gunardi was appointed as a Full Professor at the Faculty of Law, Tarumanagara University.



Mahoro Jean Claude Geoffrey, LLB, LLM

Law doctoral student at the University of Pécs, Hungary. LL.M holder with First Class from Universitas Diponegoro, Indonesia. Former ILPD Research Coordinator. Researcher in the legal field of international trade law, Business and Financial Law, Medical Law; Tort Law;

Human Rights, Aviation Law, and Environmental Law. Nationality: Rwandan.

Educational background : Sept. 2022 – Now Ph.D. Student, Doctoral School of Law, University of Pécs, Hungary | 2018 – 2019 Master of Laws, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Cumulative Grade Point Average (CGPA): 3.95/4.00 | Thesis topic The Concept of TNCs' Direct Responsibility for Human Rights Violations in the Host Jurisdiction | Supervisor Prof. Dr. F.X. Joko Priyono | 2011 – 2015 Bachelor of Law (Hons), University of Rwanda -School of Law, Huye, Rwanda. | 2007 – 2010 Advanced General Certificate of Secondary Education, APEKI - TUMBA, Rwanda.

Professional experience : Jan. 2021- Until now : Assistant Lecturer at Kigali Independent University (ULK) and INESRUHENGGERI (Part-time basis). Responsibilities: Delivering law-related modules to law students and participating in research | May 2021-Sept. 2022 : Research Coordinator, Institute of Legal Practice and Development (ILPD). Responsibilities: Review research materials and reports, Participate in teaching the research paper class and modules, Be the secretary of Experts Committees of research projects, Organize presentation and dissemination of research completed, Participate in research activities, Coordination and follow on the hiring of a competent consultant, Coordination and follow-up to ensure that all consultants are facilitated for

payment upon completion of research activities assigned to them; and, Organising the meetings on research consultancies. | Dec. 2016 – Aug. 2017: Civil Registrar and Notary Officer at Muhanga District. Responsibilities: Civil Registry and Vital Statistics (CRVS); Respond to citizens' complaints and carry out notarial duties and governance-related assignments. | July. – Dec. 2016: Intern at Forzley & Associates, Global Health Legal Advisors. Responsibilities: Research on East African Countries' medicines legal and regulatory function. | Feb. – Dec. 2016: Teacher at Kageyo Secondary School, Gicumbi District, Rwanda. Responsibilities: Delivering Business and Commercial Law courses. | Jan. – Feb. 2016: Intern at Intermediate Court of Gicumbi, Gicumbi, Rwanda. Responsibilities: Registering administrative, civil and criminal cases in court cracker's office | March – April 2015: Intern at National Commission for Human Rights of Rwanda (NCHR), Kigali. Responsibilities: Receiving and analysing citizens' complaints on Human Rights violations | Nov. 2013 – Jan. 2016: Program Manager & Legal officer at Oasis for Prosperity Foundation, Huye. Responsibilities: Drafting projects for funds and organising training sessions and collaborating with Partners, and providing legal advice to the Foundation | Feb. 2012– May 2015: Encadreur (Youth Coach). Responsibilities: Assisting youth in catechesis at St. Dominique, University Catholic Parish. | Jan. – Dec. 2011: Teacher at G. S. Rwamiko, Gicumbi District, Rwanda. Responsibilities: Delivering English course.

Volunteer experience: 2014 – 2015 Youth champion (appointed) at AEGIS Trust, Kigali, Rwanda. Responsibilities: Empower Rwandan youth and promote sustainable peace and development. | 2013 - 2015 The volunteer-like arrangement, Never Again Rwanda (NAR), Kigali, Rwanda. Responsibilities: Delivering public lectures on reconciliation, and peacebuilding, participating in the commemoration of Genocide against Tutsi, and preparing social projects.

Skills and competencies: Legal research technics and report writing, contract design and negotiation; conflict resolution and management; interpersonal; leadership and communication; and

respect for diversity. Computer skills: Microsoft Office Word, Excel, Outlook, and PowerPoint. Languages : English (C2); French (B2); Kinyarwanda (C2); Swahili (C1); and Indonesian (B2).

Research experience

1. Jean Claude Geoffrey Mahoro, *The Panorama of Violence Against Women: Background And Global Tak,*” Certa Foundation Journal - (Human Rights and Gender-based Violence) Vol. 1, Dec. 2023:13-17.
<https://www.certafoundation.rw/resource/certa-foundation-journal-volume-1-human-rights-and-genderbased-violence>
2. Jean Claude Geoffrey Mahoro, “Liabilities for Medical Negligence and Malpractice in Rwanda: A Comparative Analysis,” In *Proceedings of the 5th conference organised for Pécs law doctoral students*, Pécs, 2023,166-187. Pécs: Doctoral School of Law, University of Pécs.
<https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;34118582>
3. Jean Claude Geoffrey Mahoro, *Police Discretion: An Issue of Untestable Reasonability in A Law Enforcement Process,*” In *Police Behavior, Hiring, and Crime Fighting: An International View*, 1st ed., New York: Routledge, 2021.
<https://doi.org/10.4324/9781003047117>
4. Geoffrey, M.J.C and Samekta, F.X.A. (2021). “Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia” *Hasanuddin Law Review*, 7 (1): 31-45.
<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i1.1896>
5. Geoffrey, Mahoro, and Kholis Roisah. "Patenting Deal in Indonesia, Article 20 of The Patent Law in The Political Perspective of International Trade Law." *LAW REFORM* 16, no. 1 (2020): 19-31. April. 2020.
<https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30302>
6. J. C. G. Mahoro, "ICAO's Role in Environmental Protection and its Shortcomings under Rapid Growth of Aviation Industry," *Diponegoro Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 136-151, Sep. 2019.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.136-151>

7. J. C. G. Mahoro, and A. Pramono, "Regulation of Radio Frequency Spectrum and its Implementation Challenges in the Perspective of International Law," *Diponegoro Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 21-33, Apr. 2019. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.21-33>

Grants and awards

1. Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics by Harvard University, Certificate obtained on May 16, 2023, accessible at <https://courses.edx.org/certificates/4b1b8f889dad4688a3e05705d1915ddf>
2. International Standards on Freedom of Expression by Bonavero Institute of Human Rights and UNESCO; Certificate of Completion earned on June 30, 2021.
3. Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction by the University of Geneva on Coursera. Certificate earned on December 29, 2018, 12:09 PM GMT. Accessible on <https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/G63MDBBZAUZT>
4. Human Rights for Open Societies by Utrecht University on Coursera. Certificate earned on Sunday, October 14, 2018, 4:24 PM GMT. Accessible on <https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/7VATB3UX27AJ>
5. Introduction to International Criminal Law by Case Western Reserve University on Coursera. Certificate earned on Saturday, January 19, 2019, 5:33 PM GMT. Accessible on <https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/KZPEJWVC58F4>
6. International Law in Action: the Arbitration of International Disputes by Universiteit Leiden on Coursera. Certificate earned on Tuesday, November 13, 2018, 1:16 AM GMT. Accessible on <https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/P5N7Q9SL58NR>

7. Summer Course on Contemporary Issues on Ethics and Applied Philosophy (35 hours) by Universitas Gadjah Mada, awarded three credits worth Certificate, November 10, 2019.
8. Holocaust, Genocide Studies and Human Rights by Educator's Institute for Human Rights (EIHR) Summer Conference, Kigali, Rwanda. Certificate awarded on August 2, 2014.
9. Negotiation and Conflict Resolution by Macquarie Graduate School of Management (MGSD)/Australia. Certificate awarded on Oct. 17-Nov 14, 2017.
10. Conflict Resolution and Management by Rwanda Management Institute (RMI), Muhanga, Rwanda. Certificate awarded on January 13, 2017.

Other interests: Participating in conferences and seminars; peer discussions; paper writing, proofreading, and reviewing.

Email: gmahoro88@gmail.com

Mobile: (+250) 788681318

Skype ID: mahorogeooffrey

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jean-claude-geofreymahoro-62314a68/>



Prof. Dr. Martono SH.,LLM.,Mc.Sc.,CLA

Lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939, lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang (1959), Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia (1971), Universitas Mc Gill, Montreal Kanada (LLM-1980), Doktor Ilmu Hukum (Dr) UNDIP (2006), Sertifikat Mediator Mahkamah Agung (McSc), Sertifikat Legal Audit (PKB). Saat ini beliau adalah Guru

Besar Nasional dan Internasional Hukum Udara di Universitas Tarumanegara.

Narasumber yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan. Sampai saat ini sudah 27 kasus yang ditangani. Pembicara pada seminar luar negeri seperti di China, India, dan seminar nasional di dalam negeri. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Pasca Covid-19 dan Paradigma Penerbangan: Global, Regional dan Nasional.

Prof. Matono menerbitkan 18 buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan 28 artikel diterbitkan www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Sejarah Hukum Udara dan Antariksa (2014) Vol. XXXIX Ann Air & Sp L di 163-212; Jurnal Sinta 2; penghargaan ke-23, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022. https://www.adscientificindex.com/top100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

Biography, Prof. Dr. Martono

Prof. Dr Martono was born in Surakarta on January 14, 1939, and graduated from the Indonesian Aviation Academy in Curug, Tangerang (1959), Bachelor of Law (SH) University of Indonesia (1971), Mc Gill University, Montreal Canada (L LM1980), Doctor of Law (Dr) UNDIP (2006), Mediator Certificate of Supreme Court (Mc.Sc.), Certificate of Legal Audit (CLA). Currently, he is a national and international Professor of Air and Space Law at Tarumanagara University.

Resource persons discussing Law Number 15 of 1992 and Law Number 1 of 2009 concerning aviation, practitioners, and expert witnesses of various disputes relating to aviation. To date, 27 cases have been handled. Speakers at overseas seminars such as in China, and India nd national seminars in the country. Organizing the International Conference on Post Covid 19 and Aviation Paradigm: Global, Regional and National.

Prof. Martono published 16 books in Indonesian and English languages and 28 articles published at www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org;; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89; Annals of Air and Space Law (2014) Vol. XXIX Ann Air & Sp L at 163-212; Journal Sinta 2; 21st award, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022 https://www.adscientificindex.com/top100scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=



Prof. Dr. Rasji SH, MH

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. lahir di Indramayu Jawa Barat, 19 April 1964. Memperoleh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1991), Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1997), dan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara (2019).

Pendidikan dan Pelatihan: Penataran Pedoman Penghayatan an Pengamalan Pancasila (1993), Pelatihan Teknik Perundang-undangan (1993), Pelatihan Profesi Dosen (1997), Pelatihan Penelitian Ilmiah (1997), Pelatihan Penyuntingan dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah terakreditasi (1997 dan 2010), Pendidikan Sertifikasi Pendidik (2008), Pendidikan Dan Pelatihan Mediator Bersertifikat, Pendidikan dan Pelatihan Arbiter Bersertifikat (2011), Training of Trainer Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (2013, 2020, dan 2024), Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) (2022), serta Pelatihan Applied Approach Kedosenan (2022).

Jabatan: Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1991-sekarang); Pelaksana Ketua Program Studi Sarjana Hukum (2000-2004); Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2004-2012); Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2004-2012); Wakil Rektor IV Bidang Organisasi, Hukum, dan Administrasi (2012-2016); Wakil Rektor II Bidang Non Akademik (2012-2016); Wakil Rektor I Bidang Akademik (2020-sekarang); Sekretaris Senat Universitas Tarumanagara (2012-sekarang); Ketua Tim Penyusun Statuta Universitas Tarumanagara (2010-2012 dan 2014-2016); Ketua Tim Akreditasi Institusi Universitas Tarumanagara (2016-2020); serta Ketua, sekretaris, atau anggota beberapa kepanitiaan / tim Universitas Tarumanagara.

Pengalaman kerja: Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1991-sekarang), Peneliti (1991-sekarang), Pengabdian

Kepada Masyarakat (1991-sekarang), Staf Rektor Universitas Tarumanagara Bidang Peraturan (2000-2005), Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri (2010-sekarang); Mediator Ad.Hoc. Bersertifikat (2010-sekarang), Anggota Pengawas Pemilihan Umum (2000), Ahli Hukum pada beberapa proyek dan program pemerintah dan swasta; saksi ahi di pengadilan; serta menjadi penitia atau tim berbagai kegiatan akademik maupun non akademik.

Bidang Ilmiah dan Organisasi: Pimpinan dan pengelola Jurnal ERA HUKUM terakreditasi, penulis buku ajar dan buku referensi, penulis artike di jurnal nasional terakresitasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi terindeks scopus an copernicus, penulis artikel di media masa, peneliti, pengabd kepada masyarakat, dan narasumber/pembicara pada beberapa pertemuan ilmiah.

Menjadi Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancasila, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Asosiasi Profesi Hukum Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Ikatan Mediator Indonesia, serta Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia.

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. born in Indramayu, West Java, 19 April 1964. Obtained a Bachelor of Laws (S1) at the Faculty of Law, Tarumanagara University (1991), a Master of Laws (S2) at the Postgraduate Program at the University of Indonesia (1997), and a Doctor of Law (S3) at the Postgraduate Program Tarumanagara University Faculty of Law (2019).

Education and Training: Upgrading Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila (1993), Legislation Techniques Training (1993), Lecturer Professional Training (1997), Scientific Research Training (1997), Training on Editing and Management of Accredited Scientific Journals (1997 and 2010), Educator Certification Education (2008), Certified Mediator Education and Training, Certified Arbitrator Education and Training (2011), Training of Trainers in

Preparing Higher Education Curriculum (2013, 2020, and 2024), Training in Improving Basic Skills in Instructional Techniques (PEKERTI) (2022), and Training in Applied Approach Teaching (2022)

Position: Permanent Lecturer, Faculty of Law, Tarumanagara University (1991-present); Acting Chair of the Undergraduate Law Study Program (2000-2004); Deputy Dean I for Academic Affairs, Faculty of Law, Tarumanagara University (2004-2012); Secretary of the Tarumanagara University Faculty of Law Senate (2004-2012); Deputy Chancellor IV for Organizational, Legal and Administrative Affairs (2012-2016); Deputy Chancellor II for Non-Academic Affairs (2012-2016); Deputy Chancellor I for Academic Affairs (2020-present); Tarumanagara University Senate Secretary (2012-present); Chair of the Tarumanagara University Statute Drafting Team (2010-2012 and 2014-2016); Chair of the Tarumanagara University Institutional Accreditation Team (2016-2020); as well as the Chair, secretary, or member of several Tarumanagara University committees/teams

Work experience: Permanent Lecturer at the Faculty of Law, Tarumanagara University (1991-present), Researcher (1991-present), Community Service (1991-present), Staff to the Chancellor of Tarumanagara University for Regulations (2000-2005), Non-Judge Mediator at the District Court (2010 -Now); Ad Hoc Mediator. Certified (2010-present), General Election Supervisor Member (2000), Legal Expert on several government and private projects and programs; a witness in court; as well as being a committee member or team for various academic and non-academic activities. Scientific and Organizational Sector: Leader and manager of the accredited ERA LEGAL Journal, author of textbooks and reference books, author of articles in the accredited national journal Sinta and reputable international journals indexed by Scopus and Copernicus, author of articles in the mass media, researcher, community service, and resource person / speaker at several scientific meetings

Becoming a Student Regiment, Pancasarga Youth, Association of Teachers of Constitutional Law and Administrative Law of Indonesia, General Election Supervisory Committee, Association of

the Indonesian Legal Profession, Association of Private Universities throughout Indonesia, Alumni Association of the Indonesian Student Regiment, Association of Indonesian Mediators, as well as the Professional Association of Lawyers and Indonesian Tax Practitioner.



Saptandri Widiyanto, SH, MH, DESS, DESM

Penulis lahir di Kediri pada tanggal 06 Januari tahun 1966. Riwayat pendidikan penulis antara lain Doctor Candidate of Law | Universitas Hasanuddin Class of 2023, Magister of Law | UKIP Makassar, Magister of Aviation Law | Université d'Aix-Marseille III, Magister of Air Transport Management |

Université d'Aix-Marseille III, Bachelor Degree of Law | Universitas Merdeka Surabaya.

Relevant Skills:

1. English
2. French
3. Negotiation
4. Mediator
5. In-house Lawyer
6. International Meeting
7. Formulate Regulation

Volunteer Work and Affiliations

1. Professional Mediator of Aircraft Accident JT 610 (2018)
2. Aircraft Registration and Deregistration (2021-present)
3. Profesional Consultant (2021-present)

Work Experience

Bidang Transportasi

1. Dosen Hukum Udara & Manajemen Transportasi Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
2. Direktur Politeknik Penerbangan Makassar
3. PLT Direktur BPTJ
4. Kabag Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

5. Kepala Bidang Logistik Distrik Navigasi Laut Samarinda
6. Atase Perhubungan di KBRI Washington DC, USA
7. Perwakilan Indonesia di ICAO Montreal, Canada
8. Atase Perhubungan di KBRI Ottawa, Canada
9. Kepala Bandar Udara Sultan Babullah Ternate
10. Direktur SDM PT. Angkasa Pura I Kabag Kerjasama Luar Negeri
Kemenhub
11. Kabag Peraturan Transportasi Darat
12. Kabag Peraturan Perkretaapian
13. Sekretaris KNKT
14. Kasubag TU, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal
15. Staf Hukum, Dirjen Perhubungan Udara

Google Scholar Saptandri Widiyanto

Email: saptandri017@gmail.com

Telp.: +6281315411917

Makassar, 17 July 2024

Saptandri Widiyanto

Saptandri Widiyanto, SH, MH, DESS, DESM

Born in Kediri on January 6, 1966

Educational Background

1. Doctor Candidate of Law | Hasanuddin University, Class of 2023
2. Master of Law | UKIP Makassar
3. Master of Aviation Law | Université d'Aix-Marseille III
4. Master of Air Transport Management | Université d'Aix-Marseille III
5. Bachelor of Law | Universitas Merdeka Surabaya
6. Relevant Skills
7. English
8. French

9. Negotiation
10. Mediation
11. In-house Legal Counsel
12. International Meeting Facilitation
13. Regulatory Formulation

Volunteer Work and Affiliations

1. Professional Mediator for the JT 610 Aircraft Accident (2018)
2. Aircraft Registration and Deregistration (2021–present)
3. Professional Consultant (2021–present)

Work Experience in the Transportation Sector

1. Lecturer in Air Law & Air Transport Management at the Indonesian Aviation Polytechnic, Curug
2. Director of the Makassar Aviation Polytechnic
3. Acting Director of the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ)
4. Head of Legal Affairs at BPTJ
5. Head of Logistics Division at the Samarinda Marine Navigation District
6. Transportation Attaché at the Indonesian Embassy in Washington, DC, USA
7. Indonesian Representative to ICAO in Montreal, Canada
8. Transportation Attaché at the Indonesian Embassy in Ottawa, Canada
9. Head of Sultan Babullah Airport, Ternate
10. Director of Human Resources, PT. Angkasa Pura I
11. Head of International Cooperation at the Ministry of Transportation
12. Head of Land Transport Regulations
13. Head of Railway Regulations
14. Secretary of the National Transportation Safety Committee (KNKT)
15. Head of Administration, Inspectorate III, Inspectorate General
16. Legal Staff at the Directorate General of Civil Aviation

Google Scholar: Saptandri Widiyanto
Email: saptandri017@gmail.com
Phone: +62 813 1541 1917

Makassar, July 17, 2024

Saptandri Widiyanto

TENTANG EDITOR



Ekky Widha Atmaka, Amd, SH, CPLA

Air Traffic Controller

Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

Penulis lahir di Tulungagung tanggal 01 Januari 1992. Penulis adalah Profesional Air Traffic Controller (ATC) dan juga sebagai dosen terbang pada Program Studi dibidang Penerbangan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan ilmu hukum di Universitas Ekasakti Padang – Sumatera Barat dan sedang menjalani pendidikan S2 pada konsentrasi Hukum Komersial di Universitas Wijaya Putra – Surabaya. Penulis menekuni inovasi dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan operasi keselamatan serta navigasi penerbangan, selain itu penulis juga menekuni tentang pendidikan, ilmu hukum dan juga ilmu aviasi. Motivasi penulis untuk membagikan ilmu pengetahuan dan juga menekuni hobi sebagai penulis. Karya yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah Buku Referensi yang terbit di Indonesia adalah Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now, Mengenal Lebih Dekat ICAO, Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia, Bunga Rampai Hukum Udara, Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif, Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis, Literasi Digital dalam Pendidikan: Integrasi dan Inovasi, serta satu Buku Monograf yang diterbitkan di Italia yang berjudul Air Traffic Control Service From Home (ATCS-FH). Buku-buku tersebut merupakan buku tentang ilmu penerbangan/aviasi, ilmu pendidikan dan juga ilmu hukum.

Air Traffic Controller
Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

The author was born in Tulungagung on January 1, 1992. He is a professional Air Traffic Controller (ATC) and also serves as a visiting lecturer in aviation-related study programs. He completed his undergraduate education in law at Ekasakti University, Padang – West Sumatra, and is currently pursuing a Master's degree with a concentration in Commercial Law at Wijaya Putra University, Surabaya. The author is deeply engaged in innovations in technology, science, and operations related to aviation safety and navigation. Additionally, he has a strong interest in education, legal studies, and aviation science. Motivated to share knowledge, he also pursues his passion for writing. His published works include reference books in Indonesia, such as *Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now* (Air Law in Indonesia: Current Trends in Air Navigation), *Mengenal Lebih Dekat ICAO* (Getting to Know ICAO), *Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia* (Innovation for the Future of Indonesia's ANSP), *Bunga Rampai Hukum Udara* (An Anthology of Air Law), *Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif* (Opening the Door to Legal Knowledge: A Comprehensive Beginner's Guide), *Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis* (Education Planning: Concepts and Strategic Steps), and *Literasi Digital dalam Pendidikan: Integrasi dan Inovasi* (Digital Literacy in Education: Integration and Innovation). Furthermore, he has authored a monograph published in Italy, titled *Air Traffic Control Service From Home* (ATCS-FH). These books focus on aviation science, education, and legal studies.



Prof. Dr. Martono SH.,LLM.,Mc.Sc.,CLA

Lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939, lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang (1959), Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia (1971), Universitas McGill, Montreal Kanada (LLM-1980), Doktor Ilmu Hukum (Dr) UNDIP (2006), Sertifikat Mediator Mahkamah Agung (McSc), Sertifikat Legal Audit (PKB). Saat ini beliau adalah Guru Besar Nasional dan Internasional Hukum Udara di Universitas Tarumanegara.

Narasumber yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan. Sampai saat ini sudah 27 kasus yang ditangani. Pembicara pada seminar luar negeri seperti di China, India, dan seminar nasional di dalam negeri. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Pasca Covid-19 dan Paradigma Penerbangan: Global, Regional dan Nasional.

Prof. Matono menerbitkan 18 buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan 28 artikel diterbitkan www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Sejarah Hukum Udara dan Antariksa (2014) Vol. XXXIX Ann Air & Sp L di 163-212; Jurnal Sinta 2; penghargaan ke-23, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022. https://www.adscientificindex.com/top100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

Biography, Prof. Dr. Martono

Prof. Dr Martono was born in Surakarta on January 14, 1939, and graduated from the Indonesian Aviation Academy in Curug, Tangerang (1959), Bachelor of Law (SH) University of Indonesia (1971), Mc Gill University, Montreal Canada (L LM1980), Doctor of Law (Dr) UNDIP (2006), Mediator Certificate of Supreme Court (Mc.Sc.), Certificate of Legal Audit (CLA). Currently, he is a national and international Professor of Air and Space Law at Tarumanagara University.

Resource persons discussing Law Number 15 of 1992 and Law Number 1 of 2009 concerning aviation, practitioners, and expert witnesses of various disputes relating to aviation. To date, 27 cases have been handled. Speakers at overseas seminars such as in China, and India nd national seminars in the country. Organizing the International Conference on Post Covid 19 and Aviation Paradigm: Global, Regional and National.

Prof. Martono published 16 books in Indonesian and English languages and 28 articles published at www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org;; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89; Annals of Air and Space Law (2014) Vol. XXIX Ann Air & Sp L at 163-212; Journal Sinta 2; 21st award, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022 https://www.adscientificindex.com/top100scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=